

Buku Manajemen Pembangunan Wilayah ini, mengupas konsep dasar manajemen dalam upaya mewujudkan pengembangan wilayah yang lebih seimbang antara penguatan pusat pertumbuhan wilayah, dengan pemerataan pembangunan antar sub wilayah. Selain itu, dibahas sejumlah indikator pertumbuhan wilayah berupa pengembangan kawasan industri, agro industri, pertanian lumbung padi dan pengembangan destinasi wisata, khususnya di Jawa Barat. Adapun pembahasan tentang BUMD didasarkan pada rasionalitas, bahwa entitas perusahaan milik daerah tersebut, dapat menjadi salah satu alternatif dinamisor perekonomian daerah. Selanjutnya, penulis mencoba mengungkap sejumlah permasalahan klasik pembangunan wilayah berupa keterbatasan sumber daya manusia, kelembagaan, infrastruktur, anggaran, iptek dan kesenjangan antara pusat dengan daerah. Melalui buku ini ditawarkan pula opsi jalan keluarnya melalui pendekatan manajemen kemitraan, antara pemerintah dengan sektor privat (*Public Private Partnership*) sebagai langkah strategis dalam mensinergikan peran para *stakeholders* dalam melaksanakan pembangunan wilayah, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional.

MANAJEMEN PEMBANGUNAN WILAYAH
Dr. Budiman., SE., MSi., MM



MANAJEMEN PEMBANGUNAN WILAYAH

Editor :
Dr. Nanang Suparman, MAB.

**MANAJEMEN PEMBANGUNAN
WILAYAH**

MANAJEMEN PEMBANGUNAN WILAYAH

Penulis:

Dr. Budiman, SE,MSi,MM

Penerbit:

FISIP UIN SGD PRESS

Alamat:

Jalan A.H. Nasution No. 105 Bandung Kode Pos 40614

Telp. (022) 7800525, Fax. 7802844

Website: <http://www.uinsgd.ac.id>

Email: contact@uinsgd.ac.id

Layout Cover:

Dr. Nanang Suparman.,MAB.

Editor:

Dr. Nanang Suparman.,MAB.

Cetakan Pertama : Tahun 2021

ISBN 978-623-93765-8-1

Hak cipta dilindungi Undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara apapun
tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

Segenap puja, puji dan rasa syukur penulis persembahkan ke Hadirat *Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim* yang tiada pernah berhenti mencurahkan rahmat dan pertolongan-Nya, sehingga penulisan buku berjudul “Manajemen Pembangunan Wilayah” ini dapat diselesaikan.

Buku ini disusun, sebagai upaya memenuhi kebutuhan para mahasiswa, praktisi bisnis, birokrat, kalangan pendidik serta pembaca pada umumnya, yang memerlukan tambahan pengetahuan tentang konsep, proses, dinamika dan kendala yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam meraih tujuan bernegara, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan wilayah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional.

Selain pembahasan secara konseptual tentang Manajemen Pembangunan Wilayah, ditampilkan pula topik-topik empirikal, yang terkait dengan pengembangan wilayah dan permasalahannya serta kajian khusus tentang dinamika pembangunan, berikut ulasan tentang peran BUMD di Jawa Barat juga konsep kemitraan pemerintah dengan sektor bisnis (*partnership*).

Diharapkan para mahasiswa khususnya, dan umumnya peminat bidang ilmu manajemen, manajemen strategis, ekonomi pembangunan, administrasi pembangunan serta administrasi pemerintahan daerah, dapat memperoleh tambahan pengetahuan dan wawasan dalam perspektif yang lebih luas, mengenai pembangunan wilayah.

Bandung, Medio Agustus 2020

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | |
| DAFTAR ISI | |
| DAFTAR TABEL | |
| DAFTAR GAMBAR | |
| BAB I PENGANTAR | 1 |
| BAB II KONSEP MANAJEMEN DAN PEMBANGUNAN | 9 |
| A. Cakrawala Manajemen | 9 |
| B. Konsep Manajemen | 11 |
| C. Unsur - unsur Manajemen | 14 |
| D. Fungsi-fungsi Manajemen (<i>Management Functions</i>)..... | 18 |
| E. Konsep Pembangunan dan Kesenjangan Pembangunan | 20 |
| F. Definisi Wilayah..... | 24 |
| G. Teori - teori tentang Wilayah..... | 27 |
| H. Potensi Daerah Setempat | 30 |
| I. Konsep Agropolitan..... | 31 |
| J. Manajemen Wilayah..... | 31 |
| K. Konsep Manajemen Daerah yang Tepat untuk Pemerintahan | 33 |
| BAB III PERENCANAAN WILAYAH | 38 |
| A. Perencanaan Pembangunan | 38 |
| B. Pembangunan Perlu Direncanakan | 40 |
| C. Tujuan dan Fungsi Perencanaan Pembangunan | 42 |
| D. Jenis-Jenis Perencanaan Pembangunan | 43 |
| E. Tahapan-tahapan Perencanaan Pembangunan | 48 |
| F. Siklus Perencanaan Pembangunan | 50 |
| G. Ciri-ciri Perencanaan Pembangunan yang Tepat..... | 52 |
| H. Perencanaan Wilayah..... | 54 |
| BAB IV KONSEP DAN TEORI PEMBANGUNAN WILAYAH | 59 |
| A. Konsep Pembangunan Wilayah..... | 59 |
| B. Teori -Teori Pembangunan Wilayah | 61 |
| BAB V PUSAT PEMBANGUNAN | 66 |
| A. Pusat Pembangunan | 66 |
| B. Perkembangan Pusat Pembangunan | 72 |
| C. Kepadatan Penduduk sebagai Pendorong Pembangunan ... | 74 |

| | |
|--|------------|
| D. Pertimbangan Kondisi Fisik Wilayah dalam Konsep Pembangunan..... | 75 |
| E. Perkembangan Sektor Industri sebagai Indikator Pembangunan..... | 79 |
| F. Faktor Sosial Budaya Masyarakat sebagai Modal Pembangunan..... | 80 |
| G. Pertimbangan Faktor Ekonomi dalam Pembangunan..... | 82 |
| H. Wilayah Pusat Pembangunan di Jawa Barat..... | 83 |
| BAB VI PEMBANGUNAN WILAYAH & DAYA DUKUNG LINGKUNGAN | 86 |
| A. Latar Belakang..... | 86 |
| B. Daya dukung Lingkungan..... | 87 |
| C. Kemampuan Lahan..... | 90 |
| D. Klasifikasi Kemampuan Lahan..... | 91 |
| E. Daya Dukung Sumber Daya Air di Perkotaan..... | 92 |
| F. Keterkaitan dengan <i>Sustained City</i> | 94 |
| BAB VII KAWASAN INDUSTRI | 97 |
| A. Definisi Kawasan Industri | 97 |
| B. Tujuan Pembangunan Kawasan Industri | 100 |
| C. Kebijakan Pemerintah tentang Kawasan Industri..... | 102 |
| D. Pengaruh Keberadaan Industri..... | 105 |
| E. Teknis Dalam Pengembangan Kawasan Industri | 106 |
| BAB VIII KAWASAN AGRO INDUSTRI..... | 111 |
| A. Introduksi | 111 |
| B. Konsep Kawasan Agro Industri..... | 113 |
| C. Jawa Barat sebagai Rujukan Kawasan Agroindustri | 114 |
| D. Pengembangan Agroindustri | 116 |
| E. Sasaran Pengembangan Agroindustri..... | 116 |
| F. Tantangan dan Hambatan Pembangunan Agroindustri | 118 |
| BAB IX ISU-ISU AKTUAL PEMBANGUNAN WILAYAH DI JAWA BARAT..... | 130 |
| A. Latar Belakang..... | 130 |
| B. Gambaran Umum Pembangunan Wilayah | 132 |
| C. Pembangunan Kawasan Ciayumajakuning..... | 133 |
| D. Kota Cirebon dalam Perspektif Pembangunan Wilayah .. | 135 |
| E. Metropolis Cirebon dan Analisis Sektor Ekonomi Unggulan..... | 151 |

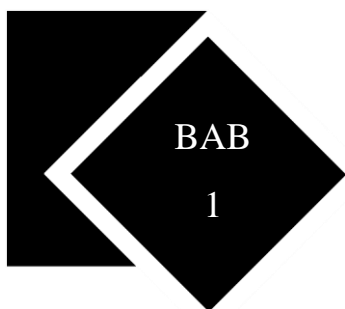
| | |
|--|-----|
| F. Pengembangan Kabupaten Indramayu dalam Konteks Pembangunan Wilayah Ciayumajakuning..... | 155 |
| G. Pembangunan Sektor Industri Kawasan Ciayumajakuning di Kabupaten Majalengka..... | 164 |
| H. Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Kuningan dalam Perspektif Pembangunan Wilayah Ciayumajakuning | 179 |
| I. Dinamika Pembangunan Wilayah di Kawasan Barat Jawa Barat..... | 187 |
| BAB V BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH..... | 203 |
| A. Dasar Regulasi Badan Usaha Milik Daerah | 203 |
| B. Potret Kecil Kinerja dan Peran BUMD | 205 |
| C. Profil BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat | 210 |
| BAB VI KEMITRAAN PEMERINTAH BISNIS DAN <i>GOOD PUBLIC GOVERNANCE</i> | 229 |
| A. Pengantar | 229 |
| B. Alasan Dijalinnnya Kemitraan Pemerintah-Bisnis..... | 233 |
| C. Manfaat Kemitraan Pemerintah-Bisnis..... | 234 |
| D. Kemitraan dari Perspektif <i>Governance</i> | 235 |
| E. Pola Kemitraan Pemerintah-Bisnis..... | 236 |
| DAFTAR PUSTAKA | 250 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 11.1. Contoh Beberapa Jenis Praktek Kemitraan | 241 |
| Tabel 11.2. Contoh Bidang Kegiatan Administratif dan Pelayanan Publik & Peluang Kemitraan di Indonesia | 243 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|---|-----|
| Gambar 3.1 | Sistem Perencanaan..... | 49 |
| Gambar 3.2 | Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Daerah | 54 |
| Gambar 3.3 | Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Tata Ruang, dan Perencanaan Sektoral..... | 58 |
| Gambar 4.1 | Optimalisasi Alokasi Sumber Daya Wilayah | 60 |
| Gambar 4.2 | Pembangunan Daerah sebagai Penjabaran Pembangunan Nasional | 61 |
| Gambar 9.1 | Contoh Matriks Energi Isu Strategis Provinsi..... | 131 |
| Gambar 9.2 | Sinergi dalam Kerangka Pengembangan Wilayah | 133 |
| Gambar 9.3 | Upaya Sinergi Nasional dan Daerah dalam Pencapaian Surplus Beras 10 Juta Ton..... | 196 |



BAB
1

PENGANTAR

Kita maklumi bersama, bahwa salah satu tujuan utama bernegara adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi bangsa kita, hal itu dengan jelas diungkapkan dalam pembukaan Undang - undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yang berbunyi : “Pemerintahan Negara Indonesia, dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikutserta melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai sebuah tujuan utama bernegara adalah sebuah pertarungan atas ekspektasi besar masa depan sebuah bangsa, yang mesti dipertanggungjawabkan oleh segenap pemangku kepentingannya (*stakeholders*) secara konsisten dan sungguh-sungguh. Sebagai konsekuensinya, diperlukan perencanaan yang matang atas sejumlah program pembangunan yang telah dirancang, dengan mengerahkan segenap sumber daya yang dimiliki, baik *man, material, money, machine, method, market, time information, dan skill* yang kesemuanya mesti diramu secara komprehensif, berhasil-guna dan berdaya-guna. Dan semua itu, tentunya mesti ditempuh melalui tahapan-tahapan dan rangkaian proses yang boleh jadi sangat rumit, serta butuh waktu tidak singkat. Namun sesulit apapun kita semua sudah sepakat, bahwa tujuan mulia itu mesti diraih dan diperjuangkan bersama, karena merupakan amanah dari cita-cita luhur para

pendiri bangsa ini, sekaligus salah satu jalan yang mesti ditempuh guna membuktikan diri sebagai bangsa besar yang bermartabat, setara dengan bangsa-bangsa lain yang telah lebih dahulu mencapai kemajuan.

Sebagai bangsa pembelajar, dengan jujur harus kita akui, bahwa sejauh ini upaya mencapai tujuan bernegara itu masih terus berproses dan diperjuangkan tahap demi tahap, serta masih memerlukan cukup waktu untuk bisa mewujudkannya. Beberapa etape telah kita lalui, dan masing-masing rezim atau penguasa negara ini, telah menorehkan prestasi yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitasnya. Kadang-kadang terasa telah membawa kita bergerak maju, namun adakalanya terkesan masih berjalan di tempat, bahkan sesekali merasa tersurut mundur menjauh dari dermaga tujuan. Hal itu tiada lain mengingat, bahwa proses mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui rangkaian pembangunan, setiap saat dihadapkan dengan berjuta tantangan dan kendala, yang memerlukan strategi dan penyiasatan jitu dari para pemangku kepentingannya. Dengan kata lain, upaya meraih tujuan mulia tersebut membutuhkan *multi skill* yang memadai dari para “manajernya” (baca: para pemimpin bangsa) dalam mengelola organisasi besar bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini.

Dari perspektif manajemen, kondisi itu menegaskan, bahwa sukses atau gagalnya sebuah negara dalam mencapai tujuannya, terpulang pada bagaimana negara tersebut diatur, dikelola atau di-*manage* oleh para *stake holder*-nya sedemikian rupa, mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penggerakkan, pengkoordinasian, hingga aspek pengawasan dan pengendaliannya, dalam rangkaian siklus manajemen yang teratur dan berkelanjutan. Negara yang maju, sudah barang tentu lahir berkat pengelolaan yang baik (*well managed*), sebaliknya negara yang

tertinggal atau bahkan terbelakang, tak pelak disebabkan oleh pengelolaannya yang tidak benar (*under managed*), atau mungkin juga akibat dari maraknya praktek *miss management* jajaran manajernya. Hal ini mengingatkan kita, tentang betapa pentingnya peran manajemen sebagai sebuah ilmu dan seni, serta rangkaian aktivitas pengaturan dan pengelolaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, sebagaimana pandangan Terry (2010). Bagi bangsa yang ingin maju, belajar dari kegagalan diri sendiri, bahkan belajar dari keberhasilan bangsa-bangsa lain, sama sekali bukanlah sebuah pantangan, akan tetapi keniscayaan yang mesti ditempuh, sebagai sebuah proses perbaikan yang terus menerus, menuju pencapaian hasil yang lebih baik, melalui berbagai upaya yang terarah, bertahap dan berkesinambungan, atau yang apa yang kita kenal dengan proses pembangunan terencana dan berkelanjutan (Sukirno 2000).

Pembangunan wilayah, adalah salah satu dimensi dari pembangunan nasional yang bertujuan agar seluruh daerah dapat melaksanakan pembangunan secara proporsional dan merata, sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut. Apabila pembangunan wilayah dikelola dengan baik (*well managed*), diharapkan kemandirian daerah dapat tumbuh dan berkembang sendiri atas dasar kekuatan sendiri (Soekartawi,1990). Hal ini mengisyaratkan, bahwa Manajemen Pembangunan Wilayah, berkaitan erat dengan upaya peningkatan kinerja wilayah (*intra regional*), dan kiat mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah (*inter regional*) secara berkeadilan.

Salah satu fungsi dasar atau fungsi fundamental manajemen, adalah fungsi perencanaan (*planning*), mengingat bahwa fungsi-fungsi manajemen lainnya, mulai dari *organizing*, *actuating*, *directing*, *coordinating* hingga fungsi *controlling*, masing-masing mesti terlebih dahulu dirancang dengan cermat,

melalui sebuah proses perencanaan yang apik dan komprehensif. Artinya, bahwa bagaimana fungsi-fungsi tersebut kelak berjalan secara sinergis menuju tujuan akhir, semuanya terpulung pada kadar ketepatan perencanaan sebelumnya. Perencanaan, pada dasarnya merupakan kumpulan keputusan-keputusan rasional, dan kerangka yang membimbing rangkaian langkah ke depan dalam upaya mencapai tujuan, yang di dalamnya terkandung berbagai resiko dan ketidakpastian. Implikasi dari sebuah perencanaan, terhadap fungsi-fungsi manajemen lainnya, baru akan terlihat dan dirasakan, manakala kita usai melaksanakan sebuah kegiatan dan mengevaluasi hasil akhirnya.

Bila dikaitkan dengan manajemen pembangunan, baik pada skala nasional maupun kewilayahan (*regional*), perencanaan memiliki peran dan fungsi yang amat sangat vital, karena berkaitan erat dengan fungsi koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program-program pembangunan. Pemahaman ini kian jelas, bila dikaitkan dengan pandangan Hasibuan (1984) yang memaknai perencanaan sebagai pekerjaan mental, untuk memilih sasaran, kebijaksanaan, prosedur, program yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan pada masa yang akan datang. Pada sebagian besar negara-negara yang berkembang, bahkan pada negara yang menurut Rostow (1998) berada pada tahapan tinggal landas (*take off*) sekalipun, khususnya pembangunan di Indonesia, fungsi perencanaan seringkali dituding sebagai penyebab utama terjadinya permasalahan, baik berupa ketimpangan pembangunan, lambannya proses pembangunan, bahkan sebagai biang dari kegagalan pembangunan itu sendiri.

Tudingan ini tampaknya tidak berlebihan, sebab sejauh ini jika kita mencermati praktek dan hasil-hasil pembangunan pada berbagai wilayah di negeri kita, banyak fakta yang memperkuat kebenaran dugaan tersebut.

Munculnya persoalan-persoalan krusial dalam pembangunan daerah/wilayah, seperti lambannya proses pembangunan, rendahnya capaian *out put*, ketimpangan persebaran alokasi anggaran antar wilayah, ketidakmerataan hasil pembangunan hingga terbelengkalainya aktivitas pembangunan, dan sejumlah kasus pembangunan lainnya, berdasarkan pemerhatian dan hasil evaluasi, secara manajerial mengarah pada lemahnya fungsi perencanaan. Fenomena yang terjadi pada awal era otonomi daerah, yang antara lain ditandai dengan meruyaknya konflik vertikal antara pemerintah (pusat) dengan pemerintah daerah, dan konflik horizontal antar daerah, semakin menambah deretan panjang dan kompleksitas masalah yang timbul akibat kebijakan serta manajemen perencanaan yang tidak matang dan visioner.

Berikut ini, adalah sederet potret buram permasalahan pembangunan di Indonesia yang hingga kini masih seringkali mencuat ke permukaan, bahkan kerap memicu perselisihan dan ketidakpuasan banyak pihak.

Pertama, bahwa pembangunan nasional yang dijalankan melalui dua pendekatan utama, yaitu pembangunan sektoral dan regional, dirancang dalam rangka meletakkan landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia, untuk tumbuh dan berkembang atas dasar kekuatan sendiri, menuju terwujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Dan untuk mencapai *goals* dan *objective* pembangunan tersebut secara efektif dan efisien, arah dan prioritas pembangunan, diutamakan pada kegiatan-kegiatan yang paling produktif, terutama kegiatan ekspor produksi primer, melalui pengembangan sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Pada pihak lain, untuk memenuhi kebutuhan terhadap barang-barang konsumsi, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor, dikembangkan sektor manufaktur, yang berlokus di kota-kota besar. Kebijakan yang notabene merupakan agenda utama pembangunan regional ini, pada kenyataannya, hanya menghasilkan

tingkat pembangunan ekonomi tinggi pada wilayah-wilayah yang kaya dengan sumber alam, serta berpusat di kota-kota besar saja, sementara daerah yang dijadikan wilayah pengembangan sektor produksi primer, tak beringsut maju dan tetap tertinggal di belakang. Kebijakan pemerintah ini, dalam banyak aspek, telah memicu merebaknya persoalan ketimpangan wilayah, yang berkepanjangan.

Kedua, ketidakmerataan pembangunan antar sektor dan antar wilayah, yang memunculkan beberapa bentuk dualisme, sebagaimana yang terjadi pada sektor pertanian, versus sektor industri, atau versus sektor pembangunan lainnya. Persoalan ini menjadi mencuat, mengingat pada satu sisi, sektor pertanian merupakan sektor yang mampu menampung tenaga kerja yang cukup banyak, namun pada sisi lain secara faktual kian menurun produktivitas dan tingkat kontribusinya terhadap Produk Domestik Brutto (PDB) nasional. Sementara sektor industri, yang kian cenderung dijalankan secara intensif, kendati kontribusinya terhadap PDB terus meningkat, akan tetapi pada pihak lain, daya serapnya terhadap tenaga kerja relatif rendah. Ketidakmerataan serupa, terjadi antara sektor jasa dan perdagangan dengan sektor pertanian, yang memperlihatkan semakin melebarnya *gap* antar sektor, dan menjadikan sektor pertanian semakin terpaut jauh di belakang sektor-sektor lainnya.

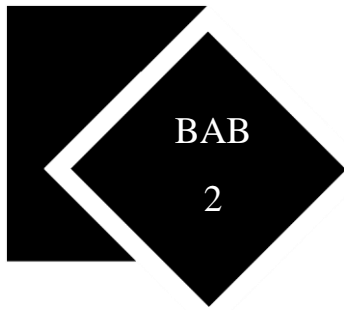
Ketiga, ketidakmerataan aspek demografis dan sumberdaya alam, sebagai dampak kebijakan pemerintah yang tidak pas (*fit*) dalam perencanaan pembangunan, dalam kenyataannya menjadi semacam *boomerang*, bahkan berandil besar, dalam menciptakan ketimpangan wilayah.

Keempat, dikotomi pembangunan antar wilayah, terutama program pembangunan yang dilaksanakan di Pulau Jawa (pusat), dengan pembangunan di luar Pulau Jawa (pinggiran); antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI); serta antara pembangunan di daerah perdesaan dengan di daerah perkotaan. Fakta-fakta tersebut, merupakan beberapa contoh konkret tentang betapa rumitnya masalah pembangunan, dilihat dari dimensi ruang (wilayah).

Meruyaknya berbagai permasalahan pembangunan wilayah sebagaimana yang disinggung di atas, semakin membuka mata kita, bahwa strategi pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, dan tidak dibarengi dengan perluasan kesempatan kerja, efektivitas pengentasan kemiskinan, keseimbangan dan proporsionalitas alokasi anggaran (keadilan), walaupun pada tahap awal mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, namun pada akhirnya mengundang sejumlah masalah pelik lainnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, segenap *stakeholders* negeri ini ditantang untuk bersepakat dalam mengembangkan strategi jitu, guna mengatasi berbagai kendala rumit yang terjadi, dengan terlebih dahulu melakukan pembenahan, pada aspek-aspek vital manajemen pembangunan wilayah. Melalui strategi tersebut, berbagai masalah kompleks yang menghadang, diharapkan dapat teratasi secara bertahap, sehingga tujuan utama bernegara, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat dicapai secara seksama.

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas tentang konsep dan praktek pengelolaan pembangunan wilayah, beserta aspek-aspek yang terkait di dalamnya, termasuk analisis atas beberapa persoalan yang timbul, dan implikasinya terhadap tujuan pembangunan tersebut, penulis memberanikan diri untuk mengupasnya secara khusus, dilihat dari perspektif manajemen,

ekonomi pembangunan, kebijakan publik, administrasi pembangunan dan bidang ilmu lainnya yang dianggap relevan. Sebagai tambahan referensi bagi para pembaca, dalam buku ini dicoba pula disajikan beberapa contoh kasus, dan potret tata kelola pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Barat, berikut dinamika dan ulasan atas berbagai kiat yang ditempuh dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul, berikut sejumlah tantangannya. Pada bagian akhir buku ini, penulis pun secara khusus mengulas tentang profil sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tengah berkembang di Jawa Barat dan konsep kemitraan antara pihak pemerintah dengan sektor swasta atau yang dikenal dengan *Government to Private partnership (G to P)*.



KONSEP MANAJEMEN DAN PEMBANGUNAN

A. Cakrawala Manajemen

Kata “manajemen” rasanya sudah sangat tak asing lagi di telinga kita, bahkan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembicaraan sehari-hari, baik di kalangan pebisnis, birokrat, organisator, pendidik, olahragawan, selebritis, bahkan warga masyarakat biasa sekalipun. Hal ini menandakan, bahwa ilmu manajemen semakin dianggap penting serta kian diperlukan peran dan fungsinya, dalam mengelola atau mengatur sumber daya dan aktivitas organisasi, dalam upaya mencapai tujuan-tujuannya. Sebuah organisasi yang maju, berkembang dan mampu mendulang sukses, tak lain adalah buah dari penerapan manajemen yang tepat dan baik. Sebaliknya organisasi atau perusahaan yang hanya mampu berjalan di tempat, atau terseok-seok, *colaps*, bahkan gulung tikar, penyebabnya seringkali dikarenakan oleh praktik manajemen yang keliru, atau akibat dari terjadinya *miss management*. Hal ini menegaskan, bahwa organisasi apapun bentuk dan jenisnya, apabila ingin berhasil meraih tujuan-tujuannya, ditantang untuk berkemampuan menjalankan manajemennya dengan baik dan benar.

Oleh karenanya tidaklah mengherankan, apabila ilmu manajemen dari waktu ke waktu semakin mendapatkan perhatian dari banyak pihak, serta dipandang sebagai bidang ilmu yang penting dan perlu dipelajari, bahkan dikuasai, terutama oleh kalangan pimpinan, organisator, *enterpreneur* atau siapapun yang ingin meraih kesuksesan. Bagi yang berakal sehat, menjadi orang yang

sukses adalah impian indah masa depan kehidupan, dan kegagalan adalah keadaan yang tak diharapkan yang mesti dihindari, serta disiasati agar tak terulang, melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan. Dalam konteks itu, pemahaman terhadap manajemen, sebagai sebuah ilmu dan seni, atau rangkaian proses kegiatan yang rasional untuk mencapai tujuan, menawarkan banyak pilihan yang dapat dijadikan piranti dalam menyiasati sukses masa depan. Kehidupan pada era global yang tengah kita arungi dewasa ini, yang ditandai dengan gelegak perubahan super cepat, penuh ketidakpastian (*unpredictable*), yang dibarengi dengan persaingan sengit dalam berbagai bidang, semakin meyakinkan kita, tentang perlunya memahami ilmu manajemen, dalam posisi apapun adanya, tak terkecuali sebagai warga jelata sekalipun. Alasannya, tiada lain karena upaya bangsa kita dalam meningkatkan derajat kehidupan dan meraih kesejahteraan bangsa, melalui rangkaian pembangunan pada berbagai bidang, memerlukan pengelolaan yang efektif dan efisien, yang didukung oleh peranserta segenap lapisan bangsa, sesuai dengan kapasitas dan fungsi masing-masing.

Fenomena lain yang perlu dipahami, bahwa kemajuan peradaban umat manusia, pada abad milenial ini, telah menggiring semua bangsa di dunia, memasuki tatanan kehidupan baru yang kian menantang, yaitu **Era Revolusi Industri 4.0 (*Four Point O*)**, yang sudah pasti membawa implikasi teramat luas terhadap berbagai aspek kehidupan. Kondisi ini mengisyaratkan, bahwa bangsa manapun yang ingin tetap eksis dan mampu mengayun langkah maju, hanyalah mereka yang cerdas membaca arah perubahan, kreatif dan inovatif, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan yang sangat dinamis, serta sarat dengan ketidakpastian. Untuk itu, siapapun di antara anak bangsa besar ini tak boleh lengah, dan malas hingga enggan keluar dari zona aman, karena jika itu yang terjadi, maka bersiap-siaplah untuk menjadi bangsa pecundang, yang akan dengan cepat kehilangan martabat dan harga diri, serta tertinggal

jauh di belakang bangsa-bangsa lain. Penguasaan anak bangsa terhadap ilmu pengetahuan, teknologi termasuk ilmu manajemen di dalamnya adalah mutlak adanya, karena hanya dengan cara itu, kita masih berpeluang untuk mengawal pembangunan bangsa ini, menuju cita-cita luhur yang didambakan, yaitu masyarakat makmur yang berkeadilan, sehingga dapat berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah terlebih dahulu meraih kemajuan.

B. Konsep Manajemen

Secara etimologis istilah manajemen, berasal dari beberapa bahasa asing diantaranya, dari kata *management* (Perancis kuno) yang berarti “seni melaksanakan dan mengatur”, dari kata *manus* (Bahasa Latin) yang berarti “tangan”, dari kata *maneggiare* (bahasa Italia) yang berarti “mengendalikan” dan dari kosa kata *to manage* (Bahasa Inggris) yang berarti “mengelola” atau “mengatur”. Dengan demikian, makna kata manajemen pada intinya berkaitan dengan seni mengelola atau mengatur serangkaian aktivitas, berdasarkan urutan dan fungsinya. Ketika arti manajemen dikaitkan dengan seni, ada sementara pihak yang tidak sependapat, karena mereka memandang seni sebagai cabang dari kebudayaan, sehingga arti manajemen terkesan dikerdilkan. Namun demikian, hal ini tak perlu diperdebatkan, karena pemahaman seni dalam manajemen, secara implisit tercermin dari praktek atau proses aktivitas manajemen, yang dilakukan secara teratur, rapi dan terstruktur.

Berkenaan dengan pengertian manajemen, para pakar menggunakan pendekatan yang berbeda-beda dalam memaknai atau mendefinisikannya. Beberapa pengertian manajemen yang kerap dijadikan rujukan, antara lain: manajemen sebagai suatu proses kerja sama, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas, dan manajemen sebagai suatu seni

dan sebagai suatu ilmu pengetahuan (Manulang, 1996). Definisi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli, sesungguhnya sangat banyak, sehingga apabila dibahas satu persatu memerlukan kupasan yang sangat panjang. Dalam bab ini akan dikemukakan sebagian kecilnya saja, sebagai landasan bagi kita, dalam memahami kandungan makna manajemen secara umum.

Menurut George R. Terry (1977), manajemen adalah suatu proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan, melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Harold Koont dan Cyril O'Donnel (1972) memandang manajemen sebagai: *Getting some thing done through the people*. Yang dapat diartikan, sebagai usaha mencapai suatu tujuan tertentu, melalui usaha orang lain. Usaha melalui orang lain, dapat dilakukan dengan mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian. Sementara Luther Gullick (1961-1896) mengemukakan, bahwa manajemen adalah satu bidang ilmu (*science*) yang dipelajari secara sistematis. Pendapat ini melihat manajemen dengan menitikberatkan pada unsur ilmunya, sehingga manajemen ditempatkan sebagai ilmu pengetahuan.

Mary Parker Polet (1868- 1933) memandang, bahwa manajemen adalah: *The art of getting some thing, done through the other people*. Artinya, manajemen merupakan sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan, melalui orang lain. Menafsirkan manajemen sebagai seni, lebih dimaksudkan, bahwa penerapan atau implementasi manajemen dalam sebuah sistem, seyogianya ditempuh dengan cara yang baik dan benar. Pakar lainnya, Andrew F. Sikulla (1984) berpendapat, bahwa manajemen pada dasarnya merupakan aktivitas-aktivitas yang dihubungkan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian,

penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan, yang dilakukan oleh setiap organisasi, dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga menghasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Pengertian manajemen dari sudut pandang lainnya, dikemukakan pula oleh Sondang Siagian P. (1994) yang berpendapat, bahwa manajemen merupakan kemampuan atau keterampilan, untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan, melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Pendapat ini, menekankan pentingnya faktor keahlian dalam organisasi. Selanjutnya, James A.F. Stoner (1995) mendefinisikan manajemen sebagai ,proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya, agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sementara Stephen P. Robbin (2005), mendefinikan manajemen sebagai proses koordinasi dan integrasi kegiatan-kegiatan kerja, agar disesuaikan secara efisien dan efektif, melalui orang lain.

Dari definisi para pakar tersebut dapat disimpulkan, bahwa manajemen adalah suatu proses kerja sama, dua orang atau lebih, yang dilaksanakan melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Secara lebih spesifik, manajemen dapat pula didefinisikan, sebagai ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemahaman, bahwa manajemen merupakan seni, antara lain dapat dilihat dari: cara penyelesaian pekerjaan melalui kerja sama tim (1) kemampuan melihat integritas dan

totalitas pada bagian yang terpisah atas sebuah visi bersama; (2) kecakapan para manajer dalam mencapai visi organisasi/perusahaan; (3) berbagai aspek dalam menjalankan fungsi manajemen, terutama dalam fungsi perencanaan, *leading*, dan fungsi koordinasi, yang memerlukan kememadaiian *human skill*, karena berhubungan dengan unsur manusia

Pada tahap implementasi, manajemen memiliki subjek dan objek. Subjek manajemen ialah orang yang mengatur atau mengelola, dan disebut manajer (*manager*), sedangkan objek manajemen adalah segala sesuatu yang diatur. Manajemen merupakan disiplin ilmu yang sangat luas, dan saling berhubungan dengan disiplin ilmu lainnya. seperti keuangan, pemasaran, sumber daya manusia. Penerapannya dapat digunakan pada berbagai bentuk dan jenis organisasi, baik organisasi bisnis, organisasi pemerintahan, pendidikan, sosial, *entertainment*, organisasi politik, organisasi keagamaan dan organisasi lainnya. Pendek kata, manajemen dapat diterapkan pada organisasi apapun bentuk dan jenisnya, karena manajemen merupakan inti dari organisasi, bahkan merupakan ruh dan gerak tubuh dari organisasi, yang sekaligus merupakan wadah di mana manajemen berada (Iskandar 2001). Dalam proses meraih tujuan organisasi, secara alamiah niscaya akan muncul berbagai masalah dan dinamika, di situlah fungsi manajemen, baik secara keilmuan maupun praksis diperlukan, guna menemukan alternatif solusi atas aneka ragam tantangan dan permasalahan yang muncul.

C. Unsur - unsur Manajemen

Manajemen sebagai sebuah proses, terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan tahap pengendalian atau pengawasan. Agar proses menuju tujuan dapat berjalan dengan lancar, dibutuhkan sejumlah sumber daya, atau lazim disebut sebagai unsur-unsur manajemen, yang ditempatkan sebagai faktor *input* atau masukan. Masing-masing

unsur tersebut, bekerja saling melengkapi dan saling berkaitan, antara satu dengan yang lainnya, dalam sebuah sistem. Berikut penjelasan dari unsur-unsur manajemen.

1. *Man* (Sumber daya manusia).

Manusia berperan dalam menyusun perencanaan, sekaligus yang menjalankan serangkaian proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa keterlibatan manusia, tentunya tidak akan ada perencanaan dan proses kerja dalam manajemen. Bahkan, dalam dunia yang sangat canggih dan serba otomatis sekalipun, tidak akan ada organisasi yang dapat berkembang, tanpa dukungan sumber daya manusia. Namun demikian, pemenuhan terhadap kebutuhan sumber daya manusia, seyogianya memperhatikan hal-hal berikut:

a). Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia. b). Memiliki kapasitas, seperti keahlian, keterampilan, pendidikan, pengalaman. c). Tersusun dalam sebuah komposisi, mulai dari unsur pimpinan, penyelia, pelaksana teknis/ administratif dan posisi lainnya.

2. *Money* (Uang).

Untuk menjalankan aktivitasnya, manajemen memerlukan sejumlah uang, baik untuk pengadaan dan perawatan peralatan, pembelian bahan baku/material, pembayaran gaji dan upah tenaga kerja dan keperluan lainnya. Pengelolaan keuangan, akan berpengaruh besar terhadap pencapaian hasil. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan mesti dilakukan secara rasional, efisien dan akuntabel, agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai sebagaimana yang diharapkan.

3. *Material* (Bahan baku).

Untuk memproduksi suatu barang, perusahaan membutuhkan bahan baku. Ketersediaan bahan baku sangat vital dalam proses produksi,

baik bahan baku (*raw material*), bahan setengah jadi, maupun bahan jadi (*finished good*). Guna menghasilkan barang yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan, selain dibutuhkan *man power* yang berkahlian pada bidangnya, juga perlu ditunjang dengan kecukupan bahan atau material yang baik dan memenuhi standar.

4. *Machines* (Mesin).

Mesin digunakan dalam proses pengolahan bahan baku, menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Mesin dan peralatan kerja lainnya, sangat dibutuhkan guna mempermudah dan mempercepat proses produksi, serta efisiensi biaya, sehingga dapat meningkatkan hasil dan keuntungan. Dengan berkembangnya teknologi, ketersediaan mesin yang semakin canggih dan modern, bisa meminimalisir kesalahan dalam proses produksi, hingga pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif dengan hasil lebih banyak.

5. *Method* (Metode).

Dalam proses manajemen, diperlukan metode guna menentukan bagaimana suatu pekerjaan dapat dilakukan. Untuk itu, serangkaian prosedur dan instruksi ditetapkan, dengan mempertimbangkan tujuan yang hendak dicapai, fasilitas yang tersedia, waktu, uang, dan proses bisnis. Metode-metode tersebut ditetapkan sebagai Standar Operasional dan Prosedur (SOP), yang berfungsi untuk meningkatkan penggunaan semua sumber daya dan faktor-faktor produksi, sehingga semua pekerjaan bisa berjalan secara efektif dan efisien.

6. *Market* (Pasar).

Untuk memasarkan hasil produksi agar sampai ke tangan konsumen, sekaligus memuaskan mereka, seorang manajer mesti memahami aspek-aspek pemasaran dengan baik. Pemasaran produk sangat penting guna menjamin kelangsungan proses produksi perusahaan itu

sendiri. Proses produksi suatu barang, akan terhenti apabila barang-barang yang diproduksi tidak laku, atau tidak diminati oleh konsumen. Artinya, pasar sangat penting untuk dikuasai demi kelangsungan proses produksi perusahaan. Pemasaran yang baik memungkinkan barang atau jasa yang dihasilkan memiliki pangsa pasar. Penguasaan pasar yang baik, berperan penting agar barang atau jasa, dapat didistribusikan kepada seluruh konsumen, dengan tetap menjaga dan memperhatikan kualitas dan harga. Hal ini dilakukan dalam upaya memuaskan (*satisfied*) para konsumen, sekaligus mencapai tujuan perusahaan.

7. *Information* (informasi)

Manajemen sebagai sebuah proses, berfungsi mengubah sejumlah faktor *in put* menjadi *out put*, sehingga memerlukan sejumlah informasi baik yang bersifat teknis maupun non teknis, yang didapatkan dari hasil pengolahan data, terkait dengan unsur-unsur atau bidang-bidang manajemen itu sendiri. Kebutuhan terhadap informasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses manajemen, karena diperlukan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan, baik di bidang produksi, pemasaran, ketenagakerjaan, keuangan dan bidang lainnya. Sebagai contoh, seorang manajer memerlukan informasi pasar, informasi harga bahan, formula produk dan sebagainya.

8. *Times* (Waktu)

Mengubah faktor *in put* menjadi *out put*, baik berbentuk barang maupun jasa, tentunya tidaklah bersifat sertamerta, namun perlu serangkaian proses yang melampaui satuan waktu tertentu tertentu, bisa dalam hitungan menit, jam, hari, bahkan bulan atau tahun.

Banyaknya satuan waktu yang digunakan, tentunya berkorelasi dengan nilai pengorbanan, yang sesungguhnya dapat atau perlu “diukur” dalam satuan nilai uang. Semakin banyak satuan waktu yang digunakan dalam proses produksi/operasi semakin besar pula nilai finansialnya, demikian pula sebaliknya. Hal ini menegaskan tentang makna *utility of time*. dan “*time is money*” yang mesti disikapi oleh seorang manajer dalam menggunakan waktu dengan bijak, sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas.

D. Fungsi-fungsi Manajemen (*Management Functions*)

Pada permulaan abad ke-20, seorang industriawan Prancis bernama Henry Fayol, melontarkan sebuah gagasan terkait dengan peran seorang manajer yang efektif. Beliau berpandangan, bahwa dalam menjalankan perannya, para manajer seyogianya melakukan lima fungsi manajemen yaitu: merancang, mengorganisasikan, memerintah, mengkoordinasikan, dan mengendalikan. Terhadap sistematika fungsi manajemen versi Henry Fayol tersebut, hingga saat ini belum mendapat kesepahaman yang bulat, baik di kalangan praktisi, maupun akademisi sehingga masih sering terjadi silang pendapat. Sekalipun demikian, bila dicermati terdapat persamaan umum tentang fungsi-fungsi manajemen tersebut, yang kemudian berkembang menjadi semacam rujukan umum (*main stream*). Berikut ini pandangan para ahli, tentang fungsi-fungsi manajemen tersebut.

Menurut George R. Terry (dalam Hasibuan, 2009 : 38), fungsi-fungsi manajemen meliputi: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengendalian (*controlling*). Menurut Henry Fayol (dalam Safroni, 2012:47), fungsi-fungsi manajemen terdiri dari : perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*), pengkoordinasian (*coordinating*), pengendalian (*controlling*). Sementara

menurut Ricki W. Griffin (Ladzi Safroni, 2012 : 47), mencakupi : perencanaan dan pengambilan keputusan (*planning and decision making*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*leading*) serta pengendalian (*controlling*).

Benang merah dari fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah, bahwa semua aktivitas manajemen diawali dengan perencanaan (*planning*), karena perencanaan akan menentukan tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Fungsi perencanaan adalah fungsi manajemen yang paling mendasar, karena melandasi fungsi-fungsi manajemen lainnya.

Hampir semua pakar manajemen menempatkan pengorganisasian pada posisi kedua sesudah perencanaan. Pengorganisasian merupakan pembagian kerja, dan berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena pengorganisasian bertolak dari *planning*. Fungsi berikutnya, adalah fungsi pengarahan, yang seringkali diungkapkan dalam istilah yang berbeda-beda, seperti *actuating*, *leading*, dan *commanding*, akan tetapi pada prinsipnya mengandung maksud yang sama, yaitu mengarahkan seluruh sumber daya manusia, agar mau bekerjasama dan bekerja efektif, menuju pencapaian tujuan organisasi. Setelah fungsi pengarahan, beberapa ahli menambahkan dengan fungsi pengkoordinasian (*coordinating*). Pengkoordinasian berfungsi untuk mengatur sumber daya manusia, agar dapat bekerjasama secara harmonis dan sinergis, sehingga terhindar dari kekacauan, konflik dan kekosongan pekerjaan. Selanjutnya fungsi terakhir dalam proses manajemen adalah pengendalian (*controlling*). Kaitan antara fungsi *controlling* dengan fungsi perencanaan, ibarat dua sisi mata uang yang sama, dan satu sama lain tidak dapat dipisahkan, karena bila salah satu fungsi hilang, maka hilang pula fungsi yang lainnya. Kedua fungsi ini tidak terpisahkan, dan dipandang sebagai fungsi inti manajemen. Dalam konteks manajemen pembangunan

wilayah khususnya, fungsi perencanaan sangat krusial serta menjadi pertaruhan keberhasilan pimpinan daerah dan para *stakeholders* utamanya, dalam membawa daerahnya meraih tujuan-tujuan pembangunan, bahkan mampu mengungguli daerah lainnya.

E. Konsep Pembangunan dan Kesenjangan Pembangunan

Pembangunan mengandung muatan konsep yang cukup luas dan komprehensif, namun demikian konsep pembangunan secara *mainstream*, tetap bertumpu pada aspek sosial, ekonomi, politik dan pembangunan manusia. Dalam kerangka pembangunan nasional, hingga saat ini pembangunan manusia, ditempatkan pada posisi paling penting dan menjadi prioritas. Mengapa demikian? Tiada lain, karena pembangunan manusia merupakan aspek yang paling mendasar, dan menjadi landasan utama bagi pembangunan sektor lainnya. Manusia merupakan subjek sekaligus objek dari pembangunan itu sendiri. Pembangunan ekonomi dan politik, seyogianya dapat diejawantahkan dengan cerdas menjadi instrumen kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat luas, dalam bentuk pemerataan pembangunan berikut hasil-hasilnya pada setiap wilayah. Jika upaya itu dijalankan secara bijak dan konsisten, akan menjadi solusi efektif dalam mengurangi tingkat kesenjangan, yang dalam kenyataannya masih terus mengganjal.

Pembangunan, menurut Nugroho dan Rochmin Dahuri (2004) didefinisikan sebagai suatu upaya terkoordinasi, untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak, secara sah kepada setiap warga negara, guna memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Definisi ini, apabila ditafsirkan lebih lanjut, menurut hemat penulis, mengandung makna yang sangat dalam, setidaknya mencakupi hal-hal di bawah ini:

Pertama, *phrase* “upaya terkoordinasi” mengisyaratkan, bahwa pembangunan berimplikasi pada pentingnya fungsi perencanaan, sebagai fungsi pertama manajemen, yang mendasari fungsi-fungsi manajemen lainnya.

Kedua, kalimat “menciptakan alternatif yang lebih banyak” dimaksudkan, bahwa pembangunan hendaknya berorientasi pada keberagaman, yang mencakupi seluruh aspek kehidupan. Dalam mekanismenya, pembangunan pun menuntut terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya, serta mampu berperan secara efisien, transparans dan adil.

Ketiga, kata “paling manusiawi” mengandung arti, bahwa pembangunan hendaknya berorientasi pada pemecahan masalah, dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat.

Apa yang dapat kita lihat dalam lintas sejarah pemerintahan, sejak zaman Orde Baru sampai dengan pemerintahan “Kabinet Indonesia Maju Presiden - Joko Widodo Jilid 1 dan Jilid 2“ yang dewasa ini tengah dijalani, cukup banyak mencatatkan hasil-hasil penting, terutama dalam pembangunan fisik infrastruktur seperti : pembangunan jalan bebas hambatan (jalan tol) yang mencapai penambahan ribuan kilometer, pembangunan listrik berkapasitas 35 mega wat, sarana jalan, jembatan, bendungan, irigasi, bandar udara, pelabuhan laut (tol laut) dan sebagainya. Sementara pada masa Orde Baru, prestasi pembangunan yang menonjol tercatat pada bidang Keluarga Berencana (KB), yang diperlihatkan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk yang ideal (ketika terjadi ledakan pertumbuhan penduduk), bahkan pada sektor pertanian, Indonesia mampu mencapai swasembada beras, sehingga mendapat penghargaan dari organisasi pangan PBB (*Food and Agriculture Organization*). Selain itu, Indonesia pun kala itu mampu mengekspor berbagai produk non migas dengan capaian yang signifikan.

Tinta emas pemerintahan Orde Baru, ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang berhasil mencapai lebih dari 7 (tujuh) persen per tahun.

Namun keberhasilan pembangunan pada setiap periode kepemimpinan yang berbeda-beda itu, tetap saja masih menyisakan sejumlah permasalahan pelik, diantaranya berupa kesenjangan sosial ekonomi, yang diikuti dengan tingkat pengangguran yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Kelambanan dalam mengatasi masalah klasik tersebut, ditengarai menjadi pemicu krisis sosial ekonomi dengan skala yang berbeda, yang tidak mudah bagi pemerintahan siapapun untuk melakukan *recovery*. Pembangunan yang hanya terfokus pada aspek ekonomi, umumnya selalu dibuntuti dengan munculnya beragam kesenjangan, baik kesenjangan antar golongan penduduk, kesenjangan antar sektor, ataupun kesenjangan antar wilayah, yang pada akhirnya memicu akumulasi jumlah penduduk miskin. Kesenjangan antar golongan, berupa ketidakadilan kesempatan terhadap akses sumber-sumber ekonomi antara golongan ekonomi lemah (golekmah), dengan para pemodal besar (konglomerat). Ironisnya ketika krisis multi dimensional menimpa pada tahun 1998 yang lalu, justru golekmah lah (baca: Usaha Mikro dan Kecil) yang mampu *survive*, dan menjadi penyelamat perekonomian negara.

Catatan buram lainnya, adalah melebarnya kesenjangan antar sektor pembangunan, sebagai eksese pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan mengedepankan sektor industri, yang kadung dipercaya sebagai strategi jitu dalam mendongkrak pendapatan per kapita masyarakat melalui industrialisasi. Dampak buruk dari pendekatan tersebut, adalah tersisihkannya sektor pertanian dan sejumlah sektor serumpun, terutama sektor perkebunan, perikanan, dan kehutanan yang sesungguhnya, menjadi basis perekonomian kita. Kebijakan tersebut

dipandang keliru, karena telah mengabaikan sektor-sektor yang memerlukan penguatan, guna memenuhi kebutuhan pangan nasional yang terus meningkat dan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, sekaligus upaya menekan laju urbanisasi tenaga kerja dari desa.

Isu miring berikutnya, bahwa pembangunan belum dapat dirasakan secara merata, terutama pada daerah perbatasan dan daerah terluar, sehingga menimbulkan kesenjangan antar daerah. Pembangunan selama ini, yang ditengarai lebih fokus dilakukan di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan berbagai prioritasnya, menimbulkan *gap* yang sangat mencolok, antara pembangunan wilayah di kawasan Indonesia bagian Barat dengan di kawasan Timur. Apabila pembangunan pada kedua wilayah tersebut diperbandingkan, sangat jelas memperlihatkan, bahwa Kawasan Timur Indonesia (KTI) semakin tertinggal jauh di belakang. Melebarnya berbagai kesenjangan tersebut, telah memantik api kecemburuan dan beragam kekecewaan pada sebagian masyarakatnya, hingga tak jarang memicu munculnya kelompok-kelompok pengganggu, pengacau hingga gerakan separatisme yang berkeinginan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berangkat dari meruyaknya masalah kesenjangan tersebut, telah mendorong banyak pihak (*stakeholders*) untuk mengadakan beragam diskusi secara intens dalam rangka menampung aspirasi, guna mencari solusi terbaik bagi terwujudnya pemerataan pembangunan wilayah/daerah secara proporsional. Skema implementasi pembangunan wilayah pada era otonomi daerah saat ini, tampaknya semakin mempertimbangkan aspirasi, potensi dan kekhasan daerah, sejalan dengan Rencana Strategis Daerah masing-masing, dengan tetap mengacu pada Rencana Strategi Nasional (Renstranas). Dengan demikian, sepanjang tidak keluar dari koridor Renstranas, pendekatan yang

digunakan daerah bisa berbeda-beda, sesuai dengan karakteristik geografis, demografis maupun corak sosial budaya daerah masing-masing. Gambar berikut memperlihatkan perbandingan distribusi anggaran pembangunan, investasi dan distribusi kredit perbankan pada berbagai wilayah pembangunan di Indonesia.

| WILAYAH | DANA DEKON + TP | | DANA PERIMBANGAN | | INVESTASI PMA | |
|---------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| | RATA-RATA 2005-2009 (Rp. Juta) | SHARE (%) | RATA-RATA 2005-2009 (Rp. Juta) | SHARE (%) | RATA-RATA 2005-2008 (US \$ JUTA) | SHARE (%) |
| SUMATERA | 37.213 | 15,65 | 62.138 | 27,65 | 1.133 | 11,29 |
| JAWA-BALI | 157.630 | 66,31 | 78.519 | 34,94 | 8.516 | 84,91 |
| KALIMANTAN | 11.721 | 4,93 | 30.487 | 13,57 | 283 | 2,82 |
| SULAWESI | 15.950 | 6,71 | 23.811 | 10,60 | 76 | 0,76 |
| NUSA TENGGARA | 5.995 | 2,52 | 9.965 | 4,43 | 8 | 0,08 |
| MALUKU | 4.278 | 1,80 | 5.889 | 2,62 | 7 | 0,07 |
| PAPUA | 4.942 | 2,08 | 13.890 | 6,18 | 5 | 0,05 |
| TOTAL | 237.729 | 100,00 | 224.698 | 100,00 | 10.030 | 100,00 |

Distribusi Dana Dekon+TP (%):
1. Jawa-Bali dan Sumatera: 81,69
2. Kalimantan: 4,93
3. Sulawesi: 6,71
4. Maluku dan Nusa Tenggara: 4,32
5. Papua: 2,08

Distriusi Dana Perimbangan (%):
1. Jawa-Bali dan Sumatera: 62,59
2. Kalimantan: 13,57
3. Sulawesi: 10,60
4. Maluku dan Nusa Tenggara: 9,30
5. Papua: 6,18

Sumber: Diolah dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan BKPM

| WILAYAH | INVESTASI PMDN | | KREDIT PERBANKAN | | KKREDIT MIKRO KECIL MENENGAH | |
|---------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| | RATA-RATA 2005-2008 (Rp. Miliar) | SHARE (%) | RATA-RATA 2007-2009 (Rp. Miliar) | SHARE (%) | RATA-RATA 2007-2009 (Rp. Miliar) | SHARE (%) |
| SUMATERA | 8.400 | 31,52 | 193.749 | 15,44 | 117.393 | 18,79 |
| JAWA-BALI | 14.729 | 55,26 | 913.352 | 72,78 | 408.768 | 65,43 |
| KALIMANTAN | 1.916 | 7,19 | 67.483 | 5,38 | 33.704 | 5,40 |
| SULAWESI | 1.402 | 5,26 | 56.483 | 4,50 | 43.281 | 6,93 |
| NUSA TENGGARA | 21 | 0,08 | 12.436 | 0,99 | 11.971 | 1,92 |
| MALUKU | 0,3 | 0,00 | 4.006 | 0,32 | 3.523 | 0,56 |
| PAPUA | 185 | 0,70 | 7.442 | 0,59 | 6.068 | 0,97 |
| TOTAL | 26.654 | 100 | 1.254.951 | 100 | 624.708 | 100,00 |

Distribusi Investasi PMDN (%):
1. Jawa-Bali dan Sumatera: 86,78
2. Kalimantan: 7,19
3. Sulawesi: 5,26
4. Maluku dan Nusa Tenggara: 0,08
5. Papua: 0,70

Distribusi Kredit Perbankan (%):
1. Jawa-Bali dan Sumatera: 88,22
2. Kalimantan: 5,18
3. Sulawesi: 4,50
4. Maluku dan Nusa Tenggara: 1,21
5. Papua: 0,59

Sumber : Kementrian PPN/Bappenas Tahun 2015

F. Definisi Wilayah

Wilayah diartikan sebagai ruang yang meliputi kesatuan geografis beserta segenap unsur-unsur terkait di dalamnya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional (wilayah daratan lautan dan udara). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan, bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis, beserta segenap unsur yang terkait kepadanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek

administratif dan atau aspek fungsional. Pamudji (2001:16), mengartikan wilayah sebagai suatu lingkungan geografis-sosiologis tertentu, yang lebih merupakan bagian dari suatu lingkungan yang lebih besar. Menurut Rustuadi (2006), wilayah didefinisikan sebagai unit geografis, dengan batas-batas spesifik tertentu, dimana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Lebih spesifik, Blair and Carrol (2009:16-18), membagi jenis wilayah menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Wilayah Fungsional

Wilayah fungsional, adalah wilayah yang terintegrasi secara internal. Artinya, bagian-bagian dari wilayah tersebut, satu sama lain saling berinteraksi secara lebih intensif, dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Suatu wilayah, ketika perusahaan-perusahaan yang ada didalamnya melakukan kegiatan bisnis satu sama lain, lebih banyak dari wilayah lain, dapat disebut sebagai wilayah fungsional. Seringkali wilayah fungsional dicirikan, dengan adanya sebuah pusat wilayah dan kawasan-kawasan sekitarnya, yang berhubungan erat dengan pusat wilayah tersebut. Wilayah metropolitan dikategorikan wilayah fungsional, manakala terdapat sebuah pusat wilayah metropolitan yang menjadi pusat dari sistem transportasi wilayah, pusat kegiatan pemerintahan, dan menjadi lokasi dari sarana- dan kegiatan keuangan utama.

2. Wilayah Homogen

Wilayah homogen adalah suatu wilayah yang bagian-bagian wilayahnya memiliki karakteristik yang sama. Karakteristik tersebut dapat berupa iklim yang sama, kegiatan utama yang sama (misal pertanian, industri dan sebagainya), atau yang berhadapan dengan problem utama yang sama. Misalnya Indonesia termasuk negara beriklim tropis, karena pada beberapa wilayahnya dapat dijumpai hutan hujan tropis dan monsoon tropis, yaitu di wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah dan Utara, dalam hal ini di Jawa

Barat, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi Utara. Kesamaan karakteristik lainnya, dapat dilihat pada daerah-daerah beriklim *savanna*, yang diindikasikan dengan adanya hutan *savanna*, yaitu daerah-daerah Indonesia yang dekat dengan Benua Australia, seperti daerah-daerah di Nusa Tenggara, Kepulauan Aru, dan Pantai Selatan Papua.

Selain faktor iklim, homogenitas kawasan wilayah di Indonesia juga memperlihatkan kesamaan dalam karakteristik tanah, yang bersifat mudah digarap, dan dapat menyerap air serta *permeable* (tanah *alluvial*), sehingga cocok untuk ditanami padi, palawija, tembakau, tebu, sayuran kelapa, dan buah-buahan. Jenis tanah ini, dapat dijumpai di daerah Jawa bagian Utara, Sumatera bagian Timur, Kalimantan bagian Barat dan Selatan.

3. Wilayah Administratif

Yang dimaksudkan dengan wilayah administratif, adalah wilayah yang berada dalam cakupan kewenangan pemerintah pusat (mencakupi seluruh wilayah negara), wilayah yang berada dalam kewenangan pemerintah provinsi (sebagian dari wilayah negara), wilayah yang berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten atau kota (sebagian dari wilayah provinsi), wilayah yang merupakan kewenangan wilayah kecamatan (sebagian wilayah dari kabupaten atau kota), dan wilayah desa (sebagian dari wilayah kecamatan).

G. Teori - teori tentang Wilayah

Perencanaan pembangunan wilayah merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan regional, pada banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia. Tujuan pembangunan nasional inklusif pengembangan wilayah, adalah guna memacu pertumbuhan wilayah, dan menyebarkan hasilnya (*growth with equality*) secara merata, sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial. Banyak aspek yang perlu

dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan wilayah, sebagai pegangan para *stake holders* agar pembangunan yang dilaksanakan, berjalan lancar menuju tujuannya. Pada uraian berikut, penulis akan mengulas beberapa teori pembangunan wilayah dari sejumlah pakar, menurut sejarah perkembangannya.

1. Teori *Resources Endowment*

Teori ini dikemukakan oleh Harver Perloff dan Lowdon W. J (1961) dalam tulisannya bertajuk “*Natural Resources Endowment and Regional Economic Growth*” yang menjelaskan, bahwa perkembangan wilayah di Amerika Serikat, berlangsung melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu : 1). Tahap Pertanian, 2). Tahap Pertambangan, dan 3). Tahap Pelayanan Jasa. Pembangunan wilayah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, dan kemampuannya dalam memproduksi barang/jasa untuk keperluan nasional, dan menunjang ekspor. Kegiatan ekspor akan memperluas permintaan, dan menciptakan efek *multiplier* yang akan berdampak terhadap dinamika wilayah. Terkait dengan kememadaian sumber daya, dimaksudkan sebagai sumber daya, yang memperlihatkan karakteristik sebagai berikut :

(1). Men-*support* produksi nasional, (2). Memiliki efek *backward* dan *forward linkage* yang luas, (3). Memunculkan efek *multiplier*, yaitu kemampuan meningkatkan permintaan terhadap hasil produksi barang dan jasa wilayah.

2. Teori *Export Base (Economic Base)*

Teori ini dikembangkan oleh Douglass C. North (1964), yang pada intinya merupakan perluasan dari Teori *Resources Endowment*. Teori ini memandang, bahwa sektor ekspor berperan penting dalam pembangunan wilayah, karena sektor ekspor dapat memberikan kontribusi yang berharga, tidak hanya pada perekonomian wilayah, tapi juga terhadap perekonomian

secara nasional. Wilayah dengan tingkat permintaan yang tinggi, akan menarik minat para investor untuk berinvestasi, juga akan menyerap tenaga kerja. Syarat utama bagi pengembangan teori ini, adalah berlakunya sistem wilayah terbuka, adanya aliran barang, modal, dukungan teknologi antar wilayah, dan antara wilayah dengan negara lain.

3. Teori Pertumbuhan Neoklasik

Teori ini dikemukakan oleh Harry W Richardson (1973) dan bukunya *Regional Economic Growth*. Teori ini mengatakan bahwa pembangunan wilayah tergantung pada tiga faktor yaitu tenaga kerja, ketersediaan modal dan kemajuan teknologi. Selain faktor tadi, teori ini menekankan pentingnya perpindahan (mobilitas) faktor produksi, terutama tenaga kerja dan modal antar wilayah dan antar negara. Pola pergerakan ini memungkinkan terciptanya keseimbangan pembangunan antar wilayah.

4. Teori Baru Pembangunan Wilayah

Teori ini memercayai kekuatan teknologi dan inovasi, sebagai faktor dominan dalam memacu pertumbuhan wilayah. Kuncinya adalah, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, dan *research and development*. Teknologi yang tinggi, dan inovasi yang didukung sumber daya manusia yang berkualitas, adalah syarat untuk meningkatkan pembangunan wilayah. Dalam teori ini faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan wilayah, dikelompokkan menjadi dua bagian besar yaitu:

- Faktor ekonomi, meliputi sumber daya alam, akumulasi modal dan kemajuan teknologi
- . - Faktor non ekonomi, meliputi faktor sosial seperti pendidikan budaya, faktor manusia, dan faktor politik dan administrasi.

5. Teori Pembangunan Wilayah Perspektif Geografi

Menurut teori ini, pembangunan wilayah dipengaruhi oleh unsur internal dan eksternal wilayah, yaitu :

- Unsur internal (*intra regional*) terdiri dari: sumber daya alam, sejarah, lokasi, agen perubahan dan pengambilan kebijakan.
- Unsur eksternal (*inter regional*) terdiri atas : interelasi dengan wilayah lain dan posisi wilayah tersebut terhadap wilayah lain.

Seiring dengan waktu, perkembangan pembangunan terus berlangsung dengan pesat pada berbagai wilayah di dunia, dan telah melahirkan pusat-pusat pembangunan baru, yang kemudian membentuk titik-titik baru, serta memberi pengaruh terhadap wilayah di sekitarnya. Pusat pembangunan tersebut, merupakan suatu kesatuan wilayah yang tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat, serta memberikan pengaruh sosial ekonomi yang kuat pada daerah-daerah sekitarnya. Wilayah dimaksud, baru akan dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan atau pusat pembangunan, apabila memberi kuat terhadap daerah-daerah di sekitarnya. Beberapa teori tentang pusat pertumbuhan, menurut para ahli antara lain:

a. Teori Tempat Sentral (*Central place Theory*)

Teori ini dikemukakan oleh Walter Cristaller (1933), yang mensyaratkan beberapa kondisi yang mesti dipenuhi oleh sebuah tempat sentral. Singkatnya, sebuah tempat sentral harus menjawab tiga pertanyaan, yaitu: (1) Apakah yang menentukan banyaknya kota; (2) Apakah yang menentukan besarnya kota; dan (3) Apakah yang menentukan persebaran kota. Dalam teori ini, dikemukakan pula konsep tentang jangkauan (*range*), dan konsep ambang (*threshold*). *Range* adalah jarak yang ditempuh oleh seseorang, untuk mendapatkan kebutuhannya pada suatu waktu, sedangkan *threshold*

adalah jumlah minimal penduduk, yang diperlukan untuk menjamin kelancaran, dan keseimbangan pasokan barang.

b. Teori Kutub Pertumbuhan (*Growth Pole Theory*)

Teori ini dikemukakan oleh Perroux (1955) yang menjelaskan, bahwa pembangunan wilayah tidak terjadi secara serentak, akan tetapi muncul di tempat-tempat tertentu, dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda-beda. Sebuah tempat yang tumbuh dan berkembang menjadi pusat pembangunan, disebut kutub pembangunan. Dari tempat tersebut, pembangunan akan terus meluas ke wilayah-wilayah sekitarnya. Perroux dalam teorinya, membahas pula dampak pembangunan menjadi dua jenis :

(1). Dampak baik, disebut *trickle down effect*. Contoh dari dampak baik ini adalah meningkatnya investasi pada suatu kota, yang berdampak pada semakin beragamnya kegiatan, yang melibatkan banyak penduduk, dan meningkatnya produksi berupa barang atau jasa.

(2). Dampak buruk, yang disebut *backwash and polarization*. Contoh dari dampak buruk ini, adalah meningkatnya beban sosial ekonomi daerah sekitar pusat pembangunan, sebagai akibat dari banyaknya masyarakat perdesaan yang melakukan urbanisasi ke wilayah pusat pembangunan.

H. Potensi Daerah Setempat

Setiap tempat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Sebagai contoh, tersedianya lahan yang luas pada suatu wilayah, berpotensi untuk dikelola menjadi lahan pertanian atau perkebunan modern yang berwawasan lingkungan, serta dapat menghasilkan produk unggulan yang berorientasi ekspor. Gambaran konkret dari hal ini, adalah kemunculan produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh beberapa daerah di Indonesia, semisal Apel

Malang, Akar Wangi Garut, Teh Papandayan, Duku Palembang dan sejumlah produk unggulan lainnya.

I. Konsep Agropolitan

Teori ini dikemukakan oleh Friedman (1975). Pada intinya menjelaskan, mengenai perlunya mengupayakan perdesaan untuk lebih terbuka terhadap pembangunan, sehingga dengan kondisi itu mendorong tumbuh-kembangnya sejumlah kota di perdesaan (agropolis). Sebagai contoh, pembangunan sarana dan prasarana yang lengkap di perdesaan, diarahkan untuk menunjang kehidupan masyarakat perdesaan, agar masyarakat perdesaan secara bertahap dapat meningkatkan kesejahteraannya, sebagaimana halnya masyarakat perkotaan, sehingga dengan pembangunan tersebut, dapat mengurangi arus urbanisasi dan migrasi.

J. Manajemen Wilayah

Sebagaimana yang telah diuraikan di muka, istilah manajemen diartikan secara *variative* oleh para ahli, sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman dan perspektif yang dianut. Dari sekian banyak definisi yang dikemukakan, dua pendapat pakar ini, tampaknya dapat mendekatkan pemahaman kita tentang konsep manajemen wilayah. Shafritz dan Russel (1997:20) berpendapat, bahwa manajemen berkenaan dengan orang yang bertanggung jawab menjalankan suatu organisasi, dan proses menjalankan organisasi itu sendiri, yaitu pemanfaatan sumber daya, baik manusia ataupun peralatan, untuk mencapai tujuan organisasi. Definisi ini tidak hanya menunjukkan proses pencapaian tujuan akan tetapi juga sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan proses tersebut.

Selanjutnya, Donovan dan Jackson (1991:11-12) mendefinisikan manajemen sebagai suatu aktivitas yang dilaksanakan pada tingkatan organisasi tertentu, sebagai serangkaian keterampilan (*skills*) dan serangkaian tugas (*tasks*).

Kedua penulis ini mengemukakan 4 (empat) klaster kompetensi, yang ada dalam manajemen, yaitu:

- 1). Klaster manajemen tujuan dan aksi,
- 2). Klaster pengarahan terhadap bawahan,
- 3). Klaster manajemen sumber daya manusia, dan
- 4). Klaster kepemimpinan.

Pandangan para pakar di atas, apabila dikaitkan dengan karakteristik wilayah/daerah berikut kompleksitas pembangunan wilayah, mengisyaratkan bahwa pengelolaan pembangunan wilayah sesungguhnya memerlukan pemahaman yang memadai, terhadap aspek-aspek manajemen dan sejumlah faktor yang berkaitan dengan kewilayahan, serta konsep pembangunan yang dianut, baik secara internal maupun eksternal. Guna meyakinkan pandangan tersebut, berikut disajikan sejumlah konsep pembangunan wilayah, menurut para ahli.

Schutte (1996) mendefinisikan manajemen wilayah, sebagai berikut: *“Organizational units concerned with, and involved in, the control, coordination and integration of activities of one or more subsidiaries in the region”* . Artinya, manajemen wilayah adalah sebuah unit organisasi yang berkaitan dan terlibat dalam suatu kontrol, koordinasi kegiatan yang terintegrasi, antara satu atau lebih perusahaan atau institusi di suatu wilayah. Dengan demikian, manajemen wilayah mencakup pula penyediaan sarana dan prasarana, perencanaan pembangunan ekonomi, pengaturan kegiatan masyarakat, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan akan rasa aman, dan lain-lain.

Menurut Mulyono (2008), pada dasarnya, tujuan dari manajemen wilayah adalah untuk mengatur dan mengkoordinasikan aspek kehidupan penduduk (ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan) di suatu wilayah

agar mereka hidup nyaman dan sejahtera. Pada pihak lain, terkait dengan manajemen wilayah ini, Cadwallader (1995) mengungkap sisi lain menyangkut peran pemerintah berupa intervensi, yang selayaknya dilakukan pemerintah dalam manajemen wilayah. Intervensi tersebut diwujudkan dalam kapasitas pemerintah sebagai ,:

- Penyedia jasa dan barang publik.
- Pengatur dan penjamin berjalannya perekonomian pasar, guna terwujudnya alokasi sumber daya sebaik-baiknya, misalnya membuat undang-undang anti monopoli.
- Mesin sosial yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai tujuan atau nilai- nilai bangsa dan bernegara. Alokasi sumber daya diserahkan pada mekanisme pasar, sedangkan pemerintah bertugas dalam mengawasi dan mengevaluasi ketidakseimbangan sosial ekonomi, dan melindungi golongan yang lemah atau kaum minoritas.
- Penengah dalam konflik antar kelompok masyarakat.

K. Konsep Manajemen Daerah yang Tepat untuk Pemerintahan

Manajemen daerah, pada dasarnya merupakan konsep yang digunakan untuk mengatur pemerintah daerah, agar bisa berjalan sendiri, dan berkemampuan memberdayakan serta memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya sendiri. Dalam prakteknya, tentu saja tidak boleh terlepas dari kebijakan manajemen pemerintah (pusat). Dalam hal ini, pemerintah memberikan kewenangan atau tanggung jawab, kepada pemerintah daerah atas sejumlah besar urusan pemerintahan, atau disebut dengan otonomi daerah dan desentralisasi, agar daerah mampu memaksimalkan potensi yang ada di wilayahnya, guna mencukupi sekaligus melindungi kebutuhan masyarakat daerahnya, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan.

Dalam implementasi manajemen daerah, pimpinan daerah beserta seluruh jajaran perangkat daerah, dituntut untuk berkemampuan menjalankan pemerintahan dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Manajemen pemerintahan dilaksanakan oleh pimpinan pemerintahan daerah (gubernur, wali kota atau bupati), DPRD beserta para pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan konsep otonomi daerah. Praktek manajemen yang baik, akan menjadi energi yang besar dan kuat, dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah, dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya, dalam bingkai NKRI secara utuh, sebagaimana yang dicita-citakan bersama. Beberapa urusan yang menjadi kewenangan manajerial pemerintah daerah, antara lain:

1. Manajemen Perencanaan Pemerintahan Daerah

Perencanaan merupakan proses pemilihan, mengenai hal yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan visi dan misi yang telah disepakati bersama. Ketentuan tentang Perencanaan Daerah ini, tertuang dalam Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004, mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Skala Nasional, yang di dalamnya mengatur tentang dua jenis perencanaan, yaitu perencanaan pembangunan dan perencanaan publik. Sesungguhnya banyak sekali manfaat yang akan diperoleh, dari suatu perencanaan, antara lain:

- Perencanaan membuat tujuan menjadi jelas, objektif dan juga rasional.
- Perencanaan membuat setiap langkah serta aktivitas yang akan dilakukan, menjadi teratur dan efisien.
- Sumber daya yang dimiliki oleh daerah, akan tereksplorasi secara terkendali.
- Perencanaan membuat kegiatan dan aktivitas menjadi lebih bermanfaat, dan mendekati kesesuaian dengan harapan.

- Memperkecil kadar resiko, karena telah melalui proses pertimbangan yang matang.
- Memberikan dasar untuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan.
- Mendorong peningkatan prestasi kerja pemerintah.

2. Pengorganisasian Lembaga Pemerintah Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, daerah dilengkapi dengan perangkat daerah, berbentuk badan, dinas, atau kantor dan institusi lainnya, yang menjalankan urusan pemerintahan daerah. Organisasi atau kelembagaan daerah tersebut, pada era otonomi daerah disebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD), atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam konteks *trias politica*, keberadaan organisasi perangkat daerah, dapat penulis gambarkan di bawah ini:

- a. Lembaga eksekutif direpresentasikan oleh gubernur, bupati atau walikota serta kepala daerah yang sejajar dengannya. Pemimpin ini memiliki tugas untuk memimpin praktek pemerintahan di daerahnya.
- b. Lembaga legislatif daerah, yaitu DPRD tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Bertugas membuat produk hukum daerah yang disahkan bersama-sama dengan eksekutif.
- c. Lembaga pengawasan, dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta lembaga lain yang berkompeten di bidangnya.

3. Manajemen Sumber Daya Daerah

Sumber daya yang ada di daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya, yang kesemuanya menuntut pengelolaan yang cermat dan akuntabel, oleh segenap perangkat daerah. Sumber daya tersebut antara lain:

- 1). Sumber daya aparatur adalah orang-orang atau pekerja yang bekerja di lembaga pemerintahan daerah.

- 2). Sumber daya alam, yaitu segala hal yang berasal dari alam, yang potensial dimanfaatkan untuk menambah pendapatan daerah.
- 3). Sumber daya buatan, merupakan hasil pengolahan yang dapat digunakan sebagai faktor input pembangunan.
- 4). Sumber daya sosial, adalah masyarakat yang ada di daerah, yang dapat diberdayakan sebagai aset daerah.
- 5). Sumber daya keuangan, merupakan sumber utama anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dapat berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Hibah, Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 6). Sumber daya peralatan dan perlengkapan, baik berupa aktiva tetap, maupun aktiva lancar.

4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pengawasan tugas serta tanggung jawab pemerintah daerah ini dilakukan oleh lembaga internal dan lembaga eksternal yang berkompeten, termasuk oleh lembaga non pemerintahan, baik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media masa, maupun masyarakat secara luas. Pengawasan dan pengendalian pembangunan daerah, pada prinsipnya bertujuan untuk mengendalikan jalannya pembangunan, dengan mengeliminasi praktek-praktek *mal* administrasi birokrasi, mencegah inefisiensi dan inefektivitas atas pelaksanaan pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat.

| Pemerintah Pusat | Pemerintah Daerah | Pemerintah Pusat & Daerah |
|---|---|---|
| Kementerian/Lembaga wajib melaksanakan fokus-fokus dan kegiatan serta mempertimbangkan dokumen perencanaan pembangunan nasional | Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah wajib mempertimbangkan dokumen perencanaan pembangunan nasional | Kementerian/Lembaga beserta pemerintah daerah wajib menjaga konsistensi antara Buku III RPJMN, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). |

Gambar 2.1 Kaidah Pelaksanaan Sinergi Pusat-Daerah

A. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pada dasarnya merupakan suatu cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks manajemen, perencanaan merupakan fungsi pertama dan utama, karena merupakan langkah awal sekaligus titik tolak dari seluruh kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang dalam upaya mencapai tujuan. Fungsi perencanaan, menjadi dasar bagi berjalannya fungsi-fungsi manajemen lainnya, apakah fungsi *organizing*, *leading*, *directing*, *actuating*, *coordinating*, hingga *controlling*. Tanpa perencanaan, aktivitas organisasi akan berjalan tanpa arah yang pasti dan tujuan yang jelas, serta tak memiliki daya antisipasi dalam menghadapi berbagai resiko yang mungkin datang menghadang pada setiap langkah yang ditempuh sepanjang proses pencapaian tujuan.

Oleh karenanya, tidak berlebihan jika ada orang yang berpandangan, bahwa sebuah perencanaan yang tepat, telah menjamin terenggamnya setengah keberhasilan pencapaian tujuan. Sebaliknya, ketidaksuksesan semata mata terjadi, karena kita memang telah merencanakan sebuah kegagalan. Dikaitkan dengan realita kehidupan sama sekali tidaklah keliru, apabila perencanaan ditempatkan seperti itu, mengingat sesungguhnya apapun yang terjadi di dunia ini, bukanlah sebuah kebetulan. Dengan demikian, secara umum perencanaan pembangunan, berkenaan dengan cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Tujuan perencanaan pembangunan,

pada hakikatnya adalah untuk mendorong percepatan proses perubahan multi dimensional menuju kondisi yang lebih baik ke arah terwujudnya masyarakat yang lebih maju, makmur dan sejahtera.

Beberapa pengertian perencanaan pembangunan menurut para ahli, diuraikan di bawah ini:

1. Menurut Arthur W. Lewis (1965): “Suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif”. Rangsangan tersebut diberikan dalam bentuk insentif-insentif ekonomi, baik secara mikro maupun makro, yang dapat mendorong penggunaan sumberdaya secara lebih produktif, sehingga proses pembangunan akan semakin meningkat.
2. M.L. Jhingan (1984), seorang ahli perencanaan pembangunan berkebangsaan India : “Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian, dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat, untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula”.
3. Michael Todaro (2003): “Suatu upaya pemerintah yang secara sengaja, untuk melakukan koordinasi pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang untuk mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat pertumbuhan dan beberapa variabel utama perekonomian nasional”.
4. Perencanaan pembangunan di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 didefinisikan sebagai: “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah”.

Dari beberapa definisi tentang perencanaan pembangunan di atas, terlihat dengan jelas, bahwa komponen utama dari perencanaan pembangunan meliputi:

- Usaha pemerintah secara terencana dan sistematis, untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan.
- Periodisasi waktu : jangka panjang, menengah dan per satu tahun.
- Variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan, baik langsung maupun tidak langsung.
- Sejumlah sasaran pembangunan yang jelas, sesuai dengan aspirasi masyarakat.

B. Pembangunan Perlu Direncanakan

Dalam kenyataannya, tidak semua negara memerlukan dan menggunakan perencanaan formal dalam mengawal proses pembangunan yang dijalankannya. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa, umumnya tidak menggunakan perencanaan pembangunan secara formal. Pada negara-negara tersebut, proses pembangunan didorong dan dikendalikan melalui “tangan yang tidak tampak” atau *the invisible hand* yang dimaknai sebagai kekuatan mekanisme pasar.

Lain halnya, pada sebagian besar negara berkembang, dan negara-negara yang menganut paham sosialis, perencanaan pembangunan difungsikan sebagai alat untuk mendorong dan mengendalikan proses pembangunan, yang dirancang secara terpusat. Hal ini mengingatkan, bahwa pada negara dengan sistem sosialis (*planned socialism*), peranan pemerintah sangatlah

besar, sementara peranan sektor swasta sangat dibatasi. Karena itu, sebagian besar kegiatan produksi, baik barang maupun jasa dilakukan melalui perusahaan-perusahaan milik pemerintah (BUMN). Karena kegiatan perencanaan pembangunan, dipandang sebagai kewenangan dan upaya pemerintah secara mutlak, sehingga pada negara-negara tersebut, perencanaan pembangunan menjadi perangkat vital, dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan *stakeholders* pembangunan.

Ada tiga alasan utama, mengapa negara-negara yang berpaham sosialis dan negara berkembang memerlukan perencanaan pembangunan dalam mengendalikan dan mendorong proses pembangunannya, baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah, yaitu:

1. Gagalnya mekanisme pasar.

Ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar, memerlukan beberapa persyaratan tertentu, yaitu:

- Kompetisi yang cukup tajam, dan berjalan secara adil dan tidak ada kekuatan monopoli.
- Tidak ada daerah dan masyarakat yang terisolir, sehingga semua berkesempatan mendapatkan informasi yang sama, dengan golongan masyarakat lainnya.
- Hukum berjalan dengan baik, sehingga sangat kecil peluang untuk berbuat curang, dan menang sendiri.

Pada kebanyakan negara berkembang, ketiga kondisi tersebut masih jauh panggang dari api, hingga mekanisme pasar pun tak dapat berjalan sebagaimana layaknya.

2. Ketidakpastian Masa Datang

Tidak dapat disangkal, bahwa masa yang akan datang, penuh dengan ketidakpastian (*uncertainty*), sehingga keputusan yang diambil oleh

pihak swasta atau *stakeholder* lainnya, dikhawatirkan tidak tepat sasaran. Jika ini terjadi, dipandang sangat merugikan, terlebih bilamana keputusan tersebut menyangkut kegiatan investasi dan produksi yang berjangka panjang. Besar kemungkinan, kebijakan yang ditetapkan dalam penggunaan sumberdaya tersebut, tidak terarah pada sektor-sektor yang dianggap prioritas. Akibatnya adalah melambatnya proses pembangunan, dan kecenderungan terjadinya inefisiensi sumber daya, padahal dalam sistem perencanaan terpusat sumber daya pembangunan sepenuhnya dikuasai oleh negara.

3. Mengontrol Kegiatan Pembangunan

Pembangunan yang dilandasi dengan perencanaan terpusat, diyakini dapat mendorong berjalannya kegiatan pembangunan yang terpadu, efisien dan berkelanjutan. Jika perencanaan pembangunan berada di tangan pihak swasta, dianggap berpotensi menghasilkan kegiatan yang tidak proporsional, karena didominasi kepentingan pihak tertentu. Pembangunan seperti itu, dinilai tidak sejalan dengan kepentingan umum, dan menyimpang dari peran ideal pemerintah dalam mendorong proses pembangunan.

C. Tujuan dan Fungsi Perencanaan Pembangunan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 dijelaskan, bahwa dalam rangka mendorong proses pembangunan yang terpadu dan efisien, perencanaan pembangunan di Indonesia, diarahkan pada 5 (lima) tujuan, dengan fungsi pokok sebagai berikut:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif dan adil.

D. Jenis-Jenis Perencanaan Pembangunan

Lincoln Arsyad (2001), membagi perencanaan pembangunan, sebagai berikut:

1. Menurut jangka waktunya, perencanaan pembangunan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Perencanaan Jangka Panjang

Perencanaan jangka panjang, biasanya memiliki rentang waktu 10-25 tahun. Pada era Orde Baru, pembangunan jangka panjang mencakup jangka waktu 25 tahun. Sedangkan rencana Pembangunan Jangka Panjang, baik nasional maupun daerah, mencakup waktu 20 tahun. Selain itu, terdapat pula jenis perencanaan pembangunan yang mencakup jangka waktu 10 tahun, seperti Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Rencana jangka panjang, disebut juga sebagai perencanaan perspektif (*perspective planning*), yang berisikan arah pembangunan secara umum atau garis besar.

- b. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan jangka menengah biasanya mencakup waktu 4-5 tahun, tergantung dan masa jabatan presiden atau kepala daerah. Di Indonesia, perencanaan jangka menengah berjangka waktu 5 tahun, yang disusun baik oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Perencanaan

jangka menengah, pada dasarnya merupakan jabaran rencana jangka panjang sehingga bersifat operasional.

c. Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan jangka pendek, biasanya ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun, sehingga seringkali juga dinamakan sebagai rencana tahunan (*annual planning*). Rencana ini, pada dasarnya merupakan jabaran dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Perencanaan tahunan ini bersifat operasional, karena didalamnya termasuk program dan kegiatan, lengkap dengan penganggarannya. Bahkan dalam rencana tahunan ini, termasuk juga indikator dan target kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan, dan menjadi dasar utama penyusunan anggaran, baik APBD maupun APBN.

2. Berdasarkan sifatnya, perencanaan pembangunan dibagi atas:

a. Perencanaan dengan Komando (*Central planning*)

Jenis perencanaan ini, banyak diterapkan di negara-negara yang menganut paham Komunisme, seperti Uni Soviet (sebelum bubar), Korea Utara, Cina, Cuba dan beberapa negara di Afrika. Perencanaan pembangunan jenis ini, dilaksanakan secara terpusat dan pelaksanaannya dikomandokan secara tegas, dan kaku oleh pihak penguasa/pemerintah.

b. Perencanaan dengan Rangsangan (*Planning by Incentives*)

Berbeda dengan perencanaan berdasarkan komando, perencanaan dengan rangsangan ini, dilakukan secara demokratis dan lebih banyak didasarkan pada “mekanisme pasar”. Pelaksanaan atas rencana pembangunan, tidak dijalankan oleh pemerintah, tetapi diberikan kesempatan luas kepada swasta dengan sistem insentif yang memadai, sehingga pihak swasta dan masyarakat tertarik untuk

melaksanakannya. Tidak ada keharusan apa lagi sanksi, namun didasarkan atas ajakan dan dorongan.

3. Dilihat dari alokasi sumber dayanya, perencanaan pembangunan dikelompokkan atas:

a. Perencanaan Keuangan

Tidak dapat disangkal, bahwa keuangan merupakan kunci pokok sebuah perencanaan pembangunan. Tanpa ketersediaan anggaran yang memadai, pembangunan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

b. Perencanaan Fisik

Perencanaan fisik, pada dasarnya adalah suatu upaya untuk menjabarkan program dan kegiatan pembangunan, melalui pengalokasian faktor-faktor produksi, beserta hasil produksinya, sehingga dapat memaksimalkan penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat.

4. Berdasarkan tingkat keluwesannya, perencanaan pembangunan dikelompokkan menjadi:

a. Perencanaan Indikatif

Perencanaan indikatif, biasanya diterapkan pada negara dengan sistem campuran, yaitu gabungan dari mekanisme pasar dan campur tangan pemerintah, seperti yang diterapkan di Perancis dan negara berkembang lainnya, termasuk di Indonesia. Dalam sistem perencanaan pembangunan ini, aset dan perusahaan negara lebih banyak diarahkan pada pembangunan sektor-sektor dasar, seperti industri batu bara, semen, baja, transportasi, bahan bakar, pupuk dan peralatan pertanian. Pada pihak lain, sektor swasta lebih banyak diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang lebih berorientasi pada kegiatan bisnis.

b. Perencanaan Imperatif

Perencanaan imperatif, identik dengan perencanaan sistem komando, karena semua kegiatan diatur oleh negara untuk kepentingan masyarakat banyak. Dalam sistem perencanaan ini, terdapat pula pengawasan terhadap faktor-faktor produksi secara menyeluruh yang dilakukan oleh negara, sementara konsumen tidak memiliki kedaulatan. Semua sumber daya yang tersedia, dimanfaatkan untuk memenuhi sasaran rencana yang telah ditetapkan.

5. Perencanaan pembangunan, dapat pula dikelompokkan berdasarkan sistem ekonomi yang dianut, sebagai berikut:

a. Perencanaan Sistem Kapitalis

Perencanaan Pembangunan, pada negara yang menganut sistem Kapitalis, semuanya didasarkan pada mekanisme pasar, yang berperan sebagai “*the invisible hand*”. Dalam hal ini peran swasta menjadi sangat besar, dan semua faktor produksi berikut kegiatan produksi, dikuasai oleh sektor privat atau pribadi. Hanya sektor-sektor yang sangat strategis saja, seperti industri yang terkait dengan militer yang dikuasai oleh pemerintah, dan campur tangan terhadap kegiatan swasta dilakukan secara tidak langsung, melalui kebijakan fiskal dan moneter.

b. Perencanaan Pembangunan Sistem Sosialis

Perencanaan pembangunan pada negara yang menganut sistem ekonomi sosialis (*Marxis*), dilakukan secara terpusat (*central planning*), dan dilaksanakan berdasarkan komando, untuk seluruh kegiatan sosial dan ekonomi. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, secara periodik pemerintah mengorganisasikan dan mengalokasikan sumberdaya yang tersedia secara terpadu, kepada para *stakeholders* pembangunan. Dalam sistem ini, peranan pemerintah bersifat mutlak,

dan pihak swasta sama sekali tidak diizinkan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan eksploitasi terhadap kehidupan kaum buruh dan petani.

c. Perencanaan Pembangunan Sistem Campuran

Perencanaan pembangunan pada sistem ekonomi campuran adalah memadukan antara perencanaan yang dirancang oleh pusat (*top down*) dengan perencanaan aspiratif yang diusulkan dari daerah bawahan atau masyarakat (*bottom up*). Pertimbangan utama dalam penerapan sistem perencanaan ini, adalah mengingat masing-masing sistem perencanaan, memiliki kelebihan dan kekurangan.

6. Berdasarkan cara pelaksanaannya, perencanaan pembangunan terbagi menjadi :

a. Perencanaan Sentralistik

Dalam sistem perencanaan sentralistik, semua keputusan dan kebijakan pembangunan yang dianggap penting, ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (*top down*). Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota bertindak sebagai pelaksana dari kebijakan pusat, melalui mekanisme koordinasi yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah masing-masing. Namun demikian, ada juga beberapa hal yang dapat diputuskan, dan ditentukan sendiri oleh pemerintah daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat.

b. Perencanaan Desentralistik

Sistem perencanaan desentralistik ini, dikenal dengan sebutan *bottom up planning*, yang pada dasarnya merupakan kebalikan dan sistem perencanaan sentralistik. Dalam sistem ini, pemerintah daerah memegang peranan cukup penting, selain kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah, biasanya mendapatkan alokasi dana dalam bentuk *block grant* (di Indonesia Dana Alokasi Umum) yang

penggunaannya, disesuaikan dengan Rencana Strategis Daerah atau perencanaan daerah masing-masing.

E. Tahapan-tahapan Perencanaan Pembangunan

Secara umum, proses perencanaan pembangunan ditempuh melalui 4 (empat) tahapan, dan dalam prakteknya di Indonesia tugas ini dilaksanakan oleh badan perencana pembangunan, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

1. Tahapan Penyusunan Rencana

Tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan, yang secara formal merupakan tanggung jawab badan perencana, dalam hal ini di Indonesia dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk tingkat nasional, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota.

Bila penyusunan rencana, dilakukan dengan menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif, maka sebelum naskah rencana disusun, terlebih dahulu dilakukan penjarangan terhadap aspirasi masyarakat, berkenaan dengan usulan-usulan dari *grass root*, terkait dengan derivasi visi dan misi, serta arah pembangunan.

2. Tahap Penetapan Rencana

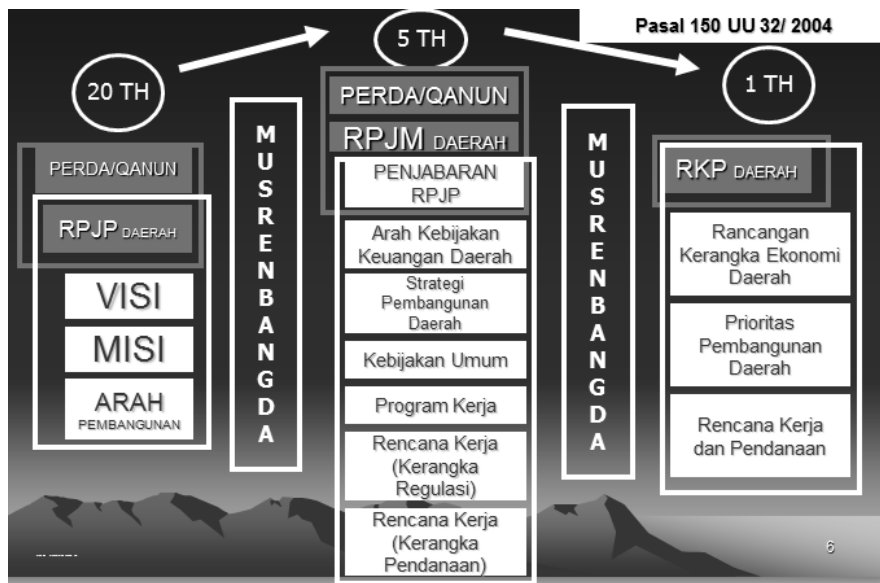
Rancangan rencana pembangunan yang telah selesai, baru akan diberlakukan secara resmi, apabila telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) perlu mendapat pengesahan dari DPRD setempat, sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) cukup mendapat pengesahan dari kepala daerah.

3. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif, mulai dijalankan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, perencana masih tetap mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian (monitoring), atas pelaksanaan rencana bersama-sama dengan SKPD yang bersangkutan.

4. Tahap Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana

Setelah kegiatan pembangunan dilaksanakan, badan perencana masih memiliki tanggung jawab terakhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini, adalah untuk mengetahui *out put*, *out come* dan *benefit* pembangunan tersebut bagi masyarakat.



Sumber: Bappeda Provinsi Nangroe Aceh Darussalam 2007

Gambar 3.1 Sistem Perencanaan

F. Siklus Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan, memiliki siklus (putaran kegiatan) yang hampir terpola secara seragam. Berdasarkan *mainstream* literatur perencanaan,

sejauh ini siklus minimum perencanaan pembangunan, ditempuh melalui 10 (sepuluh) tahapan, sebagai berikut:

1. Penilaian Keadaan Saat ini

Penyusunan perencanaan pembangunan, diawali dengan penilaian terhadap kondisi umum Negara atau daerah, mencakup bidang fisik dan sosial ekonomi saat ini (*existing condition*).

2. Penilaian Arah Pembangunan Masa Datang

Kegiatan berikutnya adalah melakukan kajian terhadap arah pembangunan di masa yang akan datang. Kegiatan ini, biasanya dilakukan dengan membuat perkiraan (prediksi) terukur, terhadap beberapa indikator makro pembangunan pada bidang ekonomi, fisik dan tata ruang.

3. Formulasi Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Siklus berikutnya, adalah menyusun formulasi tentang tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan pembangunan, pada dasarnya merupakan gambaran (deskripsi) tentang sasaran akhir yang ingin dicapai melalui kegiatan pembangunan. Sementara sasaran (*objectives*) pembangunan merupakan jabaran lebih konkret, dari tujuan pembangunan tersebut. Sasaran pembangunan biasanya dirumuskan dalam bentuk target pembangunan.

4. Mengkaji Alternatif Strategi Pembangunan

Setelah tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan, langkah berikutnya adalah mengkaji berbagai alternatif strategi yang akan ditempuh, dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tersebut. Strategi pembangunan, pada dasarnya adalah cara dan upaya yang terbaik dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

5. Menetapkan Prioritas Pembangunan

Setelah strategi pembangunan ditetapkan, langkah berikutnya adalah menetapkan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan perlu

dirumuskan secara tajam dan akurat, agar tujuan dan sasaran pembangunan, dapat diupayakan dengan anggaran yang efisien.

6. Merumuskan Kebijakan Pembangunan

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, siklus berikutnya, adalah merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sesuai dengan kondisi umum dan prediksi pembangunan di masa mendatang.

7. Identifikasi Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan, pada dasarnya merupakan tindakan dan upaya yang harus dilakukan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Untuk keperluan monitoring dan evaluasi, ditetapkan sejumlah indikator kinerja, berikut target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan. Penentuan indikator dan target kinerja ini, diperlukan guna memudahkan penyusunan Anggaran Kinerja.

8. Menetapkan Perkiraan Dana Investasi

Setelah program dan kegiatan ditetapkan, siklus pekerjaan perencanaan berikutnya adalah menetapkan perkiraan anggaran/dana investasi yang dibutuhkan. Biasanya kebutuhan anggaran ini, hanya dilakukan secara kasar dalam bentuk pagu dana indikatif.

9. Menetapkan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja sangat penting artinya, guna mengetahui secara konkret, tingkat keberhasilan pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan.

10. Penyusunan Rencana Tindak (*Action Plan*)

Siklus terakhir dan penyusunan perencanaan, adalah menyusun Rencana Tindak (*Action Plan*), yang berisikan berbagai ketentuan operasional dan

cara yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan rencana, khusus program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

G. Ciri-ciri Perencanaan Pembangunan yang Tepat

Perencanaan pembangunan yang memadai, dicirikan dengan 5 (lima) aspek berikut :

1. Tersusun lengkap, inklusif dengan sektor Swasta

Karena perencanaan pembangunan, pada dasarnya merupakan usaha pemerintah untuk mendorong proses pembangunan, banyak kalangan beranggapan, bahwa perencanaan tersebut hanya mencakupi aspek-aspek yang berkaitan langsung dan dibiayai oleh pemerintah saja. Anggapan ini sebenarnya tidaklah tepat, karena perencanaan pembangunan merupakan sebuah perencanaan yang bersifat komprehensif, tidak hanya mencakup sektor pemerintahan, tetapi meliputi sektor swasta, dan masyarakat secara menyeluruh.

2. Memasukkan Evaluasi Faktor Keekonomian Masa Lalu

Pembangunan merupakan proses yang berkelanjutan, artinya keberhasilan pembangunan yang direncanakan, sangat ditentukan oleh hasil pembangunan sebelumnya. Hasil pembangunan, berikut permasalahan dan kendala yang dihadapi, akan dapat diketahui melalui evaluasi- terhadap perekonomian di masa lalu.

3. Merinci Tujuan dan Prioritas Pembangunan

Karena tujuan pembangunan bersifat prinsipil dan sangat mendasar dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat secara keseluruhan, dan bersifat operasional, maka tujuan pembangunan perlu dijabarkan lebih lanjut, dalam bentuk prioritas pembangunan.

4. Menerjemahkan Tujuan ke dalam Target Pembangunan

Perencanaan yang baik, haruslah terarah dan terukur, sehingga sasaran pembangunan menjadi jelas dan dapat dimonitor serta dievaluasi

dikemudian hari, guna mengetahui tingkat capaian yang dihasilkan. Untuk keperluan ini, maka tujuan dan sasaran pembangunan perlu dijabarkan lebih lanjut, ke dalam berbagai target pembangunan. Target tersebut ditentukan secara makro, mencakup aspek perekonomian secara menyeluruh atau sektoral, juga target secara mikro, pada tingkat program dan kegiatan.

5. Strategi dan Kebijakan Bersifat Spesifik

Perencanaan pembangunan yang dipersiapkan dengan baik, biasanya didukung dengan strategi dan kebijakan yang bersifat spesifik, sesuai dengan kondisi, potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh negara dan daerah bersangkutan. Strategi dan kebijakan yang spesifik, akan mendorong proses pembangunan berlangsung lebih baik dan cepat, karena sesuai dengan kondisi dan situasi daerah bersangkutan.

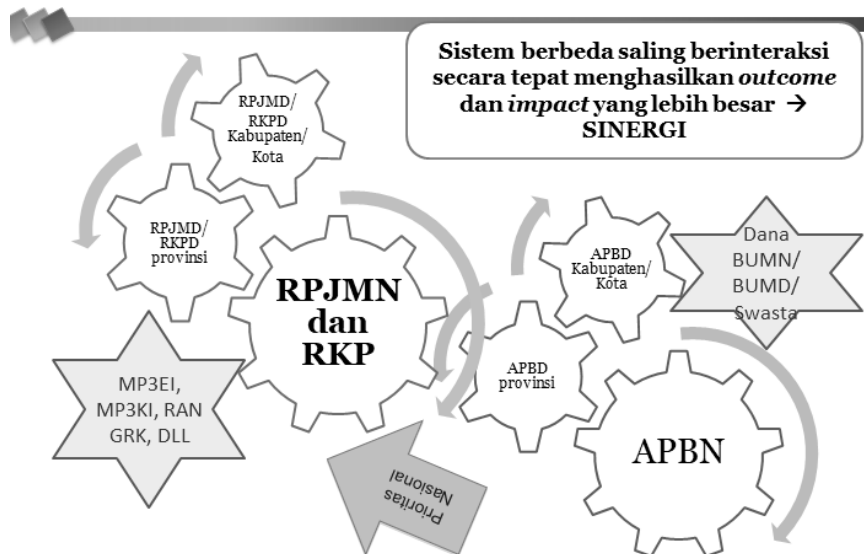
6. Berisikan Perencanaan Kebutuhan Investasi

Perkiraan kebutuhan investasi, biasanya dibagi menjadi kebutuhan investasi pemerintah, dan kebutuhan investasi swasta dan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi anggaran yang ada, perkiraan kebutuhan investasi ini, perlu ditunjang dengan kememadaian anggaran guna rencana tersebut. Dengan cara demikian, akan terdapat keterpaduan antara perencanaan, pemrograman dan anggaran (*planning, program and budgeting*).

7. Memuat Perkiraan atau Proyeksi Selama Periode Perencanaan

Perencanaan yang akurat, bersifat terukur dan memuat sasaran dan target pembangunan secara konkret. Karena itu, perencanaan pembangunan yang dipersiapkan dengan baik, dilengkapi dengan perkiraan (proyeksi) masa datang, yang sekaligus berfungsi sebagai sasaran dan target pembangunan secara kuantitatif. Perkiraan dan proyeksi yang diperlukan, minimal bersifat makro.

8. Memiliki Kaitan yang jelas dengan Perencanaan Pembangunan lainnya Perencanaan yang terpadu dan bersinergi (antar daerah dan tingkatan pemerintahan), memerlukan persiapan yang komprehensif, yang memuat dengan jelas, kaitan atau hubungan antara satu dokumen perencanaan, dengan dokumen perencanaan lainnya. Selain itu, harus tampak adanya korelasi antara RPJM dengan Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun.



Sumber: Bappenas 2013

Gambar 3.2 Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Daerah

H. Perencanaan Wilayah

Perencanaan wilayah adalah rencana penggunaan ruang wilayah, dan rencana aktivitas pada satu ruang wilayah tertentu. Perencanaan ruang wilayah, biasanya dituangkan dalam perencanaan tata ruang wilayah, sedangkan perencanaan aktivitas, umumnya dimuat dalam rencana pembangunan wilayah, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Proses perencanaan wilayah, lazimnya diawali dengan penetapan visi dan

misi wilayah/daerah. Visi adalah cita-cita ideal, tentang masa depan wilayah yang diinginkan. Visi terkadang bersifat abstrak, tetapi intinya menggambarkan kondisi masa depan yang ideal, dan mengedepankan ciri khas wilayah masing-masing, serta berfungsi sebagai pemberi inspirasi dan dorongan dalam perencanaan pembangunan wilayah. Misi, adalah kondisi antara, atau suatu tahapan untuk mencapai visi tersebut. Misi mesti menggambarkan kondisi ideal setingkat di bawah visi, tetapi lebih realistik untuk mencapainya. Proses penyusunan perencanaan wilayah, sebaiknya dimulai setelah tersusunnya rencana tata ruang wilayah, karena tata ruang wilayah berfungsi sebagai landasan, sekaligus sasaran dari perencanaan pembangunan wilayah itu sendiri.

Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak daerah yang belum memiliki rencana tata ruang, sekalipun berdasarkan undang-undang setiap daerah wajib menyusun rencana pembangunan wilayahnya, karena terkait dengan penyusunan anggaran. Apabila tata ruang sudah ada, dan masih berlaku (*existing*), maka penyusunan rencana pembangunan daerah, hendaknya mengacu pada rencana tata ruang tersebut. Mengapa demikian? Hal ini tiada lain mengingat, bahwa rencana pembangunan merupakan rencana kegiatan, yang akan mengisi ruang tersebut.

Dengan memperhatikan rencana ruang wilayah, pelaksanaan pembangunan, diarahkan pada kawasan dan zonasi yang ditetapkan. Dalam hal ini, tata ruang sekaligus berfungsi sebagai rambu tentang apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh dilakukan pada setiap zona ruang wilayah tersebut. Dengan kata lain, tata ruang merupakan panduan utama dalam merencanakan berbagai kegiatan di wilayah tersebut.

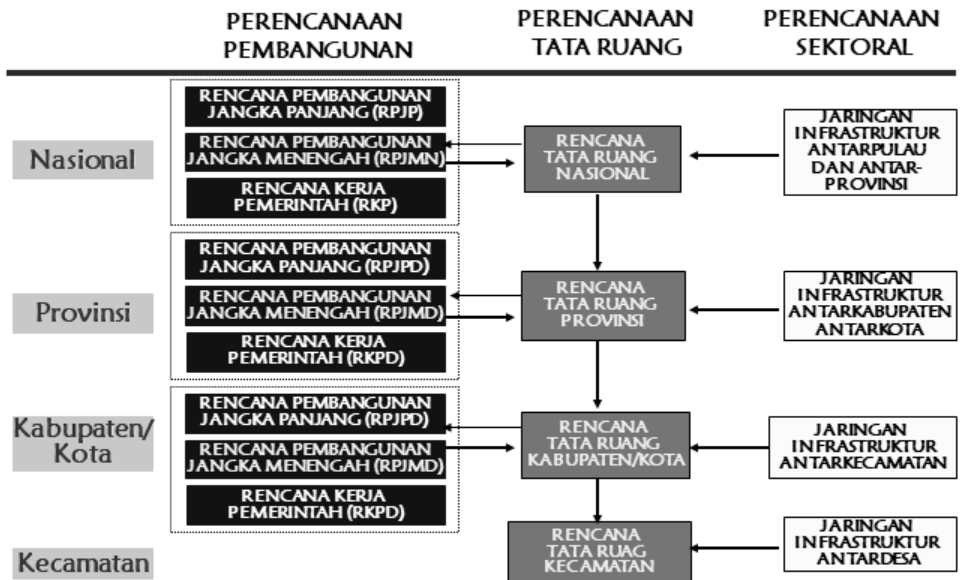
Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan wilayah yang ideal, seyogianya ditempuh dua pendekatan, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Pendekatan sektoral, biasanya cenderung bersifat *less-spatial* (kurang memperhatikan aspek ruang secara keseluruhan), sedangkan pendekatan regional lebih bersifat *spatial*, dan dipandang sebagai jembatan untuk mengaitkan perencanaan pembangunan, dengan rencana tata ruang. Rencana tata ruang, berisikan kondisi ruang/penggunaan lahan saat ini (saat penyusunannya), dan kondisi ruang yang dituju, misalnya dalam 25 tahun yang akan datang. Rencana pembangunan wilayah setingkat RPJM, merencanakan berbagai kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, untuk kemudian dituangkan lagi dalam rencana tahunan, yang telah didukung dengan anggaran. Dengan demikian, RPJM pun semestinya mengacu pada rencana kondisi ruang yang dituju, seperti yang tertera pada tata ruang.

Salah satu tantangan dalam perencanaan wilayah, adalah kuatnya tekanan kepentingan dari para aktor pembangunan non pemerintahan, yang tidak jarang berpotensi memicu konflik. Selain itu, sebagai konsekuensi dari berlakunya mekanisme pasar, kadangkala aktivitas dalam penggunaan ruang, tidak mengarah, atau berkesesuaian dengan yang telah tertuang dalam rencana. Padahal sejatinya, dalam hal ini, pemerintah selain menginginkan terciptanya pengaturan ruang yang baik, di sisi lain bertujuan untuk memaksimalkan benefit yang terkandung dalam mekanisme pasar.

Bertolak dari persoalan krusial tersebut, pemerintah seringkali terpaksa menempuh jalan kompromis. Dalam arti, arah penggunaan ruang yang didasarkan pada mekanisme pasar, biasanya masih dapat ditolerir sepanjang tidak mengganggu keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Untuk

itu, rencana tata ruang terkadang terpaksa “dikorbankan” dalam arti, dilakukan revisi seperlunya, sebelum masa berlakunya berakhir.

Dalam kondisi seperti ini, perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan wilayah, akan terasa lebih rumit, karena dituntut untuk memperhatikan mekanisme pasar secara proporsional. Perencanaan tata ruang adalah perencanaan jangka panjang, sementara tingkah laku pelaku pasar sulit diramalkan, terlebih dalam jangka panjang. Oleh karenanya, sebagai langkah antisipatif, perlu dibuatkan kebijakan yang mengatur tentang hal-hal apa saja dari tata ruang itu yang dapat dikompromikan, versus hal-hal yang tidak dapat dikompromikan. Hal-hal yang tidak dapat dikompromikan, misalnya menyangkut upaya memelihara kelestarian lingkungan hidup (termasuk jalur hijau), penggunaan lahan yang berpotensi menciptakan kekumuhan; atau terjadinya ketidakseimbangan penggunaan lahan di wilayah perkotaan (*spasial gap*). Dalam kasus terakhir, misalnya penggunaan yang terlalu luas untuk mengakomodir salah satu jenis kegiatan tertentu saja, justru seringkali membawa dampak buruk terhadap tata kehidupan lainnya dalam lingkup yang lebih luas.



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015

Gambar 3.3 Perencanaan Pembangunan, Perencanaan Tata Ruang, dan Perencanaan Sektoral



BAB

4

KONSEP DAN TEORI PEMBANGUNAN

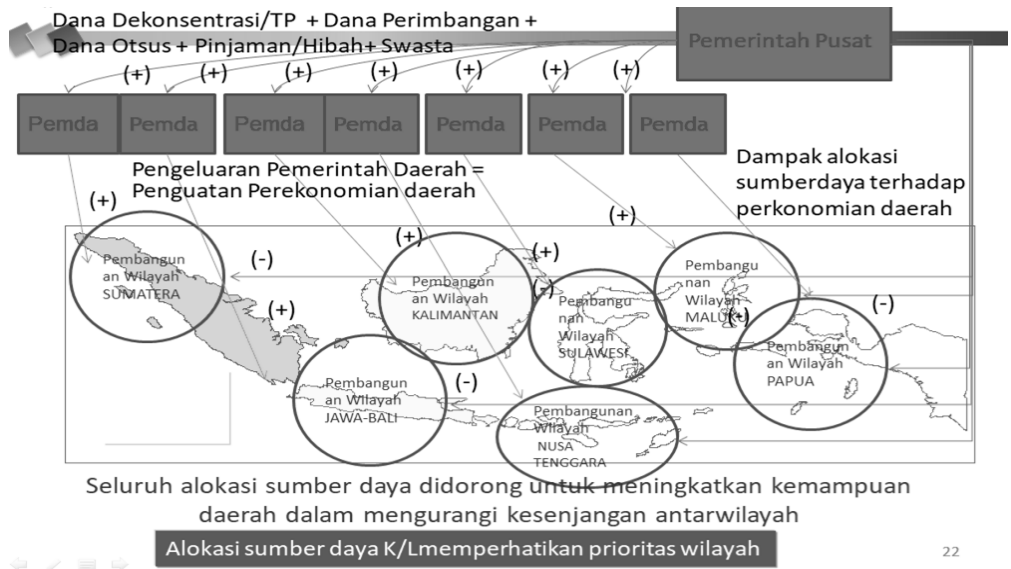
WILAYAH

A. Konsep Pembangunan Wilayah

Pembangunan wilayah, merupakan seluruh usaha yang dilaksanakan dalam menciptakan pembangunan wilayah, yang ditandai dengan terjadinya pemerataan pembangunan pada seluruh bagian wilayah dan sektor. Salah satu tujuan dari pembangunan wilayah, adalah untuk meminimalisasi timbulnya kesenjangan pembangunan dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah (Mahi : 2016). Dengan demikian, pembangunan wilayah pada dasarnya berkaitan dengan upaya memberdayakan *stakeholders* pada suatu wilayah, dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia melalui pemanfaatan teknologi, sebagai upaya mendapatkan nilai tambah (*added value*) atas apa yang dimiliki oleh suatu wilayah administratif, menuju peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam konteks pembangunan wilayah, Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki wilayah ke-empat terluas di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat, bahkan merupakan Negara kepulauan terbesar di atas bumi, dihadapkan dengan tantangan yang sama sekali tidak ringan, khususnya terkait dengan upaya pemerataan pembangunan berikut pemerataan hasilnya. Isu kesenjangan pembangunan dan ketimpangan sosial seolah tak mau lepas dari isu publik yang terus bergulir dari waktu ke waktu. Untuk itu, konsep pembangunan wilayah diharapkan dapat menjadi solusi dalam menyiasati persoalan krusial tersebut, melalui optimalisasi sumber

daya yang tersedia di berbagai peloksook bumi Nusantara ini, sebagaimana pada gambar berikut:



Sumber : Bappenas Tahun 2016

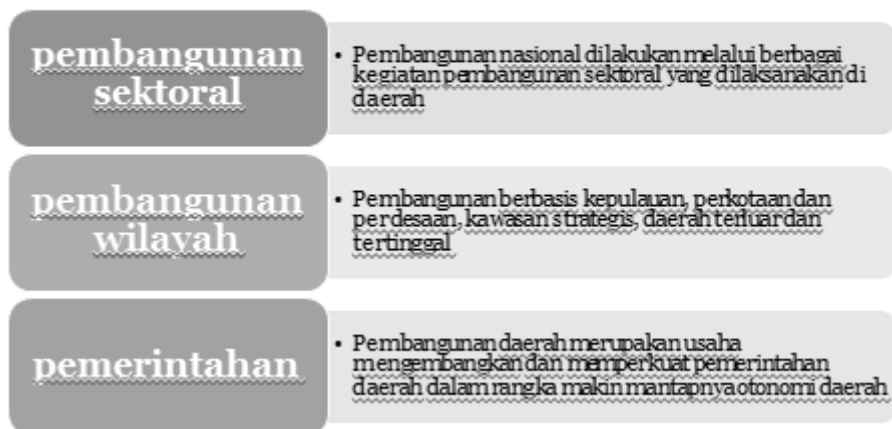
Gambar 4.1 Optimalisasi Alokasi Sumber Daya Wilayah

Dalam prakteknya, pembangunan wilayah di Indonesia menggunakan beragam pendekatan, hal ini tidak lain mengingat beberapa alasan, baik karena pengaruh perkembangan teori, model pembangunan wilayah, tatanan sosial ekonomi, sistem pemerintahan, maupun paradigma administrasi pembangunan yang berlaku. Menurut Dirjen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum RI (dalam Mahi : 2016), prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan wilayah meliputi :

1. Membangun *growth center* - Pembangunan wilayah tidak hanya bersifat internal wilayah, tetapi harus diperhatikan pula pengaruh pertumbuhan (*spread effect*) yang timbul terhadap wilayah sekitarnya, bahkan secara nasional.

2. Kerjasama - Pembangunan wilayah memerlukan upaya kerja sama antar daerah dan hal itu menjadi persyaratan utama bagi keberhasilan pembangunan wilayah.
3. Integral - Pola pembangunan wilayah bersifat integral yang merupakan integrasi dari daerah-daerah yang tercakup dalam wilayah, melalui pendekatan kesetaraan.
4. Mekanisme pasar. Dalam pembangunan wilayah, mekanisme pasar merupakan pula prasyarat bagi perencanaan pengembangan suatu kawasan.

Pembangunan daerah merupakan sinergi dari 3 elemen pembangunan, yaitu :



Sumber: Bappenas tahun 2016

Gambar 4.2. Pembangunan Daerah sebagai Penjabaran Pembangunan Nasional

B. Teori -Teori Pembangunan Wilayah

Secara garis besar, teori pembangunan wilayah di bagi atas 4 (empat) kelompok yaitu: *Pertama* merupakan teori yang memberi penekanan pada kemakmuran wilayah (*local prosperity*). *Kedua*, menekankan pada sumber daya lingkungan dan faktor alam, yang diyakini sangat mempengaruhi keberlanjutan kegiatan sistem produksi pada suatu daerah (*sustainable production activity*). Kelompok ini, sering disebut sebagai yang sangat

peduli terhadap pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). *Ketiga*, memberikan perhatian pada kelembagaan dan proses pengambilan keputusan di tingkat lokal, sehingga kajiannya terfokus pada *governance* yang bertanggung jawab (*resposnsible*), dan berkinerja baik (*good*). *Keempat*, perhatiannya tertuju pada kesejahteraan masyarakat yang tinggal di suatu lokasi (*people prosperity*). Berikut ini merupakan ulasan ringkas, dari beberapa teori pembangunan menurut para ahli.

1. Teori ‘Inter’ dan ‘Intra’ Wilayah Mirdal (1950)

Teori ini mengaitkan pembangunan dengan dampaknya, yaitu “*backwash effects*” dan “*spread effects*”. Contoh *backwash effects* adalah, makin bertambahnya permintaan dari masyarakat wilayah kaya atas hasil-hasil produksi masyarakat miskin, berupa bahan makanan pokok, seperti beras yang merupakan hasil pertanian masyarakat wilayah miskin. Sementara contoh *spread effects*, berupa gejala makin menurunnya mutu produksi pertanian yang dihasilkan masyarakat miskin, karena terdampak polusi aktivitas industri pada wilayah masyarakat kaya.

2. Teori *Trickle down Effect* Hirschman (1950)

Trickle down effects adalah istilah yang berkaitan dengan perkembangan, atau meluasnya pembagian pendapatan hasil pembangunan. Teori “*trickle down effects*” yang diterapkan pada banyak negara berkembang, sejauh ini dinilai tidak berhasil memecahkan masalah pengangguran, pengurangan angka kemiskinan dan pemerataan pendapatan, baik secara internal atau pada negara berkembang itu sendiri, maupun dalam konteks perolehan *out put* kerjasama ekonomi, antara negara maju dengan negara berkembang. Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi dalam kerjasama antara Indonesia (wilayah miskin) dengan Jepang (wilayah kaya). Indonesia dalam hal ini, merupakan

salah satu pemasok bahan baku untuk mendukung kegiatan industri di Jepang. Hasil kerjasama ekonomi ini, kenyataannya hanya menguntungkan perekonomian Jepang saja (semakin kaya) sementara Indonesia semakin miskin. Dalam hal ini kerjasama yang dijalin, tidak berhasil menekan tingkat kemiskinan di Indonesia, sehingga tetap lebih tinggi, daripada tingkat kemiskinan di Jepang.

3. Teori Tempat Sentral Walter Christaller (1933)

Pada tahun 1933, Walter Christaller memusatkan perhatiannya terhadap karakteristik penyebaran pemukiman, antara yang terjadi di perdesaan dengan di perkotaan, yang ternyata memperlihatkan kondisi yang berbeda. Penyebaran permukiman tersebut kadang-kadang terjadi secara bergerombol atau berkelompok, dan kadang-kadang terpisah-pisah, serta berjarak jauh satu sama lainnya. Atas dasar lokasi dan pola penyebaran pemukiman dalam ruang, ia mengemukakan teori yang disebut *Central Place Theory* (Nursid Sumaatmadja, 1981). Model ini dikembangkan untuk suatu wilayah abstrak, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- Wilayahnya terdiri dari daratan, serta semua datar dan sama.
- Gerakan dapat dilaksanakan ke segala arah.
- Penduduk memiliki daya beli yang sama, dan tersebar secara merata pada seluruh wilayah.
- Konsumen bertindak rasional, sesuai dengan prinsip minimalisasi jarak/biaya.

4. Teori Lokasi Pendekatan Pasar (Losch)

Teori ini melihat persoalan dari sisi permintaan pasar (*demand*). Lokasi penjual dipandang sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen. Makin jauh dari pasar, konsumen semakin enggan bertransaksi, karena biaya transportasi yang tinggi, sehingga berpengaruh pada jumlah konsumen.

5. Teori *Polarization Effect* - Hirschman

Teori ini memandang, bahwa pembangunan pada suatu wilayah, tidak terjadi secara bersamaan. Dalam banyak hal, pembangunan yang dilaksanakan pada sebuah wilayah, akan mendorong terjadinya polarisasi pada perkembangan wilayah tersebut, yang kemudian akan memberikan efek terhadap wilayah lainnya. Dengan kata lain dan dalam artian yang positif bahwa perkembangan pembangunan pada suatu wilayah, akan memicu wilayah di sekitarnya untuk turut berkembang pula.

6. Teori Pusat Pembangunan (Friedman)

Teori ini lebih menekankan pada pembentukan hirarki, yang bertujuan untuk mempermudah pengembangan sistem pembangunan yang dijalankan. Hal ini bertolak dari asumsi, bahwa adanya pusat pertumbuhan pada suatu wilayah, akan lebih memudahkan atau lebih memperlancar proses pembangunan, dan pembangunan tersebut akan berjalan sesuai dengan rencana.

7. Teori Pembangunan Ir. Sutami (1970)

Ir. Sutami merupakan seorang teknokrat yang sangat dihormati, karena pemikiran-pemikirannya yang visioner tentang pembangunan wilayah. Beliau berpendapat, bahwa pembangunan infrastruktur yang intensif untuk mendukung pemanfaatan potensi sumber daya alam, akan mampu mempercepat pembangunan wilayah. Era transisi memberikan kontribusi lahirnya konsep hirarki kota-kota, dan hirarki prasarana jalan melalui orde kota. Pembangunan wilayah tergantung dari sumber daya alam yang terdapat di daerah tersebut, karena pada umumnya wilayah dengan pusat industri, akan menarik masyarakat untuk datang ke sana, mengingat potensi lapangan pekerjaan yang terbuka luas.

Beberapa contoh yang terjadi di Indonesia antara lain, pembangunan infrastruktur industri pertambangan nikel oleh PT. Inco di Sorowako, yang membuat daerah Sorowako yang sebelumnya terpencil, berubah menjadi kota industri (kota yang tercipta karena adanya industri). Contoh lainnya, adalah Kabupaten Asiki di Provinsi Papua, yang kemudian berkembang karena adanya industri tripleks di daerah tersebut (PT. Korindo).

8. Teori Kutub Pembangunan Perroux (1955)

Teori ini dikemukakan oleh Perroux (1955) atas dasar pengamatan yang seksama terhadap proses pembangunan pada berbagai negara. Perroux mengakui kenyataan, bahwa pembangunan tidak terjadi dimana-mana secara serentak atau simultan, tetapi muncul di tempat-tempat tertentu dengan intensitas yang berbeda-beda. Tempat-tempat itulah yang dinamakan titik-titik dan kutub-kutub pembangunan. Dari titik-titik dan kutub-kutub pembangunan itu, pembangunan akan terus menyebar melalui berbagai saluran, dan akan membawa akibat akhir yang berlainan terhadap perekonomian secara keseluruhan.

A. Pusat Pembangunan

Ide awal tentang pusat pembangunan dikemukakan oleh Francois Perroux, seorang ekonom bangsa Perancis, pada tahun 1955. Gagasannya muncul sebagai reaksi terhadap pandangan para ekonom kala itu yang berkeyakinan, bahwa transfer pembangunan antar wilayah secara umum berjalan dengan lancar, sehingga perkembangan penduduk, produksi dan *capital* selalu proporsional antar waktu. Akan tetapi fakta menunjukkan, bahwa kondisi umum transfer pembangunan ekonomi antar daerah tidaklah demikian, namun cenderung terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu, terutama daerah yang memiliki keuntungan-keuntungan lokasi (Sjafrizal, 2008). Pakar lainnya, Richardson (1978) mendefinisikan pusat pembangunan, dalam pernyataannya sebagai berikut:

"A growth pole was defined as a set of industries capable of generating dynamic growth in the economy, and strongly interrelated to each other via input-output linkages around a leading industry (Propulsive Industry)".

Definisi ini, memperlihatkan empat karakteristik utama sebuah pusat pembangunan, yaitu: (a) Adanya sekelompok kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi pada suatu lokasi tertentu; (b) Konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut, mampu mendorong pembangunan ekonomi yang dinamis dalam perekonomian; (c) Kuatnya keterkaitan *input* dan *output*, antar sesama kegiatan ekonomi pada pusat pembangunan, dan (d) Dalam kelompok kegiatan ekonomi tersebut, terdapat sebuah industri induk, yang mendorong pengembangan kegiatan ekonomi pada pusat tersebut (Sjafrizal, 2008).

Menurut Samsudin (2003) pengembangan pusat-pusat pembangunan baru pada suatu wilayah, akan mendatangkan beberapa keuntungan, berupa:

1. Pendapatan daerah secara keseluruhan akan meningkat secara merata. Hal ini sejalan dengan pemikiran Richardson, bahwa pendapatan di daerah pembangunan akan meningkat secara maksimal, apabila pembangunan dipusatkan di pusat-pusat pembangunan, daripada pembangunan itu dipencar-pencar secara terpisah di beberapa daerah.
2. Penyediaan prasarana dan perumahan, lebih mudah dan murah apabila dipusatkan pada titik-titik pembangunan, daripada terpencar-pencar.
3. Titik pembangunan baru dapat menampung tenaga kerja, sehingga persoalan pengangguran di pusat utama, maupun daerah sekitarnya dapat turut tertanggulangi.
4. Titik-titik pembangunan, dapat berfungsi sebagai pembendung arus pendatang ke pusat utama, karena umumnya faktor pendorong arus migrasi adalah rendahnya tingkat kehidupan. Dengan demikian arus migrasi ke pusat utama dapat dibendung pada titik ini.
5. Konsentrasi penduduk tidak hanya di pusat utama saja, sehingga beban kota utama dalam penyediaan fasilitas dan lapangan kerja, dapat dikurangi.

Pelaksanaan pembangunan daerah melalui pusat-pusat pembangunan, efeknya akan menyebar ke beberapa pusat pembangunan lainnya, sesuai dengan hirarki dan fungsinya. Menurut Friedman (dalam Harahap :2009) pusat pembangunan pada skala regional, dapat dikelompokkan ke dalam tiga orde, yaitu:

1. Pusat Pembangunan Primer (Utama)

Pusat pertumbuhan primer, atau pusat utama orde satu, adalah pusat utama dari keseluruhan daerah, yang dapat merangsang pusat pembangunan

lain, yang lebih bawah tingkatannya. Biasanya pusat pembangunan orde satu ini, dihubungkan dengan tempat pemusatan penduduk terbesar, kelengkapan fasilitas, potensi aksesibilitas terbaik, dan memiliki daerah belakang terluas, serta lebih bersifat multi fungsi dibandingkan dengan pusat-pusat lainnya.

2. Pusat Pembangunan Sekunder (Kedua)

Pusat pembangunan sekunder, adalah pusat dari sub daerah, yang seringkali diciptakan untuk mengembangkan sub-daerah yang jauh dari pusat utamanya. Perlambatan perkembangan pembangunan akibat tidak terjangkau oleh pusat utama, dapat dikembangkan oleh pusat pertumbuhan sekunder ini.

3. Pusat Pembangunan Tersier (Ketiga)

Pusat pembangunan tersier, merupakan titik pembangunan bagi daerah yang berada dalam pengaruh pusat pembangunan tersebut. Pusat tersier ini, berfungsi menumbuhkan dan memelihara kedinamisan dengan daerah-daerah sekitar (yang dipengaruhinya). Pusat pembangunan, secara geografis merupakan suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan (berdasarkan lingkup pengaruh ekonomi), sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*). Selain itu, pusat pembangunan memiliki daerah belakang yang menjadi daya tarik bagi para pelaku usaha untuk memilih lokasi di tempat itu, pada pihak lain masyarakat pun akan turut tertarik untuk menikmati atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia di wilayah tersebut.

Secara fungsional, pusat pembangunan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur kedinamisan, sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi, baik ke dalam maupun ke luar (daerah belakangnya). Pusat pembangunan, secara geografis merupakan suatu lokasi yang memiliki banyak sarana dan prasarana/fasilitas dan kemudahan, berdasarkan lingkup

pengaruh ekonomi yang bisa menjadi pusat daya tarik bagi masing-masing daerah yang memiliki daerah belakang. Hal ini menjadi pendorong tumbuh-kembangnya berbagai bidang usaha di tempat tersebut, dan masyarakat pun biasanya turut senang, karena dapat memanfaatkan sarana dan prasarana/fasilitas yang disediakan di sana. Secara fungsional, pusat pembangunan merupakan suatu lokasi terpusat, suatu kelompok usaha, atau industri yang sifat hubungannya dinamis (bergerak), dan dapat memberi stimulus/respon terhadap kehidupan ekonomi, baik ke dalam maupun ke luar daerah belakangnya.

Menurut Tarigan (2004), pusat pembangunan memiliki 4 (empat) ciri atau karakteristik utama, yaitu:

1). Adanya Hubungan Internal dari Berbagai Macam Kegiatan

Hubungan internal sangat menentukan dinamika sebuah kota, dan memiliki keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya, sehingga apabila ada satu sektor tumbuh, akan mendorong pada perluasan pembangunan sektor lainnya. Kekuatan hubungan internal, sangat berpengaruh terhadap dinamisasi sebuah kota. Di samping itu, dengan adanya hubungan antara satu sektor dengan sektor lainnya, maka jika sebuah sektor mengalami kemajuan atau berkembang, maka sektor lain pun akan ikut maju dan berkembang pula.

2). Adanya Efek Pengganda (*Multiplier Effect*)

Keberadaan sejumlah sektor yang saling terkait, dan saling mendukung akan menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*). Unsur efek pengganda tersebut sangat berperan bagi sebuah kota dalam memacu pembangunan daerah belakangnya. Dengan meningkatnya kegiatan berbagai sektor di kota, maka kebutuhan kota tersebut terhadap bahan baku/tenaga kerja, yang dipasok dari daerah belakangnya, akan meningkat pula.

3). Adanya Konsentrasi Geografis

Konsentrasi berbagai sektor atau fasilitas, selain bisa menciptakan efisiensi di antara sektor-sektor yang saling membutuhkan, juga akan meningkatkan daya tarik kota tersebut. Orang yang datang ke kota tersebut bisa mendapatkan berbagai kebutuhan pada lokasi yang berdekatan, sehingga dapat meningkatkan *economic of scale*.

4). Bersifat Mendorong Daerah Belakangnya

Hal ini mengisyaratkan, bahwa antara kota dengan daerah belakangnya, memiliki hubungan yang harmonis. Di satu pihak, kota membutuhkan bahan baku yang dipasok dari daerah belakangnya, pada pihak lain, kota pun menyediakan berbagai kebutuhan bagi daerah belakangnya untuk dapat mengembangkan diri. Pusat pembangunan merupakan pusat inovasi yang sifatnya *propulsive*, yang terdiri atas titik-titik pembangunan yang berada pada daerah pusat pembangunan tersebut.

Terjalannya hubungan yang harmonis antara kota dengan daerah belakangnya, merupakan hal yang positif, karena di saat kota membutuhkan bahan baku, daerah belakangnya akan menyediakan kebutuhan tersebut, sehingga mereka dapat mengembangkan diri. Pusat pembangunan merupakan pusat perubahan/inovasi yang bersifat mendorong, dan terdiri dari titik-titik pertumbuhan yang terdapat pada daerah pusat pertumbuhan (Kuklinski Ed., 1972).

Dalam pandangan Rondinelli dan Ruddle (1976), sebuah pusat pembangunan seyogianya memiliki peran dan fungsi sebagai :

- a. Pusat aktivitas sosial dan ekonomi, yang dapat menyebarkan keuntungan ekonomis, dan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat sekitarnya.

- b. Pusat pengorganisasian ekonomi, yang menyediakan, menjual, dan melayani kebutuhan wilayah belakangnya, serta memberikan peluang tumbuhnya keanekaragaman tenaga kerja.
- c. Pusat inovasi, kreativitas, dan *entrepreneur* yang memiliki predikat baik, dan menjadi teladan bagi lingkungannya.
- d. Penyedia modal dari pengembalian investasi sebelumnya, dalam rangka menciptakan keunggulan komparatif dan peluang pembangunan di masa depan.
- e. Pusat investasi fasilitas umum dan infrastruktur, yang mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi baru, dan memberi peluang bagi perluasan fasilitas jasa sosial ekonomi.
- f. Konsentrasi pelayanan sosial dan ekonomi yang mampu meningkatkan aksesibilitas ke pusat pembangunan, serta menarik aktivitas jasa dan ekonomi baru.
- g. Pusat kegiatan ekonomi dan penempatan jasa, fasilitas umum serta infrastruktur yang mampu menciptakan interaksi dan efek komplementer, sekaligus menjadi pasar baru bagi produk bahan baku, dan barang setengah jadi.

Menurut Friedmann (1979), dengan ditetapkannya peran suatu kota menjadi pusat pembangunan, diharapkan kota tersebut dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan pada wilayah-wilayah yang berada dalam pengaruhnya. Untuk itu, sebuah pusat pembangunan seyogianya dapat :

- Mengkoordinasikan kemajuan daerah melalui sebuah sistem,serta memperhatikan daerah pendukung bidang prasarana, dan pelayanan administratif.
- Membawa semangat pembaharuan bagi daerah yang dipengaruhinya.

Konsep pusat pembangunan yang dilandasi dengan konsep ruang ekonomi (*economic space*), dikemukakan pula oleh Francois Perroux. Teorinya tentang pusat pembangunan, menjadi dasar strategi kebijaksanaan pembangunan industri di daerah, dan telah banyak diterapkan di berbagai negara dewasa ini. Perroux mengatakan, bahwa pembangunan tidak terjadi pada keseluruhan tata ruang, akan tetapi akan terbatas pada beberapa tempat tertentu, dengan variabel-variabel yang berbeda intensitasnya. Menurutnya, tata ruang merupakan sebuah arenekuatan yang di dalamnya terdapat kutub-kutub pembangunan (Perroux dalam Tarigan, 2004).

Selain Perroux, para ahli seperti Myrdal (1957), Hirschman (1958), dan Boudville (1966) juga mengemukakan beberapa konsep tentang pusat pembangunan. Menurut Myrdal (dalam Mutaali, 2003), pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah tertentu, bergantung pada lokasi dari sumber daya alam dan keuntungan-keuntungan faktor lokasi lainnya. Pembangunan ini akan menyebar pada daerah belakangnya, melalui efek kumulatif berupa efek sebar (*spread effect*), dan efek serap (*backwash effect*).

B. Perkembangan Pusat Pembangunan

Cepat atau lambatnya perkembangan pusat pembangunan wilayah, dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya faktor-faktor di bawah ini :

1. Mobilitas

Istilah mobilitas berasal dari kata *mobilis*, yang berarti mudah melakukan pergerakan, atau mudah untuk dipindahkan. Secara lebih luas, mobilitas dapat diartikan juga, sebagai perubahan pergerakan manusia, yang berpindah dari satu tempat, ke tempat lainnya. Mobilitas ini, akan berevolusi menjadi mobilitas sosial (*social mobility*), artinya suatu pergerakan dalam struktur sosial, yaitu pola tertentu yang mengatur organisasi dalam suatu kelompok sosial.

Mobilitas sosial, terjadi pada masyarakat yang pergerakannya relatif berbeda, antara satu kelompok masyarakat atau organisasi tertentu, dengan masyarakat atau organisasi lainnya, sesuai dengan sistem yang dianut oleh masyarakat itu dalam kehidupan sosialnya.

2. Pendapatan per Kapita

Income atau Pendapatan per Kapita (PpK), adalah besaran pendapatan rata-rata penduduk suatu negara, yang dihitung dengan cara membagi jumlah pendapatan nasional negara tersebut, dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.

3. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam, adalah sesuatu yang dimiliki oleh alam/bumi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan, dan kepentingan hidup manusia, agar hidup sejahtera, yang didapatkan dari lingkungan hidup di sekitarnya. Contoh sumber daya alam, adalah air dan barang tambang yang ada di dalam tanah, tumbuhan dan hewan yang berada di atasnya, atau sinar matahari

4. Sarana-Prasarana

Kata sarana dan prasarana selalu muncul berbarengan, yang secara umum diartikan sebagai bagian dari perlengkapan kerja dan fasilitas, dan berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, juga dalam rangka mendukung kepentingan yang berhubungan dengan organisasi kerja.

5. Infrastruktur

Infrastruktur adalah semua jenis fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat umum, untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, infrastruktur adalah

semua fasilitas, baik fisik maupun non fisik yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh perorangan, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pada suatu lingkup sosial dan ekonomi seperti: moda transportasi, distribusi barang & jasa, dan sejenisnya.

6. Moda Transportasi

Moda transportasi merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Moda yang biasanya digunakan dalam transportasi dapat dikelompokkan atas moda yang berjalan di darat, berlayar di perairan laut dan pedalaman, serta moda yang terbang di udara. Moda angkutan darat masih bisa dikelompokkan menjadi moda jalan, moda kereta api dan moda pipa.

Model transportasi adalah suatu cara/metode yang digunakan dalam menentukan sebuah lokasi yang ditetapkan sebagai titik penentu pengiriman dan permintaan, atau sebagai sumber penawaran dan tujuan, dengan maksud meminimumkan biaya transportasi dan biaya produksi. Sumbernya dapat berupa pabrik, gudang, atau kantor perwakilan yang menunjukkan asal barang yang dikirimkan, sedangkan tujuannya adalah beberapa tempat yang menerima barang.

C. Kepadatan Penduduk sebagai Pendorong Pembangunan

Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan atau wilayahnya. Secara umum, tingkat kepadatan penduduk menggambarkan banyaknya penduduk dengan luas daerahnya berdasarkan satuan luas tertentu. Tingkat kerapatan penduduk pada suatu wilayah, merupakan salah satu faktor pendorong berkembangnya sebuah wilayah, baik secara administratif maupun fungsional dalam proses perubahan dari status

atau kategori sebelumnya, menuju status atau kategori wilayah yang lebih meningkat atau lebih tinggi levelnya. Contohnya, yang semula berstatus daerah belakang, menjadi wilayah pusat pertumbuhan. Kepadatan penduduk pada suatu daerah atau wilayah, dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu:

1. Kepadatan Penduduk berdasarkan Lahan Pertanian

Kepadatan penduduk berdasarkan lahan pertanian dibagi menjadi dua, yaitu kepadatan penduduk agraris dan kepadatan fisiologis. Kepadatan penduduk agraris adalah, perbandingan antara jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani dengan luas lahan pertanian. Istilah lain untuk kepadatan penduduk agraris ialah kepadatan penduduk netto. Sedangkan kepadatan penduduk fisiologis, merupakan perbandingan jumlah penduduk total, baik yang bekerja di sektor pertanian maupun pada sektor lain, dengan luas lahan pertanian di wilayah tersebut.

2. Kepadatan Penduduk Umum (Aritmatik)

Kepadatan penduduk umum atau kepadatan aritmatik, adalah jumlah penduduk rata-rata yang menempati wilayah per kilometer persegi. Kepadatan penduduk aritmatik, merupakan perbandingan antara jumlah penduduk secara keseluruhan (total) tanpa memandang mata pencaharian (profesi) dan luas wilayah, artinya wilayah pertanian ataupun non pertanian.

3. Kepadatan Penduduk Ekonomi

Kepadatan penduduk ekonomi adalah jumlah penduduk pada suatu wilayah berdasarkan kemampuan ekonomi wilayah tersebut.

D. Pertimbangan Kondisi Fisik Wilayah dalam Konsep Pembangunan

Sesungguhnya bumi yang sekarang kita pijak ini memiliki keragaman bentuk, baik pada wilayah daratan maupun di lautan. Keberagaman fisik wilayah ini tentu akan berimplikasi pada aktivitas penduduk yang ada di dalamnya.

Bagaimana lingkungan yang beragam ini, dapat dimanfaatkan oleh para penduduknya akan bergantung pada kondisi lingkungan dan kualitas sumber daya manusianya. Selanjutnya, yang dimaksudkan dengan keberagaman bentuk kondisi fisik bumi/wilayah dapat dijelaskan di bawah ini:

1. Dataran Tinggi

Adalah daerah atau wilayah yang memiliki ketinggian antara 700-800 meter di atas permukaan laut. Ciri utama wilayah ini adalah beriklim relatif sejuk. Aktivitas penduduk di kawasan dataran tinggi, umumnya lebih dominan pada bidang pertanian lahan kering, seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan tanaman hias.

2. Pegunungan

Merupakan daerah atau wilayah yang memiliki ketinggian lebih 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini, secara fisik dicirikan dengan tampilan permukaan tanah yang lebih menonjol, bahkan menjulang lebih tinggi daripada daerah disekitarnya. Perbedaan lainnya adalah pada cadangan air. Di wilayah pegunungan, cadangan airnya relatif sedikit dengan topografi yang bergelombang. Wilayah pegunungan, umumnya selain dimanfaatkan sebagai area perhutanan, juga dimanfaatkan sebagai wilayah perkebunan, misalnya perkebunan kina, karet, atau teh. Penduduk yang bermukim di wilayah perkebunan biasanya berprofesi sebagai buruh kebun.

3. Dataran Rendah

Adalah daerah/wilayah, yang memiliki ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Kondisi daerah ini relatif datar, dengan ketersediaan air yang cukup. Aktivitas penduduk di wilayah dataran rendah biasanya lebih beragam, mulai dari pertanian, perikanan, pertambangan, hingga industri, perdagangan dan jasa-jasa.

Bidang pertanian, perkebunan dan perikanan tentunya baru akan bisa dikembangkan apabila tersedia sumber air yang cukup, dan iklim yang mendukung pertumbuhan tanaman dataran rendah. Selain itu, aktivitas di bidang industri dan jasa di daerah dataran rendah, lebih berkembang karena tersedianya sarana dan prasarana/infrastruktur yang memadai, seperti alat transportasi, pusat perbelanjaan, pusat pendidikan dan faktor pendukung lainnya.

4. Pantai

Merupakan daerah atau wilayah yang berada dipesisir pantai atau sepanjang tepian pantai. Umumnya penduduk yang berada di wilayah pantai berprofesi sebagai nelayan. Namun, hal ini tidak berlaku untuk semua pantai. Kondisi pantai ideal yang bisa digunakan nelayan, adalah pantai yang landai. Karena pada pantai yang landai, biasanya gelombang lautnya tidak terlalu besar, sehingga bisa dibangun dermaga untuk tempat berlabuh kapal–kapal motor atau perahu nelayan. Sementara pada wilayah pantai yang curam dan terjal, penduduk biasanya mencari mata pencaharian lain sebagai petani, atau pencari sarang burung Walet.

Kondisi geografis sebuah wilayah, selain berimplikasi pada aktivitas penduduk, juga terhadap jenis moda transportasi yang digunakan. Pada wilayah dataran tinggi, biaya transportasi cenderung mahal karena medan yang sulit, berbukit-bukit, disertai tanjakan yang berkelok–kelok, sehingga lebih memboroskan bahan bakar yang digunakan. Bahkan, jika medan terlalu sulit untuk ditempuh, penduduk terpaksa tidak menggunakan jalur daratan, dan menggunakan transportasi udara untuk menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya. Berbeda dengan dataran rendah, dikarenakan kondisi geografinya yang cenderung stabil, maka biaya transportasinya pun lebih

mudah daripada di dataran tinggi. Selain itu, tersedia bermacam–macam pilihan moda transportasi, mulai dari kendaraan pribadi, kereta api, atau bus. Kondisi geografis Indonesia, yang terdiri dari ribuan pulau dan dihubungkan oleh laut, menjadi kendala tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan moda transportasinya. Transportasi yang bisa digunakan pun, terbatas pada kapal laut atau pesawat terbang. Karena kondisi geografis inilah, Indonesia memiliki perbedaan dalam penggunaan moda transportasi, sebagaimana tergambar di bawah ini:

a. Pulau Jawa

Moda transportasi di Pulau Jawa, relatif lebih berkembang daripada di daerah lainnya. Berbagai alternatif moda transportasi sudah tersedia, mulai dari moda angkutan darat yang didukung dengan kememadaiannya jalan raya, jalan *by pass*/lintas dan jalan tol, serta kereta api, hingga moda transportasi udara, bahkan beberapa kota besar di pulau Jawa sudah memiliki bandar udara sendiri.

b. Pulau Sumatera

Kondisi geografis Pulau Sumatera agak berbeda dengan pulau lainnya. Pada wilayah bagian Timur, yang umumnya berawa–rawa dan dilintasi oleh beberapa sungai yang lebar dan panjang, dikembangkan transportasi air seperti sampan, dan perahu. Sedangkan untuk transportasi antar pulau kecil, digunakan *speedboat*, sementara untuk bagian wilayah lainnya, dikembangkan moda transportasi yang hampir sama seperti halnya di pulau Jawa.

c. Pulau Kalimantan

Kondisi fisik wilayah Kalimantan dicirikan dengan banyak sungai besar dan panjang, sehingga lebih banyak dikembangkan moda transportasi sungai, seperti perahu dan sampan. Sementara moda transportasi darat, belum berkembang dengan baik. Pada pihak lain

kondisi geografis Pulau Kalimantan yang memiliki banyak pulau kecil, maka moda transportasi utama yang sering digunakan adalah moda angkutan laut berupa kapal atau *ferry*.

E. Perkembangan Sektor Industri sebagai Indikator Pembangunan

Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, mendefinisikan industri sebagai kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi, menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Sektor industri termasuk dalam cabang kegiatan ekonomi yang strategis, karena dinilai potensial menghasilkan efek berganda (*multiplier effect*) sehingga dijadikan prioritas pembangunan pada negara-negara yang sedang berkembang.

Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, karenanya kita dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengolah kekayaan tersebut, sebagai modal utama dalam membangun bangsa besar ini, hingga mampu berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah terlebih dahulu mencapai kemajuan. Hal terpenting yang mesti diwaspadai, adalah jangan sampai anugerah alam yang berlimpah tersebut, dieksploitasi habis-habisan oleh pihak asing, sementara kita hanya menjadi sebatas konsumennya saja, bahkan lebih buruk lagi hanya mampu menjadi penonton di negeri sendiri. Karenanya perlu dibangun generasi yang cerdas yang siap mengolah kekayaan negeri ini secara cerdas, visioner namun bijak, sehingga mampu membawa Indonesia sebagai 6 (enam) besar negara termaju di dunia, kelak pada tahun 2040 mendatang, sebagaimana yang dicanangkan dalam *Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI tahun 2010)*.

F. Faktor Sosial Budaya Masyarakat sebagai Modal Pembangunan

Indonesia adalah negara kepulauan yang dihuni oleh beraneka ragam penduduk yang berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda, dengan latar budaya dan ciri khas masing-masing. Terbentuknya keragaman sosial budaya ini merupakan hasil interaksi antara manusia dengan faktor-faktor lingkungan eksternalnya, yang dapat dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu:

1. Suku Bangsa

Menurut Koentjaraningrat (1968), suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan jati diri mereka akan kesatuan dari kebudayaan mereka yang tidak ditentukan oleh orang yang berada di luar sistem kebudayaan mereka. Berdasarkan sejarahnya, penduduk Indonesia berasal dari keturunan rumpun bangsa Mongolid, Melanesia dan Negroid. Penduduk yang berasal dari keturunan rumpun bangsa Mongoloid, tersebar di wilayah Indonesia bagian Barat, dan yang berasal dari keturunan bangsa Melanesia dan Negroid tinggal di wilayah Timur.

Keadaan dan karakteristik lingkungan alamnya yang berbeda-beda, menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang sangat beragam, dengan berbagai adat istiadat dan corak budayanya yang unik. Tidak kurang dari 250 suku bangsa yang hidup di Indonesia dan beberapa di antaranya memiliki jumlah cukup besar, yaitu suku Jawa (45%), Sunda (14%), Madura (8%), dan Batak (7%). Keanekaragaman suku bangsa tersebut, menghasilkan kekayaan peradaban dan budaya yang tinggi yang dapat kita lihat dari berbagai peninggalan-budaya yang terkenal antara lain berupa arsitektur bangunan, bahasa daerah, busana tradisional, seni sastra, seni tari dan pertunjukan, upacara adat, serta sekian banyak cabang kebudayaan lainnya.

2. Penduduk

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia dengan jumlah kurang lebih 269,6 juta jiwa (BPS, 2020). Dengan jumlah tersebut menempatkan Indonesia pada posisi ke-empat setelah Amerika Serikat di posisi ke-tiga, India pada posisi ke-2 dan China di urutan pertama, dengan jumlah penduduk sebanyak 1,43 miliar jiwa atau hampir 20% populasi manusia di dunia. Salah satu permasalahan kependudukan di Indonesia adalah persebaran penduduknya yang tidak merata, yaitu sebanyak 60% tinggal di Pulau Jawa. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan daya dukung wilayah, baik pada sektor infrastruktur, ekonomi dan aspek lainnya berikut eksese-eksesnya yang tidak sederhana.

1. Bahasa

Bahasa adalah salah satu alat komunikasi yang amat sangat penting bagi bangsa mana pun, karena bahasa merupakan identitas sebuah bangsa. Bahasa Indonesia termasuk dalam rumpun bahasa Melayu yang berkembang di beberapa negara di wilayah Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan Indonesia. Selain bahasa Indonesia, terdapat sekitar 300 bahasa daerah dengan dialek bahasa dan jenis aksara masing-masing. Beberapa bahasa yang ada di Indonesia antara lain: Bahasa Jawa, Sunda, Aceh, Batak, Melayu, Banten, Betawi, Padang, Bugis, Papua, Bali dan bahasa daerah lainnya.

2. Agama

Kepercayaan asli nenek moyang Indonesia adalah animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan terhadap roh yang menempati benda-benda tertentu, sedangkan dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda tertentu yang diyakini memiliki kekuatan. Kepercayaan ini sudah ada jauh

sebelum kedatangan ajaran agama di Indonesia. Agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia serta diakui secara resmi oleh negara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong hu Cu. Sekitar 80 persen lebih masyarakat Indonesia memeluk agama Islam.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator *Human Development Index (HDI)* sebuah negara atau wilayah, atau sebagai ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat yang dicapai melalui pembangunan. Harus diakui dengan lapang dada, bahwa capaian IPM kita masih belum menggembirakan dibandingkan dengan negara-negara di lingkup ASEAN sekalipun, termasuk pada aspek pendidikan (*Education Development Index*). Untuk itu pemerintah menetapkan program Wajib Belajar 12 tahun bagi warga negaranya, yang meliputi: 6 tahun untuk Sekolah Dasar, 3 tahun untuk Sekolah Menengah Pertama, dan 3 tahun lagi untuk Sekolah Menengah Atas. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat Indonesia.

G. Pertimbangan Faktor Ekonomi dalam Pembangunan

Ilmu Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah "ekonomi" sendiri berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *οἶκος (oikos)* yang berarti "keluarga rumah tangga" dan *νόμος (nomos)* yang berarti "peraturan, aturan, hukum". Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga." Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi, dan data dalam menjalankan profesinya. Terkait dengan konsep pembangunan, pertimbangan ekonomi umumnya

ditempatkan sebagai salah satu alasan fundamental dalam membuat keputusan-keputusan strategis pembangunan.

Pertimbangan ekonomi pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan manusia dalam mengelola informasi, guna membuat sebuah keputusan cerdas dalam rangka mendapatkan kepuasan atas kebutuhan dan keinginan. Untuk mengolah informasi yang begitu banyak dengan cepat dan akurat, dibutuhkan pemahaman berkenaan dengan dasar-dasar pembuatan keputusan ekonomi yang cerdas. Keputusan ekonomi yang cerdas akan terindikasikan lewat kemampuan sebuah bangsa dalam meracik sumber daya yang dimiliki atau yang dikuasai, guna menciptakan profit dan *benefit* yang signifikan.

H. Wilayah Pusat Pembangunan di Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat periode pemerintahan tahun 2009-2014 DR. H. Ahmad Heryawan menyatakan, bahwa kebijakan pembangunan kewilayahan di Jawa Barat dilihat dari berbagai aspek seperti: potensi, kegiatan produksi, dan aglomerasi pusat pemukiman. Adapun *goals* dari pengembangan wilayah yaitu mencapai target penataan ruang dan pengembangan ekonomi. Untuk itu, wilayah pengembangan Jawa Barat ditetapkan dalam 6 (enam) kawasan, yakni Bodebepunjur (Bogor, Depok, Bekasi, Puncak, Cianjur) dan sekitarnya, Purwasuka (Purwakarta, Subang, Karawang), Cekungan Bandung, Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan), Priangan Timur - Pangandaran, serta Sukabumi dan sekitarnya.

Rencana tata ruang di Jawa Barat, dibagi menjadi beberapa kawasan yaitu: kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan industri, kawasan wisata dan kawasan strategis. Untuk kawasan lindung, Pemprov Jabar menetapkan 45% dari luas wilayahnya sebagai kawasan lindung dan tersebar pada 4 kabupaten

dengan kawasan lindung terluas, yakni Kabupaten Garut (78,7%), Kabupaten Bandung (60,5%), Kabupaten Cianjur (59,6%) dan Kabupaten Bandung Barat (59,2%).

Wilayah Jawa Barat setiap tahun mengalami pertumbuhan, baik pada bidang industri, budi daya, wisata dan ekonomi. Salah satu wilayah yang dijadikan pusat pembangunan ekonomi pada tahun 2018 adalah kawasan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka dan kawasan wisata di Sukabumi. Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Majalengka yang telah diresmikan Presiden Jokowi. Kertajati yang merupakan kawasan pertumbuhan baru di Timur Jawa Barat akan didukung oleh infrastruktur berupa pelabuhan besar di Patimban, Kabupaten Subang. Pelabuhan ini digadang-gadang menjadi pelabuhan yang besarnya melebihi pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. Pak Jokowi pun telah meresmikan Bandara Nusawiru di Pangandaran, Bandara Cikembar di Sukabumi, Pelabuhan Patimban, Tol Bocimi, Tol Cisumdawu, Bendungan Kuningan, Bendungan Ciawi, Bendungan Sukamahi, dan pembenahan Sungai Citarum melalui program “Citarum Harum”.

Pusat pembangunan ekonomi baru di Jawa Barat, juga terjadi di daerah Subang, Karawang, Indramayu, Cirebon, dan Majalengka, mengingat saat ini daerah tersebut telah menjadi pusat pembangunan industri yang luar biasa. Kawasan pusat pembangunan ekonomi baru lainnya adalah daerah Sukabumi, yang akan dikembangkan menjadi kawasan destinasi wisata. Terlebih saat ini *geo park* telah ditetapkan oleh *UNESCO*. *Geopark* Ciletuh – Pelabuhan ratu menjadi jaringan dunia. Kawasan wisata Sukabumi akan didukung konektivitasnya melalui Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), pembangunan Bandara di Cikembar, serta jalur kereta api *double track*.

Dengan dukungan infrastruktur dan tata ruang yang terbilang memadai di Jawa Barat, tentu akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat, bahkan diperkirakan akan muncul kota-kota baru pada wilayah sepanjang perlintasan Kereta Api Cepat, dan akan muncul metropolitan baru di zona Patimban, Kertajati, Cirebon.

PEMBANGUNAN WILAYAH & DAYA DUKUNG LINGKUNGAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks manajemen pembangunan wilayah, khususnya terkait dengan pengembangan sebuah wilayah eksisting, terutama pada kota-kota besar, salah satu masalah krusial yang kerap muncul adalah keterbatasan daya dukung lingkungan. Masalah ini mencuat dalam berbagai bentuk persoalan lingkungan, seperti pencemaran lingkungan akibat limbah industri, penumpukkan sampah rumah tangga, terjangan banjir berulang akibat penyempitan sungai atau buruknya saluran pembuangan air dan sanitasi lingkungan, masalah polusi udara, meluasnya pemukiman kumuh (*slumps*), dan sekian banyak masalah lingkungan lainnya. Berbagai kondisi buruk tersebut, adalah gambaran dari dampak keterbatasan daya dukung lingkungan yang hakikatnya tidak lagi mampu menyokong kenyamanan kehidupan sebuah wilayah, baik dilihat dari aspek kapasitas penyediaan (*supply capacity*), maupun daya tampungnya.

Dampak keterbatasan daya dukung lingkungan, terutama pada kota-kota besar khususnya di Indonesia, dari hari ke hari terasa semakin rumit, dan sangat banyak menggerus energi sosial ekonomi kota, baik materil maupun imateril. Demikian besar anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, dan sulit dihitung pula seberapa besar kerugian yang diderita warganya, akibat meruyak dan berkepanjangan persoalan-persoalan lingkungan hidup beserta dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan mereka. Oleh karenanya, tidak mengherankan, apabila persoalan yang ditimbulkan oleh keterbatasan kapasitas daya dukung

lingkungan ini, telah memicu munculnya aneka permasalahan lainnya, mulai pada lingkup lokal hingga lingkup nasional, atau bahkan internasional. Konflik antar wilayah atau antar daerah bertetangga lantaran persoalan tempat pembuangan akhir sampah (TPA) misalnya, atau saling tuduh penyebab banjir pada suatu wilayah, hingga wacana pemindahan ibu kota negara, adalah beberapa kisah nyata yang menggambarkan betapa kompleksnya problema yang bersumber dari persoalan daya dukung lingkungan.

B. Daya dukung Lingkungan

Daya dukung lingkungan hidup, secara umum berkaitan dengan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, dan makhluk hidup lainnya. Penentuan daya dukung lingkungan hidup, dilakukan dengan cara menghitung kapasitas lingkungan alam, dan sumber daya dalam mendukung kegiatan manusia, atau penduduk yang akan menggunakan ruang, bagi kelangsungan hidup mereka. Daya dukung atau kapasitas lingkungan hidup ini, secara garis besar terdiri atas 2 (dua) komponen, yaitu kapasitas penyediaan (*supportive capacity*), dan kapasitas tampung limbah (*assimilative capacity*). Kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, akan menjadi faktor pembatas dalam penentuan pemanfaatan ruang yang sesuai, mengingat bahwa besaran kapasitasnya pada suatu tempat, dipengaruhi oleh keadaan dan karakteristik sumber daya, yang ada di hamparan ruang yang bersangkutan.

Terkait dengan manajemen pembangunan wilayah, maka pembahasan tentang daya dukung lingkungan hidup pada bab ini, akan difokuskan pada kapasitas penyediaan sumber daya alam, terutama berkaitan dengan kemampuan lahan, serta ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air pada suatu ruang atau wilayah sebagai unsur manajerial utama, yang diperlukan

dalam menjalankan manajemen pembangunan wilayah. Untuk itu, pembahasannya akan dilakukan berdasarkan 3 (tiga) pendekatan, dengan fokus utama pada :

1. Kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang.
2. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan.
3. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air.

Agar pemanfaatan ruang pada suatu wilayah, sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya yang tersedia, maka alokasi pemanfaatan ruang harus senantiasa mengindahkan kemampuan lahan. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air di suatu wilayah, akan menentukan apakah daya dukung lahan dan air dalam mendukung kegiatan pemanfaatan ruang, terhitung *surplus* atautkah *defisit*. Hasil perhitungan atau prediksi kapasitas daya dukung lingkungan hidup ini, selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah. Mengingat daya dukung lingkungan hidup tidak dapat dibatasi berdasarkan batas wilayah administratif, maka penerapan rencana tata ruang hendaknya memperhatikan aspek pula keterkaitan ekologis, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang, serta dalam pengelolaannya senantiasa memperhatikan aspek koordinasi dan kerja sama antar daerah.

Dalam konteks ekologis, daya dukung lingkungan (*carrying capacity*), adalah jumlah populasi atau komunitas, yang dapat didukung oleh suatu lingkungan, tanpa merusak unsur lingkungan lainnya dalam periode jangka panjang. Daya dukung lingkungan dalam konteks ekologis ini, berkaitan erat dengan modal alam, tetapi dalam konteks pembangunan berkelanjutan, tidak hanya terkait dengan modal alam saja, melainkan terkait pula dengan modal manusia, modal sosial dan lingkungan buatan. Mengingat hal itu, maka faktor yang sangat potensial mempengaruhi keterbatasan daya dukung lingkungan,

adalah jumlah populasi manusia atau penduduk berikut pola konsumsinya. Dengan demikian, daya dukung lingkungan pada sebuah kota akan dipengaruhi, bahkan ditentukan oleh jumlah populasi penduduk atau komunitas yang dapat didukung oleh lingkungan, termasuk modal alam, modal manusia, sosial dan lingkungan buatan yang dimilikinya.

Undang-undang RI Nomor 52 tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, membagi daya dukung lingkungan, menjadi 3 (tiga) jenis, yakni daya dukung lingkungan alam, daya tampung binaan, dan daya tampung lingkungan sosial. Namun sayangnya dalam undang-undang tersebut, tidak dirinci lebih jauh, bagaimana daya dukung suatu lingkungan diukur atau dihitung secara metodik, sehingga hal itu tidak banyak membantu kita dalam membuat kalkulasi lingkungan, khususnya bagi mereka yang akan berbisnis, atau melakukan investasi jangka panjang.

Salah satu unsur daya dukung lingkungan yang cukup penting, untuk dipertimbangkan oleh para perencana pembangunan, adalah modal alam. Mengapa demikian? Jawabannya tiada lain, karena modal alam memiliki kemampuan untuk memproduksi sumber daya lain yang dibutuhkan, sekaligus berfungsi untuk menyerap limbah yang dihasilkan sebagai eksek dari sebuah proses pembangunan itu sendiri. Karena modal alam adalah modal sumber daya alam dunia, yang meliputi geologi, tanah, udara, air, dan semua organisme hidup, maka tidak menutup kemungkinan ada sumber daya alam yang dibutuhkan untuk menyerap limbah. Berdasarkan pengertian tersebut, maka sumber daya alam memiliki kemampuan untuk mengasimilasi limbah. Banyak sekali contoh sumberdaya alam yang dapat menyerap limbah, antara lain eceng gondok, atau logam-logam yang dapat

mengasimilasi limbah. Kemampuan mengasimilasi limbah disebut biosimilasi, yang didefinisikan sebagai kemampuan dari lingkungan alam untuk menyerap berbagai material, termasuk limbah antropogenik dalam konsentrasi tertentu, tanpa mengalami degradasi.

Setiap lingkungan memiliki kemampuan dalam mengasimilasi limbah, hal ini disebut sebagai daya tampung lingkungan. Daya tampung lingkungan menurut Undang-undang RI Nomor 23 tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Sebenarnya makna daya tampung lingkungan, sudah tercakup dalam pengertian daya dukung lingkungan, karena kata “mendukung perikehidupan” dapat diartikan sebagai mendukung ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan, sekaligus mengasimilasi limbah atas konsumsi sumberdaya tersebut. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan pula, bahwa daya dukung lingkungan adalah sesuatu yang bersifat dinamis, dapat terdegradasi atau bahkan punah, apabila tidak dilestarikan, dan sebaliknya dapat pula ditingkatkan kemampuannya.

C. Kemampuan Lahan

Aktivitas manusia dalam mengisi peran kehidupannya, tidak dapat terlepas dari kebutuhan terhadap ruang dan lahan, yang akan digunakan sebagai ruang kehidupan. Kebutuhan terhadap ketersediaan lahan, adalah hal mutlak bagi siapapun, yang akan melakukan sebuah aktivitas. Untuk itu, maka evaluasi terhadap lahan merupakan suatu pendekatan, atau cara untuk menilai potensi sumber daya lahan. Hasil evaluasi terhadap lahan, akan memberikan informasi, atau arahan penggunaan lahan yang diperlukan, dan akhirnya nilai harapan produksi yang kemungkinan akan diperoleh. Sejumlah sistem

evaluasi lahan, sesungguhnya telah banyak dikembangkan, dengan menggunakan berbagai pendekatan. Diantaranya, dengan sistem perkalian parameter, penjumlahan, dan *matching system*, yaitu mencocokkan antara kualitas dan sifat-sifat lahan (*land qualities/land characteristics*) dengan kriteria kelas kesesuaian lahan, yang disusun berdasarkan persyaratan daya tumbuh komoditas pertanian, berbasis lahan. Sistem evaluasi terhadap lahan, hingga kini masih terus dikembangkan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat (Litbang Deptan, 2013).

Kemampuan lahan, adalah penilaian atas kemampuan suatu lahan untuk penggunaan tertentu, yang dinilai dari masing-masing faktor penghambat. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya dan tidak diikuti dengan usaha konservasi tanah yang baik, akan mempercepat terjadinya erosi. Apabila tanah sudah tererosi, maka produktivitas lahan tersebut otomatis akan mengalami penurunan (degradasi). Evaluasi kemampuan lahan sangat penting dilakukan, guna mengetahui kemampuan lahan secara sistematis, dan mengelompokkannya menurut kategori berdasarkan sifat, potensi, dan penghambat penggunaan lahan, secara lestari. Pengklasifikasian lahan, dimaksudkan agar pendayagunaan lahan disesuaikan dengan kemampuannya, sekaligus guna mengetahui teknik konservasi tanah dan air, yang sesuai dengan kemampuan lahan tersebut.

D. Klasifikasi Kemampuan Lahan

Klasifikasi kemampuan lahan (*land capability classification*), adalah penilaian lahan (komponen-komponen lahan) secara sistematis, dan pengelompokannya ke dalam beberapa kategori, berdasarkan sifat-sifatnya yang menggambarkan potensi dan penghambat dalam penggunaannya, secara

lestari. Kemampuan lahan, dipandang sebagai kapasitas lahan itu sendiri untuk suatu macam, atau tingkat penggunaan umum.

1. Metode Klasifikasi Kemampuan Lahan

Menurut Hadmoko (2012), metode klasifikasi kemampuan lahan terdiri dari:

a. *Overlay Map*. Metode ini didasarkan pada *overlay* atau tumpang tindih peta, yang sebelumnya sudah diberi skor untuk setiap jenis petanya.

b. Metode statistik. Metode ini didasarkan pada analisis statistik variabel penentu kualitas lahan, yang disebut *diagnostic land characteristic* (variabel x) terhadap kualitas lahannya (variabel y).

c. Metode *matching*. Metode ini didasarkan pada pencocokan antara kriteria kesesuaian lahan, dengan data kualitas lahan. Evaluasi kemampuan lahan dengan *matching system*, dilakukan dengan mencocokkan antara karakteristik lahan, dengan syarat penggunaan lahan tertentu.

d. Metode pengharkatan (*scoring*). Metode ini didasarkan pemberian nilai pada masing-masing satuan lahan sesuai dengan karakteristiknya.

E. Daya Dukung Sumber Daya Air di Perkotaan

Daya dukung sumber daya air pada suatu wilayah, adalah kadar ketersediaan potensi sumber daya air, yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup, yang ada dalam wilayah tersebut. Potensi air pada suatu wilayah, dapat diartikan sebagai kemampuan *supply* dalam memenuhi kebutuhan air (*demand*) pada wilayah tersebut. Idealnya, *demand* tidak melebihi dari kemampuan *supply*, jika *demand* lebih besar dari *supply*, dapat diartikan, bahwa daya dukung air telah terlampaui. Penerapan teknologi dan pengelolaan lingkungan yang baik, dapat mengendalikan pada suatu kondisi agar daya dukung air tidak terlampaui. Secara umum, beberapa sumber air yang dapat digunakan sebagai alternatif sumber air bersih, adalah sebagai berikut:

1. Air Permukaan

Air permukaan, adalah air yang ada dan mengalir di atas permukaan tanah. Yang termasuk pada golongan air permukaan, antara lain adalah: air laut, air danau, air sungai, air waduk dan air rawa. Air sungai, sering digunakan sebagai sumber air baku, untuk sarana penyediaan air bersih, pengairan dan industri. Secara kuantitas, debit aliran sungai umumnya sangat dipengaruhi oleh musim, begitu juga dengan kualitasnya. Pada musim penghujan, sungai mengalami pengenceran, sehingga kadar pencemaran mengalami penurunan, akibat pengenceran tersebut. Perairan tawar di permukaan bumi, dapat membentuk suatu ekosistem, misalnya ekosistem danau atau sungai. Perlu diingat, bahwa faktor yang paling mempengaruhi ekosistem perairan, adalah oksigen terlarut guna mendukung berlangsungnya proses foto sintesis, respirasi dan penguraian dalam perairan; cahaya matahari untuk pengaturan suhu, dan berlangsungnya proses foto sintesis.

Beberapa masalah utama yang kerap terjadi pada air permukaan, adalah masalah pengeringan atau gangguan terhadap kondisi alami, misalnya dampak pembuatan waduk, irigasi, pencemaran pada badan air, pembuangan limbah industri dan domestik, limbah pertanian yang dapat menyebabkan terjadinya eutrofikasi. Istilah ini merujuk pada suatu proses perubahan fisik, kimia dan biologis yang terjadi dalam suatu badan perairan (biasanya yang alirannya lambat), akibat melimpahnya masukan zat hara (umumnya unsur Nitrogen dan Posfat) dari luar.

2. Air Bawah Tanah

Air bawah tanah, secara garis besar terdiri dari:

a. Mata air, yaitu pemunculan air tanah yang keluar dari permukaan tanah secara alamiah. Sifat debit mata air, umumnya 2 macam, yaitu yang

berubah-ubah (fluktuatif) akibat dari pergantian musim, dan yang relatif tetap (kontinu). Ada sebagian mata air, yang pada musim kemarau tidak mengalirkan air sama sekali, namun pada musim penghujan airnya akan mengalir kembali (mata air musiman).

b. Air tanah. Secara kuantitas, jumlah air tanah yang ada di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya, tergantung dari jumlah cadangan air yang terkandung pada setiap lapisan pembawa air (*aquifer*) yang ada di daerah yang bersangkutan, dan kapasitas infiltrasi pada daerah tangkapan air hujan. Air bawah tanah (*ground water*) atau *aquifer*, adalah air yang terdapat pada pori-pori tanah, pasir, kerikil, batuan yang telah jenuh terisi air. *Aquifer* tidak tertekan (*unconfined aquifer*) mendapatkan air dari proses infiltrasi, sedangkan *aquifer* tertekan (*confined aquifer*) airnya berasal dari daerah pengisian (*recharge area*) atau resapan air.

c. Muka air tanah (*water table*) adalah garis batas antara air tanah dengan air bawah tanah yang jenuh. Muka air tanah akan mengalami kenaikan pada saat musim hujan, dan pada musim kemarau akan mengalami penurunan. Biasanya penyebaran air tanah tidaklah merata, hal ini disebabkan oleh karakteristik tutupan lahan, dan kondisi hidrogeologi suatu wilayah.

F. Keterkaitan dengan *Sustained City*

Konsep dasar dari pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*), bertolak dari dua konsep, yaitu konsep kebutuhan (*concept of needs*), dan konsep keterbatasan (*concept of limitations*). Konsep pemenuhan kebutuhan, difokuskan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, sementara konsep keterbatasan adalah ketersediaan dan kapasitas yang dimiliki lingkungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Keberlanjutan pembangunan dapat terwujud, apabila terpenuhinya keseimbangan, antara kebutuhan dan

keterbatasan yang ada saat itu. Upaya menciptakan keseimbangan dapat dilakukan melalui dua arah, yaitu mengendalikan kebutuhan dengan mengubah perilaku konsumsi, dan sebaliknya dengan meningkatkan kemampuan guna meminimalkan keterbatasan melalui : pengembangan teknologi, finansial, dan institusi. Aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, hendaknya mempertimbangkan keberlanjutan dalam jangka panjang.

Daya dukung alam sangat menentukan bagi keberlangsungan hidup manusia, maka kemampuan daya dukung alam tersebut wajib dijaga, agar tidak merusak, dan membawa akibat buruk pada kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Secara umum, kerusakan daya dukung alam dipengaruhi oleh dua faktor:

1). Faktor Internal

Kerusakan yang disebabkan oleh faktor internal, adalah kerusakan yang berasal dari alam itu sendiri. Kerusakan karena faktor internal pada daya dukung alam sulit untuk dicegah, karena merupakan bagian dari proses alamiah dalam rangka mencari keseimbangan dirinya, misalnya: letusan gunung berapi, gempa bumi, dan badai.

2). Faktor Eksternal

Kerusakan karena faktor eksternal, pada hakikatnya adalah kerusakan yang diakibatkan oleh ulah manusia, terkait dengan berbagai aktivitas dalam meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidupnya. Kasus yang paling banyak ditemui adalah kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan industri, berupa pencemaran tanah, air, laut, udara, bahkan pencemaran suara (*noisy*). Lingkungan hidup yang sesungguhnya, bukan hanya berbentuk lingkungan alamiah saja, namun termasuk juga lingkungan sosial dan lingkungan binaan.

Demikian pula dengan daya dukung, pengertiannya dapat diperluas menjadi daya dukung alamiah (lingkungan alam), daya dukung sosial (yang berupa

ketersediaan sumber daya manusia dan kemampuan finansial). Melalui pengelolaan lingkungan yang baik, dan bantuan berbagai *input* teknologi, maka daya dukung lingkungan dapat ditingkatkan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup makhluk yang berada pada lingkungan tersebut. Kota yang “*sustainable*” adalah kota yang perkembangan dan pembangunannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini, mampu berkompetisi dalam ekonomi global dengan mempertahankan keserasian lingkungan, memiliki vitalitas sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanan, tanpa mengabaikan atau mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhan mereka (Budihardjo, E., Sujarto, D. 2005). Untuk menciptakan kota yang berkelanjutan dimaksud, diperlukan konsistensi atas penerapan lima prinsip dasar daya dukung lingkungan, yang meliputi: *Environment (ecology)*, *Economy (employment)*, *Equity Engagement*, dan *Energy*.

A. Definisi Kawasan Industri

Kawasan Industri di Indonesia pertama kali dikembangkan oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 1970-an, sebagai reaksi terhadap meningkatnya kebutuhan lahan industri. Seiring dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan investasi pada berbagai daerah di Indonesia, maka pada awal tahun 1989 pemerintah mengizinkan pihak swasta untuk mengembangkan kawasan industri. Dalam pengembangan sebuah kawasan industri, khususnya pada tahap pra-konstruksi, seorang investor wajib menempuh beberapa tahapan mendasar yang meliputi tahap perizinan, tahap pembebasan tanah, dan tahap perencanaan. Kawasan industri adalah suatu daerah atau kawasan, yang secara umum didominasi oleh aktivitas industri. Kawasan industri biasanya dilengkapi dengan fasilitas kombinasi yang terdiri atas : peralatan-peralatan pabrik (*industrial plants*), penelitian dan laboratorium untuk pengembangan, bangunan perkantoran, bank, serta prasarana lainnya seperti fasilitas sosial dan umum yang mencakup perkantoran, perumahan, sekolah, tempat ibadah, ruang terbuka dan lainnya.

Di Indonesia, pengertian kawasan industri mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996. Menurut Keppres tersebut, yang dimaksud dengan kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri, yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri, yang telah memiliki izin Usaha Kawasan Industri. Sarana dan prasarana tersebut antara lain akses jalan, penyediaan air bersih dan pengolahan limbah terpadu,

jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan sebagainya. Hal ini berbeda dengan Zona Industri yang juga merupakan pemusatan industri, akan tetapi tanpa dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Zona Industri adalah satuan geografis sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri, baik berupa industri dasar maupun industri hilir, yang berorientasi kepada konsumen akhir berpopulasi tinggi, berfungsi sebagai penggerak utama dan secara keseluruhannya membentuk berbagai kawasan terpadu dan beraglomerasi dalam kegiatan ekonomi dan memiliki daya ikat spasial. Merujuk pada definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kawasan industri merupakan sebuah kawasan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Area lahan yang cukup luas dan telah disahkan sebagai suatu kesatuan.
2. Didominasi oleh aktivitas industri.
3. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
4. Memiliki suatu badan pengelola (manajemen).
5. Memiliki izin usaha kawasan industri.
6. Biasanya diisi oleh industri manufaktur.

Pembangunan kawasan industri, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat. Penentuan suatu kawasan yang akan dijadikan kawasan industri didasarkan pada rencana tata ruang yang dibuat oleh masing-masing kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Keppres RI Nomor 33 Tahun 1990, tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 2009, kawasan peruntukan industri dimaksudkan sebagai bentangan lahan, yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan industri yang mengkonsentrasikan kegiatan industri pada suatu tempat, atau sering disebut sebagai kawasan industri, dimaksudkan untuk menekan penyebaran dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh industri. Tujuan lainnya, bahwa keberadaan industri pada tempat yang sama akan memberikan pengaruh berganda terhadap masyarakat. Akan tetapi tujuan tersebut baru akan dicapai, jika diikuti oleh pemenuhan kriteria yang ditentukan. Kriteria tersebut dimulai dari penetapan peruntukan lahan untuk kawasan industri, sampai dengan kewajiban pengelolaan limbah atau dampak lingkungan yang ditimbulkan. Kebijakan pembangunan kawasan industri yang disusun dengan memperhatikan berbagai aspek lingkungan, memungkinkan terwujudnya kawasan industri yang berwawasan lingkungan.

Dalam suatu kawasan industri, di mana berbagai aktivitas industri berlangsung, pada satu sisi dapat memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan ekonomi, tetapi pada sisi lain berpotensi mendorong terjadinya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan dimaksud, umumnya akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang digunakan sebagai sumber energi dan bahan baku dalam kegiatan industri, serta lingkungan sebagai tempat pembuangan limbah. Untuk meminimalkan kerusakan lingkungan tersebut, diperlukan suatu konsep yang dapat menyelaraskan antara pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan, yang dikenal dengan industri hijau (*green industry*). Industri hijau adalah industri, yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014).

B. Tujuan Pembangunan Kawasan Industri

Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2009, tentang Kawasan Industri menyatakan, bahwa pembangunan kawasan industri bertujuan untuk:

1. Mempercepat pertumbuhan industri di daerah;
2. Memberikan kemudahan bagi kegiatan industri;
3. Mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri;
4. Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

Menurut Tim Koordinasi Departemen Perindustrian RI, tujuan utama pembangunan dan pengusahaan kawasan industri (*industrial estate*) adalah untuk memberikan kemudahan bagi para investor sektor industri, dan untuk memperoleh lahan industri dalam rangka pembangunan industri.

Kawasan industri dibangun sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik, melalui penyediaan lokasi industri yang telah siap pakai, yang didukung fasilitas dan prasarana yang lengkap dan berorientasi pada kemudahan dalam mengatasi masalah pengelolaan dampak lingkungan, yang ditimbulkan oleh limbah industri. Pembangunan kawasan industri ditujukan untuk pengembangan industri di daerah, guna mempertinggi daya tarik daerah tersebut, dengan harapan akan memperoleh sejumlah manfaat sebagai berikut:

- Menghemat pengeluaran pemerintah untuk pengadaan prasarana.
- Terciptanya efisiensi yang lebih tinggi dalam kegiatan industri;
- Untuk menciptakan perkembangan daerah yang lebih cepat.
- Memaksimumkan akselerasi pembangunan daerah.
- Memaksimumkan peranan pembangunan daerah dalam menunjang pembangunan ekonomi.

Selain itu, faktor pendorong utama dalam menciptakan kawasan perindustrian, adalah besarnya keuntungan potensial yang akan diperoleh para pelaku industri, karena tersedianya fasilitas yang memadai.

Untuk itu, pembangunan kawasan perindustrian hendaknya dapat merangsang minat para penanam modal, sekaligus dapat membantu mereka dalam mendapatkan tempat yang strategis, dengan cara menyewa atau membeli bangunan yang tersedia, serta menekan biaya pendirian usaha. Tersedianya kawasan perindustrian, dapat menghemat pula berbagai jenis *external economy cost* bagi industri-industri tersebut. Pada sisi lain pertumbuhan industri pada suatu kawasan industri, dapat mempertinggi efisiensi aktivitas industri.

Selain itu, tujuan lain dari pembangunan kawasan industri, adalah untuk mendorong pembangunan sektor industri agar lebih terarah, terpadu, dan memberikan hasil guna yang lebih optimal, bagi daerah di mana kawasan industri dimaksud berlokasi. UNINDO (2012) membedakan pula tujuan pembangunan kawasan industri di negara maju dengan di negara berkembang. Di negara maju, bertujuan untuk meminimalkan eksternalitas negatif (seperti polusi dan kemacetan), sehingga kawasan industri didesain menjadi klaster pergudangan dan pusat distribusi, bahkan pada beberapa negara, kawasan, industrinya dikonversi menjadi *eco industrial park*. Sementara itu, di negara berkembang kawasan industri diarahkan untuk : (a) mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di tingkat nasional, regional, dan lokal; (b) menarik investasi asing; dan (c) memacu perkembangan sektor industri. (Winardi, dkk: 2019)

Menurut Kumar (2008) tujuan pembangunan kawasan industri adalah: (a) mendorong pengembangan industri dan kewirausahaan; (b) mendorong pertumbuhan industri skala kecil; (c) mewujudkan pembangunan yang terdesentralisasi ke seluruh wilayah; (d) mendorong tumbuhnya industri pendukung industri besar, baik sektor swasta maupun publik; (e) menarik investasi; (f) menciptakan lapangan kerja; dan (g) memanfaatkan sumber bahan baku, sumber daya tenaga kerja terampil, dan kedekatan dengan pasar (Winardi, dkk: 2019).

C. Kebijakan Pemerintah tentang Kawasan Industri

Penyusunan Pedoman Teknis Kawasan Industri, dilandasi oleh sejumlah peraturan perundangan yang terkait, baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan Presiden, dan Peraturan Menteri, dan pada tingkat daerah (provinsi/kabupaten/kota) biasanya dilengkapi pula dengan Peraturan Daerah dan peraturan yang bersifat teknis operasional, yang mengatur lebih lanjut tata cara pelaksanaannya secara *detail*. Beberapa regulasi tentang Kawasan Industri yaitu :

1. Undang-Undang :

- a. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian;
- b. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung;
- c. UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- e. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- f. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- g. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah
- h. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Peraturan Pemerintah

- a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 1986, tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 1995, tentang Izin Usaha Industri;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan;
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.

3. Peraturan Presiden/Keputusan Presiden :

- a. Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 1990 tentang Pembangunan Tanah bagi Pembangunan Kawasan Industri;
- b. Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama
- d. Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

e. Peraturan Presiden RI Nomor. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;

f. Peraturan Presiden RI Nomor. 39 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

4. Peraturan Menteri/Keputusan Menteri :

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta prosedur Pemberian IMB dan Ijin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO bagi perusahaan yang berlokasi dalam Kawasan Industri;

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;

c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor. 07/M-IND/PER/5/2005 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Perindustrian;

d. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

e. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

f. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor. 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

g. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.

D. Pengaruh Keberadaan Industri.

Dampak positif yang dirasakan dari kehadiran industri di berbagai daerah hingga awal tahun 1970-an, adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan secara ekonomi. Usaha-usaha di bidang industri pada waktu itu, dapat dikatakan sebagai usaha yang sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian di berbagai daerah. Tetapi, dengan semakin bertambahnya jumlah dan volume usaha industri, tak urung menimbulkan dampak yang merugikan, baik dampak yang dirasakan langsung seperti tercemarnya air, udara ataupun degradasi mutu lingkungan itu sendiri. Selain itu dirasakan pula dampak tidak langsung, artinya baru dirasakan setelah melewati jangka waktu tertentu dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar, di antaranya terjadinya banjir atau menyusutnya sumber air tanah pada lingkungan kawasan. Hingga saat ini, seiring derap pembangunan, sektor industri terus mengalami perkembangan, tidak hanya di kota-kota yang besar saja, melainkan telah merambah sampai ke “kota-kota pinggir”. Dengan demikian, pencemaran lingkungan merupakan eksek dari lingkungan itu sendiri, yang bersifat negatif dan terjadi karena adanya proses alam dan meningkatnya aktivitas manusia. Meningkatnya aktivitas tersebut, tentunya akan memberikan berbagai pengaruh bagi lingkungan sekitarnya. Akan tetapi perlu diingat pula, bahwasanya tidak setiap industri menjadi penyebab terjadinya semua jenis pencemaran. Hal ini sangat tergantung pada jenis industrinya itu sendiri.

Pada era teknologi yang maju seperti saat ini, mesti diakui bahwa pencemaran lingkungan, lebih dominan diakibatkan oleh aktivitas industri,

terlebih memasuki Era Industri 4.0 ini, di mana banyak terjadi perubahan pada lingkungan binaan, dan salah satu perubahan paling menonjol terjadi pada kawasan industri. Perubahan ini menimbulkan bermacam-macam pencemaran berupa asap, bau, cairan limbah, reaksi kimia dan kebisingan yang mereduksi mutu lingkungan secara *gradual*. Dalam upaya mengendalikan dampak lingkungan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian telah menetapkan hal-hal berikut:

- > Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, akibat kegiatan industri yang dilakukannya.
- > Pemerintah mengadakan pengaturan dan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan mengenai pelaksanaan pencegahan kerusakan dan penanggulangan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri.

E. Teknis Dalam Pengembangan Kawasan Industri

Teknis pengembangan kawasan industri, pada prinsipnya dilakukan dengan mempertimbangkan dua faktor utama, yaitu :

1. Faktor Internal :

Faktor internal dapat didefinisikan sebagai bahan tolak ukur dari, bisa tidaknya sebuah kegiatan industri digunakan sebagai sudut pandang, untuk melihat pengembangan sebuah industri. Untuk itu, perlu dikaji beberapa variabel yang terkait dengan pertumbuhan kegiatan industri, sebagai perspektif dalam melihat pertumbuhan industri, berikut ini adalah variabel-variabelnya:

a. Ukuran/Besaran Permintaan Lahan (*Land Demand*)

Sebagai patokan umum, luasan lahan 20 hektar, merupakan besaran minimum lahan suatu wilayah industri yang efisien, untuk pengembangan industri. Terkait dengan permintaan lahan wilayah industri, umumnya baru bisa dipenuhi, jika permintaan untuk lahan, berkisar 7-10 Ha rata-rata per tahunnya. Ukuran lahan maksimum pembangunan sebuah wilayah industri yang cukup layak untuk pengolahan industri pada daerah yang memiliki pertumbuhan industri, sebenarnya tidak terlampau besar, yaitu seluas 100 hektar. Suatu wilayah industri baru, dinyatakan layak difasilitasi dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu, bila luasannya lebih dari 50 (lima puluh) hektar.

b. Indikasi Jenis Industri yang Berkembang

Kecenderungan kelayakan pembangunan sebuah wilayah industri, dilihat dari sudut pandang jenis industri, adalah jenis industri pengolahan (manufaktur) dengan tingkat perkembangan minimal per satu tahun, sebanyak 5 (lima) unit usaha. Selain itu, juga dapat ditinjau dari bentuk industrinya, apakah berbentuk industri basis (*inti/core*) atau *vendor*. Sesungguhnya sangat sulit memastikan bagaimana prospek perkembangan satu jenis industri dalam sebuah wilayah industri. Namun demikian dalam suatu wilayah industri, selalu terdapat kecenderungan bertumbuhnya industri yang memiliki hubungan *input-output*. Biasanya ketika terdapat satu atau dua industri “induk” eksistensinya akan didukung oleh jenis industri lainnya yang bergerak sebagai *vendor*. Dalam hubungannya dengan penguatan ekonomi wilayah, jenis industri yang paling layak dikembangkan, adalah industri yang berbasis potensi unggulan daerah.

c. Masalah Lingkungan

Faktor pendorong tumbuh-kembangnya sebuah wilayah industri, umumnya dipicu oleh meningkatnya tuntutan pembangunan industri secara

perseorangan yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kawasan sekitarnya, berupa pencemaran lingkungan akibat limbah padat, cair ataupun gas. Bila munculnya konflik pengelolaan lahan, diakibatkan oleh dinamika pembangunan industri dan degradasi lingkungan, sudah seharusnya pembangunan industri tersebut diintegrasikan ke dalam wilayah industri. Dengan upaya itu, pada prinsipnya pembangunan wilayah industri sudah layak dilanjutkan.

d. Ketersediaan Prasarana

Dinamika yang rawan terhadap keberlangsungan pembangunan sebuah kawasan industri dalam hubungannya dengan ketersediaan prasarana, adalah masalah kelayakan layanan prasarana yang dibutuhkan. Contoh: kapasitas layanan kelistrikan pada suatu daerah (yang tidak dipersiapkan untuk pengembangan industri), akan sangat rawan manakala terjadi desakan permintaan layanan di atas layanan domestik. Masalah yang sama dapat terjadi pula, jika daerah memiliki keterbatasan prasarana dan sarana pendukung industri lainnya. Maka dari itu, apabila suatu wilayah direncanakan untuk dikembangkan menjadi wilayah industri, pemerintah daerah seyogianya sejak jauh hari mengkaji dengan seksama terhadap prasarana pendukung yang dibutuhkan. Adapun indikator-indikator pertimbangannya, diutamakan pada faktor-faktor berikut:

- 1). Tersedianya pelabuhan dalam jarak tertentu sebagai *outlet* produk, baik antar pulau maupun antar negara.
- 3). Adanya kolektor primer yang menjaring daerah otonom dengan pelabuhan (*outlet*).
- 4). Ketersediaan daya listrik yang memadai untuk kebutuhan industri, baik daya maupun tegangan listriknya.
- 5). Ketersediaan sumber air sebagai bahan baku industri yang bersumber dari air permukaan, air bawah tanah maupun PDAM.

- 6). Ketersediaan jaringan komunikasi yang bisa memenuhi berbagai permintaan dalam hubungannya dengan daerah lain, baik dalam hubungan keluar (*outgoing*) maupun menerima dari luar (*incoming*).
- 7). Ketersediaan prasarana penunjang seperti perbankan yang memiliki layanan transaksi internasional dan mata uang asing.
- 8). Ketersediaan Sumber Daya Manusia.

2. Faktor Eksternal

Ada empat faktor eksternal yang dijadikan pertimbangan dalam menilai kelayakan pembangunan sebuah kawasan industri, yaitu:

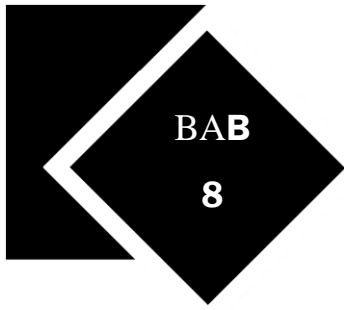
a. Kondisi *hinterland*. Sejauhmana potensi sumber daya alam yang berada dalam lingkungan *hinterland* dikelola oleh industri hulu (dasar) yang bersifat "*raw material oriented*" bisa dimanfaatkan oleh industri pengolahan (manufaktur) yang bersifat "*footloose industry*" yang kemudian akan berkembang di kawasan industri, dengan memanfaatkan keuntungan lokasi (*locational advantage*) dari daerah depan (*frontier region*) terutama yang memiliki *outlet*/pelabuhan. Kondisi ini merupakan potensi *hinterland* yang penting dalam menilai kelayakan pembangunan sebuah kawasan industri. Visi pembangunan industri dalam era otonomi daerah, mengarahkan setiap pembangunan kawasan industri sebagai upaya meningkatkan nilai tambah produk *hinterland*.

b. Persaingan dengan daerah lain. Faktor ini berkenaan dengan upaya untuk mengetahui apakah di daerah sekitar sudah terbangun kawasan industri atau belum. Terutama pada daerah yang berada di sekitar jalur transportasi utama, pembangunan usaha kawasan industri baru, akan diarahkan pada radius 100 km. Sepanjang pembangunan kawasan industri baru, berlokasi pada daerah sekitar jalur transportasi yang berbeda, pembangunannya masih dimungkinkan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah jenis industri yang dikembangkan pada masing-masing kawasan

industry tersebut. Dalam hal ini, diusahakan agar masing-masing kawasan industri mengakomodir jenis industri atau basis industri yang berbeda, sehingga dapat saling melengkapi.

c. Lokasi yang Strategis terhadap Sistem Ekonomi Makro. Upaya menarik investor sektor industri, perlu ditunjang oleh kemampuan daerah dalam mengembangkan jaringan dengan daerah lain secara lebih luas. Indikator yang dapat digunakan dalam menilai kelayakan pembangunan kawasan industri adalah apabila daerah yang bersangkutan, memiliki keuntungan lokasi (*locational advantage*) terhadap sistem ekonomi makro yang ada, baik melalui jalur pelayaran maupun jalur darat.

d. Stabilitas Keamanan. Faktor kunci keberlanjutan kegiatan industri pada suatu wilayah, terletak pada stabilitas keamanan daerah tersebut. Sejahtera suatu daerah mampu menjamin keamanan daerahnya dari berbagai gangguan, baik dari dalam ataupun dari luar, menjadi faktor penentu layak atau tidaknya daerah tersebut, untuk mengembangkan kawasan industri.



KAWASAN AGRO INDUSTRI

A. Introduksi

Sebagai negara agraris yang tengah berkembang, selama beberapa dekade sektor pertanian di Indonesia selalu muncul sebagai penyumbang terbesar terhadap *Product Domestic Brutto (PDB)* setelah sektor Minyak dan Gas. Oleh karenanya sangat beralasan apabila pemerintah - sejak zaman Orde Baru, menempatkan sub sektor agro industri sebagai salah satu prioritas pembangunan. Pertimbangannya, sangat mungkin karena potensi agro industri dijumpai pada hampir semua kawasan pembangunan kita, baik di wilayah Indonesia Bagian Barat, Tengah maupun Timur. Pada dekade 90-an, pengembangan sektor ini tampak kian menonjol dengan dikembangkannya sejumlah kawasan agro industri dan agro bisnis pada ketiga wilayah pembangunan tersebut.

Pengembangan sejumlah klaster agro industri berbasis produk unggulan daerah, merupakan model pengembangan agro industri saat itu, yang tersebar sesuai *mapping* pembangunan agro industri nasional, di bawah Departemen Perindustrian dan Departemen Pertanian yang bertindak sebagai *leading sector*-nya. Sejumlah kawasan ditetapkan secara baku sebagai kawasan agro industri, bahkan penganggarannya pun di *support* secara penuh melalui APBN dan APBD Provinsi, sementara kabupaten/kota bertugas sebagai penyedia lahan, fasilitator dan penyeleksi kelompok binaan. Pengembangan Kawasan Agro industri di Provinsi Jawa Barat saat itu, diarahkan di sejumlah kabupaten yang berlokasi di wilayah Jawa Barat bagian Selatan, seperti Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten

Tasikmalaya di bawah koordinasi Bappeda Provinsi Jawa Barat, antara lain melalui program unggulan bernama “Cipamatuh” (Cikuray, Papandayan, Malabar dan Patuha) dan PPWT (Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu).

Mengingat proyek pengembangan kawasan agro industri tersebut bersifat lintas wilayah dan terpadu, maka dalam pelaksanaannya melibatkan kelompok binaan yang terdiri dari para petani, pekebun dan peternak yang berada pada wilayah klaster pengembangan masing-masing. Pada pihak lain sebagai sarana pengumpulan dan *packaging* hasil produksi kelompok binaan, pemerintah membangun pula Sub Terminal Agribisnis (STA), sementara penyediaan Stasiun Agro Industri difungsikan sebagai sarana pembinaan produksi, pengolahan dan pengendali mutu produk. Tujuan utama proyek ini adalah mengembangkan produk agroindustri dan agrobisnis pada basis wilayah klaster komoditi unggulan melalui sistem *revolving*, sehingga selain dapat meningkatkan pendapatan anggota kelompok binaan dan masyarakat di lingkungan kawasan pengembangan, sekaligus menyebarkan manfaat ekonomi pada daerah sekitar kawasan pengembangan.

Model pengembangan ini sekalipun kini tidak lagi berlanjut, telah menginspirasi konsep pengembangan kawasan agro industri pada era otonomi daerah. Sejumlah sarana eks Sub terminal agri bisnis dan agro industri yang masih eksis, tetap difungsikan melalui konsep revitalisasi semisal di Kabupaten Garut dan Cianjur, juga di Kabupaten Malang Jawa Timur. Gambaran faktual ini mencerminkan, bahwa pemerintah sejak lama memiliki komitmen yang tinggi dalam mengembangkan sub sektor agro industri karena potensi komoditi agro industri tersebar luas pada hampir seluruh daerah di Indonesia. Karena itu, model pengembangan kawasan agro industri dianggap masih relevan hingga saat ini, mengingat dalam hal fasilitasi umum, kawasan agroindustri memiliki fungsi sebagai suatu kawasan

yang mengendalikan dan mengawasi serta memproduksi sejumlah sumber daya yang dapat dimanfaatkan pada kawasan tersebut, dalam hal ini yaitu lingkungan industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku utamanya.

B. Konsep Kawasan Agro Industri

Menurut Suprpto (tahun 1997), agroindustri berasal dari dua kosa kata dalam Bahasa Inggris, yaitu *agricultural* dan *industry* yang berarti, suatu industri yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku utamanya, atau suatu industri yang menghasilkan produk, yang digunakan sebagai sarana, atau *input* dalam usaha pertanian. Agroindustri dapat berupa kegiatan industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, termasuk merancang, dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Dengan demikian dalam pengertian yang lebih luas, agroindustri meliputi: industri pengolahan hasil pertanian, industri yang memproduksi peralatan dan mesin pertanian, industri *input* pertanian (pupuk, pestisida, herbisida dan lain-lain) dan industri jasa sektor pertanian.

Apabila dilihat dari sistem agribisnis (suatu bisnis berbasis usaha pertanian atau usaha lain yang mendukungnya), agroindustri merupakan bagian (sub sistem) agribisnis yang memproses dan mengolah bahan-bahan hasil pertanian, baik bahan makanan, kayu dan serat dan semacamnya, menjadi barang-barang setengah jadi, ataupun barang yang langsung dapat dikonsumsi, contohnya : makanan dan barang atau bahan hasil produksi industri yang digunakan dalam proses produksi seperti traktor, pupuk, pestisida, mesin pertanian.

Berangkat dari gambaran di atas, maka agroindustri merupakan sub sektor yang cukup luas, karena meliputi dua sektor, mulai dari industri hulu sektor

pertanian, sampai dengan industri hilirnya. Industri hulu, adalah industri yang memproduksi peralatan (*equipment*) dan mesin pertanian, serta industri yang menyediakan sarana produksi, yang digunakan dalam proses budidaya pertanian. Industri hilir, merupakan industri yang mengolah hasil pertanian menjadi bahan baku, atau barang yang siap dikonsumsi, atau merupakan industri pasca panen dan pengolahan hasil pertanian. Agroindustri pengolahan hasil pertanian, merupakan bagian dari agroindustri, yang khusus mengolah bahan baku yang bersumber dari tanaman, binatang, ikan dan sejenisnya. Pengolahan dimaksud, meliputi proses transformasi, pengawetan produk melalui proses perubahan fisika atau kimiawi, penyimpanan, pengepakan, dan distribusi.

Dengan demikian, posisi pelaku agroindustri pengolahan hasil pertanian, berada diantara petani produsen dengan konsumen, atau pengguna hasil agroindustri. Untuk memudahkan kita mengenal jenis industri ini, dapat dilihat dari ciri-cirinya, yaitu: (a) dapat meningkatkan nilai tambah suatu bahan, (b) menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan, dipasarkan atau digunakan atau dimakan, (c) meningkatkan daya saing, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan (d) menambah pendapatan dan keuntungan produsen.

C. Jawa Barat sebagai Rujukan Kawasan Agroindustri

Agar upaya transformasi sistem dari usaha agribisnis menuju sistem usaha agribisnis maju (modern) berhasil, syarat utamanya adalah sistem pertaniannya sendiri, harus tangguh dan modern (Baharsjah,1996). Sejauh ini Provinsi Jawa Barat, tengah terus dikembangkan sebagai tempat rujukan pengembangan kawasan industri berbasis agro. Perlu diketahui, bahwa hingga saat ini, Indonesia belum memiliki kawasan industri berbasis agro yang mampu menghasilkan nilai tambah yang diharapkan.

Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar Deddy Widjaja (2018), bahwa pengembangan kawasan industri agro diarahkan ke Jawa Barat bagian selatan. Hal itu disesuaikan dengan kondisi geografis di wilayah tersebut yang dinilai cocok untuk pengembangan budidaya pertanian, selain padi. Sementara untuk wilayah di bagian Utara, seperti Cirebon, Indramayu, Kabupaten Bekasi, dan Karawang mayoritas usaha pertaniannya budi daya padi. Pembangunan Kawasan Agroindustri, diarahkan sesuai dengan karakteristik hasil pertanian di daerah tersebut.

Deddy Widjaja lebih lanjut mengatakan, bahwa industri agro di Jawa Barat hingga saat ini, masih bersifat sporadis, padahal Jawa Barat memiliki tiga komoditas unggulan yang berorientasi ekspor, yaitu : teh, kopi, dan kina. Namun demikian, harga komoditas kopi dan teh, sering mengalami fluktuasi, dikarenakan berbagai sebab. Salah satu alasannya, karena teh dari Jawa Barat dijual tanpa campuran. Perlu *will* kuat dari pemerintah, untuk mendorong kawasan tersebut menjadi kawasan industri agro terpadu. Hal ini, tentunya memerlukan koordinasi yang intens, antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, menurut Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian, Imam Haryono (2017), saat ini memang belum ada kawasan industri khusus untuk agro. Karena, hasil agroindustri terpencar-pencar di setiap daerah dan masing-masing memiliki produk unggulannya, sehingga agak sulit untuk digabungkan pada suatu kawasan khusus agro. Selain itu dari segi investasi, pemerintah juga tidak bisa memaksakan suatu kawasan industri untuk menginvestasikan sektor tertentu, mengingat kawasan industri biasanya dikelola oleh pihak swasta.

D. Pengembangan Agroindustri

Agroindustri di Indonesia, sesungguhnya memiliki peluang besar untuk berkontribusi pada pertumbuhan dan penguatan basis ekonomi makro nasional. Sebagai bukti, ditunjukkan saat krisis multi dimensional melanda Indonesia pada tahun 1997-1998, agroindustri ternyata mampu berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa kelompok agroindustri mampu bertahan di masa krisis tersebut, karena mengandalkan *local contain*, tidak bergantung pada bahan baku dan bahan tambahan impor.

Strategi pembangunan agroindustri yang tepat, seyogianya didukung oleh sumber daya yang memadai, dan inklusif dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Hal ini tiada lain mengingat, bahwa produk agroindustri yang memiliki daya saing tinggi, akan memacu perolehan devisa, dan berkontribusi positif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Di samping itu, akan memperluas lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan pelaku agroindustri, baik sektor hulu, maupun hilir, terutama para pelaku usaha tani, perkebunan, peternakan, perikanan dan nelayan. *Last but not least*, strategi pengembangan agro industri yang baik dan tepat, sekaligus akan turut memelihara mutu dan daya dukung lingkungan, sehingga dapat berlangsung secara berkelanjutan serta berpihak pada ekonomi kerakyatan.

E. Sasaran Pengembangan Agroindustri

Sasaran akhir dari pengembangan agroindustri, adalah meningkatkannya produktivitas, daya saing produk agroindustri, nilai tambah produk pertanian, dan pendapatan masyarakat perdesaan. Menurut Departemen Pertanian RI (2005), paling sedikit ada lima alasan utama mengapa agroindustri penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu :

- (1). Industri pengolahan mampu mentransformasikan keunggulan komparatif menjadi keunggulan bersaing (kompetitif), yang pada akhirnya akan memperkuat daya saing produk agribisnis Indonesia.
- (2). Produknya memiliki nilai tambah dan pangsa pasar yang besar, sehingga kemajuan yang dicapai, dapat mempengaruhi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan.
- (3). Memiliki keterkaitan yang besar, baik pada industri hulu (industri yang menyediakan sarana dalam proses produksi), ataupun pada industri hilir (industri yang mengolah hasil pertanian menjadi bahan baku atau barang yang siap dikonsumsi), sehingga mampu menarik kemajuan sektor-sektor lainnya.
- (4). Memiliki basis bahan baku lokal (keunggulan komparatif), yang dapat diperbaharui sehingga terjamin kualitasnya, serta meningkatkan pengelolaan manfaat dari sumber daya yang ada.
- (5). Memiliki kemampuan untuk mentransformasikan struktur ekonomi nasional dari pertanian ke industri, dengan agroindustri sebagai motor penggeraknya.

Mengacu pada Strategi Pembangunan Agro Industri yang telah disusun oleh Departemen Pertanian RI (2005), program pembangunan agro industri ditujukan untuk :

- 1). Membangun kawasan industri, yakni industri pengolahan yang terintegrasi dengan sentra produksi bahan baku, serta sarana penunjangnya dalam sebuah kegiatan produksi.
- 2). Membangun industri pengolahan skala rumah tangga dan kecil, yang didukung oleh industri pengolahan skala menengah dan besar, sehingga dapat meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat.

3). Membangun industri pengolahan yang berdaya saing tinggi, untuk meningkatkan ekspor, dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Prioritas utama pembangunan agroindustri, difokuskan pada produk yang memiliki keunggulan komparatif, dengan produk yang berorientasi pasar, yakni: (a) industri pengolahan hasil perkebunan, seperti industri pengolahan minyak sawit dan kelapa, industri gula, industri kopi bubuk/instan, dan industri teh olahan, dan sejenisnya. (b) industri pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura seperti, industri buah dan sayur dalam kaleng, industri minuman sari buah, industri tepung tapioka, industri pakan ternak, dan industri makanan ringan, (c) industri pengolahan hasil peternakan, seperti industri susu olahan, industri daging dalam kaleng, serta (d) industri pengolahan hasil ikutan/samping, seperti industri *agrocomposting* (pengomposan hasil pertanian), industri pakan ternak, industri karbon aktif, industri minuman dari buah jambu mete, dan lain-lain.

F. Tantangan dan Hambatan Pembangunan Agroindustri

Kendala utama yang sering dijumpai dalam pembangunan agro industri di Indonesia, adalah rendahnya kemampuan teknologi dan daya dukung sumber daya manusia dari sisi kualitas, sehingga pembangunan agroindustri berjalan lambat. Permasalahan umum lain dalam pembangunan agro industri yaitu: (1) Sifat produk pertanian yang mudah rusak dan tebal, sehingga diperlukan teknologi pengemasan dan sarana transportasi yang mampu mengatasi masalah itu; (2) Sebagian besar produk pertanian bersifat musiman, dan sangat dipengaruhi iklim, sehingga kontinuitasnya sangat tidak terjamin; (3) Kualitas produk pertanian dan industri umumnya masih rendah, sehingga daya saingnya pun rendah, baik di pasar dalam negeri maupun pasar internasional; dan (4) Sebagian besar usaha agroindustri berskala kecil, dan masih menerapkan teknologi tingkat rendah.

Kendala-kendala lain dalam pengembangan agroindustri menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI (tahun 2005), adalah:

- 1). Bahan baku yang berbentuk komoditi pertanian, belum dapat mencukupi kebutuhan industri pengolahan secara berkesinambungan;
- 2). Kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas, terutama dalam penguasaan manajemen dan teknologi, menyebabkan rendahnya efisiensi dan daya saing produk agroindustri;
- 3). Investasi di bidang agro industri kurang berkembang, antara lain karena ketidakpastian iklim usaha dan kebijakan yang inkonsisten, kesulitan memperoleh bahan baku, keterbatasan prasarana dan sarana, kelangkaan tenaga kerja yang berkualitas, penyediaan dan jangka waktu pemanfaatan lahan usaha yang sesuai dengan Hak Guna Usaha (HGU) dan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), serta sumber dana investasi dalam negeri yang relatif terbatas;
- 4). Lembaga keuangan menerapkan preferensi suku bunga yang sama antara sektor pertanian, kehutanan, industri dan jasa sehingga kurang atraktif bagi investor untuk berusaha di bidang agro industri;
- 5). Informasi peluang usaha dan pemasaran belum memadai dan belum terciptanya keterpaduan jaringan bisnis yang baik;
- 6). Masih adanya kesenjangan dalam pengembangan wilayah;
- 7). Homogenitas kebijakan pembangunan, baik regional maupun sektoral, tanpa memperhatikan keragaman yang dimiliki oleh masing-masing wilayah;
- 8). Belum terciptanya sinergi kebijakan yang mendukung iklim usaha;
- 9). Kurangnya sarana, prasarana dan transportasi;

10). Kemitraan usaha dan keterkaitan produk antara hulu dan hilir belum berjalan lancar;

11). Masih minimnya kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi proses, terutama di kalangan pelaku industri, lembaga-lembaga penelitian maupun perguruan tinggi;

12). Ketergantungan pada lisensi produk dan teknologi yang (kesemuanya) bersumber dari luar negeri.

Selain sekian banyak permasalahan di atas, masih ditambah pula dengan permasalahan di dalam negeri, antara lain: Kurang tersedianya bahan baku secara *continue*, kurang nyataanya peran agroindustri di pedesaan, kurang konsistennya kebijakan pemerintah terhadap agroindustri, ketidakmemadaan permodalan, keterbatasan pasar, lemahnya infrastruktur, minimnya penelitian dan pengembangan produk, lemahnya keterkaitan antara industri hulu dan industri hilir, kualitas produksi dan *prossesing* yang tidak kompetitif serta lemahnya *entrepreneurship*.

Permasalahan yang berasal dari faktor eksternal, sesungguhnya merupakan dampak dari diberlakukannya mekanisme perdagangan bebas. Pada era perdagangan bebas, semua negara mempunyai peluang yang sama, sehingga masing-masing negara bersaing ketat memperebutkan pasar dunia. Tiap-tiap negara “dipaksa” untuk berusaha meningkatkan kualitas dan efisiensi produknya, dalam upaya meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitifnya, sekalipun pada akhirnya hanya negara majulah yang kembali memenangi persaingan tersebut. Pada pihak lain, pada *era free trading* dewasa ini, sejumlah negara maju, dengan alasan melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen, telah menetapkan standar mutu internasional, seperti: *ISO 9000*, *ISO 14.000*, *HACCP (Haazard Analysis and Critical Control*

Point), *Nutritional Labelling and Education Act* dan pengedepanan HAM (Hak Asasi Manusia). Pemberlakuan standar mutu internasional tersebut, dirasakan oleh kebanyakan negara-negara berkembang, sebagai suatu hambatan non tarif.

5. Peluang Pembangunan Agroindustri

Berbagai kendala dan permasalahan dalam pembangunan agroindustri, selayaknya menjadi perhatian lebih serius dari banyak pihak, seandainya Indonesia ingin memainkan peran besar dalam perdagangan internasional, mengingat Indonesia memiliki beberapa keunggulan, baik secara *natural* maupun komparatif. Jenis keunggulan tersebut, apabila mampu ditingkatkan menjadi keunggulan kompetitif, akan menghasilkan *trade gain* yang besar. Sektor agroindustri, khususnya memiliki peluang untuk berkembang secara meyakinkan, terutama bila dikelola secara arif dan bijaksana, mengingat :

- 1). Jumlah penduduk Indonesia yang kini berjumlah lebih dari 220 juta jiwa merupakan aset nasional dan sekaligus berpotensi menjadi konsumen produk agroindustri. Namun bila potensi ini tidak dikelola dengan baik, maka justru akan menjadi beban bagi kita semua. Tingkat pendapatan masyarakat yang semakin meningkat merupakan kekuatan yang secara efektif akan meningkatkan permintaan produk pangan olahan.
- 2). Berlangsungnya era perdagangan bebas berskala internasional, telah semakin membuka kesempatan untuk mengembangkan pemasaran produk agroindustri.
- 3). Penyelenggara otonomi daerah memberikan harapan baru akan munculnya prakarsa dan swakarsa daerah untuk menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan program dan aspirasi wilayah yang spesifik dan berdaya saing. Peningkatan kinerja pemerintah daerah, bila

dibarengi dengan stabilitas politik merupakan faktor penting yang akan menarik minat para investor untuk mengembangkan agroindustri.

4). Dari sisi suplai sumberdaya, agroindustri masih memiliki bahan baku yang beragam, berlimpah dalam jumlah dan tersebar di seluruh penjuru tanah air. Sementara itu kapasitas produksi usaha agroindustri yang masih dapat ditingkatkan. Modernisasi dan teknologi pengolahan yang semakin banyak diaplikasikan, merupakan jaminan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi agroindustri.

5). Dalam proses produksinya, bahanbaku agroindustri tidak bergantung pada komponen impor. Sementara pada sisi hilir, produk agroindustri umumnya berorientasi ekspor.

Peluang agroindustri, dapat dilihat dari sisi permintaan terhadap produk agroindustri, dan dari sisi penawaran bahan baku dan tenaga kerja. Indonesia merupakan negara pertanian yang sangat kaya dengan hasil-hasil primer dari tanaman perkebunan, tanaman pangan, peternakan dan perkebunan sebagai bahan baku agroindustri. Dari sisi permintaan, agroindustri dapat menghasilkan produk olahan, untuk memenuhi permintaan dalam negeri, promosi ekspor dan substitusi impor. Berkembangnya sektor pariwisata akhir-akhir ini, khususnya wisata domestik memperlihatkan peningkatan tingkat konsumsi pangan olahan secara signifikan. Fenomena ini, kian meyakinkan, bahwa peluang sub sektor agroindustri memiliki prospek yang cerah dan terbuka luas.

6. Prospek Pembangunan Sistem Agroindustri di Indonesia

Dilihat dari beberapa aspek, seperti potensi sumber daya yang dimiliki, arah kebijakan pembangunan nasional, potensi pasar domestik dan internasional produk-produk agroindustri, peta kompetisi dunia, sebetulnya Indonesia memiliki prospek cerah, apabila berhasil mengembangkan sistem

agroindustri. Prospek ini secara aktual dan faktual, didukung oleh hal-hal sebagai berikut:

Pertama, pembangunan sistem agroindustri di Indonesia, telah menjadi keputusan politik. Arah pembangunan ekonomi, sebagaimana dimuat dalam GBHN 1999-2004, antara lain mengamanatkan, upaya membangun perekonomian nasional, berbasis agraris dan maritim yang mengedepankan keunggulan komparatif. Hal dimaksud tidak lain, adalah pembangunan sistem agroindustri.

Kedua, pembangunan sistem agroindustri, searah dengan amanat konstitusi diantaranya, Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1999, Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 tahun 2000, tentang Otonomi Daerah. Dari kacamata ekonomi, esensi otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Caranya, dengan mendayagunakan sumber daya yang tersedia di setiap daerah, yang tidak lain berasal dari sumber daya di bidang agroindustri. Sejumlah fakta sejauh ini, memperlihatkan, bahwa pada hampir seluruh daerah sekitar 80 persen struktur perekonomiannya (pembentukan PDRB, penyerapan tenaga kerja, kesempatan berusaha, ekspor), disumbangkan oleh sub sektor agroindustri dan agribisnis.

Ketiga, Indonesia memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dalam agroindustri, berkat kekayaan keragaman hayati (*bio diversity*), daratan dan perairan terbesar di dunia, serta lahan yang relatif luas dan subur. Berkat kekayaan sumberdaya hampir tak terbatas itu, maka demikian banyak produk *agro industry* yang dapat dihasilkan dari bumi Indonesia. Selain itu, kita pun didukung oleh jumlah sumber daya manusia (SDM) terbanyak ke-4

di dunia, beragam modal sosial berupa kelembagaan petani, *local wisdom*, *indigenous technologies* yang kuat, dan infrastruktur agroindustri dan agribisnis yang terus menerus ditingkatkan, untuk membangun sistem agroindustri/agribisnis.

Keempat, pembangunan sistem agroindustri/agribisnis, yang berbasis pada sumberdaya domestik (*domestic resources based, high local content*) tidak memerlukan impor dan pembiayaan eksternal (utang luar negeri) yang besar. Hal ini sesuai dengan tuntutan pembangunan ke depan, yang tidak berkehendak lagi menambah jumlah utang luar negeri, mengingat utang luar negeri Indonesia yang sudah terlalu besar.

Kelima, dalam menghadapi persaingan ekonomi global, *bargaining power* Indonesia, tak cukup memadai untuk bersaing pada produk-produk yang sudah dikuasai negara maju, semisal produk otomotif atau elektronik buatan Jepang, Korea Selatan, Jerman atau Perancis. Untuk itu, Indonesia mesti cerdas memilih produk-produk, yang memungkinkan Indonesia mampu bersaing, karena keunggulan pada produk tersebut memang berada di tangan kita. Produk tersebut tak lain, adalah produk-produk agribisnis, semisal aneka produk berbahan baku karet, bermacam produk turunan dari *Crude Palm Oil* (deterjen, sabun, *palm oil*, dan sejenisnya). Biarlah Jepang menghasilkan mobil, tetapi Indonesia yang menghasilkan ban-nya, bahan bakarnya (*palm oil*, diesel) dan yang lainnya.

7. Agroindustri Berbasis Sistem Usaha Tani Terpadu

Sistem pertanian terpadu, pada dasarnya diarahkan pada upaya memperpanjang siklus biologis, dengan mengoptimalkan pemanfaatan hasil sampingan pertanian dan peternakan. Dengan cara itu, setiap mata rantai siklus akan menghasilkan produk baru yang memiliki nilai ekonomis tinggi, sehingga pemberdayaan dan pemanfaatan lahan marginal di seluruh daerah,

dapat lebih dioptimalkan. Hal tersebut dimaksudkan, guna mendukung kebijakan pemerintah dalam menjamin kecukupan pangan, melalui pengembangan sistem pertanian yang terintegrasi, misalnya tanaman pangan, pakan dan ternak, yang juga dapat dimanfaatkan hasil sampingnya, berupa produk kompos (*manure*) sebagai bahan baku pupuk organik, dan limbah pertanian yang dijadikan pakan ternak melalui pengelolaan secara terpadu dalam satu kawasan (Hidayat dkk., 2001).

Mayoritas petani Indonesia masih berpendapatan rendah, disebabkan oleh penurunan daya dukung lahan, sebagai eksese eksploitasi lahan, dan kebiasaan pola budidaya yang sekian lama diterapkan. Di sisi lain, penguasaan lahan pertanian yang semakin sempit, dan usaha pertanian yang intensif, mendorong penggunaan pestisida dan pupuk anorganik, menjadi pilihan yang dianggap praktis. Kebiasaan ini, menyebabkan kondisi fisik tanah menjadi buruk, sehingga produktivitas tanaman pertanian semakin tidak optimal. Pengurangan kandungan bahan organik, pada sebagian besar tanah di Indonesia dewasa ini, menunjukkan perlunya usaha peningkatan kandungan bahan organik hingga dua kali lipat, sebagai upaya mengembalikan kesehatan tanah (Haryanto, 2004). Dengan demikian, penambahan bahan organik pada lahan pertanian intensif sangat perlu dilakukan, guna meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk anorganik, sehingga produktivitas usaha tani menjadi lebih optimal. Usaha tani terpadu, adalah usaha tani yang mengintegrasikan budidaya tanaman dengan peternakan, dengan tujuan mengawinkan usaha tani dengan usaha ternak, sehingga kedua kegiatan tersebut dapat bersinergi. Usaha ini diyakini dapat mengoptimalkan usaha agribisnis secara menyeluruh dalam suatu sistem yang terintegrasi, karena melalui kombinasi tanaman-ternak, diharapkan dapat turut meningkatkan kesejahteraan petani (Jarmani, 2004).

Salah satu penerapan konsep pertanian terpadu berkelanjutan-lintas sektoral, serta ramah lingkungan, adalah konsep *Low External Input Sustainable Agriculture* (LEISA) yang diusahakan dalam suatu kawasan pertanian, baik untuk tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan. Melalui teknik ini, dapat sekaligus dikembangkan usaha pemeliharaan ternak dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal, sehingga limbah tanaman yang berlimpah selama musim panen, dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, dan sebaliknya kotoran ternak dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesuburan tanah, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas lahan (Hidayat dkk., 2001).

Melalui sistem pertanian terpadu, petani memanfaatkan limbah dari tanaman yang dibudidayakan, dan hewan ternak dimanfaatkan sebagai alternatif hara, untuk meningkatkan kesuburan tanah, sehingga perbaikan kesuburan lahan, dapat dilakukan dengan biaya yang relatif kecil. Selain itu, pelaksanaan sistem usaha tani terpadu, memungkinkan peningkatan penghasilan petani, melalui interaksi tanaman dengan hewan ternak yang dipelihara. Pola usaha tani yang terintegrasi, antara tanaman dengan ternak, memberikan manfaat yang besar bagi petani, karena petani dapat memanfaatkan pupuk organik yang dihasilkan dari ternak, untuk memupuk tanamannya. Limbah pertanian berupa: jerami, kulit kopi daun singkong, daun jagung, daun kacang, daun ubi, pisang, dimanfaatkan petani untuk pakan ternak. Pola integrasi antara tanaman dan ternak, mampu menekan biaya produksi, sehingga pendapatan petani dapat ditingkatkan (Hidayat dkk., 2001).

Salah satu potret kecil tentang pengolahan lahan tradisional di tanah air kita, adalah apa yang terjadi pada lahan pasang surut di Kabupaten Pulang Pisau, yang hingga saat ini masih memprihatinkan, akibat petani terkendala oleh

terbatasnya tenaga kerja, dan biaya (modal) usaha tani. Pengetahuan petani tentang cara pengelolaan lahan pasang surut, saat ini juga masih sangat terbatas pada pengetahuan berusaha tani yang dikuasai secara turun-temurun (Soewarno dan Susilawati, 1997). Tradisi usahatani yang lekat dilakukan pada lahan pasang surut seperti ini, adalah usaha tani secara monokultur dengan komoditas padi lokal berumur panjang (8 bulan). Kondisi ini, tentu saja sangat memberatkan para petani, karena pengolahan lahan yang apa adanya, dengan hasil yang sangat minim.

Dalam kenyataannya, gambaran tersebut berlaku pula pada sejumlah hamparan luas lahan pasang surut, padabanyak wilayah di Indonesia, dan secara sosial ekonomi menjadi pemicu bertambahnya jumlah petani miskin, dari waktu ke waktu. Secara teknis, sesungguhnya karakteristik lahan semacam di Kabupaten Pulau Pisang, dapat disiaati dengan menerapkan pola usaha tani terintegrasi, sebagaimana yang telah dipraktekkan selama ini.

Peran ternak dapat dimasukkan kedalam bagian integral sistem usaha tani, hingga saling berintegrasi dan memberikan nilai tambah. Tanaman semusim ataupun tanaman tahunan, tidak hanya menghasilkan produk pangan sebagai produk utama, akan tetapi juga menghasilkan produk sampingan, berupa limbah pertanian yang dengan cara sederhana dapat diubah menjadi pakan ternak (Badan Litbang Pertanian, 2000). Pola integrasi ternak dengan tanaman pangan dan perkebunan, mampu menjamin keberlanjutan produktivitas lahan, melalui pelestarian sumberdaya alam yang *renewable*. Pola ini dikenal sebagai *crop-livestock system (CLS)*, dan dewasa ini sudah banyak dikembangkan di berbagai negara Asia (Diwyanto dan Haryanto, 2003).

Selain memegang peranan penting sebagai pemasok daging, ternak sapi bagi para petani tidak hanya berfungsi sebatas sumber pendapatan, tetapi juga sebagai sarana investasi, tabungan, fungsi sosial, sumber pupuk dan membantu dalam pengolahan tanah (Hermawan dkk., 1996). Limbah ternak sapi oleh petani dapat diolah menjadi pupuk kandang, dan tabungan yang memberikan rasa aman pada saat kekurangan pangan, di samping sebagai ternak kerja (Najib et al., 1997). Ternak selain menghasilkan produk utama, juga menghasilkan hasil sampingan berupa *urine*, yang dengan inovasi sederhana dapat diubah menjadi kompos yang bermutu, dalam jumlah yang relatif besar. Penggunaan kompos pada lahan pertanian, akan mendukung kelestarian lingkungan sekaligus mewujudkan “*organic farming*” yang berdaya saing tinggi (Anonim, 2000).

Pengalaman panjang para petani dalam bertani dan beternak sapi, tanpa disadari telah menghasilkan sistem usaha tani terpadu, sekalipun belum diterapkan secara optimal. Contohnya, seperti kotoran ternak sapi perah yang hingga kini belum sepenuhnya diolah menjadi pupuk. Keterpaduan komoditas dalam usahatani yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat petani, lebih banyak didasarkan pada pengertian terpadu dalam peran ekonomi, sedangkan secara natural (biologi) belum menunjukkan suatu keterpaduan (Jarmani. S.N. 2004).

Pertanian yang diarahkan menjadi agroindustri, yang menggabungkan usahatani dengan industri pemasok bahan dan sarana produksi pertanian, di satu pihak, dengan industri pengolah hasil pertanian di pihak lain, merupakan langkah yang keberlanjutan dan dapat menjadi sumber pendapatan yang memadai. Hal ini senada dengan pendapat Notohadiprawiro (1988), bahwa dengan sistem agroindustri yang mengaitkan industri pembuat sarana

produksi pertanian dan pengolahan hasil pertanian, dengan budi daya pertanian menjadi komponen pemandu, industri-industri tersebut dapat dibangun dengan konsep industri rakyat, atau disebut juga industri pedesaan.

Paradigma pembangunan agroindustri di Kalimantan Tengah adalah salah satu contoh pertanian berkelanjutan, yang berada dalam lingkup pembangunan manusia dan masyarakat. Paradigma pembangunan agroindustri ini, bertumpu pada kemampuan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraannya dengan kemampuan sendiri. Mengingat semua itu, maka pembangunan bidang agroindustri, perlu dirumuskan sejalan dengan paradigma baru tersebut, yakni pembangunan yang berangkat dari upaya meningkatkan kualitas dan profesionalitas sumberdaya manusia, sebagai pelaku aktif pembangunan agroindustri itu sendiri.

Dengan demikian, pembangunan agroindustri, semestinya bertolak dari optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam, dan penerapan teknologi maju yang murah, sederhana, dan efektif, yang dibarengi dengan penataan dan pembangunan kelembagaan pada tingkat pedesaan. Mengapa mesti dibarengi dengan penataan lembaga pedesaan? Jawabannya tiada lain mengingat, bahwa hingga era milenial ini, mayoritas penduduk pedesaan, masih mengandalkan mata pencahariannya pada sektor pertanian. Terkait dengan hal ini, Jarmani (2004) menegaskan, bahwa keterpaduan sektor pertanian dan non-pertanian, akan semakin cepat terjadi, bila tersedia prasarana ekonomi yang mendukung kegiatan ekonomi di pedesaan. Pembangunan agroindustri dengan paradigma baru ini, diharapkan dapat menjadi solusi jitu, dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus menjadi mesin pendorong bagi bertumbuhnya sektor non pertanian.

A. Latar Belakang

Secara tradisional, pembangunan umumnya diartikan sebagai peningkatan yang terus menerus pada *Gross National Product* (GNP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Pada level daerah, makna pembangunan tradisional tersebut difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu provinsi, kabupaten atau kota. Definisi pembangunan tradisional ini, sering dikaitkan dengan strategi mengubah struktur perekonomian suatu negara menjadi negara industri, yang dalam prosesnya secara umum ditandai dengan mulai tergesernya kontribusi sektor pertanian oleh sektor industri. Paradigma pembangunan modern memiliki pola pandang yang berbeda, dengan pembangunan ekonomi tradisional. Hal dimaksud antara lain berkenaan dengan penggunaan aksentuasi pada beberapa variabel utama pembangunan, yang secara khusus ditambahkan dalam upaya mendapatkan hasil evaluasi yang lebih objektif atas pelaksanaan pembangunan, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang. Dalam mengukur hasil-hasil pembangunan, sejumlah ekonom modern mulai mengedepankan apa yang disebut dengan *Dethronement of Gross National Product* (penurunan tahta pertumbuhan ekonomi), pengentasan kemiskinan, pengurangan distribusi pendapatan yang semakin timpang, dan penurunan tingkat pengangguran (Mudrajat, 2003).

Rahardjo Adisasmita (2005) berpandangan, bahwa pembangunan wilayah (*regional*) merupakan fungsi dari sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi

dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas. Pengertian lain tentang pembangunan ekonomi wilayah (regional), di antaranya menurut pelopor Mazhab Ekonomi Klasik yaitu Adam Smith yang mengatakan, bahwa pembangunan ekonomi terjadi karena faktor kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk.

Dengan demikian, dalam konteks pembangunan sebuah negara atau bangsa, pembangunan wilayah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional negara tersebut, sehingga baik konsep maupun prosesnya mesti mengacu dan sejalan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Sesuai dengan judul buku ini, maka pada bab ini kita akan melihat bagaimana pembangunan wilayah tersebut dilaksanakan, mulai dari perancangan, proses dan pelaksanaannya, berikut dinamika, tantangan dan upaya yang ditempuh sebagai alternatif solusinya, yang dilengkapi pula dengan analisis seperlunya.

| PN | Isu Strategis Provinsi | Kebutuhan Dukungan | | | | |
|----|---|--|---|--|---|--|
| | | Pemerintah Pusat | Pemerintah Prov/Kab/Kota/Swasta | BUMN/BUMD | Pendanaan | Target |
| 6 | Perkuatan Domestic Connectivity Pembangunan Jalan dari akses jembatan suramadu menuju pelabuhan socah Isu Strategis | KemenPU K/L Pembebasan Lahan pembangunan akses ke pelabuhan socah 750 km (APBN-Balai V) Pengaspalan 5 km, lebar 14 m (4 jalur) APBN, Nalair V TA 2012 | APBD Provinsi Jatim APBD Prov Penyusunan AMDAL, FS & DED Pembebasan lahan pemb akses ke Pel Socah 10.475 km | PT. Misi Pembebasan Lahan pemb akses ke Pel Socah 2.500 km | Pusat: ... Daerah: ... BUMN/BUMD/Swasta: ... Total: ... | Diharapkan pembangunannya selesai tahun 2014 Diisi menjadi 1 catatan dalam kolom isian BUMN/BUMD/Swasta |
| | | Dirinci dalam program dan Kegiatan APBD Kegiatan Strategis -> Dijabarkan lagi dalam rincian: Program, Kegiatan, Sasaran, Indikator Sasaran, Lokasi | | | | |

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015

Gambar 9.1 Contoh Matriks Energi Isu Strategis Provinsi

B. Gambaran Umum Pembangunan Wilayah

Uraian selanjutnya secara khusus akan mengungkap isu-isu aktual pembangunan wilayah di Jawa Barat, yang dikenal sebagai salah satu provinsi dengan akselerasi pembangunan cukup tinggi. Isu-isu dimaksud terkait dengan pembangunan wilayah, yang oleh banyak pihak diyakini sebagai sebuah strategi yang tepat, dalam memacu percepatan dan pemerataan pembangunan pada suatu daerah (*region*), pada wilayah geografis yang cukup luas, berpenduduk banyak, dan memiliki beragam kekayaan sumber daya, namun terkendala oleh sejumlah masalah di dalamnya. Pada beberapa negara, atau daerah-daerah dengan karakteristik kendala pembangunan seperti itu, ternyata berhasil mendapatkan solusi efektif sekaligus mampu bangkit, melalui penerapan konsep pembangunan wilayah terpadu.

Bagaimana strategi pembangunan tersebut diimplementasikan dalam skala kewilayahan, khususnya pada klaster pembangunan bagian Timur, dan bagian Barat Provinsi Jawa Barat, tampaknya hingga saat ini masih menjadi isu menarik untuk dibahas. Hal ini mengandung makna yang penting dalam rangka membangun spirit dan menyamakan kerangka visi pembangunan bangsa, di tengah kehidupan global dewasa ini yang sangat kompetitif, dan sarat dengan fenomena perubahan lingkungan yang super cepat, liar serta pervasif. Untuk itu, mari kita cermati, potret empirik tentang apa dan bagaimana proses serta dinamika pembangunan wilayah di Kawasan Ciayumajakuning (wilayah Timur) dan di kawasan wilayah Barat-Utara, dalam hal ini di Kabupaten Karawang.



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015
 Gambar 9.2 Sinergi dalam Kerangka Pengembangan Wilayah

C. Pembangunan Kawasan Ciayumajakuning

Pembangunan wilayah di bagian Timur Jawa Barat, yang dikenal dengan akronim “Ciayumajakuning” (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan), mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dikarenakan berada di salah satu wilayah pusat pertumbuhan pada klaster wilayah Timur Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini, mencoba membangun cara pandang baru terhadap konsep Trilogi Pembangunan, yang diaktualisasikan ke arah terwujudnya pemerataan (*equity*), pertumbuhan (*eficiency*), dan keberlanjutan (*sustainability*) pembangunan berikut hasil-hasilnya dalam satu lingkup wilayah tertentu. Munculnya cara pandang baru tersebut, sangat mungkin dilatarbelakangi oleh capaian hasil pembangunan, baik pada skala nasional maupun regional yang sejauh ini, masih menyisakan banyak persoalan klasikal, yang menuntut perhatian dan solusi bersama. Salah satunya, menyangkut persoalan

“pemerataan pembangunan” yang hingga kini masih nyaring dipermasalahkan oleh para para pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya, terutama yang berada di daerah (kabupaten/kota).

Padahal sejatinya, sejak dari awal kata “pemerataan pembangunan”, sama sekali tidak dimaksudkan, bahwa pembangunan mesti sama rata di semua daerah, namun seyogianya dipahami sebagai pembangunan, yang menampilkan keunikan dan mendayagunakan potensi daerah sedemikian rupa, sekaligus mampu menghasilkan *multiplier effect* bagi pertumbuhan dan kesejahteraan sosial ekonomi penduduk pada seluruh wilayah. Karena kita tahu, bahwa dalam kenyataannya setiap wilayah atau bagian dari wilayah, secara spasial memiliki beragam potensi, dan kondisi yang berbeda-beda. Provinsi Jawa Barat sendiri, dengan jumlah penduduk sekitar 48,67 juta jiwa (tahun 2018) merupakan provinsi dengan penduduk terbanyak di antara 34 provinsi di NKRI, artinya setara dengan 18,37 persen total penduduk Indonesia. Namun hasil pendataan Badan Pusat Statistik (tahun 2017) memperlihatkan, bahwa aktivitas perekonomian di Jawa Barat, hanya terkonsentrasi pada beberapa daerah tertentu saja, yang berada di sekitar Jakarta dan Bandung dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), sebesar 60 persen.

Kondisi itu, menginspirasi sejumlah daerah di kawasan Timur Jawa Barat, yakni Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan, yang pada masa sebelumnya kurang diperhitungkan, untuk bangkit menjadi kekuatan ekonomi baru Jawa Barat, setelah kawasan Bandung Raya. Dalam upaya mengoptimalkan hasil-hasil pembangunannya, kelima daerah tersebut, bersepakat untuk menerapkan konsep pembangunan wilayah secara terpadu, dan memproyeksikan kawasan Ciayumajakuning, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang prestisius pada

tahun 2028 mendatang. Diharapkan kawasan tersebut, dapat bangkit menjadi magnet raksasa perekonomian, baik pada skala internasional, nasional, maupun regional.

Sejalan dengan konsep pembangunan wilayah tersebut, Kota Cirebon dimunculkan dengan *brand* “Cirebon Metropolis” atau “Cirebon Raya”, dan difungsikan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), serta pusat pertumbuhan wilayah Jawa Barat bagian Timur, sekaligus sebagai pusat kawasan andalan Ciayumajakuning dan daerah sekitarnya. Sebagai pusat kegiatan nasional, Kota Cirebon dirancang menjadi kota metropolis, yang berfungsi sebagai sentra dan garda terdepan pembangunan wilayah Jawa Barat Bagian Timur, yang berkemampuan melayani berbagai kebutuhan entitas wilayah pertumbuhan, baik dalam skala nasional, regional, bahkan internasional.

D. Kota Cirebon dalam Perspektif Pembangunan Wilayah

Ada beberapa alasan kuat mengapa suatu daerah diposisikan sebagai pusat pertumbuhan pada sebuah kawasan pembangunan. Alasan yang paling rasional, umumnya terkait dengan faktor-faktor *feasibilities* pembangunan itu sendiri, yang menyangkut kelayakan sejumlah aspek, baik aspek geografis, demografis, ekonomi, dan sosial budaya. Bila kita melihat faktor-faktor tersebut, tampaknya penempatan Kota Cirebon sebagai pusat pembangunan wilayah, sangatlah tepat. Untuk itu, marilah kita kenali lebih dekat, bagaimana sosok Kota Cirebon dilihat dari perspektif pengembangan wilayah pembangunan, beserta aspek lain yang terkait di dalamnya.

1. Deskripsi Umum Kota Cirebon

Kota Cirebon terletak pada 6°41'LS dan 108°33'E di bagian Utara dan bagian Timur Pulau Jawa. Luas wilayahnya, dari Barat ke Timur, membentang sepanjang 8 kilometer, sementara bentang jarak Utara - Selatan, sepanjang 11

kilometer, dengan ketinggian dari permukaan laut ± 5 meter, sehingga secara geografis tergolong ke dalam dataran rendah. Kota Cirebon dapat ditempuh melalui jalan darat, sejauh kurang lebih 130 km dari arah Kota Bandung, dan ± 258 km dari arah Kota Jakarta. Letaknya yang berada di wilayah pantai, menjadikan Kota Cirebon memiliki wilayah dataran yang lebih luas, dibandingkan dengan wilayah perbukitannya. Total luas Kota Cirebon kurang lebih 37,54 km², dengan dominasi penggunaan lahan untuk perumahan (32%), dan lahan pertanian (38%).

Sebagai pusat perdagangan, Kota Cirebon sangatlah strategis karena menjadi simpul pergerakan antarkota/wilayah seperti: DKI Jakarta-Jawa Barat dan Jawa Tengah. Hasil-hasil pertanian dari perdesaan, dan pemasaran barang-barang produksi dari perkotaan, serta dari regional kota, terkonsentrasi di kawasan kota. Tersedianya moda transportasi dengan tingkat aksesibilitas yang cukup tinggi, menjadikan Kota Cirebon sebagai salah satu pusat distribusi barang, jasa, dan mobilitas penduduk di Provinsi Jawa Barat bagian Timur. Kondisi kota tersebut, sangat menunjang peran Kota Cirebon dalam lingkup regionalnya, yaitu sebagai kota Orde I (pengembangan wilayah Timur di Provinsi Jawa Barat) dalam hirarki pelayanan regional Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kota Cirebon ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dan difungsikan sebagai pusat pelayanan berskala regional, di Wilayah Pengembangan Ciayumajakuning. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Kota Cirebon merupakan pusat pengumpul barang-barang hasil produksi, dan pusat pelayanan perdagangan dan jasa bagi wilayah sekitarnya. Didukung dengan potensi wisata alam dari Kabupaten Kuningan, potensi minyak Balongan dari Kabupaten Indramayu, potensi rotan Kabupaten Cirebon, dan potensi hasil

pertanian Indramayu, menjadikan Kota Cirebon sebagai kota bisnis tempat berkumpulnya para investor dan pebisnis, dari dalam maupun luar negeri.

Struktur perekonomian Kota Cirebon didominasi oleh sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa. Sampai dengan tahun 2010, komposisi kontribusi sektor-sektor perekonomian Kota Cirebon adalah: industri pengolahan (41,32%), diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (29,8%), sektor pengangkutan dan komunikasi (13,56%), sektor jasa-jasa (6,06%). Sedangkan sektor lainnya (9,26%) meliputi: sektor pertambangan, pertanian, bangunan, listrik, dan gas, rata-rata menyumbang 2-3 persen. Pada sektor informal, terjadi pertumbuhan yang sangat pesat, mengingat Kota Cirebon merupakan sasaran urbanisasi, hingga jumlah Pedagang Kaki Lima-nya (PKL) dari waktu ke waktu, terus bertambah secara signifikan. Fenomena ini di satu sisi menggembirakan, karena menunjukkan dinamika ekonomi akar rumput, tapi di sisi lain jika tidak dikelola dengan baik, sangat berpotensi menimbulkan persoalan yang serius, pada aspek ketertiban, tata ruang dan estetika kota.

Didin (dalam Susilo, 2011) meyakini, bahwa Kota Cirebon memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan, dengan alasan:

- Kota transit yang terletak di jalur Pantura, dan dapat dicapai dengan sangat mudah dengan segala moda transportasi darat.
- Kota dengan julukan “Kota Peninggalan Wali Sanga”, dengan sejumlah warisan budaya, antara lain: Keraton Kesepuhan, Kanoman dan Kacirebonan, yang berlokasi di tengah-tengah kota dengan aktivitas niaga yang semakin dinamis.

- Kota dengan budaya yang majemuk, karena dibangun di atas akulturasi berbagai suku bangsa, memiliki kesenian yang kaya dan beraneka ragam.
- Memiliki sejumlah benda peninggalan budaya, yang bernilai tinggi.
- Memiliki berbagai macam kuliner khas yang lezat.
- Masyarakat kota yang memiliki sikap terbuka, dan berpikiran maju.
- Memiliki potensi corak batik yang unik, seperti corak “Karangan” dan “Mega Mendung”.

Selain itu, Kota Cirebon disebut juga sebagai *Caruban Nagari* (penanda Gunung Ciremai) dan sebagai “poros dunia” yang tentunya memiliki arti dan makna yang sangat unik, terkait dengan posisi Cirebon sebagai pusat pembangunan wilayah Ciayumajakuning.

2. Sejarah Kota Cirebon

Letak Cirebon yang strategis, telah menjadikannya sebagai kota pelabuhan yang dikenal luas sejak zaman dahulu, sehingga banyak dikunjungi oleh para pendatang dari berbagai belahan dunia, seperti para pedagang yang berasal dari Cina, Eropa, Arab dan India. Sebagian dari pendatang tersebut, banyak yang kemudian menetap bahkan menikah dengan penduduk setempat, sehingga terjadilah akulturasi atau pencampuran budaya, hingga menjadikan Cirebon sebagai kota yang kaya dengan aneka budaya.

Dalam beberapa dekade terakhir, Cirebon menunjukkan perkembangan yang luar biasa pesat. Hal tersebut, antara lain ditandai dengan berdirinya hotel-hotel baru, pusat perbelanjaan dan sejumlah objek wisata, yang berperan penting dalam proses perkembangan Cirebon menuju kota modern baru. Terlebih setelah dibukanya Tol Kanci, peningkatan layanan jasa Kereta Api, dan mulai dioperasionalkannya Bandara Majalengka,

semakin memudahkan mobilitas orang, barang dan jasa, dari dan menuju Cirebon. Potensi atau kekuatan Cirebon, dalam bidang pariwisata ditopang oleh kekayaan nilai sejarah dan keragaman budayanya, sebagai produk akulturasi dari berbagai budaya, yang berasal dari Cina, Eropa, Arab dan India. Kekayaan budaya itu, tampak jelas baik dari tampilan arsitektur, kesenian, kuliner dan sosial budaya yang satu sama lain saling berbaur, menciptakan daya tarik dan pesona tersendiri.

Pada aspek sejarah, Cirebon memiliki sejumlah peninggalan bernilai tinggi, berupa artefak-artefak fisik, seperti keraton, klenteng, kereta kerajaan, makam, naskah-naskah kuno dan sebagainya, yang tentunya sangat mendukung untuk pengembangan kawasan wisata. Sekalipun, informasi dan publikasi yang memadai tentang keunikan dan keindahan peninggalan-peninggalan tersebut belum memadai, dan tidak mudah bagi seseorang, untuk mengetahui bagaimana keunggulan dan keunikannya kota tersebut sesungguhnya. Namun di balik itu, Cirebon tetap menyimpan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata yang sangat prospektif.

3. Keunggulan Kota Cirebon sebagai Kota Metropolitan

Kota Cirebon Raya merupakan metropolitan baru dan pusat pertumbuhan di wilayah Timur Jawa Barat, dengan kawasan andalannya meliputi: Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan, yang terhubung karena interaksi perkembangan kota. Perkembangan Cirebon Raya sebagai metropolitan baru, terdorong oleh langkah perluasan (ekstensifikasi) wilayah kota, ke arah daerah-daerah pinggiran, akibat dari desakan faktor sosial, ekonomi penduduk sekitar. Perluasan dan perkembangan wilayah Kota Cirebon seperti itu, berimbas positif terhadap perkembangan Kabupaten Indramayu dan

Kabupaten Kuningan, seiring dengan menguatnya intensitas hubungan antar daerah pada kawasan tersebut yang teraktualisasi lewat interaksi dan pergerakan, antara kota inti dengan daerah sekitarnya (*boundaries*).

Metropolitan Cirebon Raya adalah daerah beriklim tropis, dan secara geografis didominasi oleh dataran rendah serta pegunungan, dengan beragam kekayaan seni budayanya. Salah satu cabang kebudayaan yang khas adalah seni tarian tradisionalnya, seperti : tari topeng, kuda lumping, dan *Tayuban*. Keanekaragaman seni budaya tersebut, menjadi keunggulan absolut Cirebon Raya. Keunggulan seni budaya lainnya, adalah keberadaan Kampung Batik Trusmi, sebagai satu-satunya sentra pengembangan produk batik di Jawa Barat. Perkampungan Batik Trusmi merupakan pusat perajin dan pasar produk batik, yang mampu bersaing dengan batik hasil produksi wilayah lain, seperti Batik Garut, Batik Tasik, Batik Pekalongan, Batik Solo, dan Batik Yogya. Batik Trusmi memiliki ciri yang sangat khas, dan memiliki nilai seni tinggi, serta menjadi sumber ekonomi andalan bagi masyarakat Cirebon, sehingga mendapat pengakuan dunia internasional sebagai salah satu warisan budaya asli Indonesia.

Sebagai daerah yang didominasi dataran rendah, dan didukung dengan ketersediaan lahan memadai, wilayah Metropolitan Cirebon Raya sangat strategis untuk pengembangan investasi. Letaknya yang strategis tersebut memberikan beberapa keuntungan, berupa kemudahan akses keluar-masuk wilayah, karena berada di jalur pantai Utara dan terhubung dengan beberapa kota besar lainnya, seperti Jakarta, Semarang dan Bandung. Pada sisi lain, keberadaan industri-industri skala kecil, menengah hingga industri berskala besar, telah mendorong lahirnya sejumlah tenaga kerja terampil, khususnya dalam seni membatik, mengolah rotan dan perabot rumah tangga, serta berbagai jenis industri kerajinan lainnya.

Keberadaan pelabuhan laut dan bandar udara di Metropolitan Cirebon Raya, menjadi simpul pergerakan transportasi yang cukup penting. Pelabuhan Cirebon, sangat berperan dalam menunjang aksesibilitas barang maupun penumpang pada skala pelayanan regional dan nasional. Sementara Bandara Cakrabhuwana, memiliki fungsi khusus, sebagai tempat praktikum sekolah penerbangan, dan pusat penyebaran tersier. Dibukanya Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka, sebagai bandara penerbangan domestik, semakin memperkuat keunggulan Cirebon sebagai kota Metropolitan Raya.

Sekian banyak potensi yang dimiliki Kota Cirebon Raya tersebut, mencerminkan keunggulan ekonomis wilayah metropolis ini, dari sisi *product advantage*, baik berupa keunggulan absolut, keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif, di antaranya :

1). Keunggulan Absolut (*absolute advantage*)

Keunggulan absolut dicirikan dengan : (1) Daerah iklim tropis berbentuk dataran rendah, pegunungan dan pantai; (2) Budaya *Nadran* (pesta laut), *Syawalan* Gunung Jati, Topeng Cirebon, Tarling, Sintren, Sandiwara Cirebonan, Debus, Kesenian Gembyung, Tayuban, Wayang Golek, Kuda Lumping, Ngarot, Tari Topeng Dermayon, Genjring Akrobat; (3) Keraton, Situs sejarah, Bumi Perkemahan, Taman Nasional Gunung Ciremai, Gedung Perjanjian; (4) Perkampungan Batik Trusmi; dan (5) Sungai, situ, dan waduk.

2). Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*)

Keunggulan komparatif Cirebon, direpresentasikan dengan: (1) Letak geografis strategis karena berada di Jalur Pantura; (2) Bandara Cakrabuwana, Stasiun Kejaksan, Pelabuhan Perikanan Kejawanan; (3) Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dalam memproduksi

batik dan rotan; dan (4) SDA melimpah berupa hasil laut, kayu, bahan galian, energi panas bumi, minyak dan gas.

3). Keunggulan Kompetitif (*Competitive Advantage*)

Keunggulan kompetitif Cirebon, diantaranya tercermin dari dimilikinya : (1) Pelabuhan Cirebon (untuk pengangkutan batu bara); (2) Warisan budaya Keraton; (3) Perajin batik yang berpengalaman selama bertahun-tahun; dan (4) Perajin rotan berkelas dunia.

4. Konsep Pengembangan Kota yang Visioner

Metropolitan Cirebon Raya, dikembangkan berdasarkan konsep pengembangan metropolitan dan *growth center*, sebagai penghela percepatan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, konsep pengembangan Cirebon Raya, diharapkan menjadi *patroon* dalam pengembangankota metropolitan lain di Jawa Barat, melalui optimalisasi pemanfaatan komponen atau faktor-faktor produksi yang terdapat di kawasan Ciayumajakuning. Berdasarkan potensi dan perkembangan jumlah penduduk, serta aktivitas perekonomian di kota Cirebon, maka pembangunan wilayah tersebut diarahkan pada terwujudnya Kota Metropolitan berbasis budaya dan sejarah, dengan mengedepankan keunggulan pada sektor pariwisata, industri, dan kerajinan, sebagaimana tergambar berikut ini:

a. Pengembangan Sektor Unggulan Wisata

Wisata menjadi salah satu sektor yang sangat diharapkan dapat mendorong terwujudnya Cirebon Raya, sebagai metropolitan budaya dan sejarah. Prioritas pengembangan produk wisata dan strategi pemasarannya, ditekankan pada upaya preservasi warisan budaya, yang memiliki nilai sejarah tinggi, sekaligus menjadi produk wisata, dan penggerak pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Pengembangan potensi wisata tersebut, disertai dengan peningkatan

sarana dan prasarana penunjang, seperti: aksesibilitas jalan yang terintegrasi antar kawasan wisata, optimalisasi sarana dan prasarana transportasi, penyediaan hotel dan restoran di sekitar tempat wisata, penyediaan pusat informasi wisata dan rekreasi serta fasilitas perdagangan sebagai bagian dari pengembangan wisata. Wisata alam dan wisata budaya, ditempatkan pula sebagai bagian dari wisata unggulan Metropolitan Cirebon Raya. Keragaman jenis wisata tersebut, secara utuh merepresentasikan budaya dan sejarahnya Kota Cirebon. Pengoptimalan potensi sektor wisata, dilakukan mulai dari pemeliharaan, peningkatan, serta pengawasan terhadap objek-objek wisata yang ada. Pengembangan sektor wisata tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian.

Perjalanan meraih visi Ciayumajakuning, semakin berderap kencang pada kelima kabupaten/kota di wilayah Timur Jawa Barat tersebut. Sebagai kota yang tengah berproses menjadi kota metropolitan, Cirebon sibuk mempercantik diri, lewat pembenahan sejumlah objek dan potensi wisatanya, secara apik dan terencana. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kota Cirebon, Arif Kurniawan, pembenahan sejumlah objek dan potensi wisata Cirebon, secara bertahap akan dilakukan mulai tahun 2020. Kota Cirebon akan dikembangkan dengan menonjolkan karakteristik keunikannya sebagai kota pelabuhan, kota kolonial dan kota tua, dengan *icon* berupa bangunan keraton, Kampung Pecinan, dan Kampung Arab, dengan gambaran pengembangan sebagai berikut:

- (1). Pada kawasan “Kota Kolonial” - ruas jalan raya mulai dari depan Kantor Pos hingga lapangan Kebumen, akan dijadikan sebagai blok khusus bagi para pejalan kaki.

- (2). Lapangan Kebumen akan ditata-ulang menggunakan konsep zaman dahulu, dan dijadikan Taman Budaya Terbuka. Lapangan tersebut akan dilengkapi dengan galeri terbuka, teater terbuka, sanggar seni budaya terbuka, mobil pustaka, dokumenter budaya, dan taman bermain anak-anak.
- (3). Gedung Bundar di Lapangan Kebumen, akan dijadikan sebagai *point vokal* guna menggugah memori masa lampau, dan memperkuat kesan kolonial.
- (4). Semua gedung yang berlokasi di Kota Tua, khususnya di kawasan eks *British American Tobacco*, akan dicat menggunakan warna yang seragam.
- (5). Kawasan kumuh di sekitar Panjunan, akan diperindah dan ditata-ulang termasuk sepanjang Kali Sukalila sampai ke wilayah muaranya.
- (6). Sepanjang ruas Jalan Kartini hingga Jalan Siliwangi, akan dilakukan peningkatan jalan dan *trottoar* dan akan dikembangkan menjadi *main street* dan *shopping street*.
- (7). Kawasan Bima yang dalam waktu dekat akan diserahkan dari pemerintah pusat kepada Pemkot Cirebon, juga akan dibenahi dan ditata-ulang serta dikembalikan fungsinya sebagai kawasan olahraga.

2). Pengembangan Sektor Unggulan Industri

Sektor industri memperlihatkan peranan yang tak kalah penting, dalam mendukung pengembangan Metropolitan Cirebon Raya. Pertumbuhan berbagai jenis industri, seperti industri penggalian, kimia, sampai industri pengolahan makanan, sangat prospektif jika diposisikan sebagai akselerator pengembangan kota.

Strategi pengembangan sektor industri, ditempuh dengan membentuk kawasan industri yang terintegrasi di wilayah Metropolitan Cirebon Raya, tepatnya di kawasan *Aerocity*

Kabupaten Majalengka. *Aerocity* sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dari Bandara Internasional Kertajati yang sangat strategis dalam memacu laju perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.

3). Pengembangan Sektor Unggulan Kerajinan

Pengembangan industri kerajinan batik dan rotan, yang menjadi ciri khas Cirebon, diarahkan secara khusus, dalam rangka mewujudkan ikon budaya kota. Kedua jenis produk unggulan tersebut, diprioritaskan sebagai bagian dari pengembangan budaya *Cirebonan*. Kerajinan batik dan rotan dikembangkan berdasarkan konsep yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan teknologi madya, sebagai *leverage* kegiatan sektor perekonomian wilayah lainnya. Dalam pengembangannya, ditunjang pula dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai, meliputi penyediaan air baku, sistem pengelolaan limbah dan aksesibilitas jalur distribusi bahan baku, serta pemasaran hasil produksi. Mengingat industri kerajinan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, disiapkan pula sarana perumahan vertikal skala besar, yang ditunjang dengan penyediaan infrastruktur permukiman yang memadai, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk kota yang terus meningkat.

4). Pengembangan Cirebon Sebagai Penghela Ekonomi

Pada dasarnya, pengembangan metropolitan sebagai penghela ekonomi, bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan memperluas akses pasar bagi produk-produk Jawa Barat. Pertumbuhan industri pariwisata, hotel dan restoran, sektor industri dan sektor perdagangan serta sektor jasa lainnya, selain akan mendorong laju pertumbuhan investasi, juga akan menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan

pendapatan masyarakat. Beberapa produk unggulan, seperti industri rotan dan batik, diorientasikan pada pasar ekspor, sehingga akan berkontribusi pada devisa negara, dan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah, sehingga benar-benar menjadi penghela ekonomi bagi masyarakat Jawa Barat.

Pembangunan *Aerocity* Kertajati di Kabupaten Majalengka, diharapkan mampu menarik para investor, baik dalam dan luar negeri serta meningkatkan efisiensi ekonomi, karena adanya aglomerasi kegiatan industri di kawasan tersebut. Pada sisi lain, pengembangan wisata budaya, wisata sejarah, dan wisata alam, berupa situs-situs sejarah dan taman wisata alam, akan mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah. Budaya keraton, Kawasan Makam Sunan Gunungjati yang diakui secara nasional maupun internasional, diharapkan mampu menarik wisatawan dalam dan luar negeri, sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat, devisa negara sekaligus berkontribusi signifikan pada pendapatan daerah.

Last but not least, pengembangan kawasan pesisir pantai, berikut dengan pengembangan aneka hasil laut, tambang mineral, serta minyak dan gas yang cukup melimpah, sangat berpeluang menjadi penghela ekonomi masyarakat. Selain itu, laut sebagai sumber mata pencaharian masyarakat pesisir sehari-hari, apabila dikelola dengan baik, tentunya akan memberikan *benefit* yang tidak kecil, bahkan berpeluang menarik investor domestik dan mancanegara.

5). Pengembangan Cirebon Raya sebagai Penghela Kesejahteraan

Pengembangan metropolitan akan berdampak terhadap peningkatan kebutuhan dasar masyarakat dan juga pada pertumbuhan wilayah sekitar metropolitan. Pertumbuhan sektor industri, baik skala kecil,

menengah, dan besar akan berpengaruh pada meningkatnya kebutuhan terhadap fasilitas-fasilitas dasar, terutama kebutuhan air bersih untuk industri, dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Terpenuhinya infrastruktur strategis pada wilayah Metropolitan Cirebon Raya tersebut, akan menjadi penghela kesejahteraan masyarakat, yang membawa implikasi luas, terhadap aspek-aspek sosial ekonomi masyarakat pada wilayah sekitarnya. Sebagai contoh, meningkatnya *demand* atas bahan baku industri, akan mendorong keterkaitan kota Cirebon dengan wilayah sekitar, dalam kapasitasnya sebagai *supplier* bahan baku industri. Hal tersebut akan memberikan *benefit* tidak hanya untuk wilayah metropolitan, tetapi juga untuk wilayah *hinterland*-nya yang akan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Di pihak lain, letak Metropolitan Cirebon Raya yang strategis pada jalur pantura, ditunjang dengan infrastruktur memadai, selain akan membuka peluang usaha, juga akan memperlancar lalu-lintas orang, barang, dan jasa. Akses keluar masuk Metropolitan Cirebon Raya yang semakin lancar, akan memperluas cakupan aktivitas ekonomi mereka, karena masyarakat memiliki banyak pilihan untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi pada skala regional.

Demikian pula dengan pengembangan industri, biasanya akan diikuti dengan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar. Kebutuhan tenaga kerja untuk industri dalam jumlah besar, tidak akan mampu dipenuhi oleh tenaga kerja lokal, tetapi juga tenaga kerja luar wilayah kota metropolitan. Terbukanya peluang kerja, dapat menjadi resep mujarab, dalam mengatasi salah satumasalah klasik negara berkembang, yaitu masalah pengangguran dan kriminalitas kota. Jika ini teratasi dengan dibarengi peningkatan

kualitas pendidikan dan kesehatan, maka akan menjadi penghela kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

6). Pengembangan Cirebon Raya sebagai Penghela Modernisasi

Konsep pengembangan Metropolitan Cirebon Raya sebagai penghela modernisasi, diarahkan pada upaya mengubah kebiasaan, pola pikir dan gaya hidup masyarakat seiring dengan tuntutan perkembangan zaman. Pengembangan kota metropolitan sebagai penghela modernisasi, pada prinsipnya bertujuan mengantarkan masyarakat menuju kehidupan yang lebih berkualitas. Dalam konteks pengembangan Metropolitan Cirebon Raya, modernisasi diterapkan melalui penggunaan peralatan dan teknologi canggih, dalam kegiatan industri pada berbagai skala. Penggunaan alat-alat tersebut, akan berimplikasi pada meningkatnya efisiensi dan efektivitas produksi, serta modernisasi penyediaan infrastruktur. Selain itu, dengan meningkatnya kadar rasionalitas dan *life skill* setiap individu, kegiatan industri akan lebih terdorong maju, melalui lahirnya bermacam-macam kreativitas dan inovasi-inovasi baru sehingga berimbas pada meningkatnya produktivitas masyarakat. Tradisi, adat istiadat dan budaya setempat, yang tetap dilestarikan akan memperkaya kearifan lokal, untuk kemudian dikemas menjadi *tool of promotion* kehidupan modern masyarakat. Dengan cara itu masyarakat awam khususnya, tidak akan bersikap resisten terhadap berbagai pembaharuan yang terjadi, bahkan sebaliknya, mereka merasa terbantu dan mendapatkan *benefit* kehidupan baru dalam banyak aspek kehidupan. Kolaborasi antara unsur tradisi, budaya dengan modernisasi, yang di-*manage* dan ditransformasikan dengan baik, diharapkan menghasilkan energi yang berlimpah dalam mewujudkan kota metropolitan Cirebon Raya yang bermartabat.

Pada sisi lain cara itu, diarahkan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas berbagai program pengembangan wilayah metropolitan yang dilaksanakan, melalui penerapan modernitas sains dan teknologi. Dengan kata lain, pengembangan metropolitan Cirebon Raya, melalui pelestarian tradisi dan budaya serta kearifan lokal, diberdayakan sebagai penggerak modernisasi.

7). Pengembangan Cirebon Raya sebagai Penggerak Pembangunan Berkelanjutan

Potensi-potensi yang terdapat di Metropolitan Cirebon Raya juga dikembangkan guna menggerak pembangunan secara berkelanjutan, baik secara fisik maupun finansial. Keberlanjutan dapat diartikan, bahwa keberlangsungan pengembangan metropolitan, tetap terjaga secara konsisten, dan terus berlanjut dalam jangka panjang, secara lebih baik. Dalam kaitan ini, pengembangan Taman Nasional Gunung Ciremai di satu pihak, dilakukan dengan tetap mempertahankan fungsinya sebagai daerah konservasi, dan pada sisi lain dimanfaatkan pula sebagai kawasan wisata skala regional.

Dengan demikian, perlakuan terhadap keberadaan taman nasional ini, selain memberikan keuntungan ekonomis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Metropolitan Cirebon Raya dan sekitarnya, juga akan mendukung perwujudan kawasan hutan lindung di Jawa Barat (ditargetkan 45%). Pengembangan kawasan Metropolitan Cirebon Raya secara berkelanjutan (*sustainable*), inklusif dengan pelestarian lingkungan sekitarnya, sehingga dapat sekaligus berperan sebagai penggerak keberlanjutan pembangunan Jawa Barat, secara menyeluruh. Selain Taman Nasional Gunung Ciremai, kawasan wisata alam lainnya, akan dikembangkan pula sebagai daerah konservasi, untuk turut menjaga keberlanjutan

pembangunan. Kehadiran para investor di Metropolitan Cirebon Raya, memungkinkan tersedianya kelayakan finansial guna menunjang pengembangan infrastruktur perkotaan, dan meningkatkan indeks fiskal daerah. Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati dan *Aerocity* Majalengka, merupakan salah satu contoh meningkatnya kelayakan finansial, bagi pengembangan infrastruktur strategis dalam menghela keberlanjutan pembangunan regional Jawa Barat.

8). Konsep Pengembangan Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Cirebon Raya Berbasis *Benefit Oriented*

Secara umum, karakteristik kota dan kabupaten yang berada dalam kawasan Metropolitan Cirebon Raya, memiliki beberapa persamaan. Keberadaan dan potensi sejumlah objek wisata, seperti wisata sejarah, wisata alam dan wisata budaya, merupakan salah satu contoh kesamaan karakteristik dimaksud, yang sekaligus merupakan *advantage factors* pengembangan wilayah Metropolitan Cirebon Raya. Terkait dengan hal itu, maka konsep pengembangan infrastruktur dan prasarana wilayah pada kawasan tersebut, disusun dalam upaya mengoptimalkan *benefit* dan *value added* kesamaan karakteristik wilayah, sehingga memungkinkan terakomodasinya mobilitas dan aktivitas penduduk setempat secara optimal. Pengembangan infrastruktur dan prasarana wilayah kawasan Cirebon Raya, diprioritaskan pada 7 (tujuh) sektor, yaitu sektor transportasi, sektor perumahan, sektor jaringan air bersih, sektor air limbah, sektor persampahan, sektor jaringan drainase, dan sektor jaringan energi.

E. Metropolis Cirebon dan Analisis Sektor Ekonomi Unggulan

Sebagai tambahan, penulis akan menjelaskan secara ringkas instrumen analisis yang dijadikan dasar dalam menemu-kenali sektor-sektor ekonomi unggulan pada suatu daerah atau wilayah pembangunan, guna mengetahui sektor ekonomi mana yang paling unggul, di antara sejumlah sektor basis yang ada (*exsisting*), sektor-sektor apa memiliki potensi paling baik, yang sedang berkembang dan sektor yang layak dikembangkan. Analisis terhadap 5 (lima) kota/kabupaten di kawasan pembangunan wilayah Ciayumajakuning atau Metro Cirebon Raya, menggunakan tiga pendekatan yaitu : *Dynamic Location Quotient (DLQ)*, *Shift-Share* dan Tipologi Klassen. Melalui hasil analisis ini, kita dapat mengetahui lebih jelas, posisi masing-masing kabupaten/kota yang berada pada kawasan pembangunan wilayah tersebut, dilihat dari beberapa aspek pembangunan.

1). *Dynamic Location Quotient Analysis*

Dynamic Location Quotient (DLQ) merupakan teknik menganalisis perubahan sektor ekonomi yang terjadi selama kurun waktu tertentu, pada suatu lingkup perekonomian lokal, guna melihat perubahan atau reposisinya secara sektoral, sehingga dapat diidentifikasi potensi sektor ekonomi yang akan menjadi sektor basis, dimasa yang akan datang. Hasil analisis memperlihatkan, bahwa terdapat sejumlah sektor ekonomi di Kawasan Ciayumajakuning yang dinilai berpotensi dijadikan sektor basis di masa yang akan datang, sebagaimana tergambar di bawah ini:

(a). Kota Cirebon: memiliki tiga sektor ekonomi yang berpotensi dijadikan sektor basis di masa yang akan datang yaitu : sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, administrasi, pemerintahan, pertahanan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

(b). Kabupaten Kuningan: memiliki enam sektor ekonomi yang berpotensi dijadikan sektor basis di masa yang akan datang yaitu : pertanian, kehutanan, dan perikanan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan sampah, *real estate*, administrasi pemerintahan, pertahanan, serta jasa pendidikan.

(c). Kabupaten Majalengka: memiliki delapan sektor ekonomi yang berpotensi untuk dijadikan sektor basis di masa yang akan datang, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, pengadaan listrik, dan gas, pengadaan air, pengolahan sampah, konstruksi, perdagangan besar dan eceran; reparasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

2). Analisis *Shift Share*

Analisis *shift-share* digunakan untuk mengidentifikasi sektor unggulan masing-masing kota/kabupaten di kawasan Metro Cirebon Raya dalam kaitannya dengan perekonomian wilayah acuan, dalam hal ini yaitu Provinsi Jawa Barat. Analisis ini menggunakan data 17 sektor ekonomi pada masing-masing kota/kabupaten di kawasan Metropolitan Cirebon Raya. Melalui analisis *shift-share* dapat diketahui sektor yang progresif atau maju, dan sektor yang berkembang lambat. Hasil analisis *shift-share* menunjukkan, bahwa pada kota/kabupaten dalam kawasan MCR ditemukan beberapa sektor ekonomi yang pergerakannya progresif, yaitu pada sektor ekonomi sekunder dan tersier. Pada sektor ekonomi primer, semua kota/kabupaten masuk pada kriteria memiliki pergerakan yang lambat. Untuk lebih jelasnya, sektor-sektor apa saja yang memiliki pergerakan progresif, dapat dilihat pada rincian berikut ini :

(a). Kota Cirebon: memiliki enam sektor ekonomi yang pergerakannya progresif, yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan

komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya.

(b). Kabupaten Cirebon: memiliki sembilan sektor ekonomi yang pergerakannya progresif, yaitu pengadaan listrik dan gas, konstruksi, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya.

(c). Kabupaten Kuningan : memiliki sepuluh sektor ekonomi yang pergerakannya progresif yaitu pengadaan air, pengolahan sampah, konstruksi, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan komunikasi, *real estate*, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya.

(d). Kabupaten Majalengka: memiliki sembilan sektor ekonomi yang pergerakannya tergolong progresif yaitu: pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, konstruksi, perdagangan besar, dan eceran, reparasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya.

3). Analisis Tipologi Klassen

Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi pada masing-masing kota/kabupaten di kawasan Metropolitan Cirebon Raya (MCR). Analisis dilakukan terhadap data kontribusi dan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tiap kota/kabupaten di Kawasan MCR dan Provinsi Jawa Barat. Hasil analisis menunjukkan, bahwa terdapat beberapa sektor ekonomi yang

berpotensi untuk dikembangkan sebagai sektor unggulan. Rincian sektor ekonomi pada tiap kota/kabupaten sebagai berikut:

(a). Kota Cirebon: memiliki dua sektor ekonomi yang unggul, yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, dan administrasi pemerintahan, pertahanan.

(b). Kabupaten Cirebon: memiliki empat sektor ekonomi yang unggul, yaitu pertanian, kehutanan, dan perkebunan, jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan dan pertahanan dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

(c). Kabupaten Kuningan: memiliki tiga sektor ekonomi yang unggul, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jasa pendidikan.

(d). Kabupaten Majalengka: memiliki empat sektor ekonomi yang unggul, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, konstruksi, dan penyediaan akomodasi dan makan minum.

Dengan demikian, sangatlah beralasan jika dalam konteks pembangunan wilayah Ciayumajakuning, Kota Cirebon diposisikan sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pembangunan, sekaligus dijadikan *city icon*, mengingat demikian banyak faktor penunjang yang dimiliki kota tersebut. Berbagai keunggulan Kota Cirebon, tampak dengan jelas, baik dilihat secara faktual maupun potensial. Demikian pula dengan memperhatikan sejumlah hasil studi dan analisis ilmiah yang telah ditempuh, kesemuanya menegaskan bahwa Kota Cirebon sangat layak dipilih sebagai *center of development* Kawasan Ciayumajakuning atau dijadikan Kota Metropolitan Cirebon Raya.

F.Pengembangan Kabupaten Indramayu dalam Konteks Pembangunan Wilayah Ciayumajakuning

1. Gambaran Umum Kondisi Wilayah

Secara geografis, posisi Kabupaten Indramayu terletak pada $107^{\circ} 52' - 108^{\circ} 36' BT$ dan $6^{\circ} 15' - 6^{\circ} 40' LS$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Kabupaten Subang
- Sebelah Timur : Laut Jawa dan Kabupaten Cirebon
- Sebelah Selatan : Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Cirebon.
- Sebelah Utara : Laut Jawa

Cakupan wilayah administratif Kabupaten Indramayu saat ini terdiri dari: 31 kecamatan, 309 desa dan 8 kelurahan, dengan luas wilayah 204,011 hektare, atau 2.040.110 Km², dan total panjang garis pantai ± 147 Km yang membentang sepanjang pantai Utara antara Cirebon-Subang, dengan jumlah desa pantai, sebanyak 36 desa yang merupakan wilayah dari 11 kecamatan. Menurut data *GIS (Geographic Information System)* Bapeda Kabupaten Indramayu, pola penggunaan lahan pada wilayah seluas 204.011 Ha tersebut terdiri dari: lahan sawah Irigasi 116.675 Ha; tanah kering 87.336 Ha; dan tanah sawah non Irigasi 92.795 Ha.

Berdasarkan topografinya ketinggian wilayah Indramayu, pada umumnya berkisar antara 0 -18 meter, di atas permukaan laut, dan wilayah dataran rendahnya berkisar antara 0-6 meter di atas permukaan laut, berupa rawa, tambak, sawah, dan lahan pekarangan. Sebagian besar permukaan tanahnya berbentuk tanah datar dengan kemiringan antara 0%-2%, seluas 201.285 ha (96,03%) dari total wilayah. Kondisi ini berpengaruh terhadap kapasitas drainase, sehingga apabila curah hujan tinggi, maka pada daerah-daerah tertentu, akan tergenang air, sebaliknya pada musim kemarau akan mengalami kekeringan.

Hasil registrasi penduduk pada tahun 2010, memperlihatkan, bahwa populasi penduduk Kabupaten Indramayu berjumlah 1.769.423 jiwa, terdiri dari laki-laki 885.345 jiwa, dan perempuan 884.078 jiwa, dan pada tahun 2011 mengalami penurunan, menjadi 1.675.790 jiwa, yaitu laki-laki 862.846 jiwa dan perempuan 812.944 jiwa. Sementara pada tahun 2015 bertambah menjadi sebanyak 1.823.757 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 924.375 jiwa dan perempuan sebanyak 899.382 jiwa. Letak Kabupaten Indramayu yang membentang sepanjang posisi pantai Utara Pulau Jawa, menjadikan suhu udara di wilayah pantai Utara tersebut relatif tinggi, yakni berkisar antara 22,9°C-30° C. Tipe iklim di Indramayu termasuk iklim tropis, dan menurut klasifikasi *Schmidt* dan *Ferguson* termasuk tipe D (iklim sedang) dengan karakteristik iklim antara lain:

- 1). Suhu udara harian, berkisar antara 22,9°-30° dengan suhu udara tertinggi 32 derajat Celcius, dan terendah 22 derajat Celcius.
- 2). Kelembaban udara, antara 70%-80%.
- 3). Curah hujan sepanjang tahun 2011 rata-rata 1.287 Mm, dengan hari hujan tahunan sekitar 80 hari.
- 4). Curah hujan dan jumlah hari hujan tertinggi terjadi di Kecamatan Sindang dan Pasekan, sedangkan curah hujan terendah, yaitu sekitar 538 mm, dengan jumlah hari hujan 54 hari, terjadi di Kecamatan Patrol.
- 5). Angin Barat dan angin Timur bertiup secara bergantian, setiap 5-6 bulan sekali.

Secara hidro orologis, sumber air yang terdapat di Kabupaten Indramayu meliputi air permukaan dan air tanah. Air permukaan berupa sungai dan air genangan berasal dari Daerah Aliran Sungai (DAS), sedangkan air tanah dieksploitasi melalui sumur-sumur pompa. Kabupaten Indramayu merupakan daerah hilir aliran sungai yang sangat potensial, guna memenuhi kebutuhan air masyarakat, baik untuk pertanian, industri maupun sebagai bahan baku air

bersih. Daerah Aliran Sungai tersebut meliputi : Cipunegara, Cipancuh, Sewo, Mang Setan, Bugel, Legok, Eretan, Cilet, Tuan, Cilalanang, Cipanas, Cipondoh, Cibelerang, Pangkalan, Semak, Maja, Rambatan, Cimanuk, Kelolo, Prawiro, Darung, Gebang, Sawit, Glayem, Kamal, Sigedang, Bobos, Oyoran, Pamengkang, Cimanis, dan Kumpulkuista.

2. Potensi Pertanian Kabupaten Indramayu

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu daerah utama penghasil padi di Indonesia. Kabupaten ini dijadikan sentra produksi padi utama di Jawa Barat, dengan rata-rata produksi per tahun, sekitar 1.401.811 ton (BPS, 2017). Hal tersebut menempatkan posisi sektor pertanian padi Kabupaten Indramayu, pada urutan nomor satu, dan penghasil padi terbesar di Jawa Barat. Posisi tersebut, tidak terlepas dari kontribusi sejumlah kecamatan dan desa penghasil padi tertinggi, di wilayah DAS hilir Indramayu. Kecamatan Anjatan, merupakan salah satu daerah penghasil padi terbesar di Kabupaten Indramayu, setelah Kecamatan Gantar dan Kroya, dengan luas lahan sawah 6.100 hektar yang seluruhnya merupakan sawah irigasi dengan rata-rata produksi pada tahun 2012-2016 sebesar 93.313,56 ton.

Dalam hubungannya dengan wilayah kabupaten/kota, kecamatan dan desa merupakan *hinterland* atau daerah pendukung, yang berfungsi sebagai penyedia bahan pokok seperti padi, sayur-sayuran, dan lain sebagainya.

3. Potensi Usaha Tani Mangga di Indramayu

Indonesia memiliki beberapa provinsi yang menjadi sentra produksi buah mangga nasional, dan salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat, yang tersebar di Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Sumedang. Sebagai produsen mangga terbesar di Jawa Barat, Indramayu dijuluki sebagai “Kota Mangga” sehingga dijadikan salah satu produk unggulannya. Wilayah ini identik dengan buah mangga, karena nyaris pada setiap halaman rumah,

halaman sekolah, rumah ibadah, perkantoran, termasuk taman di Kabupaten Indramayu didominasi oleh pohon mangga. Selain itu, kebun-kebun mangga setiap desa terbentang luas pada beberapa lokasi di Indramayu. Tanaman mangga sangat cocok dibudidayakan di Kabupaten Indramayu, hal tersebut dimungkinkan oleh faktor struktur tanah, iklim, dan topografi yang mendukung, sehingga menjadikan buah mangga Indramayu, memiliki cita rasa yang khas, perpaduan antara manis dengan aroma wangi yang tajam. Hal itu secara ekonomis, memberikan nilai keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan budidaya tanaman lainnya. Varietas yang banyak diusahakan oleh petani antara lain Gedonggincu, Arumanis, dan Cengkir.

Produksi mangga di sejumlah daerah penghasil mangga di Jawa Barat, dalam beberapa tahun terakhir, mengalami fluktuasi yang beragam. Pada tahun 2016, beberapa daerah sentra mengalami penurunan produksi cukup besar, namun Kabupaten Indramayu mampu bertahan, bahkan mengalami peningkatan produksi. Prestasi ini, sangat mungkin karena ditunjang oleh keterampilan para petaninya dalam berkebun, melalui penerapan prinsip berkebun yang ekonomis, efisien dan produktif. Oleh karena itu, dalam sebuah usaha pertanian diperlukan perencanaan dan pengkoordinasian penggunaan faktor-faktor produksi secara efisien untuk memperoleh pendapatan yang maksimal (Suratiah, 2006).

Beberapa hasil penelitian menunjukkan penggunaan faktor-faktor produksi, seperti: pupuk, pestisida, bibit, dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap tingkat produksi berbagai komoditas (Asih, 2009; Tahir et al, 2010). Di pihak lain, Mardikanto (1995) menyebutkan, bahwa pendidikan merupakan proses pengembangan pengetahuan maupun sikap seseorang, yang dilakukan secara terencana dan akan mengarahkan pada pengambilan keputusan. Artinya, bahwa tingkat pendidikan mencerminkan tingkat pemahaman petani dan kemampuan petani dalam mencari solusi atas

permasalahan yang dihadapinya. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar petani di sentra mangga, rata-rata hanya menyelesaikan sekolah hingga lulus sekolah dasar. Hanya sebagian kecil petani yang menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Hasil studi yang dilakukan oleh Andriyani dkk. (2019) mengungkapkan pula beberapa faktor yang menjadi penyebab keunggulan para petani mangga di Kabupaten Indramayu, salah satunya terkait dengan aspek pertimbangan pemilihan pasar. Sementara sejumlah karakteristik individu petani seperti, umur, pengalaman usaha tani dan jumlah pohon yang dimiliki, ternyata tidak berpengaruh, terhadap keputusan petani dalam memilih pasar. Tingkat pendidikan, berpengaruh nyata terhadap keputusan petani mangga dalam pemilihan pasar di Kabupaten Indramayu dengan *odd ratio* 0,614, artinya petani dengan tingkat pendidikan lebih tinggi, berpeluang 0,614 kali lebih besar untuk menjual hasil panennya ke pasar formal.

Selain itu, terungkap pula, bahwa keanggotaan dalam kelompok tani dan kemitraan dalam pemasaran tidak berpengaruh nyata terhadap keputusan petani dalam memilih pasar di Kabupaten Indramayu. Sebagian besar petani memang tidak tergabung dalam kelompok ataupun kemitraan pemasaran. Akses informasi mengenai pemasaran mangga berpengaruh nyata terhadap keputusan petani mangga dalam pemilihan pasar di Kabupaten Indramayu dengan *odd ratio* 3,197 artinya petani yang lebih mudah mendapatkan informasi mengenai peluang pasar mangga berpeluang 3,197 kali lebih tinggi untuk menjual hasil panennya ke pasar formal. Informasi mengenai kondisi pasar akan membantu petani dalam memutuskan ke mana menjual hasil panennya dengan harga yang lebih menguntungkan.

Syarat kualitas produk berpengaruh nyata terhadap keputusan petani mangga dalam pemilihan pasar di Kabupaten Indramayu dengan *odd ratio* 4,617, artinya petani yang dapat memenuhi syarat kualitas produk yang diinginkan

pasar berpeluang 4,617 kali lebih tinggi, untuk menjual hasil panennya ke pasar formal. Hal ini juga sejalan dengan temuan petani yang menghasilkan hasil panen berkualitas baik lebih tinggi (*Grade A*) lebih berpeluang 0,978 kali untuk menjual produknya ke pasar formal. Pasar modern dan pasar ekspor memang hanya menerima produk mangga dengan kualitas terbaik. Sebagian petani cenderung menghindari tujuan pasar yang memberlakukan standar kualitas tertentu. Banyak petani yang belum melakukan pemeliharaan pohon mangga-nya secara intensif, yang tentunya berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas buah yang dihasilkan. Melihat kondisi tersebut, petani perlu dilatih agar memiliki jiwa wirausaha yang lebih kuat, hingga mampu menghasilkan produk yang diinginkan pasar, bukan sekedar menjual apa yang mereka hasilkan kemudian menjualnya ke pasar.

Keterikatan petani terhadap sumber pembiayaan tertentu, berpengaruh terhadap keputusan petani dalam pemilihan pasar. Sebagian petani memiliki keterikatan bantuan sarana produksi pertanian, sehingga petani harus menjual hasil panennya kepada pemberi modal. Fakta yang menarik adalah sebagian petani (38,46%) menggunakan lembaga keuangan formal (bank) untuk memperoleh pinjaman modal usaha, dan pilihan mereka untuk menjual hasil panennya kepada tengkulak atau bandar, bukanlah karena keterikatan modal namun berdasarkan kemudahan akses dan kedekatan interpersonal dengan tengkulak atau bandar. Hal ini menunjukkan, bahwa bagi sebagian besar petani keberadaan lembaga pemasaran informal dirasakan menguntungkan, selain karena kemudahan akses dan syarat penjualan hasil panen, jangka waktu pembayaran yang relatif cepat, dan kedekatan petani dengan tengkulak atau bandar juga menjadi pertimbangan petani dalam memilih pasar.

4. Tantangan Pengembangan Sektor Pertanian di Kabupaten Indramayu

Lokasi Kabupaten Indramayu yang terletak pada dataran rendah dan pesisir pantai, menyebabkan temperatur udaranya relatif tinggi dan beberapa

tempat sulit mendapatkan kecukupan air. Perubahan iklim (global) telah menyebabkan, para petani kesulitan dalam menentukan awal musim tanam, sehingga sering terjadi keterlambatan masa tanam. Isu perubahan iklim, sesungguhnya merupakan hal yang baru, namun sebagian besar petani dan masyarakat perdesaan, belum menyadari betul kondisi tersebut. Padahal menghadapi kondisi seperti itu, kemampuan beradaptasi para petani sangat diperlukan. Perlu dipahami, bahwa adaptasi terhadap perubahan iklim, adalah kemampuan suatu sistem dalam menyesuaikan diri dengan perubahan iklim (termasuk di dalamnya variabilitas iklim dan variabilitas ekstrim) dengan cara, mengurangi kerusakan yang ditimbulkan, dan mengambil manfaat atau mengatasi perubahan beserta segala akibat yang ditimbulkannya.

Kabupaten Indramayu, secara umum memiliki kontur tanah yang datar di sepanjang jalur pantai Utara, dengan ketinggian tanah mulai dari 0 meter sampai dengan 10 meter di atas permukaan laut, sehingga memudahkan para petani dan pekebun dalam mengolah tanahnya. Namun perubahan iklim global dewasa ini telah menjadi salah satu ancaman sangat serius, dan potensial menggagalkan panen di kawasan tersebut. Mengingat pertanian dan perubahan iklim berkaitan erat, maka sektor pertanian sangat bergantung dan amat sangat rentan terhadap perubahan iklim tersebut. Untuk itu, pengetahuan para petani sangat perlu ditingkatkan, guna menyiasati perubahan iklim global yang kita alami akhir-akhir ini.

Pada pihak lain, upaya meningkatkan produktivitas pertanian, sangat tergantung pula pada kemampuan adaptasi sosial petani, dan kebiasaan penggunaan *input* produksi usaha tani menurut takaran yang seharusnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Soekartawi (1988), yang mengatakan, bahwa proses adopsi dan difusi inovasi di bidang pertanian, oleh seseorang sangat dipengaruhi faktor-faktor umur, pendidikan, keberanian mengambil resiko, pola hubungan, sikap terhadap perubahan, pendapatan usahatani, luas

usahatani, status kepemilikan tanah, prestise masyarakat, sumber-sumber informasi, dan jenis inovasi. Artinya, bahwa kebiasaan penggunaan *input* produksi usaha tani sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial petani itu sendiri. Dalam hal ini permasalahan kondisi sosial petani secara umum, adalah menyangkut umur petani yang telah lanjut usia sehingga kurang produktif dalam mengelola kegiatan usaha taninya, rata-rata petani tidak berpendidikan formal sehingga untuk mengadopsi inovasi teknologi lambat, sempitnya luas lahan garapan petani dikarenakan terjadinya alih fungsi lahan dan pembagian waris, sehingga produksi padi mengalami penurunan.

Tantangan lain sektor pertanian di Indramayu, berkenaan dengan menyempitnya luasan lahan pertanian. Hasil penelitian Suherman (2013) mengungkapkan, bahwa di Kabupaten Indramayu tingkat konversi alih fungsi lahan, dari lahan sawah irigasi menjadi lahan non pertanian, rata-rata mencapai 0,12% per tahun, dari total lahan sawah seluas 116.039 hektar. Alih fungsi lahan di wilayah ini, cenderung meningkat setiap tahunnya karena beberapa alasan, baik akibat desakan perkembangan penduduk, kebutuhan lahan, dan *impact* perkembangan perekonomian wilayah. Berdasarkan data BPS Jawa Barat (2013), pada tahun 2012 di Kabupaten Indramayu, telah terjadi penurunan luas panen padi, sebesar 4,59% (10.612 ha), dan menyebabkan produksi padi menurun sebesar 2,7 persen, atau setara dengan 38.446 ton GKG ekuivalen dengan 24.121,02 ton beras.

Pada bulan Februari tahun 2014, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan dokumen kebijakan resmi, bernama “Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim” (RAN-API). Dalam dokumen tersebut, Kabupaten Indramayu termasuk sebagai salah satu wilayah paling rentan terkena dampak perubahan iklim, terutama berupa kekeringan, banjir, dan penurunan produksi padi (Bappenas 2014). Penilaian kerentanan tersebut, dilakukan dengan memperhatikan analisis iklim dan karakteristik wilayah. Informasi ini

tidaklah mengejutkan, mengingat wilayah Indramayu yang berada di daerah hilir Sungai Cimanuk, sejak dulu dikenal sebagai daerah yang rentan terhadap kekeringan dan banjir. Berbagai hasil penelitian dan dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah, memperkuat hal tersebut, diantaranya :

Utomo (2013) yang menjelaskan, bahwa wilayah Kabupaten Indramayu didominasi oleh wilayah yang memiliki potensi rawan banjir tinggi (32,7%) dan rawan banjir sangat tinggi (62,4 persen). Kalsim (2007) dengan merujuk pada berbagai data, di antaranya data yang *dipublish* oleh Kementerian Pertanian, menyebutkan pula Kabupaten Indramayu merupakan daerah yang sangat rawan kekeringan dan juga banjir.

Pemerintah sendiri, dalam dokumen Indeks Bencana Rawan Bencana Indonesia yang dikeluarkan BNPB tahun 2011 menyatakan, bahwa Kabupaten Indramayu merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kekeringan dan banjir. Indeks ini dikembangkan berdasarkan konsep analisis riwayat kebencanaan yang terjadi, dan mengakibatkan kerugian signifikan di suatu wilayah, hingga berimbas ke tingkat kabupaten/kota. Suahyono dan Aldrian (2012) ahli klimatologi BMKG, melakukan analisis perubahan iklim di Indonesia, dalam rangka memperbaharui hasil analisis yang sebelumnya dilakukan BMKG 2004. Hasilnya, wilayah Kabupaten Indramayu (terutama wilayah pertanian di Kecamatan Kandanghaur, Juntinyuat, dan Losarang) dinilai sebagai wilayah yang sangat rentan terhadap kekeringan dan banjir. Kekeringan dan banjir yang terus melanda berbagai wilayah Kabupaten Indramayu setiap tahunnya, menyebabkan penurunan luas panen dan penurunan produksi, bahkan kegagalan panen. Dalam hal ini, BPS Kabupaten Indramayu (tahun 2006, 2009, 2012, 2013) menyebutkan pula, bahwa pada tahun 2005, 2008, 2011, dan tahun 2012 terjadi penurunan luas panen, yang disertai penurunan produksi.

Data BPS tersebut menunjukkan, bahwa penurunan luas panen terjadi di daerah-daerah persawahan yang memiliki kerentanan ekologi tinggi, seperti daerah persawahan tadah hujan dan hilir (ujung) saluran irigasi yang rentan terhadap kekeringan, serta daerah persawahan yang berada di daerah pesisir, dan daerah hilir (ujung) saluran irigasi “pelanggan” banjir. Dari sekian daerah persawahan dengan kerentanan yang tinggi, terdapat pula sejumlah daerah persawahan yang berkategori memiliki kerentanan paling tinggi, karena lokasinya berada di daerah pesisir dan di ujung saluran irigasi, sehingga daerah tersebut sering mengalami kekeringan di musim kemarau, dan banjir di musim hujan.

Chambers dan Conway (1991) Scoones (1998, 2009), Carney (1998), DFID (1999), Ellis (2000), menyinggung tentang kerangka kehidupan masyarakat desa, yang berada di daerah yang sangat rentan secara ekologi tersebut, dalam beradaptasi dengan berbagai tekanan dan goncangan, serta memelihara kapabilitas dan aset penghidupan yang dimilikinya, dengan mencoba menerapkan berbagai strategi penghidupan, yang mampu menjamin penghidupannya dan generasi berikutnya. Kerangka penghidupan tersebut, sangat menekankan keberlanjutan penghidupan masyarakat (sistem sosial) dan keberlanjutan sumber daya alam atau sistem ekologi (Dharmawan 2007).

G. Pembangunan Sektor Industri Kawasan Ciayumajakuning di Kabupaten Majalengka

Ketika orang membicarakan tentang Majalengka, mungkin akan teringat pada dua jenis produk khasnya yang sejak lama cukup dikenal, yaitu Kecap dan Genteng Banyuwangi. Selain itu, boleh jadi diingatkan pula dengan keranuman aneka jenis buah mangga yang memiliki cita rasa yang lezat dan khas. Dalam konsep pengembangan wilayah Ciayumajakuning, Kabupaten Majalengka memiliki posisi yang cukup strategis, dengan sejumlah potensi ekonominya, serta letak geografisnya sebagai gerbang lalu-lintas yang

menuju Provinsi Jawa Tengah, di samping beberapa alasan lain yang turut melatarbelakanginya.

1. Karakteristik Wilayah Kabupaten Majalengka

Kabupaten Majalengka adalah sebuah kabupaten yang terletak pada klaster Timur Provinsi Jawa Barat. Kabupaten ini di sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Subang, serta di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya. Dalam Peraturan Pemerintah RI, Nomor 26 tahun 2008 tentang Tata Ruang Nasional, bahwa di Kabupaten Majalengka akan dibangun Bandara Sekunder Kertajati, dan di sekitarnya akan dibangun pula Pelabuhan Laut Arjuna. Dalam Sistem Perencanaan Struktur Tata ruang Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka berada di antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Bandung dan PKN Cirebon, dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kadipaten (akses menuju PKW Indramayu dan Tasikmalaya).

Kabupaten Majalengka sebagai daerah agraris memiliki sumber daya lahan yang sangat baik, untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan. Beberapa sumber daya alam lain yang potensial, antara lain : pertambangan, sumber daya air, dan sumber daya alam yang cukup prospektif dalam menunjang pariwisata. Selain itu, Majalengka memiliki pula potensi sumber daya hutan, minyak dan gas alam yang sangat penting untuk pengembangan ekonomi wilayah, terutama dalam mendukung kegiatan industri. Letak geografisnya sangat strategis, karena berdekatan dengan salah satu kota yang sedang berkembang di Jawa Barat yaitu Kota Cirebon. Kabupaten Majalengka menjadi salah satu jalur transportasi utama menuju Kota Cirebon, hal ini menjadi alasan kuat bagi Kabupaten Majalengka untuk turut bergabung ke dalam pengembangan wilayah Ciayumajakuning.

2. Potensi Majalengka sebagai Daerah Industri

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang tengah giat mengembangkan sektor industri, sebagaimana yang diindikasikan dengan maraknya pembangunan kawasan industri di wilayah itu. Hal tersebut sangat beralasan, mengingat sektor industri memegang peranan sangat penting dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu daerah, dalam hal ini selain dapat meningkatkan nilai tambah, juga sangat besar perannya dalam penyerapan tenaga kerja. Kabupaten Majalengka di samping sangat potensial pada sektor industri, juga ditopang oleh beberapa potensi lainnya yaitu: pertanian, pertambangan dan penggalian, pengolahan, listrik gas dan air bersih, konstruksi, perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa lainnya.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 dijelaskan, bahwa aspek daya saing daerah merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Sementara komoditas unggulan, oleh Depkimpraswil (2003) didefinisikan sebagai komoditas andalan yang paling menguntungkan, untuk diusahakan atau dikembangkan pada suatu daerah. Mengingat pengertian tersebut, sangatlah wajar apabila pengembangan komoditas unggulan pada era otonomi daerah ini, mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah, termasuk Pemkab Majalengka.

Sekalipun Kabupaten Majalengka, memiliki sumber daya yang potensial untuk pengembangan sub sektor industri pengolahan, khususnya Industri Logam dan Elektronik, namun pengembangan sub sektor ini untuk dijadikan salah satu produk unggulan daerah, masih menjadi pilihan krusial. Persoalannya, mengingat dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah, khususnya berkenaan

dengan kriteria Penetapan Produk Unggulan Daerah, menempatkan Industri Logam sebagai salah satu sub sektor industri, yang menyerap jumlah tenaga kerja paling sedikit, jika dibandingkan dengan sub sektor Industri Pengolahan lainnya.

3. Arah Pengembangan Industri Potensial di Majalengka

Hingga saat ini, sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam menopang perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka. Kondisi geografis dan sarana irigasi yang cukup memadai, membuat sektor ini tetap menjadi tulang punggung pembangunan Kabupaten Majalengka, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dimasa mendatang sektor unggulan wilayah ini, beralih pada sektor lain. Tentunya banyak alasan, yang melatarbelakangi penentuan produk unggulan, di Kabupaten Majalengka, satu alasan di antaranya, terkait dengan keberadaan Bandara Internasional Kertajati dan jalan tol di Kabupaten Majalengka.

Dua sisi menarik dari pengembangan suatu insfrastuktur apapun, adalah munculnya dua dampak yang berbeda, dalam bentuk *benefit* dan ekses negatif atau timbulnya kerugian bagi pihak-pihak tertentu.

Dari sisi ekses, pembangunan infrastruktur dalam skala besar, semacam bandar udara, infrastruktur jalan atau industri sering berdampak pada menyempitnya lahan pertanian, sehingga kontribusi sektor pertanian lambat laun akan menurun. Lebih dari itu, akan berdampak pula pada mata pencaharian penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Bagi penduduk Kabupaten Majalengka, yang mayoritas bergerak di sektor pertanian, ekses dari pembangunan infrastruktur tersebut, tentunya tidak akan terhindarkan. Akan tetapi di balik itu, tidak sedikit pula manfaat yang akan didapatkan, salah satu di antaranya berupa meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas serta dinamika penduduk dalam menjalani berbagai aktivitasnya, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap

peningkatan transaksi ekonomi, termasuk tentunya transaksi barang-barang yang dihasilkan oleh sektor industri.

Pengembangan sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Majalengka saat ini mencakup lima sub sektor, yaitu Industri Pangan, Industri Sandang dan Kulit, Industri Kimia & Bahan Bangunan, Industri Logam dan Elektronika, dan Industri Kerajinan. Kabupaten Majalengka merupakan salah satu pusat Industri Kecil Menengah (IKM) terbesar di Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah IKM mencapai 8.690 unit usaha, pada jenis komoditi yang berbeda-beda dan tersebar di 26 kecamatan serta mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 47.222 orang. Oleh karena itu, sangat beralasan jika keberadaan IKM ini terus dipertahankan dan dikembangkan.

4. Kebijakan Pembangunan Kawasan Industri

Sebelum menyoroti lebih jauh, tentang bagaimana langkah yang ditempuh oleh Pemkab Indramayu dalam mengembangkan sektor-sektor unggulannya melalui pengembangan kawasan industri - dalam konteks pembangunan wilayah Ciayumajakuning, pada sub bab ini terlebih dahulu akan disampaikan regulasi pemerintah berkenaan dengan kebijakan pembangunan kawasan industri di Indonesia. Regulasi ini penting untuk dijadikan pegangan, mengingat pembangunan sebuah kawasan industri, akan berimplikasi luas terhadap sektor-sektor lain, baik pada lingkup lokal, maupun lingkup regional. Selain dari itu, praktek pemerintahan pada era otonomi daerah saat ini, dalam beberapa aspek masih belum bisa berjalan secara efektif, bahkan tak jarang memicu konflik di antara para *stakeholders*-nya, akibat perbedaan interpretasi terhadap kebijakan yang diberlakukan.

Kebijakan pembangunan kawasan industri yang diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1996, merupakan langkah yang ditempuh pemerintah pusat dalam mendorong peningkatan investasi di sektor industri,

sekaligus memberikan kepastian hukum, serta mengatur pengelolaan kawasan industri dalam suatu daerah. Kawasan industri adalah suatu daerah yang didominasi oleh aktivitas industri, yang didukung dengan fasilitas kombinasi terdiri dari: peralatan-peralatan pabrik (*industrial plants*), sarana penelitian dan laboratorium untuk pengembangan, bangunan perkantoran, perbankan, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum (Dirdjojuwono, 2004). Pembangunan kawasan industri di Indonesia pertama kali, dimulai pada tahun 1973 dengan berdirinya *Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung (JIEP)*, kemudian tahun 1974 dibangun *Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)*, selanjutnya Kawasan Industri Cilacap (tahun 1974), menyusul kemudian Kawasan Industri Medan (tahun 1975), Kawasan Industri Makasar (tahun 1978), Kawasan Industri Cirebon (tahun 1984), dan pada tahun 1986 pembangunan Kawasan Industri Lampung (Kwanda, 2000).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2009, tujuan pembangunan kawasan industri adalah untuk: (a) mengendalikan pemanfaatan ruang; (b) meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan; (c) mempercepat pertumbuhan industri di daerah; (d) meningkatkan daya saing Industri; (e) meningkatkan daya saing investasi; dan (f) memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur, yang terkoordinasi antar sektor terkait. Keenam tujuan tersebut merupakan arah kebijakan pembangunan kawasan industri di seluruh wilayah NKRI. Pembangunan kawasan industri, dipandang penting dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi, sebagaimana pendapat Soeling (2007) yang mengatakan, bahwa melalui pembangunan ekonomi satu persen saja, dapat menyerap tenaga kerja sekitar seratus ribu orang.

Hal yang perlu diantisipasi dari pembangunan sebuah kawasan industri, adalah mengendalikan dan mengawasi terjadinya proses alih fungsi (konversi) terhadap lahan pertanian secara berlebihan, guna memenuhi

kebutuhan pembangunan lokasi industri dan permukiman. Pembangunan suatu kawasan industri di mana pun selalu menimbulkan konsekuensi logis, berupa meningkatnya permintaan terhadap lahan untuk industri itu sendiri, untuk lahan permukiman, dan sarana pendukung lainnya. Yang kerap kali menjadi persoalan adalah, ketika lahan yang digunakan untuk membangun kawasan industri tersebut, menyerobot peruntukkan areal pertanian.

Kawasan industri, adalah suatu tempat pemusatan kegiatan industri, yang dilengkapi dengan sejumlah prasarana dan sarana, yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Hal ini, berbeda dengan Zona Industri yang juga merupakan pemusatan industri, tetapi tanpa dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang memadai. Di Indonesia, pada awalnya kawasan industri hanya dikembangkan oleh pemerintah melalui BUMN, sebagai reaksi terhadap meningkatnya jumlah industri, yang dalam kenyataannya seringkali mendatangkan masalah ikutan, berupa pencemaran lingkungan, ketidakmemadaiannya infrastruktur, bahkan konflik dengan penduduk di sekitarnya. Untuk itu, seiring dengan meningkatnya investasi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, maka pemerintah melalui Keppres RI Nomor 53 tanggal 27 Oktober tahun 1989, mengizinkan pihak swasta untuk mengembangkan usaha kawasan industri.

Bagi pihak swasta, kebijakan dibidang usaha kawasan industri ini, merupakan peluang usaha baru yang cukup menjanjikan, sehingga berkembanglah kawasan-kawasan industri baru, yang dikelola oleh pihak swasta yang tersebar pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi regional, seperti di Jabotabek dan Gerbang Kertausila. Proses perizinan untuk kawasan industri, tak jauh beda dengan perizinan bidang usaha *realestate* lainnya, dalam arti masih dirasakan rumit, dan memakan waktu yang lama. Menyadari bahwa keadaan itu akan menghambat investasi di Indonesia, maka pemerintah – Cq. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/BKPM

mengeluarkan deregulasi dibidang perizinan, melalui Paket Kebijakan Nomor: 15/SK/1993 tanggal 23 Oktober 1993, yang lebih dikenal dengan PAKTO 1993. Dalam ketentuan ini, proses perizinan yang diberlakukan untuk kegiatan investasi seperti perhotelan, perkantoran, perumahan dan kawasan industri, dibuat lebih sederhana, karena prosesnya tidak lagi mesti melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat provinsi, tetapi langsung ditangani oleh SKPD di kabupaten/kota masing-masing.

Setelah investor mendapatkan Surat Persetujuan Penanaman Modal PMDN/PMA yang juga berlaku sebagai Izin Prinsip, dapat langsung mengajukan Izin Lokasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dilengkapi dengan laporan tentang Penyajian Informasi Lingkungan (PIL). Hal ini sangat meringankan pihak investor, karena sebelumnya untuk mendapatkan Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur melalui Kakanwil Badan Pertanahan Nasional, investor harus terlebih dulu memiliki Surat Konfirmasi Pencadangan Tanah dari Gubernur dan Persetujuan Prinsip dari Menteri Perindustrian atau Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Selanjutnya, bagi perusahaan industri yang akan melaksanakan kegiatan produksi pada suatu kawasan industri, diperlukan Izin Usaha Tetap (IUT). Izin ini diajukan kepada BKPM dengan dilengkapi Izin Lokasi, IMB, Hak atas tanah, Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi perusahaan yang wajib melakukan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL). Sekalipun regulasi perizinan untuk kawasan industri sudah disederhanakan, namun dalam pelaksanaannya masih dirasakan relatif rumit dan memakan waktu yang lama, mengingat masih banyaknya persyaratan-persyaratan pelengkap untuk setiap tahap permohonan, dan banyaknya instansi yang terlibat.

Dalam merencanakan suatu kawasan industri, pemerintah melalui Menteri Perindustrian telah menentukan Standar Teknis Kawasan Industri yaitu melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 291/M/SK/10/1989 tanggal 28 Oktober 1989 yang secara garis besar, standar teknisnya mencakup beberapa hal berikut:

(1). Komposisi penggunaan lahan

- > Kapling industri: Maximum 70%
- > Ruang terbuka hijau termasuk daerah penyangga: Minimum 10%
- > Prasarana dan sarana: Luas tanah sisa (20%)

(2). Prasarana yang wajib disediakan antara lain:

- > Jaringan jalan lingkungan: satu jalur dengan dua arah, lebar perkerasan minimum 8 meter atau dua jalur dengan dua arah, lebar perkerasan minimal 2 x 7 meter.
- > Saluran pembuangan air hujan (*drainase*).
- > Instalasi penyediaan air bersih bersumber dari PAM atau diusahakan sendiri.
- > Instalasi penyediaan dan jaringan distribusi tenaga listrik dengan sumber PLN atau diusahakan sendiri.
- > Jaringan telekomunikasi.
- > Instalasi pengelolaan air limbah industri.
- > Penerangan jalan.
- > Unit perkantoran perusahaan kawasan industri.
- > Unit pemadam kebakaran diluar prasarana yang diwajibkan, dapat pula menyediakan prasarana seperti TPS limbah padat dan pagar kawasan industri.

Mengacu pada ketentuan tersebut, maka kebijakan pembangunan kawasan industri di Kabupaten Majalengka, ditempuh melalui beberapa tahapan di bawah ini :

a). Perencanaan Pembangunan Wilayah

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, wilayah pembangunan industri dilokalisasikan pada 27 desa. Wilayah pembangunan industri berbasis komoditas Mangga, terdiri dari : 13 desa/kelurahan di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Jatitujuh, Kertajati, Ligung, Sumberjaya, Dawuan, Sukahaji, Panyingkiran, Majalengka, dan Cigasong. Wilayah pembangunan industri berbasis Komoditas Kedelai, meliputi : 2 desa di Kecamatan Jatiwangi dan berbasis Komoditas Pisang, terdiri atas 3 desa di Kecamatan Rajagaluh.

Secara kewilayahan desa-desa tersebut, telah memenuhi aspek *spatial contiguity*, yaitu kecenderungan yang terjadi pada 2 wilayah yang bersebelahan secara *continue*, dan secara agregat menjadi satu kesatuan yang saling mempengaruhi, sehingga terbangun keterkaitan spasial (Rustiadi dkk, 2011). *Spatial contiguity* dicirikan dengan dua hal, yaitu:

- (1). Desa pembangunan industri, yang berada di perbatasan 2 atau lebih wilayah pengembangan komoditas; dan
- (2). Desa pembangunan industri yang saling berbatasan dengan desa industri lain.

Desa berkarakter (1) dijadikan desa pembangunan industri kecil dengan basis lebih dari satu komoditas, dan desa dengan karakteristik (2) dijadikan kawasan pembangunan industri, yang terdiri atas gabungan beberapa desa.

Wilayah pengembangan komoditas Pisang, berlokasi di wilayah pembangunan sebelah Timur (Kecamatan Argapura), belum memenuhi aspek *spatial compacness* (kecenderungan wilayah untuk mendekati bentuk bentuk lingkaran sempurna). Bahkan, untuk wilayah pengembangan di sebelah Barat daya (Kecamatan Lemahsugih) sama sekali terpisah, dengan wilayah

pembangunan industrinya yang ada di sebelah Timur (Kecamatan Rajagaluh). Anomali ini disebabkan oleh:

- a. Tidak ada desa yang memenuhi kriteria sebagai wilayah pembangunan industri; dan
- b. Letak geografis wilayah tersebut berada di daerah pegunungan yang cukup terjal dan bersebelahan dengan kawasan lindung, sehingga cenderung menjadi wilayah yang terfragmentasi secara spasial (*spatially fragmented*).

Menurut Rustiadi dkk. (2011), wilayah yang terfragmentasi berpotensi menciptakan berbagai bentuk inefisiensi. Mengingat alasan tersebut, wilayah semacam itu biasanya diarahkan untuk pembangunan komoditas pertanian. Arah akhir wilayah pembangunan industri kecil berbasis komoditas unggulan di Kabupaten Majalengka, adalah sebanyak 10 (sepuluh) wilayah tingkat desa, dan 6 (enam) wilayah dalam bentuk kawasan, yang merupakan gabungan beberapa desa.

b). Pembangunan Kawasan Industri di Majalengka

Sesuai dengan amanah Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan, mesti dilakukan secara terencana, serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut, menjadi pedoman umum dalam menentukan arah kebijakan dan mendorong pembangunan sektor industri, sekaligus menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan industri nasional. Undang-undang ini juga menjelaskan, bahwa Pemerintah atau Pemerintah Daerah berperan dalam mendorong percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya melalui pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri menengah.

Sebagai bagian dari daerah yang tergabung dalam pembangunan Wilayah Ciayumajakuning, Kabupaten Majalengka telah menyusun program pengembangannya melalui beberapa kawasan industri. Hal ini dapat dimengerti, mengingat sektor industri memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Sektor ini, selain dapat meningkatkan nilai tambah, juga sangat besar perannya dalam penyerapan tenaga kerja. Dilihat dari banyaknya potensi yang tersedia, baik berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, pembangunan kawasan industri di Kabupaten Majalengka, dititikberatkan pada beberapa sektor yang prospektif.

Potensi yang intens dikembangkan tersebut, meliputi: sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, pengolahan, listrik gas dan air bersih, konstruksi, perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan, dan terakhir sektor jasa-jasa. Dengan letak geografis yang strategis, karena berdekatan dengan salah satu kota yang sedang berkembang di Jawa Barat yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka menjadi akses transportasi penting, dari dan menuju kota metropolis tersebut, sehingga sangat rasional jika pada wilayah ini dikembangkan sektor industri. Beberapa sektor industri di Kabupaten Majalengka yang saat ini cukup berkembang, diantaranya terdiri dari: Industri Tekstil, Industri Pengolahan Kayu, Agro industri atau industri pangan, dan Industri Kerajinan. Mengingat banyaknya potensi yang dimiliki, menjadikan Kabupaten Majalengka menjadi salah satu pusat Industri Kecil Menengah (IKM) yang cukup berkembang di Jawa Barat.

Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Majalengka, meliputi beberapa sub sektor, yaitu:

(1). Pengembangan Industri Tekstil

Di Jawa Barat, sub sektor industri tekstil hingga kini masih merupakan kontributor penting pada sektor industri. Pada tahun 2016, sub sektor ini mampu memberikan kontribusi sebesar 14,90 persen. Peranan sub sektor industri tekstil ini pada tahun yang sama, mencatatkan kontribusi relatif besar jika dilihat dari kontribusi seluruh sub sektor, yaitu sebesar 6,36 persen. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Majalengka, berada pada posisi ke tiga, di bawah sektor perdagangan dan pertanian, yaitu sebesar 14 persen.

Wilayah peruntukan industri di Kabupaten Majalengka, meliputi sejumlah kecamatan berikut : Kecamatan Jatitujuh, Kecamatan Kadipaten, Kecamatan Kertajati, Kecamatan Ligung, Kecamatan Dawuan, Kecamatan Kasokandel, Kecamatan Jatiwangi, Kecamatan Sumberjaya, Kecamatan Leuwimunding, dan Kecamatan Palasah. Wilayah tersebut, diperuntukkan untuk industri besar dan menengah, sedangkan peruntukan industri tekstil diarahkan ke Kecamatan Jatitujuh dan Ligung.

Bila dikaitkan dengan konsep Rantai Nilai Industri (*industry value chain*), pada umumnya industri tekstil menghasilkan produk yang berbeda-beda, seperti benang, kain, dan pakaian. Terkait hal ini, Sturgeon (1998) menegaskan bahwa penerapan konsep Rantai Nilai dalam kegiatan industri, sangat berpeluang menghasilkan nilai tambah produk, karena Rantai Nilai akan membentuk bagian-bagian yang terstruktur, yang bersifat saling membutuhkan di antara berbagai jenis industri tersebut. Khusus untuk pembangunan industri tekstil, Sorensen (1997) mengingatkan tentang perlunya memperhatikan semua regulasi yang diberlakukan pada wilayah yang akan dibangun.

(2). Pengembangan Industri Pengolahan Kayu

Pengolahan kayu sebagai hasil hutan, akan mendorong perkembangan berbagai aktivitas produksi berbasis industri kayu, baik berupa industri primer maupun industri sekunder. Majalengka sebagai salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang relatif besar, memiliki banyak perusahaan kayu yang memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kebutuhan kayu di Kabupaten Majalengka juga sangat tinggi, dan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Dalam penggunaannya, kayu banyak dipakai sebagai bahan bangunan yang permintaannya terus meningkat, sehingga permintaan terhadap kayu pun ikut meningkat. Industri pengolahan kayu di Kabupaten Majalengka berjumlah sekitar 200 unit usaha, dan didominasi oleh industri sekunder pengolahan kayu setengah jadi. Industri pengolahan kayu ini tersebar di 26 kecamatan, yang mayoritas mengolah jenis kayu jati, dan mahoni, dalam bentuk barang setengah jadi seperti kusen, pintu, jendela, lemari, bufet dan kursi.

3). Pengembangan Sub Sektor Agroindustri

Agroindustri merupakan salah satu subsistem agribisnis yang strategis, dan diharapkan mampu menghasilkan nilai tambah hasil pertanian, melalui pengembangan, pemanfaatan dan penguasaan teknologi pengolahan. Agroindustri ditempatkan sebagai rintisan menuju industrialisasi yang berorientasi pada peningkatan pendapatan, dan peningkatan kapasitas produksi berbagai pengolahan hasil pertanian.

Salah satu tanaman pangan penunjang sektor industri pengolahan, atau produk agroindustri dari Desa Ciomas Kecamatan Sukahaji Majalengka, adalah emping jagung. Emping ini merupakan salah satu produk pengolahan hasil pertanian yang bahan bakunya berasal dari jagung yang di-*press* tipis

seperti layaknya emping. Di beberapa negara, Emping Jagung ini disebut *corn flake* yang biasa dikonsumsi dengan campuran susu untuk sarapan. Agroindustri Emping sejauh ini mampu menjadi penopang kehidupan masyarakat desa, dan diharapkan dapat menginspirasi desa yang lain dalam pengembangan jenis produk agroindustri lainnya.

(4).Pengembangan Industri Kerajinan

Indusri kerajinan di Majalengka berpusat di Leuwilajah, Kecamatan Rajagaluh, yang merupakan salah satu sentra anyaman rotan cukup terkenal. Di sentra ini ratusan orang menjadi perajin anyaman rotan. Dengan mengedepankan estetika tinggi, dan proses tradisional, produk kerajinan rotan asal Rajagaluh ini, cukup diminati pasar Eropa. Kerajinan anyaman rotan menjadi usaha yang populer di Kecamatan Rajagaluh, Majalengka, dan tidak hanya dipasarkan dalam negeri, hasil industri kerajinan masyarakat Majalengka ini juga mampu menembus pasar ekspor.

Selain Leuwilajah Kecamatan Rajagaluh, terdapat pula sejumlah sentra lain yang memproduksi anyaman rotan, yaitu Desa Mindi, Kecamatan Leuwimunding, dan Desa Balagedok, Kecamatan Sindangwangi. Hanya saja nama Rajagaluh lebih populer dibandingkan dengan sentra-sentra lainnya. Data dari Dinas Perindustrian Kabupaten Majalengka, memperlihatkan, bahwa di wilayah ini terdapat 14 eksportir anyaman rotan dan menyerap 30.000 tenaga kerja. Menurut keterangan Ikhwan Hidayanto, salah seorang eksportir anyaman rotan di Rajagaluh dengan nama *Tjakil Furniture*, bahwa di Rajagaluh, sebetulnya hanya ada lima eksportir anyaman rotan saja, artinya lebih sedikit bila dibandingkan dengan sentra rotan lainnya di Majalengka.

Menurut Ikhwan, terdapat ratusan perajin lain yang menyuplai kebutuhan produksi rotan di daerahnya. Dia sendiri saat ini bekerjasama dengan sekitar 50 perajin rotan. Bisnis kerajinan anyaman rotan di Majalengka, khususnya

Rajagaluh, menurut Ikhwan telah dimulai sejak 1975. Walaupun daerah ini bukan penghasil rotan, namun karena banyak pihak yang bergantung pada bisnis ini, maka Majalengka menjadi terkenal karena kerajinan rotan. Umumnya, perajin anyaman rotan Rajagaluh mengandalkan pasokan rotan dari pedagang rotan di Cirebon, sedangkan bahan bakunya berasal dari Kalimantan, Sumatra dan Sulawesi.

H. Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Kuningan dalam Perspektif Pembangunan Wilayah Ciayumajakuning

1. Gambaran Umum Potensi Pembangunan Kabupaten Kuningan

Kabupaten Kuningan merupakan sub bagian wilayah pembangunan Ciayumajakuning, yang berada pada bagian Selatan Metropolitan Cirebon, dengan karakteristik daerah yang sedikit berbeda bila dibandingkan dengan 4 (empat) kabupaten/kota lainnya, karena secara geografis berada pada kawasan kaki Gunung Ciremai. Sisi geografis daerah ini memungkinkan Kabupaten Kuningan, beriklim lebih sejuk dibandingkan dengan 4 (empat) daerah lain yang berada dalam cakupan pembangunan wilayah Ciayumajakuning, sehingga menjadi modal berharga dalam mengembangkan potensi wisata, yang sungguh sangat prospektif, pada daerah tersebut. Kondisi topografisnya yang berbukit-bukit, di satu sisi memang tidak memberi keleluasaan untuk perluasan dan pengembangan kawasan perkotaan, namun pada sisi lain apabila dikelola dengan apik, memungkinkan Kuningan tampil menjadi kota mungil yang cantik dan menarik bagi para pelancong. *Endowment factor* ini, menjadi pertimbangan utama Pemkab Kuningan, dalam mengembangkan wilayahnya sebagai daerah tujuan wisata di kawasan Ciayumajakuning khususnya, dan menjadi andalan potensi wisata Jawa Barat yang turut memperkaya khasanah kepariwisataan Nasional.

2. Pengembangan Sektor Pariwisata sebagai Sektor Unggulan Kabupaten Kuningan

Dalam Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1990, tentang Kepariwisataan disebutkan, bahwa Kabupaten Kuningan memiliki potensi yang cukup besar dalam pembangunan sektor pariwisata, hal ini didukung oleh kondisi geografis yang berupa pegunungan, dihiasi dengan keindahan alam yang diperkaya dengan sumber-sumber mata air alami. Disamping itu, juga terdapat sejumlah objek wisata sejarah dan situs purbakala, sehingga menjadikan Kabupaten Kuningan sebagai pilihan utama destinasi wisata, baik ketika liburan panjang maupun saat liburan akhir pekan.

Ditengok dari sisi potensi, pariwisata Jawa Barat memang pantas digelar sebagai *champion*. Keindahan alam dan kekayaan seni budayanya tak terbantahkan, termasuk potensi wisata Kabupaten Kuningan. Selain Gunung Ciremai, masih ditambah dengan banyak ragam destinasi lain yang menarik. Kekayaan wisata Kuningan ini, telah dieksplor lewat *Tour de Linggarjati (TDL) 2018*. *Tour* ini merupakan salah satu *event*, yang diharapkan mampu mempromosikan Kabupaten Kuningan kepada para penikmat wisata global. Kementerian Pariwisata RI, terus berupaya memperkenalkan potensi-potensi berharga itu, salah satunya lewat *event sport tourism* yang telah terbukti ampuh mempromosikan pariwisata di berbagai daerah di Indonesia.

Kabupaten Kuningan memiliki dua jenis wisata unggulan, yaitu wisata alam dan wisata sejarah. Berikut ini gambaran dari wisata daerah tersebut:

1). Wisata alam di antaranya: Taman Nasional Gunung Ciremai, Curug Sidomba, Waduk Darma, Telaga Remis, Kebun Raya Kuningan, Lembah Cilengkrang, Balong Cigugur, Palutungan, Curug Bangkong, Situ Cicerem, Desa Sitonjul, Telaga Nilem, Pemandian Air Panas Subang, Taman Cisantana, Hutan Desa Setianegara, Curug Ceret, Buper Ipukan, Bukit

Panembongan, Curug Landung, Sukageuri View, Curug Payung, Curug Putri, Hutan Kota Mayasih, Hutan Kota Bungkirit, Kebun Raya Kuningan, Curug Cipeuteuy, Curug Putri Palutungan, Curug Landing, Batu Luhur, Situ Wulukut.

2). Wisata Sejarah antara lain: Situs Purbakala Cipari, Sumur Tujuh Cibulan, *Open Space Gallery*, Balong Dalem, Balong Kramat Darmaloka, Paseban Tri Panca Tunggal, Gua Maria Rahmet Sawyer, Gedung Perundingan Linggarjati.

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia mengungkapkan pula, bahwa Kabupaten Kuningan memiliki aksesibilitas yang baik. Sebagai contoh, pelancong yang berasal dari Jakarta dapat menjangkau Kuningan melalui Tol Cikapali dengan waktu tempuh sekitar 3.5 jam, bahkan dalam waktu dekat, setelah pembangunan Tol Cisumdawu rampung, dan Bandara Internasional Kertajati Majalengka beroperasi penuh, akan semakin memudahkan para turis berkunjung ke Kabupaten Kuningan. Kuningan juga memiliki fasilitas wisata yang lengkap, dengan sajian berbagai macam kuliner tradisional dan modern, berikut ketersediaan akomodasi yang lengkap, mulai dari hotel berbintang sampai *homestay*. Bahkan Kuningan berhasil mengorbitkan Desa Cibuntu sebagai peraih penghargaan bidang kepariwisataan, dan dinobatkan sebagai desa wisata terbaik urutan kelima tingkat ASEAN pada tahun 2016, untuk bidang *homestay*.

3. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuningan di Bidang Pariwisata

Kebijakan pemerintah Kabupaten Kuningan terkait bidang kepariwisataan, tertuang dalam Rencana Strategis Kabupaten Kuningan, dengan mengusung visi “Kuningan MAS” singkatan dari Mandiri, Agamis, Sejahtera. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, salah satu misi yang berkaitan dengan pariwisata daerah berbunyi: “Memantapkan keunggulan kawasan

agropolitan, pariwisata daerah dan sektor unggulan lainnya, peningkatan investasi ramah lingkungan serta peningkatan sarana dan prasarana daerah”.

Pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Kuningan, bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dengan sasaran meningkatnya keunggulan wisata daerah, melalui strategi peningkatan manajemen pariwisata daerah. Secara umum, kebijakan pariwisata diarahkan pada peningkatan kualitas sarana prasarana objek wisata, peningkatan promosi pariwisata daerah dan peningkatan kemitraan/jejaring pariwisata.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuningan tentang Kepariwisata lebih lanjut, dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, yang sekaligus menegaskan, bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Kuningan bertujuan untuk:

- 1).Memelihara nilai-nilai agama dan budaya masyarakat Kuningan;
- 2).Menumbuhkan rasa persatuan, pluralisme, dan multikultur;
- 3).Mendorong pendayagunaan potensi lokal;
- 4).Menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja bagi masyarakat Kuningan yang luas dan merata;
- 5).Memelihara kelestarian dan keindahan lingkungan alam dan budaya Kuningan; dan
- 6).Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara sektoral, visi kepariwisataan Kabupaten Kuningan, dituangkan pula dalam pernyataan visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, yaitu: “Mewujudkan Kuningan Mandiri, Agamis dan Sejahtera melalui pariwisata yang maju, unggul berbasiskan budaya dan alam yang lestari”. Guna mendukung tercapainya visi tersebut, telah ditetapkan sejumlah misi sebagai berikut:

- 1). Melakukan kajian teknis dan pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan masyarakat. Membangun kemitraan (sinergitas) dengan para pelaku usaha pariwisata (sektor swasta) dan masyarakat dalam pengembangan dan pembangunan kepariwisataan.
- 2). Mewujudkan seni budaya sebagai aset potensial dalam mendukung pengembangan jasa usaha pariwisata.
- 3). Menjadikan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam aspek sejarah, nilai-nilai tradisi masyarakat sebagai asset pengembangan pariwisata.
- 4). Mempromosikan dan mempublikasikan pariwisata untuk menjadikan Kuningan sebagai daerah tujuan wisata unggulan di Jawa Barat.

Strategi dan Arah Kebijakan Kepariwisata Kabupaten Kuningan, diarahkan pada upaya-upaya berikut:

- a). Pengembangan Industri pariwisata berdaya saing, melalui :
 - >Penguatan industri pariwisata dan keterkaitan antara industri pariwisata dan industri kreatif, termasuk dengan usaha mikro, kecil dan menengah.
 - >Peningkatan dan penguatan basis data dan informasi investasi pariwisata.
 - > Pengembangan UMKM serta industri kreatif bidang pariwisata.
 - > Penerapan *Standard Operating Procedure (SOP)* usaha pariwisata.
 - > Penerapan sertifikasi kompetensi pariwisata dan usaha pariwisata dan penerapan sapta pesona pariwisata di destinasi pariwisata.
 - > Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral.
 - > Peningkatan promosi pariwisata lokal, regional dan internasional.

- b). Pengembangan destinasi pariwisata yang berkelanjutan, melalui:
- > Peningkatan konsolidasi akses transportasi terutama antar pemerintah daerah perbatasan yang tergabung dalam “Kunci Bersama”.
 - > Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata serta meningkatkan kualitas dan standar pelayanan minimum pariwisata.
 - > Penataan dan diversifikasi daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan termasuk *event* dan olahraga.
 - > Pengembangan destinasi pariwisata di daerah terdepan, terluar dan wilayah perbatasan.
 - > Pengembangan agropolitan yang merupakan konsepsi pengembangan wilayah berbasis pedesaan tempat sumber daya pertanian dengan cara mengadaptasikan elemen-elemen pertanian modern dengan meningkatkan akses jaringan ekonomi (pariwisata) regional yang lebih luas.
 - > Pengembangan daya tarik wisata dan inovasi produk yang berbasis lingkungan.
 - > Peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas *stakeholders* pengembangan daya tarik wisata.
 - > Penataan kebijakan dana manajemen daya tarik wisata dan produk pariwisata.
 - > Pemanfaatan media cetak, elektronik, dan *public figure* dan media kesenian tradisional.
 - > Pengamanan dan kenyamanan oleh masyarakat di destinasi.

- > Peningkatan efektivitas pengelolaan destinasi pariwisata melalui peningkatan koordinasi dan ketrepaduan pembangunan pariwisata dan *Destination Management Organization (DMO)*.
 - > Pengembangan destinasi pariwisata dengan meningkatkan apresiasi seni dan budaya local.
- 3). Pemasaran pariwisata bertujuan untuk:
- > Meningkatkan jumlah wisatawan manca negara maupun nusantara.
 - > Meningkatkan promosi tujuan pariwisata pada daerah perbatasan yang tergabung dalam KUNCI BERSAMA melalui saluran pemasaran yang kreatif dan efektif.
 - > Meningkatkan promosi melalui jaringan situs *on line* kepariwisataan daerah dengan pengembangan data dan informasi destinasi pariwisata yang dilengkapi dokumentasi dan visualisasi.
 - > Meningkatkan pemanfaatan informasi pasar pariwisata melalui para biro dan agen perjalanan wisata serta para pelaku usaha lainnya dari daerah dan negara sumber wisatawan.
 - > Meningkatkan kuantitas pengguna bahan promosi kepariwisataan melalui penyediaan, penyajian, dan diseminasi bahan promosi cetak, elektronik, dan publikasi kepariwisataan.
 - > Meningkatkan eksistensi kepariwisataan daerah melalui keikutsertaan dan partisipasi segenap pelaku kepariwisataan pada bursa kepariwisataan regional dan nasional, khususnya di daerah fokus pasar.
 - > Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kepariwisataan melalui dukungan atas penyelenggaraan festival seni, budaya dan pariwisata di tingkat lokal, regional, nasional bahkan internasional.

> Meningkatkan jumlah pergerakan wisatawan nusantara melalui penyelenggaraan *direct promotion*, penyelenggaraan *event* pariwisata utama, serta dukungan bagi penyelenggaraan event seni, budaya dan pariwisata di berbagai daerah.

> Meningkatkan pelaksanaan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran baik local, regional, nasional, dan internasional melalui pengembangan kapasitas, promosi dan penyelenggaraan serta dukungan *event MICE (Meeting, Incentive Travel, Convention and Exhibition)*.

> Meningkatnya dukungan bagi partisipasi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam promosi pariwisata.

> Meningkatkan pemasaran pariwisata secara sistematis melalui kerjasama antar pemerintah, masyarakat, dan pengusaha.

4). Pengembangan kelembagaan pariwisata dilakukan melalui:

> Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata local untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan *hospitality management* yang kompetitif di Jawa Barat.

> Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kepariwisataan dengan mengembangkan SDM pariwisata berbasis kompetensi melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

> Peningkatan penelitian dan pengembangan pariwisata dalam mendukung kebijakan pembangunan pariwisata.

> Peningkatan profesionalisme dan daya saing Sumber Daya Manusia bidang pariwisata.

> Peningkatan dukungan manajemen sumber daya pariwisata.

- > Pemantapan koordinasi dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat atau pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan yang meliputi perencanaan objek wisata, seni dan budaya serta promosi dan publikasi.
- > Peningkatan promosi pariwisata lokal, regional dan internasional.

I. Dinamika Pembangunan Wilayah di Kawasan Barat Jawa Barat

1. Gambaran Umum Kabupaten Karawang

Ketika mendengar nama Karawang, mungkin ada yang langsung teringat pada peristiwa bersejarah bagi bangsa kita, yaitu saat Sang Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia saat itu, diculik oleh para pemuda pejuang ke daerah Rengasdengklok terkait dengan rencana memproklamkan kemerdekaan Negara kita. Bagi para pelajar, kata “Karawang” pun boleh jadi tidak begitu asing, karena terkait dengan sajak berjudul “Antara Karawang dan Bekasi” buah karya penyair terkenal masa Pujangga Baru, Khairil Anwar. Hal ini mengingatkan, bahwa Kabupaten Karawang telah mencatatkan diri sebagai daerah yang berperan penting dalam lembaran sejarah perjuangan Bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah.

Kabupaten Karawang secara geografis terletak antara 107°02'-107°40' dan 5°56'-6°34' LS dan termasuk daerah dataran yang relatif rendah dengan kemiringan wilayah 0-2%, 2-15%, 15-40% dan di atas 40%, serta memiliki luas wilayah 1.753,27 km² atau 3,73 persen dari luas Provinsi Jawa Barat, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Subang
- Sebelah Tenggara : Kabupaten Purwakarta
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur

- Sebelah Barat : Kabupaten Bekasi

Secara administratif Kabupaten Karawang terdiri dari: 30 kecamatan, 309 kelurahan/desa, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.273.579 jiwa, terdiri dari 1.166.478 jiwa penduduk laki-laki dan 1.107.101 jiwa penduduk perempuan (BPS : 2015), dengan kepadatan penduduk rata-rata berkisar 1.297 jiwa per km² (tahun 2011), serta Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,67 persen per tahun.

Kabupaten Karawang secara topografis, berada pada ketinggian 0 – 5 meter di atas permukaan laut (dpl), menjadikan sebagian besar lahan di kabupaten itu sebagai dataran yang relatif rendah, dengan kondisi tofografi yang landai atau rata. Pada pihak lain, secara hidrologis Kabupaten Karawang pun dilalui pula oleh beberapa buah sungai yang bermuara di Laut Jawa, di antaranya yaitu Sungai Citarum yang merupakan pemisah dengan Kabupaten Bekasi, dan Sungai Cilamaya yang merupakan batas wilayah dengan Kabupaten Subang. Selain sungai, terdapat 3 (tiga) buah saluran irigasi yang besar, yaitu Saluran Induk Tarum Utara, Saluran Induk Tarum Tengah dan Saluran Induk Tarum Barat yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah, tambak dan pembangkit tenaga listrik.

Karakteristik geologis Kabupaten Karawang merupakan campuran antara endapan laut dan *alluvium* vulkanik, khususnya di bagian utara/pantai, sementara pada bagian tengah dan Selatan dipengaruhi oleh keberadaan perbukitan dan Gunung Sanggabuana, sehingga tanahnya banyak mengandung endapan vulkanik. Mengingat karakteristik alamiah tersebut, sangat beralasan jika lahan pertanian di Kabupaten Karawang sangat produktif, khususnya dalam pertanian padi, hingga menjadikannya sebagai salah satu lumbung beras nasional. Hal ini tiada lain karena ditopang oleh

ketersediaan lahan yang subur, sehingga sebagian besar lahannya sangat cocok untuk pengembangan sektor pertanian.

Saat ini luasan lahan sawah di Karawang mencapai 95.906 hektar, sedangkan lahan pertanian bukan sawah yang terdiri dari: tegal/kebun seluas 10.249 hektar, ladang/huma seluas 1.291 hektar, dan perkebunan seluas 468 hektar. Produktivitas padi di Karawang pun sangat tinggi, dibandingkan dengan daerah lainnya, yaitu mencapai 7 ton per hektar, bahkan dalam satu tahun, Karawang mampu menghasilkan hingga 500 ribu ton beras.

2. Karawang: Dari Lumbung Padi Menjadi Lumbung Pabrik

Sebagaimana disinggung di muka, bahwa Kabupaten Karawang merupakan salah satu wilayah lumbung padi di Jawa Barat. Diduga karena tingkat perubahan penggunaan lahan dan tutupan lahan di wilayah ini sangat tinggi, dalam beberapa tahun terakhir ini, telah berdampak pada menurunnya kemampuan produksi lumbung padi tersebut secara signifikan. Apabila dikaitkan dengan kebutuhan beras nasional, fenomena tersebut agak ironis, apalagi jika kita melihat upaya pemerintah dalam memenuhi *stock* beras nasional, yang realitasnya sering dilakukan lewat impor. Untuk menelisik sejauhmana kebenaran dugaan itu, diperlukan penelitian yang saksama dilihat dari berbagai perspektif, sehingga kita dapat mengungkapkan fakta yang sebenarnya, guna dijadikan bahan pembelajaran, karena hal ini terkait dengan kepentingan kita bersama.

Untuk itu, terlebih dahulu marilah kita lihat hasil analisis pola perubahan penggunaan lahan dan tutupan lahan, selama periode tahun 2000-2013 dalam hubungannya dengan Neraca Pangan dan Produksi Beras, yang merujuk pada beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten. Perubahan penggunaan lahan dan tutupan lahan dimaksud,

diidentifikasi dengan menggunakan Citra *LandSatelite* TM selama lima tahun liputan, yaitu tahun 2000, 2003, 2007, 2010 dan tahun 2013, sedangkan produksi dan produktivitas padi, dianalisis berdasarkan Data Statistik Ekonomi Kabupaten Karawang, dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2014. Hasil pencitraan satelit memperlihatkan, bahwa sepanjang periode tersebut, luas lahan sawah di Kabupaten Karawang menyusut dari 116,268 hektar menjadi 103,866 hektar. Perubahan penggunaan lahan dan tutupan lahan terbesar, terjadi padahal sawah yang beralihfungsi menjadi lahan pemukiman, berupa lahan terbangun untuk tempat tinggal dan tempat bekerja, yang luasannya bertambah secara signifikan dari 11.759 hektare pada tahun 2000, menjadi 30.155 hektare pada tahun 2013. Ironisnya, perubahan penggunaan lahan paling dominan, justru terjadi pada lahan sawah dan pertanian lahan kering, sehingga dalam kurun waktu yang sama, rata-rata penurunannya mencapai angka 0.93 persen per tahun. Penurunan luas lahan sawah ini, berakibat pada menurunnya kontribusi beras yang didistribusikan ke luar wilayah, sebesar rata-rata 5 (lima) persen dalam kurun waktu 13 tahun terakhir.

3. Upaya Mempertahankan Lahan Persawahan di Kabupaten Karawang

Alih fungsi lahan di Kabupaten Karawang yang terus menerus berlangsung dalam waktu yang relatif cepat, bagi pemerintah daerah setempat menjadi persoalan yang sangat krusial, khususnya dalam menentukan lokasi lahan sawah yang harus dipertahankan. Desakan kebutuhan alih fungsi lahan sawah bagi kepentingan sektor lain, di luar pertanian tak lagi dapat dihindari, sehingga satu-satunya jalan untuk menanggulangi kemungkinan defisit lahan, adalah upaya perlindungan terhadap lahan-lahan pertanian pangan yang produktif secara berkelanjutan, dengan cara melakukan zonasi terhadap

lahan-lahan sawah di Kabupaten Karawang. Perlindungan terhadap lahan sawah ini sangat penting dilakukan, karena kita semua tahu, bahwa beras merupakan makanan pokok utama bagi penduduk Indonesia, bahkan sejauh ini kita masih tercatat sebagai konsumen beras terbesar di dunia.

Walaupun dalam prakteknya, upaya perlindungan ini tidak akan sepenuhnya mampu menangkal terjadinya konversi lahan, akan tetapi paling tidak, diharapkan mampu menghambat laju alih fungsi lahan secara berlebihan. Karena jika sama sekali tidak dilakukan, maka seluas apapun bentangan lahan sawah di wilayah lumbung padi nasional ini, seiring dengan waktu akan terus menyempit, yang niscaya akan berdampak pada kian menurunnya produksi padi. Bagi Kabupaten Karawang, kendati kebutuhan masyarakat domestik terhadap beras bisa tercukupi, tetapi karena kabupaten ini berstatus sebagai lumbung padi nasional, dengan target produksi gabah sebanyak 600 ribu ton per tahun, maka merebaknya alih fungsi lahan tersebut, jelas merupakan ancaman yang tidak bisa diremehkan.

Tahun 1989 adalah awal mula terjadinya alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Karawang, menjadi lahan industri. Ketika itu, Presiden Soeharto menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989, tentang Kawasan Industri yang diarahkan ke Kabupaten Karawang. Berkembangnya berbagai jenis industri di kawasan lumbung padi tersebut, memicu kedatangan tenaga kerja dari luar daerah ke Kabupaten Karawang dalam jumlah besar, yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan lahan untuk rumah tinggal, berikut sarana penunjang dan fasilitas permukiman lainnya. Pertumbuhan sektor industri secara masif sebagai konsekuensi pengembangan kawasan industri di Kabupaten Karawang tersebut, menjadi ancaman serius bagi sektor pertanian, akibat alih fungsi lahan yang terus meningkat, baik untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan kawasan industri itu sendiri, maupun untuk

lahan perumahan tenaga kerja, dan utilitas kawasan industri. Apabila tidak ditangani dengan bijak, sama saja artinya dengan menciptakan kemiskinan baru di kalangan petani, dan membiarkan terjadinya penghamburan uang Negara, untuk membiayai impor beras yang dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat. Sekalipun diakui, bahwa sektor industri berpeluang menciptakan *multiplier effect* dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, namun tidak sedikit pula potensi efek samping yang menyertainya.

Untuk itu, demi terjaganya ketersediaan dan keamanan pangan nasional, sekaligus sebagai upaya mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian, pembangunan wilayah di Kabupaten Karawang, seyogianya secara konsisten berorientasi pada pembangunan pertanian, dengan tetap mengedepankan konsep kemandirian pangan, swasembada pangan, dan ketahanan pangan. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012, tentang Ketahanan Pangan, selain tetap dijadikan landasan utama upaya mewujudkan ketahanan pangan, juga merupakan dasar dalam membangun kemandirian pangan sekaligus menjamin kedaulatan pangan. Apapun alasannya, hendaknya diingat bahwa kedaulatan pangan merupakan hak negara dan bangsa yang mandiri, dalam upaya menjamin hak pangan rakyat, melalui pemberian hak secara adil kepada masyarakat dalam menentukan sistem yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal yang dimiliki.

4. Penyebab Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan di Daerah Karawang

ini kita telah memiliki aturan hukum yang jelas tentang tata ruang dan tata guna lahan berikut sanksi-sanksinya, akan tetapi alih fungsi lahan pertanian pangan khususnya, tetap terjadi di berbagai daerah, seperti halnya di Kabupaten Karawang Jawa Barat dan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali,

padahal kedua daerah tersebut berstatus sebagai lumbung padi nasional. Alih fungsi lahan, antara lain terjadi karena pemerintah daerah, belum sepenuhnya menindaklanjuti ketentuan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan. Pemkab Karawang memang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011- 2031. Pemerintah Kabupaten Karawang pun, telah memberlakukan pula Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018, tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang didalamnya berisikan penetapan lahan dimaksud, seluas 87.000 hektar, yang terdiri dari 85.000 hektar dalam bentuk lahan persawahan dan 2.000 hektar untuk lahan cadangan.

Dengan berlakunya peraturan tersebut, maka area persawahan seluas 85.000 hektar yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan itu (LP2B), tidak dapat lagi dialihfungsikan untuk kegiatan non pertanian. Namun hingga saat ini, Perda tersebut tidak berjalan secara efektif, karena belum ditindaklanjuti dengan peraturan teknis pelaksanaannya. Selain alasan itu, penyebab lain dari terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan di daerah, umumnya berupa desakan kebutuhan lahan untuk kepentingan lain. Kasus yang terjadi di Kabupaten Karawang, adalah fakta dari kuatnya desakan tersebut, manakala *demand* terhadap lahan peruntukan sektor industri pada akhirnya mereduksi lahan pertanian pangan.

Sektor industri di Karawang berkembang pesat, karena sejumlah faktor, selain berdekatan dengan Provinsi DKI Jakarta, juga menjadi pintu gerbang utama ke ibukota negara tersebut, terlebih setelah adanya Tol Cikampek. Selain itu, Karawang pun memiliki wilayah administratif yang cukup luas dengan topografi yang sangat mendukung untuk pengembangan sektor

industri, sehingga sangat menarik bagi para pelaku usaha dan investor. Pada pihak lain, bunyi pasal 106 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang mewajibkan perusahaan yang akan menjalankan industri, untuk menempatkan diri (berlokasi) pada kawasan industri, semakin memicu minat para pengusaha properti tersebut untuk membangun kawasan industri di Kabupaten Karawang.

Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri, yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjangnya. Kawasan ini, dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha di bidangnya. Sampai dengan pertengahan tahun 2018, Pemkab Karawang telah menerima sebanyak 23 permohonan izin pembangunan kawasan industri, dan saat ini telah terealisasi sebanyak 11 kawasan industri. Kawasan industri dimaksud, antara lain Kawasan Industri Kujang, *Indotaisae*, Mandala Putra, KIIC, Suryacipta, dan KIM. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, hingga tahun 2018 seluas 13.756.358 hektar lahan yang dialokasikan untuk lahan industri di Kabupaten Karawang.

Meningkatnya skala produksi pada perusahaan industri, umumnya diikuti oleh kebutuhan perluasan lahan untuk sarana penunjang, terutama untuk gudang penyimpanan barang sisa produksi dan kelebihan produksi. Perkembangan sektor industri yang sehat, akan mendatangkan efek berganda bagi sektor-sektor lainnya, berupa meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar, bertambahnya lapangan kerja, berkembangnya industri pemasok (hulu), maupun hilir berikut sektor penunjang lainnya, seperti jasa keuangan dan bank, serta sektor *property*. Pada sisi lain, bertambahnya jumlah penduduk akibat dari migrasi tenaga kerja, telah mendorong maraknya pembangunan perumahan di Karawang, konon tidak kurang dari 5.000 hektar

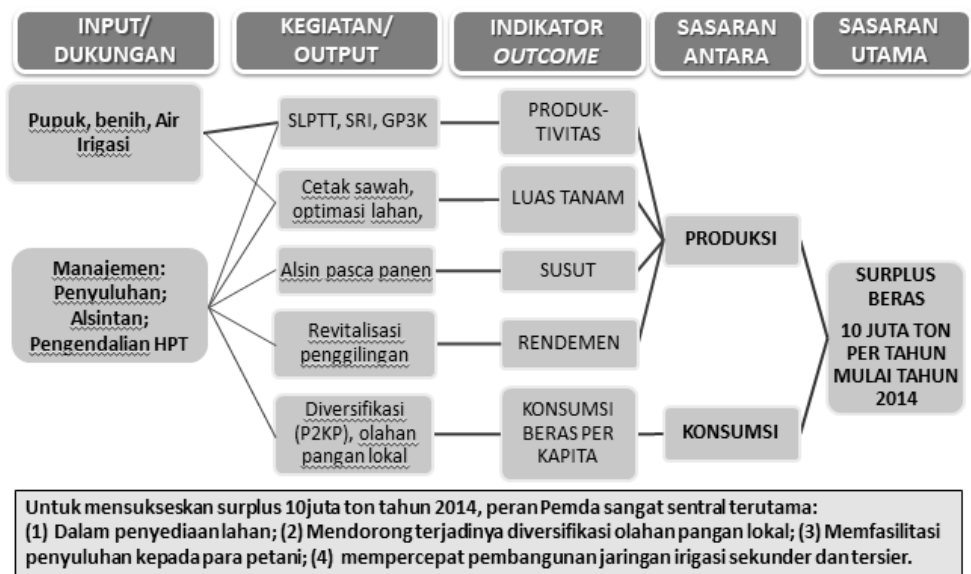
lahan yang telah berubah menjadi kompleks perumahan. Lebih jauh, perkembangan sektor industri pun telah berdampak pada perubahan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang ditandai dengan bermunculannya hotel, restoran, tempat karaoke, dan beragam tempat hiburan lainnya. Selain itu, permintaan terhadap jasa persewaan rumah atau tempat kost para pekerja, serta warung makanan dan jajanan tumbuh dengan marak di daerah lumbung beras ini. Yang pasti, semua itu memerlukan ketersediaan dan daya dukung lahan, dan sudah barang tentu sangat berpotensi mendesak lahan pertanian pangan.

Mencermati fenomena itu, kiranya tidak berlebihan jika banyak pihak yang meramalkan, bahwa area persawahan yang berada di tepi jalan utama sekitar perkotaan Karawang, akan segera terkikis habis akibat alih fungsi lahan. Terbitnya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang, yang memperbolehkan alih fungsi lahan persawahan kota, dalam rangka pengembangan kawasan pertumbuhan baru, meskipun dibatasi pada lahan sawah dengan radius 200 meter dari tepi jalan raya, di mata para pengusaha, telah menjadi alat legitimasi yang ampuh, untuk memperluas alih fungsi lahan sawah hingga merasuk jauh dari pinggir jalan utama. Kurang intensnya sosialisasi dari aparat pemda kepada masyarakat mengenai ketentuan alih fungsi lahan pertanian pangan, semakin mempertegas jawaban atas kekhawatiran tersebut.

Keliaran alih fungsi lahan pertanian pangan di Karawang kian meruyak, karena menimpa pula pada kawasan LP2B. Salah satu contoh, adalah kasus alih fungsi yang dilakukan oleh PT. Jatisari Lestari Mandiri (PT JLM), yaitu produsen kaca di Jatisari, yang semula hanya dizinkan menggunakan lahan untuk pembangunan gudang seluas 3,5 hektar, namun dalam kenyataannya merambah hingga hampir 12 hektar. Pada kasus itu, sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Undang –undang RI Nomor 41 Tahun 2009, meskipun lahan sudah

dikeruk dan difondasi, PT.JLM diperintahkan untuk menghentikan pembangunan gudang,serta mengembalikan lahan pada fungsi semula, yaitu untuk persawahan. Perusahaan tersebut, selanjutnya diproses secara hukum, sesuai dengan amanat perundang-undangan.

Kasus PT. JLM hanyalah secuil gambaran dari kasus pelanggaran alih fungsi lahan pertanian pangan, dan sangat mungkin masih ada kasus-kasus pelanggaran lainnya yang belum atau tidak terdeteksi, bahkan tidak dilaporkan, mengingat lemahnya fungsi pengawasan pihak aparat, akibat keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Pengawasan yang dilakukan sejauh ini, baru sebatas mengandalkan para Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, yang jumlahnya paling banyak hanya dua orang.Karena mereka tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan, maka apabila terjadi pelanggaran, petugas cukup melaporkannya ke Dinas Pertanian setempat, untuk selanjutnya dilaporkan kepada kepala daerah.



Gambar 9.3 Upaya Sinergi Nasional dan Daerah dalam Pencapaian Surplus Beras 10 Juta Ton

5. Dampak Kebijakan Pembangunan Kawasan Industri Bagi Masyarakat Sekitar di Kabupaten Karawang

Di usianya yang mendekati 4 (empat) abad, perkembangan perekonomian Kabupaten Karawang, tergambarkan dari Laju Pertumbuhan Ekonomi-nya (LPE) yang relatif tinggi, yakni 7,87 persen per tahun, dengan jumlah penduduk kurang lebih 2,9 juta jiwa. Kemampuan ekonomi rata-rata penduduk Kabupaten Karawang, dapat terlihat pula dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita atas dasar harga konstan, yaitu sebesar Rp. 13.109.640,00, dan Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku, sebesar Rp. 29,498 juta rupiah per tahun. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karawang, dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan perkembangan yang semakin baik. IPM Karawang (2018) mencapai indeks 71,98, dengan komponen Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 93,49; Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,45; Indeks Harapan Hidup (AHH) sebesar 68,18; serta Indeks Daya Beli perkapita sebesar 641,70 per kapita. Capaian tersebut tentunya cukup menggembirakan, mengingat IPM merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk di suatu Negara atau wilayah, yang mengacu pada standar kesejahteraan versi *United Nation Development Program (UNDP)*, sebagai indikator dari capaian keberhasilan pembangunan.

Pengembangan kawasan industri, saat ini menjadi salah satu prioritas pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian RI, di wilayah Provinsi Jawa Barat terdapat sekitar 2.381,97 hektar luas lahan, yang tengah dikembangkan menjadi 10 (sepuluh) kawasan industri baru bertaraf nasional dan internasional. Dari jumlah tersebut, seluas 851,97 hektar atau sekitar 35 persen,

berlokasi di wilayah Karawang. Perkembangan kota industri ini, diharapkan dapat merangsang tumbuh-kembangnya daya kreasi dan inovasi serta *multiplier effect* yang berarti dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karawang dan daerah sekitarnya. Sebagai konsekuensi logis dari pembangunan sektor industri, selain mendatangkan dampak positif, tidak akan terlepas pula dari dampak negatif. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa munculnya eksekutif industrialisasi tersebut, terkait dengan aspek kependudukan, sosial budaya, ekonomi dan masalah lingkungan. Hal serupa terjadi pula di Kabupaten Karawang, pada aspek kependudukan, kabupaten ini mengalami bonus lonjakan urbanisasi yang luar biasa, khususnya dalam tiga tahun terakhir. Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang (tahun 2019), populasi pendatang mencapai 60 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Karawang, sementara 40 persen sisanya merupakan penduduk asli. Lonjakan arus urbanisasi, secara signifikan terjadi sejak tahun 2016, dengan jumlah pendatang sekitar 30.000 orang, setahun kemudian bertambah sebanyak 1.000 orang, dan pada 2018 kembali bertambah sekitar 11.600 orang yang kemudian menetap di sana.

Tingginya arus urbanisasi terutama pada usia pekerja, menimbulkan persinggungan antara warga pendatang, dengan warga pribumi dalam bentuk persinggungan budaya. Banyaknya pendatang yang *notabene* terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, mengakibatkan tingginya tingkat persinggungan budaya di Kabupaten Karawang. Selain karena perbedaan latar belakang di atas, persinggungan budaya ini sangat mungkin dipicu oleh diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, yang antara lain mewajibkan setiap perusahaan baru,

untuk merekrut 60 persen tenaga kerjanya yang berstatus sebagai orang Karawang asli.

Menyadari, bahwa hal itu secara substansial dianggap bertentangan dengan amanat Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama dan tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, maka pada tahun 2016 kebijakan tersebut dihapus oleh Kementrian Dalam Negeri RI, dengan alasan untuk mempercepat investasi di daerah. Tampaknya kebijakan itu cukup efektif, dan pada tahap implementasi, tindak lanjut penghapusan kebijakan tersebut telah diperkuat dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2016.

Meskipun secara ekonomi industrialisasi di Kabupaten Karawang lebih banyak mendatangkan dampak positif, seperti berkembangnya kawasan industri, penyerapan tenaga kerja, bervariasinya jenis mata pencaharian dan lapangan pekerjaan, disisi lain meninggalkan pula sejumlah dampak negatif, terutama terhadap sektor pertanian. Tingginya alih fungsi lahan pertanian yang mencapai 150 hektare per tahun menjadi pemukiman warga, pabrik, pusat bisnis, dan infrastruktur lainnya, membuat sektor pertanian tersurut beberapa langkah. Salah satu kemunduran yang mendasar adalah keengganan generasi milenial untuk menekuni sektor pertanian. Fenomena ini sama sekali tidak menguntungkan bagi bangsa kita, yang sejak dulu memang dikenal sebagai negara agraris.

Saat ini luas baku areal sawah di Karawang tercatat seluas 98.615 hektare. Dalam upaya mengendalikan peningkatan alih fungsi lahan persawahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), telah menetapkan lahan seluas 87.000 hektar sebagai lahan baku pertanian, dan hanya seluas

10.000 hektar yang bisa dialih fungsikan. Dampak negatif lain dari proses modernisasi dan perubahan sosial melalui industrialisasi ini, diperlihatkan pula oleh hasil penelitian Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang (tahun 2014), yang mengerucut pada 4 (empat) aspek, yaitu: kependudukan, sosial budaya, ekonomi serta lingkungan hidup. Menurut Gillin dan Gillin (dalam Soekanto, 1990) perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk dan ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Sedangkan modernisasi adalah suatu proses transformasi dari suatu arah perubahan ke arah yang lebih maju, atau meningkat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju, dimana dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Abdulsyani, 1994:176).

Modernitas atau tata kehidupan yang dianggap lebih modern dimaksud, ditunjukkan dengan kemunculan sejumlah fenomena baru dalam suatu lingkungan masyarakat. Di bidang ekonomi, khususnya perubahan itu, terlihat dari beberapa fenomena berikut:

- Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat.
- Terjadinya pergeseran dari sektor agraris ke industri sebagai inti sektor ekonomi.
- Konsentrasi produksi ekonomi di kota dan kawasan urban.
- Penggunaan sumber daya tak bernyawa sebagai pengganti tenaga kerja manusia dan hewan.
- Penyebaran temuan teknologi pada seluruh aspek kehidupan sosial.

- Terbukanya pasar tenaga kerja yang berkompetensi bebas, dan sedikitnya pengangguran.
- Terkonsentrasinya tenaga kerja di pabrik dan perusahaan raksasa.
- Pentingnya peran pengusaha, manager atau "kapten industri" dalam pengendalian produksi (Sztompka, Piort, dalam Rosana, 2011)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa Kabupaten Karawang tengah berada dalam tahap transformasi menuju ke arah yang lebih maju, yang terjadi karena pengaruh perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi serta difusi atau faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Pergeseran dari masyarakat agraris menuju masyarakat industrialisasi, tingginya tingkat urbanisasi, penyebaran temuan teknologi ke seluruh aspek kehidupan, terkonsentrasinya tenaga kerja di pabrik dan perusahaan raksasa dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, merupakan sejumlah dampak positif yang didapatkan dari proses transformasi tersebut.

Menjadi harapan kita, bahwa pesatnya perkembangan sektor industri di Kabupaten Karawang, dapat mendatangkan *trickle down effect* sehingga masyarakat kelas bawah, dapat turut menikmati berkah pengembangan industrialisasi di kawasan tersebut. Selain itu timbulnya dampak negatif, seperti persinggungan budaya karena tingginya angka urbanisasi diharapkan dapat diatasi secara bijaksana. Dalam hal ini, Karawang perlu belajar dari Bekasi yang telah terlebih dahulu menjadi daerah tujuan urbanisasi utama, setelah Jakarta. Selain itu pengendalian dampak lingkungan akibat industrialisasi, perlu mendapat perhatian khusus, karena secara faktual masih ditemukan sejumlah pabrik yang pengelolaan limbahnya, belum sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur semestinya. Beberapa konsep dan sistem pengelolaan kawasan

industri di Karawang seperti yang dijalankan oleh KIIC, KNIC, KIKC, Kawasan Industri Mitra Karawang, Surya Cipta, dapat dijadikan *benchmark* dalam pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan di wilayah pembangunan lainnya.

A. Dasar Regulasi Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Di Indonesia dikenal dua bentuk BUMD, yaitu:

- Perusahaan Umum Daerah (perumda) yaitu badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
- Perusahaan Perseroan Daerah (perseroda) adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit sebanyak 51 persen sahamnya dimiliki oleh satu daerah, dan sisanya oleh pihak swasta.

Dalam prakteknya di Indonesia, jenis BUMD berbentuk perumda lebih banyak jumlahnya, bila dibandingkan dengan yang berbentuk perseroda. Mungkin hal itu dilatarbelakangi oleh perbedaan di antara kedua bentuk BUMD tersebut, terutama dalam sistem manajemen/pengelolaannya. Dalam hal ini BUMD yang berbentuk non persero, konkretna berupa Perusahaan Daerah (PD) atau Perusahaan Umum Daerah (perumda), menawarkan model pengelolaan swakelola mandiri, yang dalam pandangan kebanyakan pemerintahan daerah di Indonesia, dianggap lebih pas (*fit*). Konsep pengelolaan swakelola mandiri ini, menganut sistem pengawasan dan pembinaan secara bertanggung-jawab dan intensif. Dalam hal ini, pengelolaan BUMD dilakukan di bawah pengawasan dan pembinaan langsung dari pemangku kebijakan di daerah, yakni kepala daerah selaku

pemegang otoritas tertinggi pemerintahan di daerah (gubernur, bupati atau walikota).

Dalam posisinya selaku *owner*, pemerintah daerah otomatis berperan sebagai pemegang otoritas yang dapat melakukan “intervensi kebijakan” dalam konteks yang positif, terkait dengan upaya mendorong kinerja BUMD, melalui Dewan Pengawas masing-masing. Dewan Pengawas BUMD, selaku representasi dari pihak *owner*, biasanya terdiri dari beberapa unsur, yaitu unsur yang mewakili pimpinan daerah, perwakilan pelanggan, perwakilan tokoh masyarakat atau kalangan akademis. Penetapan Dewan Pengawas BUMD dilakukan melalui proses seleksi, berdasarkan mekanisme tertentu, sesuai dengan jenis bisnis atau lapangan usaha masing-masing BUMD. Khusus bagi Dewan Pengawas BUMD yang bergerak pada bidang jasa keuangan dan perbankan, proses seleksinya dilakukan dengan melibatkan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK RI).

Berkenaan dengan pengelolaan BUMD, dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan, bahwa pengelolaan BUMD mesti dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Namun demikian, hingga kini peraturan pemerintah atau peraturan pelaksanaan lainnya, yang mengatur lebih lanjut mengenai penerapan *good corporate governance* dalam pengelolaan BUMD tersebut, belum dikeluarkan. Sementara konsep pengelolaan BUMD yang berbentuk persero (Perseroan Terbatas/Perusahaan Perseroan Daerah), dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Badan Hukum BUMD ditegaskan, bahwa BUMD persero tersebut tunduk pada Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.

B. Potret Kecil Kinerja dan Peran BUMD

Sesungguhnya banyak hal yang sangat menarik apabila menengok keberadaan BUMD di tanah air kita, baik dari sisi perkembangan maupun dinamikanya, terlebih bila mencermati kinerjanya. Salah satu hal yang menggelitik adalah menyangkut payung hukum BUMD yang hingga kini masih menggunakan regulasi yang telah relatif lawas, yaitu Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Hal ini mengesankan, bahwa landasan hukum BUMD bersifat statis dan tidak kenyal terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis, yang dari waktu ke waktu berubah dengan sangat cepat pada berbagai aspek. Kondisi ini sangat berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang semula regulasinya dilandaskan pada peraturan pemerintah, kini telah ditingkatkan menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang berlaku efektif seiring bergulirnya otonomi daerah.

Oleh karenanya tidak mengherankan, jika kebanyakan BUMD tidak mampu mengembangkan diri seperti halnya BUMN, bahkan dalam dwi dasa warsa terakhir, banyak di antaranya yang terpaksa harus dilikuidasi alias gulung tikar, atau hanya sekedar dapat bertahan hidup dengan mengandalkan suntikan modal dari pemda (*owner*), tanpa mampu melangkah lagi. Fenomena yang menyakitkan tersebut, termasuk di Jawa Barat memuncak pasca krisis multi dimensional tahun 1998, atau menjelang dimasukinya era otonomi daerah. Puluhan BUMD yang bergerak di bidang jasa keuangan dan perbankan milik daerah, dan sejumlah BUMD pada sektor perkebunan, tekstil, jasa wisata hingga pertambangan, satu per satu terpuk layu, lalu mati suri dan hanya menyisakan puing-puing bangunannya saja.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, bertujuan untuk turut memacu laju pertumbuhan ekonomi, secara mikro dan makro. Pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari strategi

pertumbuhan wilayah, sangat diharapkan mampu berkontribusi pada upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja. Untuk menampung tenaga kerja yang setiap tahun terus meningkat, maka beragam bentuk dan jenis investasi perlu dirangsang dan didorong, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing, investasi dalam bentuk portofolio saham ataupun pada sektor riil. Investasi pada sektor riil yang dilakukan oleh pihak swasta (*private sector*) melalui pendirian perusahaan baru, semacam industri tekstil, dampaknya sangat positif terhadap penyerapan *man power*, karena dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah cukup besar. Sementara investasi pada sektor publik, atau pada bidang-bidang yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, masih tetap dilakukan oleh pemerintah (*government investment*), melalui pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Badan Usaha Milik Daerah sesungguhnya memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi mesin penggerak dan katalisator perekonomian daerah, sepanjang dikelola dengan baik dan profesional, selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)*. Dalam konsep otonomi daerah, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang bertumpu pada transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, efektivitas & efisiensi dan partisipasi, mesti ditempatkan sebagai pilar utama oleh semua *stakeholders* BUMD dalam menjalankan misinya. Pada era otonomi daerah, pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang berstatus sebagai *owner* BUMD, dituntut untuk berkemampuan mengelola BUMD secara profesional agar tumbuh dan berkembang menjadi institusi *social seeking*, yang mampu memerankan fungsi gandanya, sebagai *income generating* yang sekaligus berkemampuan memberikan *social benefit* bagi masyarakat di daerahnya.

Sebagai lembaga *income generating*, BUMD ditantang kemampuannya untuk berkompetisi secara sehat, di tengah persaingan global yang ketat dewasa ini, secara mandiri dan professional, dalam arti tidak berlindung di balik punggung penguasa (*owner*), namun tetap berkemampuan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, berupa bagian laba perusahaan (*deviden*) kepada pemda sebagai *owner*, dan pajak daerah serta penerimaan asli daerah (PAD) lainnya. Di sisi lain, dalam menjalankan perannya sebagai institusi *social seeking*, BUMD diharapkan mampu melayani kebutuhan masyarakat dengan segala kemudahan di dalamnya, termasuk membuka peluang pekerjaan, mengembangkan kemitraan dan *social benefit* lainnya kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Purwadi (2002) yang berpandangan, bahwa secara makro peranan BUMD terhadap perekonomian daerah, dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja.

Mengingat hingga saat ini, sumber anggaran pada hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia, masih sangat mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah (pusat), maka upaya menjadikan BUMD sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tantangan tersendiri bagi daerah. BUMD yang berkinerja sehat tentunya berpeluang memberi kontribusi terhadap PAD, sebaliknya BUMD yang tidak sehat hanya akan menjadi beban bagi keuangan daerah. Otonomi daerah yang secara hakiki bertujuan membangun kemandirian daerah, sudah barang tentu memerlukan dukungan anggaran guna menggali, mengolah dan memberdayakan berbagai potensi daerah yang dimiliki. PAD idealnya menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah (Soleh & Rochmansjah, 2010). Pendapat ini menegaskan, bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan

otonomi daerah, sekaligus mencerminkan kemandirian suatu daerah. Dengan demikian, optimalisasi penggalan sumber-sumber PAD baik yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, seyogianya dijadikan prioritas oleh pemerintah daerah, dalam meningkatkan kemandiriannya. *Last but not least* adalah bagaimana daerah berkemampuan menjalankan strategi yang jitu, guna mendongkrak PAD yang berasal dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yakni pendapatan yang berasal dari Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah.

Hal ini kiranya tidak berlebihan, karena tujuan ideal didirikannya BUMD, adalah untuk turut andil dalam pembangunan daerah khususnya, dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya, serta turut berupaya memenuhi kebutuhan rakyat menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Kendati upaya merengkuh tujuan mulia tersebut, masih jauh panggang dari api, namun bagaimanapun BUMD tetap tidak dapat memungkiri peran dan fungsinya yang ambigu tersebut. Kondisi ini, hendaknya mampu menggugah kesadaran para pemangku kepentingan utama BUMD, bahwa mereka tengah menjalankan sebuah pertarungan besar atas masa depan kehidupan bangsa, pada kancah kehidupan yang sarat dengan dinamika dan perubahan ekstrim tak terduga dewasa ini.

Persaingan dunia usaha pada era globalisasi dewasa ini, memaksa seluruh pelaku bisnis - apapun bentuk dan jenisnya, tak terkecuali BUMD untuk bertarung keras pada arena persaingan global yang sangat kompetitif. Pertanyaannya, apakah BUMD akan tetap bertahan dengan jurus konvensionalnya, atau segera berbenah diri melalui penyesuaian visi, misi, dan strategi bisnisnya? Agar tidak salah melangkah, hendaknya diingat bahwa BUMD adalah salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah, sekaligus representasi peran mesin ekonomi pemda dalam menopang

pembangunan ekonomi daerah. Tentunya sangatlah ironis jika dalam kenyataannya justru menjadi beban bagi keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan Setyawan dan Riyardi (2009), mendapatkan temuan-temuan menarik terkait dengan kinerja BUMD. Mereka menemukan 9 (sembilan) BUMD di beberapa kota di Jawa Tengah, yang ternyata tidak efisien dalam operasionalnya. Sumbangan yang mereka berikan terhadap APBD tidak sebanding dengan nilai aset yang dimiliki, dan rata-rata sumbangan BUMD di Indonesia terhadap PAD masing-masing daerahnya, kurang dari 1 (satu) persen. Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwadi (2012) mengungkapkan bahwa, paling tidak ada 13 masalah umum yang mendera BUMD di Indonesia, yaitu:

1. Tingginya campur tangan pihak birokrat ;
2. Kondisi mesin dan peralatan yang sudah *obsolescence*;
3. Lemahnya kemampuan permodalan;
4. Banyaknya aset perusahaan yang tidak produktif (*idle capacity*), seperti tanah dan bangunan yang menyebabkan *overhead cost* relatif tinggi;
5. Keterampilan/kapasitas pegawai pada umumnya masih rendah;
6. Kurang jelasnya dasar hukum yang digunakan, sehingga tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
7. *Marketing system* yang dilakukan oleh BUMD relatif lemah;
8. Persaingan sengit dengan pihak swasta yang memproduksi barang sejenis;
9. Kurang berfungsinya Badan Pengawas BUMD;
10. Perusahaan-perusahaan daerah pada umumnya memiliki posisi *Debt to Equity Ratio* yang tidak menguntungkan, sehingga resiko finansial perusahaan relatif tinggi;

11. Tingginya beban finansial, akibat keharusan untuk menyeter sebagian laba (deviden) pada tahun berjalan;
12. Masih dipertahankannya BUMD yang merugi;
13. Banyak BUMD yang pendiriannya dipaksakan, walaupun secara ekonomis tidak layak didirikan (tidak *feasible*), dengan alasan menyangkut kebutuhan pelayanan umum sehingga usahanya tidak efisien (merugi).

C. Profil BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Rasanya tidak adil, jika kita hanya berkuat menyoroti kekurangan BUMD saja, karena dalam kenyataannya sekalipun masih bisa dihitung dengan jari, beberapa BUMD di sejumlah daerah mampu memperlihatkan kinerja yang menggemirakan dan membangkitkan ekspektasi besar atas peran ganda mereka— yaitu sebagai lembaga *profit taking* dan *social seeking*. Beberapa BUMD dimaksud, berlokasi di Jawa Barat dan dimiliki oleh Pemprov Jawa Barat, baik secara penuh maupun sebagai bagian dari *share holder*. Berikut adalah gambaran kondisi dan perkembangan dari 5 (lima) BUMD dimaksud, dalam beberapa tahun terakhir.

1. PT Migas Hilir Jabar

PT. Migas Hilir Jabar (PT MHJ) adalah perseroda yang bergerak di bidang energi, dan mengemban visi & misi sebagai perseroan yang unggul dalam mengelola potensi dan sumber daya energi, secara efisien serta ramah lingkungan di Jawa Barat. Perseroan ini didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 16, tanggal 25 November 2014, tentang Pendirian PT. Migas Hilir Jabar, oleh Notaris In-in Inayat Amintapura, Notaris di Bandung. Pendirian perseroda ini terinspirasi oleh keluhan pemerintah, yang kerap mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan *Liquified Petroleum Gaz (LPG)* dalam negeri.

Bertolak dari hal itu, PT MHJ mencoba merambah bisnis ini, guna ikut berperan aktif dalam membantu pemenuhan kebutuhan *LPG*, mengingat *LPG* yang dijual oleh Pertamina 58 persen di antaranya masih dipasok dari luar negeri. Meski sebagian besar masih berbahan impor, tetapi penggunaan *LPG* sangat diperlukan sebagai upaya untuk mengurangi pemakaian bahan bakar minyak yang terus meningkat. Dalam pengembangan bisnis yang strategis ini, PT Migas Hilir Jabar bekerjasama dengan salah satu BUMD milik Kabupaten Bekasi, yang diawali dengan realisasi Proyek Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2015, dalam pemanfaatan gas sebagai alternatif energi di Pulau Jawa. Tepatnya pada bulan Agustus tahun 2015, PT MHJ memulai kegiatan produksinya dengan mengolah gas alam yang berasal dari sumur gas Tegal Pacing, menjadi Mini LNG. Sumur gas tersebut semula merupakan sumur marginal milik PT. Pertamina EP, yang diharapkan dapat menghasilkan produk, dengan kapasitas 3-5 *MMSCFD* guna memenuhi kebutuhan *LNG* Industri industri di Jawa Barat dan sekitarnya. Pembangunan *LPG plant* ini, diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi gas, khususnya di Kabupaten Bekasi sekaligus mengeksplor potensi Pendapatan Asli Daerah.

Dalam upaya mengoptimalkan potensi gas tersebut, pada tahun 2015 PT MHJ telah membangun jaringan pipa utama dari *well head* ke *LNG Plant* sepanjang ± 2 km, dan pada tahun 2016 diperluas dengan membangun jaringan pipa gas dari Cikarang ke kota Cilegon Provinsi Banten. Dalam kegiatan ini, PT MHJ menjalin kerjasama dengan Krakatau *Industrial Estate* Cilegon II (*KIEC II*), dengan tujuan memenuhi kebutuhan gas bagi entitas pada kawasan Industri di Cilegon Banten.

Strategi pengembangan usaha PT MHJ selain ditempuh dengan mencukupi permodalan, juga merekrut sejumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang sudah teruji dan berpengalaman di bidang industri hilir Migas. Sebagai

perusahaan milik pemerintah daerah yang sedang berkembang, tidak menutup kemungkinan, perseroda ini kelak akan memperluas bisnisnya tidak hanya di Jawa Barat, tapi di seluruh Indonesia. Sebagai BUMD yang visioner PT MHJ saat ini tengah menyiapkan kerjasama dan bersinergi dengan entitas bisnis lainnya, seperti : (1) *Gas Supplier*, Pertamina EP dan PHE. (2) Kawasan Industri. (3) Instansi instansi yang terkait dengan lini usaha migas. Di bidang *Gaz Supplier*, sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 36 Undang – undang Migas Nomor 22 Tahun 2001, PT MHJ selaku BUMD memiliki hak untuk mendapatkan alokasi gas yang dihasilkan dari sumur-sumur yang terdapat di Jawa Barat, bahkan saat ini sudah mendapatkan kuota dari Pertamina EP dan PHE untuk menyalurkan gas ke industri-industri yang tersebar di wilayah Jawa Barat.

Terkait dengan keberadaan Kawasan Industri, wilayah Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki banyak kawasan industri, dalam hal ini PT MHJ sebagai BUMD milik Pemprov Jabar, tentunya mesti siap untuk bekerjasama secara mutualistik. Beberapa rencana bisnis yang tengah disiapkan untuk menangkap peluang di bidang energi ini, adalah :

- Gas Alam berfasilitas.
- *CNG* untuk wilayah-wilayah yang tidak terjangkau pipa.
- PLTG, pembangkit listrik bersumber bahan bakar gas untuk memenuhi kekurangan pasokan listrik pada sebagian kawasan industri.

2. PT. Jamkrida Jabar

PT Jamkrida Jabar merupakan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat, dengan tujuan melaksanakan dan menunjang kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil

dan Menegah (KUMKM) melalui kegiatan penjaminan kredit, serta bantuan manajemen dan konsultasi kepada pelaku KUMKM. PT Jamkrida Jabar didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nomor 03 tanggal 3 Oktober Tahun 2012 yang dibuat di hadapan Yuliani Idawati, S.H., Sp.N - Notaris yang berkedudukan di Kota Bandung dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-56159.AH.01.01, Tanggal 1 November tahun 2012.

Dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Kredit di wilayah Jawa Barat, PT Jamkrida Jabar telah mendapatkan Izin Operasional Nomor KEP.05/D.05/2013 tanggal 30 Januari 2013 dari Otoritas Jasa Keuangan yang pada saat itu baru beralih dari Bapepam LK. Perseroan juga telah mendapatkan pemeringkatan “idBBB” dari lembaga pemeringkatan PT Pefindo, sehingga dapat bekerjasama dengan pihak perbankan, sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/6/DPNP Tahun 2011 mengenai Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Objek Penjaminan PT Jamkrida Jabar meliputi:

- 1). Penjaminan Pinjaman yang disalurkan Koperasi kepada anggotanya.
- 2).Penjaminan Kredit/Pinjaman Modal Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
- 3).Penjaminan Penyaluran Uang Pinjaman dengan Jaminan Gadai dan Fidusia.
- 4).Penjaminan atas Surat Utang.
- 5).Penjaminan atas Transaksi Dagang.
- 6).Penjaminan atas Pengadaan Barang & Jasa (*Surety Bond*).
- 7).Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi).
- 8).Penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).
- 9).Penjaminan *Letter of Credit* (L/C).
- 10).Penjaminan Kepabeanan (*Custom Bond*).

- 11). Jasa Konsultasi Manajemen terkait dengan Kegiatan Usaha Penjaminan.
- 12). Penyediaan Informasi/*database* terjamin, terkait dengan kegiatan Usaha Penjaminan.
- 13). Penjaminan lainnya setelah memperoleh Persetujuan Menteri.

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan non bank, maka penerapan tata kelola perusahaan merupakan syarat mutlak guna terpenuhinya kriteria sebagai perusahaan yang kredibel, baik dari sisi teknis operasional pelayanan maupun akuntabilitasnya. Karenanya, pada lingkungan PT Jamkrida Jabar ini, pengedepanan nilai-nilai etika dan integritas dalam pengelolaan perseroan mesti ditunjukkan secara konsisten, sebagai dasar dalam memacu kinerja, meningkatkan kepercayaan mitra, melindungi kepentingan *stakeholders*, serta memberikan kontribusi positif pada industri keuangan dan perekonomian daerah.

Dalam hal ini, PT Jamkrida Jabar berkomitmen meningkatkan kualitas penerapan tata kelola secara berkelanjutan, sesuai standar dan praktik yang berlaku pada industri keuangan dengan mengedepankan kekuatan likuiditas, strategi dalam pengelolaan risiko, sumber daya manusia yang unggul dan kompeten, pengelolaan sistem informasi dan data sebagai elemen kunci menghadapi tantangan persaingan usaha penjaminan, meraih pertumbuhan yang berkelanjutan serta meningkatkan fungsi pelayanan pada mitra-mitra strategis perseroan. Lebih jauh pemaknaan tata kelola berkelanjutan ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagi PT Jamkrida Jabar, tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai suatu struktur dan proses sistem manajemen yang efektif dan efisien, dalam mengelola sumber daya dan risiko serta menjaga kepentingan internal dan eksternal, dalam

rangka mewujudkan dan meningkatkan nilai tambah (*added value*) secara berkelanjutan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lain.

2. Penerapan *GCG* di PT Jamkrida Jabar mengacu pada 5 prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu: *Transparency, Accountability Responsibility, Independence* dan *Fairness* (kewajaran).
3. Tugas pokok, tanggung jawab, dan fungsi organ-organ Perseroan secara memadai ditetapkan dalam Kebijakan, Pedoman dan Tata Tertib yang termuat dalam *Board Manual*.
4. Kebijakan, prosedur dan sistem informasi manajemen perseroan tersedia dan mendukung kegiatan operasional Perseroan.
5. Penyusunan rencana strategis dan bisnis Perseroan dilakukan secara realistis, komprehensif dan terukur sejalan dengan visi dan misi Perseroan yang disetujui Dewan Komisaris dan dikomunikasikan kepada pemegang saham dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Adapun tujuan penerapan *GCG* di PT Jamkrida Jabar adalah:

- a. Mengoptimalkan nilai Lembaga Penjamin bagi Pemangku Kepentingan;
- b. Meningkatkan pengelolaan Lembaga Penjamin secara profesional, efektif, dan efisien;
- c. Meningkatkan kepatuhan organ Lembaga Penjamin dan jajaran dibawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Lembaga Penjamin terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan;

- d. Mewujudkan Lembaga Penjamin yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan
- e. Meningkatkan kontribusi Lembaga Penjamin dalam perekonomian nasional.

3. PT Jaswita Jabar

PT Jaswita Jabar adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat berbentuk perseroda, yang resmi berdiri pada tanggal 10 November 2017, sebagai hasil perubahan bentuk hukum dari PD Jasa dan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat dengan *call name* “Jaswita Jabar”. Perseroda ini siap untuk melayani masyarakat Jawa Barat, dan umumnya masyarakat Indonesia, bahkan pelancong dari manca Negara atau turis asing. Perseroda ini bergerak pada 4 bidang bisnis yaitu:

- a. Bisnis Perhotelan dan *Mall*.
- b. Bisnis Properti.
- c. Bisnis Otomotif dan Perbengkelan.
- d. Bisnis Jasa.

Dalam menjalankan bisnisnya, PT Jaswita Jabar melayani dua bentuk/model bisnis yaitu: melayani konsumen secara langsung, baik konsumen individu kelompok maupun korporasi, dan melayani kerjasama dengan mitra dalam membangun suatu proyek.

PT Jasa dan Kepariwisata Jawa Barat (PT Jaswita), merupakan salah satu BUMD yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sesuai namanya, perusahaan ini bergerak di bidang jasa properti, dan kepariwisataan, dengan visi: “Menjadi perusahaan properti dan pariwisata terbesar dan terpercaya di Jawa Barat tahun 2025”. Untuk mencapai visi tersebut, perusahaan menetapkan sejumlah misi, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1). Meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Barat:

Dalam hal ini perusahaan berkomitmen untuk memberikan deviden 40% dari pendapatan bersih perusahaan setiap tahunnya.

2). Mengoptimalkan asset Pemprov Jabar, melalui usaha wisata dan perhotelan; dan jasa penunjang properti, melalui kerjasama dengan pihak ketiga;

3). Mengembangkan diri sebagai *Agent of Development* yang memberikan *economic multiplier effect* bagi perekonomian Jawa Barat.

Aset PT Jaswita, saat ini tersebar di sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Barat berupa bengkel, hotel dan ruko-ruko termasuk *guest house*, dan diharapkan mampu menumbuhkan *economic multiplier effect* secara merata di wilayah provinsi Jawa Barat, dalam bentuk penyerapan tenaga kerja, dan penerimaan pajak bagi kabupaten/kota. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah, orientasi bisnis PT Jaswita lebih terfokus pada upaya mendapatkan laba (*profit oriented*). Hal itu sesuai dengan ketentuan tentang BUMD, yang mengisyaratkan orientasi bisnis perseroda ini, ke dalam tiga bidang yaitu : *fully* bisnis, sumber PAD, serta memberi deviden kepada pemerintah daerah. Kendati berorientasi pada bisnis, PT Jaswita pun tidak mengenyampingkan fungsi sosialnya, yang direalisasikan dalam bentuk *Costumer Social Responsibility*, dan pelayanan publik/masyarakat.

Hal lain yang menggembirakan, bahwa tingkat kesehatan PT Jaswita berdasarkan tiga aspek yang dinilai, yakni aspek keuangan, operasional, dan administrasi, mencetak total skor 72,5, artinya tergolong sehat, sehingga dalam tiga tahun terakhir (tahun 2017, 2018, 2019) hasil auditnya WTP (wajar tanpa pengecualian). Seiring dengan kiprahnya yang terus melaju, PT Jaswita pun dalam tiga tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2018 akhir, sepanjang tahun 2019 dan awal tahun 2020, secara intens melakukan sejumlah pengembangan usaha, yang mencakupi beberapa bidang pengembangan. **Pertama** : menyediakan *marketplace* khusus Gurilaps

(gunung, rimba, laut, pantai, dan sungai). Jadi, masyarakat yang ada di luar Jawa Barat yang ingin piknik tinggal *download* aplikasi “Gurilaps”, sekaligus bisa melihat harga, jumlah, waktu dan sebagainya.

Kedua : PT Jaswita juga melakukan pengembangan usaha dalam bentuk investasi PLB (Pembangunan Logistik Berikat) di Cikampek,

Ketiga : Persewaan jasa hotel transit di Bandara Kertajati, renovasi Dapur Sanpedo, dan masih banyak lagi. Dapur Sanpedo merupakan *brand* usaha *catering* yang dijalankan oleh PT Jaswita.

Pada aspek *human resources*, dalam upaya menyelaraskan *human capital management system* dengan strategi bisnis perusahaan, PT Jaswita juga merekrut tenaga ahli dan konsultan yang *di-hire* untuk setiap divisi guna mendampingi tim perusahaan. Pendampingan konsultan juga dilakukan dalam penyempurnaan *job description*, *SOP*, dan KPI yang diselaraskan dengan strategi bisnis dan *corporate culture* perusahaan. Selain itu, sebagai bentuk pengembangan *Human Capital* PT Jaswita juga menyelenggarakan pendidikan dan latihan dasar (Diklatsar) bagi calon pegawai baru. Sementara sebagai apresiasi kepada karyawan-karyawati yang berprestasi, perusahaan juga mengadakan program penghargaan kepada personal terbaik bulanan, dan *reward* berupa hadiah biaya ibadah Umrah kepada pegawai berprestasi. PT Jaswita pun menyelenggarakan berbagai jenis *training* untuk pegawainya, seperti *Hospitality Industry*, *Service Excellent*, Pelatihan/Bimtek Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan Kerja, Motivasi Purnatugas, Penyampaian Teori Budidaya Jamur, dan *Sales Team Integrated*.

4. PT Agronesia

Sesuai dengan Anggaran Dasar-nya, PT Agronesia merupakan sebuah BUMD yang melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: (1) Industri yang terdiri dari: Industri karet & barang-barang dari karet; Industri makanan, minuman dan pengalengan/pembotolan (Amatil); dan

Industri plastik & *Fibre*. (2) Pedagangan makanan-minuman. Wilayah kerja PT Agronesia untuk proses produksi dan pemasaran, umumnya masih di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya, namun untuk pemasaran berdasarkan pesanan (*job order*) khususnya produk dari *Inkaba* sudah mencapai hampir seluruh Indonesia seperti pelabuhan-pelabuhan kapal laut, pertambangan-pertambangan dan perminyakan. Divisi *Inkaba* bahkan menembus pasar ekspor ke Kualalumpur Malaysia untuk pemenuhan pesanan *rubber house*. Secara struktural, organisasi PT Agronesia terbagi menjadi beberapa divisi, yaitu :

1). Divisi Industri Teknik karet

Pabrik karet ini didirikan oleh pemerintah Belanda dengan nama *N.V. FATERU (Fabriek Technique Rubberwaren)* pada tahun 1933. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, perusahaan tersebut dikuasai dan diambil alih oleh Indonesia. Seiring perkembangan waktu pada tahun 1999 melalui Peraturan Daerah Jabar Nomor 1 Tahun 1999, per tanggal 26 Januari 1999 tentang Peleburan Perusahaan-perusahaan Daerah Provinsi Jawa Barat, maka *Inkaba* menjadi salah satu unit usaha dari Perusahaan Daerah Industri di bidang industri teknik karet dengan merk dagang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999. *Inkaba* pada tahun 2002, berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2002, tanggal 12 April 2002, tentang perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Industri Provinsi Tingkat I Jawa Barat, menjadi Perseroan Terbatas (PT).

2). Divisi Industri Es

Didirikan pada tahun 1930 di Jalan *Deendelsweg* No. 24 Bandung dan merupakan cabang dari *NV. Verenigde, YS. Fabrieken* yang berpusat di Surabaya. Pabrik ini mulai beroperasi pada tanggal 19 November 1931 dan pada zaman Pemerintahan Jepang tahun 1943, kepemilikan pabrik es beralih pada *Dai Sehjo Kajo*. Tahun 1943 pabrik es direnovasi oleh *NV. Verenigde*,

YS. Fabrieken dan kapasitas produksi es mengalami peningkatan, dan pada tahun 1958 perusahaan ini diambilalih oleh Pemerintah Republik Indonesia. Tahun 1964, melalui Peraturan Perdana Menteri RI tanggal 14 Desember 1964 No 188/BPM/1964 *juncto* PP No 7 Tahun 1964 berganti nama menjadi PN Parwita Jasa. Tahun 1979 melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No 15/PD-DPR GR/64 serta perubahan No 8 Tahun 1979 menjadi perusahaan berbentuk perusahaan daerah di bawah Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan nama Perusahaan Daerah Makanan Minuman Kerta Sari Jawa Barat (PD Kerta Sari Mamin Jawa Barat).

Pada Tahun 1999, sesuai dengan Perda Propinsi DT I Jawa Barat No 1 Tahun 1999 tanggal 26 Januari 1999, PD Kerta Sari Mamin di *merger* dengan perusahaan daerah lainnya menjadi Perusahaan Daerah Industri Propinsi Jawa Barat. Sejak Juni 2002 sampai sekarang, PD Industri Propinsi Jawa Barat berubah bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Agronesia yang didirikan pada tanggal 17 Juni 2002 melalui SK Menteri Kehakiman RI No Y.A 7/6/25 Tanggal 22 Maret 1982 *Juncto* Nomor C.87-HT.03.01 Tahun 1990 Tanggal 8 Oktober 1990 serta Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna, SH, Hum Nomor 8 Tahun 2002.

3). Divisi Makanan & Minuman

Periode sebelum tahun 1945, *Bandung Milk Center (BMC)* adalah koperasi susu pertama yang menerapkan manajemen modern ditunjang dengan peralatan pabrik pengolahan susu berteknologi tinggi, karena sudah melakukan pengolahan susu dengan sistem pasteurisasi. Lahan untuk pendirian bangunan BMC adalah lahan milik *Louis Hirschland dan van Zijl*, pemilik peternakan *General de wet Hoeve* di Cisarua. Tahun 1958, sewaktu dilakukan nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan Belanda, pengelolaan BMC diambil alih oleh Kodam 6 Siliwangi. Tahun 1965, *BMC* diserahkan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pengelolaannya ditangani oleh PD.

Kerta Sari Mamin. Periode 1999 hingga Mei 2002, terjadi peleburan perusahaan-perusahaan daerah, dan PD. Kerta Sari Mamin berganti menjadi PD. Industri Unit Makanan dan Minuman. Periode Juni 2002-sekarang Perusahaan PD Industri Provinsi Jawa Barat berubah bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Agronesia yang didirikan pada tanggal 17 Juni 2002 melalui SK Menteri Kehakiman RI No Y.A 7/6/25 Tgl 22-3-1982 *juncto* No C.87-HT.03.01 per tanggal 8 Oktober 1990 serta Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna, SH, M Hum No 8 Tahun 2002.

Outlet di Jalan Aceh & *Paris Van Java* adalah salah satu restoran terbaik di Bandung yang menempati bangunan bergaya arsitek tempo dulu, dengan interior eksklusif dan makanan lezat. Menunya lebih dari 100 varians makanan tradisional asli Indonesia, dan modern. Menu diciptakan dan disajikan untuk memenuhi kepuasan para pelanggan dan pencinta makan. Restoran *BMC* akan membantu pelanggan untuk menemukan dimensi baru dalam menikmati rasa makanan dan minuman serta membuat selera khusus hanya untuk pelanggan. Bidang usaha *BMC* selain restoran adalah :

a. Pengolahan Susu

Industri Susu adalah salah satu produk *BMC* yang telah dikenal sejak zaman Belanda. Salah satu produknya yang populer adalah Susu Murni hasil pasteurisasi dan homogenisasi dalam aneka rasa. Konsistensi *BMC* dalam menjaga mutu telah menjadikan produk susunya sebagai produk yang digemari masyarakat. Susu *BMC* menggunakan proses pasteurisasi *HTST* (*High Temperature Short Time*) dan homogenisasi, pengolahan susu di *BMC* juga telah menerapkan sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2005. Permintaan terhadap susu pasteurisasi ini cukup tinggi, karena terbukti dapat menurunkan resiko kanker payudara, resiko *asthma* dan alergi. Selain itu, kalsium dan mineral yang terkandung dalam susu bermanfaat bagi

kesehatan tulang. Susu juga mengandung *tritofan* yang memproduksi hormon *melatonin* yang membuat tidur lebih nyenyak saat beristirahat.

b. Air Minum Dalam Kemasan

Air Minum dalam Kemasan (AMDK) BMC diproses dengan teknologi modern melalui proses filterisasi dan desinfektan dengan *Ultra Violet* dan ozonisasi. Untuk menjaga mutu dan standar kualitas, maka setiap tahapan proses produksi dilakukan pengawasan yang ketat, mulai dari bahan baku air sampai dengan produk akhir melalui uji laboratorium, sehingga air minum yang memenuhi standar mutu serta memiliki kandungan mineral yang dibutuhkan serta kesegaran alami.

5. PT Agro Jabar

PT Agro Jabar adalah sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat yang didirikan pada tahun 2013 dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna aset daerah, mengembangkan investasi daerah, memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membantu menggerakkan perekonomian daerah. Ruang lingkup usaha PT Agro Jabar adalah di bidang perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, cadangan pangan dan usaha lainnya di bidang agro. Sesuai dengan misi perusahaan yaitu mengelola dan mengembangkan kegiatan produksi agro, perusahaan melakukan kemitraan dengan petani dalam mengelola jaringan pasar produk agro, ditempuh berbagai langkah taktis, inovatif dan improvisatif yang dikembangkan dan didukung oleh sumber daya yang berkomitmen dan konsisten dalam memberikan yang terbaik untuk terus membangun Jawa Barat.

Di tengah banyaknya perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan atau kerugian, karena beban belanja pegawai yang tidak produktif. PT Agro Jabar memiliki strategi tersendiri untuk tetap memberikan sumber pendapatan kepada orang banyak, tanpa melibatkan terlalu banyak pegawai tetap dengan

membangun kemitraan produksi. Dengan konsep tersebut, mutu produk tetap terjaga, demikian pula halnya dengan keamanan asset perusahaan sekaligus dapat terjaga, karena pihak mitra merasa masih menjadi bagian yang turut memiliki perusahaan. Dalam hal ini salah satu upaya yang dilakukan, adalah bermitra dengan UKM (usaha kecil dan mikro) milik para petani penggarap, dalam mengelola perkebunan Pemprov Jabar di kawasan lahan perkebunan yang berlokasi di Garut, pada lahan seluas kurang lebih 2.000 hektare . Perkebunan itu dikelola bersama, dengan sistem bagi hasil, sehingga baik petani maupun perusahaan sama-sama mendapatkan manfaat. Agar hasilnya lebih optimal, PT Agro Jabar mengembangkan kemitraan tersebut dengan konsep hulu-hilir. Di sektor hulu, Agro Jabar mengembangkan perkebunan kopi, *lemon*, *stevia* dan teh, dan di hilir dikembangkan pula unit bisnis pengolahan yang menampung dan mengolah hasil produksi sektor hulu tersebut.

Kemitraan dengan para petani ini, sebenarnya sudah cukup lama dilakukan. Misalnya, di Pangalengan Kabupaten Bandung dengan jumlah petani yang bermitra sebanyak 512 orang, di Cikajang Garut bermitra dengan 627 petani. Lalu di hilir, perusahaan pun membuka distributor untuk pemasaran produk *C-Legar* (minuman lemon) sebanyak 3 unit yang mempekerjakan sebanyak 600 *reseller*. Kapasitas produksi *C-Legar* sendiri sudah lebih dari 20 ribu liter per bulan, sehingga masih memerlukan tambahan pasokan bahan baku (*lemon*). Target PT Agro Jabar, pada tahun 2018 adalah menambah luasan kebun hingga 50%, dengan kapasitas sekitar 50 ribu pohon pada lahan seluas 50 hektar, artinya pada tahun 2019, akan ditingkatkan menjadi 100 hektar.

Demikian pula halnya dengan komoditas kopi, PT Agro Jabar akan menggenjot produksinya guna memasok kebutuhan kopi dunia yang masih kekurangan. Kopi dari Jawa Barat, sangat diminati karena ditunjang dengan kualitas agroklimat iklim, yang mampu menghasilkan kualitas kopi terbaik di

dunia. Budi daya kopi pun diselaraskan dengan strategi pembangunan nasional, yang bertujuan agar tanah perkebunan kembali ke fungsinya, sekaligus untuk menghindari bencana lingkungan. Pengembangan komoditas ini akan dilakukan dengan pola kemitraan yang sama seperti pada produk lemon. Agro Jabar tampak akan terus berupaya dan berusaha agar tumbuh menjadi BUMD yang sehat, sekalipun saat ini belum dapat menikmati investasinya secara utuh. Masih butuh waktu yang tidak pendek untuk meraih hasilnya. Sebagai contoh, tanaman kopi hasilnya baru bisa dinikmati dalam waktu 24 sampai 36 bulan. Namun dengan kesiapan pihak manajemen perusahaan saat ini, keberhasilan pengembangan kopi melalui system kemitraan tinggal menunggu waktu.

Selain ditantang untuk mengembangkan komoditas perkebunan, BUMD ini pun mengemban tugas untuk meningkatkan produktivitas susu nasional, melalui skema kemitraan dengan para petani. Kemitraan tersebut dilakukan melalui bisnis peminjaman sapi dan pakan yang saling menguntungkan. Hal ini dilakukan dalam rangka menjawab obsesi Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Barat, terkait upaya meningkatkan kedaulatan pangan, yang kemudian mendorong Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang mampu berswasembada daging dan susu, karena susu secara nasional kurang dari 3 juta ton. Apabila dikaitkan dengan istilah generasi milenial, atau lebih *trend*-nya anak-anak zaman *now*, maka apa yang ditempuh oleh PT Agro Jabar diistilahkan dengan *selling is calling*, yakni berbagi dengan banyak *stake holders*. Karena, bisnis agro ini merupakan bisnis yang strategis, maka saat sektor pangan kita berdaulat, yang lain otomatis akan mengikuti.

Menjaga kedaulatan pangan sebagai bagian dari visi perusahaan adalah hal sangat penting, sebab apabila kebutuhan pangan rakyat Indonesia telah tercukupi, maka tidak akan lagi ada ketergantungan terhadap impor, bahkan sebaliknya, kita bisa melakukan ekspor. Pemenuhan 70 persen kebutuhan

pangan kita yang hingga kini masih berasal dari hasil impor, merupakan tantangan bagi generasi muda Indonesia, yang mesti dijawab dengan menanggalkan rasa gengsi untuk menjadi petani, pekebun atau nelayan yang sigap dan trengginas mengolah aneka kekayaan lahan, gunung, rimba, laut dan kekayaan alam lainnya yang terkandung dalam bumi Indonesia.

Prospek bisnis di sektor perkebunan dan pertanian sebenarnya sangatlah menjanjikan. Jumlah manusia yang semakin banyak di satu pihak, sementara di pihak lain luas lahan semakin menyempit, kondisi ini secara ekonomis akan membuat komoditas yang dihasilkan kedua sektor tersebut lebih bernilai, sehingga berpeluang mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Bisnis pada sektor ini prosesnya memang panjang, tapi jika dilakukan dengan manajemen yang baik, hasilnya sangat menjanjikan. Tantangan berat lainnya, adalah menyangkut upaya memulihkan *trust*, mengingat *image* yang terlanjur buruk terhadap BUMD yang dikenal kental dengan KKN .

6. PT Bank Bank Jabar Banten

Salah satu BUMD milik Pemprov Jawa Barat yang paling menonjol kinerja dan nilai raihan labanya adalah PT Bank Jabar Banten, atau lebih populer dengan sebutan Bank BJB. Dalam rangka memberikan sokongan terhadap perwujudan visi Jawa Barat “Juara Lahir Batin”, Bank BJB senantiasa memberikan dukungan penuh terhadap berbagai program pemerintah menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Salah satu bentuk dorongan yang secara proaktif dilakukan Bank BJB adalah meningkatkan performa usaha. Di sisi lain, perseroan juga terus bergerak memperluas jalinan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, demi langkah maju bersama.

Sebagai salah satu badan usaha milik daerah Provinsi di Jawa Barat, yang bergerak pada sektor jasa perbankan terbesar di Jabar, Bank BJB memegang peranan sentral dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Barat,

melalui kontribusinya yang membanggakan. Salah satu bentuk kontribusi Bank BJB terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ini, bisa dilihat dari sokongan yang signifikan terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur guna menunjang konektivitas dan efisiensi. Sepanjang tahun 2018 lalu, total penyaluran kredit infrastruktur nasional dari Bank BJB mencapai Rp 7,5 triliun, dan menjadikan Jawa Barat sebagai daerah dengan penyaluran kredit infrastruktur terbesar. Angka penyaluran kredit nasional ini terus bertumbuh hingga mencapai 5,06 persen pada tahun 2019. Sehingga pada tri wulan I tahun 2019, mengantarkan Jawa Barat meraih pertumbuhan ekonomi sebesar 5,68 persen, artinya melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

Keberadaan infrastruktur yang memadai adalah salah satu pilar utama yang dibutuhkan dalam mengakselerasi perekonomian daerah yang tentunya akan mendatangkan *multiplier effect* bagi masyarakat luas. Dalam kerangka dan narasi semangat seperti itulah, Bank BJB senantiasa mencurahkan perhatiannya untuk mendorong pembangunan yang senantiasa berorientasi pada pertumbuhan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (2018). Kontribusi terhadap ekonomi dan pembangunan ini dibarengi pula dengan sokongan dan sinergi terhadap BUMD lain dan sektor-sektor yang menjadi pilar utama perekonomian. Lewat berbagai produk dan program yang dikembangkan, Bank BJB senantiasa menunjukkan komitmen penuhnya sebagai mitra untuk bertumbuh bersama. Bank BJB, misalnya konsisten menyalurkan kredit kepada BPR maupun Badan Layanan Usaha Desa yang sama-sama menjadi motor penggerak roda perekonomian. Seiring hal itu, Bank BJB telah ditunjuk menjadi mitra pembiayaan hak pakai kios para pedagang PD “Pasar Bermartabat”. BJB, turut pula terlibat menjadi salah satu bank partisipan pada pembiayaan sindikasi pembangunan *airport link* Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka, dan sejumlah kerjasama pendanaan lainnya. Teranyar, Bank BJB menyepakati

kerjasama penyaluran fasilitas kredit kepada PT Agro Jabar (Perseroda) untuk penambahan modal kerja budidaya jahe dan kentang bagi para petani di daerah penghasil. Selain itu, kontribusi Bank BJB ditunjukkan pula dalam turut menyukseskan program *One Village One Company (OVOC)* yang digerakkan oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Sebagai penunjang, BJB ikut pula mengembangkan layanan digital kredit UMKM, melakukan penyaluran kredit ke sektor pertanian dan pemberian program pemberdayaan, serta pemberian edukasi dan literasi keuangan. Keseluruhan langkah ini tidak lain dilakukan dengan tujuan untuk menyokong perkembangan unit-unit usaha daerah agar memberikan kontribusi lebih optimal.

Di luar sector pembiayaan, Bank BJB tengah mengembangkan infrastruktur teknologi khusus, guna mendukung sinergitas dengan lembaga lain, dalam mengajegkan perannya sebagai BUMD andalan. Perseroan ini mengembangkan *tools* monitoring khusus, yang diarahkan guna memacu kontribusi perusahaan. Bank BJB pun mengembangkan *tools* Sistem Monitoring Kinerja (Simonik) untuk memantau kinerja khususnya kualitas portofolio kredit perusahaan anak dan perusahaan terafiliasi. Dengan keberadaan “Simonik”, perseroan bisa dengan mudah mengetahui dan mengukur keberhasilan kinerja perusahaan anak dan pihak terafiliasi, khususnya pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) agar kinerja mereka bisa memberikan kontribusi, sesuai dengan rencana bisnis bank (RBB) masing-masing. Informasi yang tersaji dalam indikator-indikator bisnis “Simonik” ini akan menjadi tolak ukur kinerja, untuk memberi arahan aktivitas bisnis, sesuai dengan visi pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan. Aplikasi yang tengah dalam tahap pengembangan ini diharapkan dapat dimaksimalkan oleh seleruh perusahaan anak dan bisnis terafiliasi, maupun Bank BJB sendiri.

Sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi jurus penting yang akan terus dilakukan. Sokongan dalam berbagai bentuk pun akan terus diberikan secara

konsisten, sebab perseroan memandang koperasi (*cooperative*) sebagai salah satu strategi krusial, dalam menggenjot pertumbuhan usaha para pihak yang terlibat. Dengan serta-merta memperhatikan portofolio perkembangan usahanya, Bank BJB berkomitmen untuk senantiasa memperkuat jalinan sinergi dan kolaborasi yang bertujuan untuk mengakselerasi pertumbuhan bersama demi melangkah maju secara perlahan namun pasti di jalur pencapaian visi “Jawa Barat Juara Lahir Batin.”

KEMITRAAN PEMERINTAH BISNIS DAN *GOOD PUBLIC GOVERNANCE*

A. Pengantar

Kegiatan kolaboratif menjadi lebih menonjol dan meluas di semua sektor pada berbagai bangsa di dunia dalam kurun waktu 25 tahun terakhir, serta telah menghasilkan “perubahan evolusioner yang menakjubkan dalam bentuk kelembagaan dari governansi” sejak awal tahun 1980-an. Kolaborasi dalam literatur ini, didefinisikan sebagai "pengaturan sosial sementara di mana dua atau lebih banyak aktor sosial bekerja bersama-sama menuju satu tujuan bersama yang membutuhkan trans mutasi bahan, ide, dan hubungan sosial untuk mencapai tujuan akhir itu”. Para mitra berniat untuk mempertahankan otonomi organisasi saat bergabung dengan kekuatan untuk menangani suatu masalah sosial bersama (John W. Selsky & Barbara Parker. 2005).

Salah satu jenis keterlibatan kolaboratif adalah kemitraan di antara bisnis, pemerintah, dan masyarakat sipil tiga sektor masyarakat utama yang membahas masalah dan penyebab sosial (Loffler dalam Bouvard dan Loffler. 2009:225). Kemitraan pemerintah - bisnis (*government-business partnership, GBPs*) menjadi keharusan untuk mengapresiasi demokratisasi dalam pemerintahan dan menghadapi era disrupsi. Kemitraan pemerintah-bisnis merupakan kontrak pemerintah dengan bisnis, untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintah di sektor publik, dan atas perannya tersebut institusi bisnis menerima kompensasi, baik langsung maupun tidak langsung, sekaligus menjadi penanggung jawab terhadap risiko yang timbul sebagai konsekuensi kontrak tersebut. Kemitraan pemerintah-bisnis, secara sederhana dapat diartikan sebagai pengaturan kerja berdasarkan komitmen bersama atau

timbang balik (*mutual commitment*), dan tersirat dalam kontrak antara organisasi sektor publik dengan organisasi sektor bisnis di luar dari sektor publik (Bovaird, 2004: 200). Kemitraan Publik-Swasta (*Government to Private*) didefinisikan sebagai pengaturan apa pun antara pemerintah dan sektor swasta di mana sebagian atau secara tradisional kegiatan publik dilakukan oleh sektor swasta (Savas 2000: 3-4).

Adanya kemitraan antara pemerintah dan bisnis, akan menghindarkan dominasi pemerintah dan dominasi pasar. Dominasi pemerintah akan menciptakan ketergantungan dan meminimasi inovasi, serta posisi tawar menawar (*bargaining position*) warga terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Sementara dominasi pasar, dapat mengakibatkan monopoli eksploitatif dan meminimasi akses masyarakat untuk mengontrol pelayanan publik berkualitas. Bermitra dalam bidang sektor publik bukan saja mempercepat kuantitas, tetapi juga kualitas penyediaan pelayanan publik. Namun demikian, pemerintah masih tetap memegang peranan penting dalam kemitraan pemerintah-bisnis sehingga pemerintah harus mengambil prakarsa, paling tidak untuk menciptakan iklim yang mendorong bagi usaha kemitraan yang berguna bagi pembangunan berkelanjutan. Bagaimanapun, realitasnya pemerintah telah memberikan pengaruh sangat besar terhadap bisnis sehari-hari melalui tindakan-tindakan seperti penyediaan infrastruktur fisik, sosial, kebijakan-kebijakan fiskal dan keuangan, kebijakan investasi, kebijakan industri, dan sebagainya.

Sementara pada era demokratisasi, peran sektor swasta atau institusi bisnis (*private sector*) semakin besar sejalan dengan peran pemerintah yang semakin surut. Peran ini lebih besar lagi bila dipahami, bahwa dalam persaingan yang menuntut keunggulan daya saing global sekarang, pemeran utamanya adalah dunia usaha. Dengan peran dan posisinya yang semakin kuat, menyebabkan dunia usaha menjadi salah satu *power center* yang posisi

tawar menawarnya semakin besar. Semakin besar dan kuatnya peran dunia usaha, maka baik langsung atau tidak langsung, telah menempatkan dunia usaha sebagai bagian yang turut menentukan penetapan kebijakan-kebijakan publik. Sebaliknya, mengandung arti pula bahwa pemerintah semakin memperhatikan dan memperhitungkan keberadaan dan pentingnya peran dunia usaha (M. Idrus, dalam Miftah Thoha, 1999: 36-37). Dengan demikian, maju dan mundurnya suatu negara sangat berkorelasi dengan maju mundurnya dunia usaha.

Kemitraan antara pemerintah-bisnis, dan masyarakat atau sektor ketiga akan terjadi, hanya jika penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan pelayanan publik berbasiskan pada *good governance* (Osborn dan Gaebler 1996:49-51). *Good public governance* atau governansi publik yang baik, mengubah secara mendasar praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di seluruh dunia. Perubahan meliputi dimensi *struktural* dan *fungsiional*. Perubahan struktural menyangkut perubahan pelaku dalam governansi yang mensyaratkan tiga pilar utama: pemerintah (*government*), dunia swasta (*private sector*), dan masyarakat (*society*) ikut ambil bagian dalam sektor publik. Tiga sektor dalam '*governance*' yaitu sektor publik (pemerintah), sektor privat (bisnis/korporasi), dan sektor masyarakat (organisasi non profit) seharusnya memberlakukan pembagian hak dan tanggungjawab bersama dengan jelas, yang biasanya diatur dalam kontrak-kontrak (legal-formal, sosial, ekonomi dan politik), dimana kontrak-kontrak ini merupakan hasil produk pengaturan bersama, yang melibatkan ketiga sektor tersebut. Kontrak-kontrak berisi norma-norma yang mengatur pola hubungan antar pelaku-pelaku dari ketiga sektor tersebut dan menjadi acuan untuk pelaksanaan akuntabilitas (tanggung gugat) mereka (Andy Fefta Wijaya, 2018).

Perubahan fungsional menyangkut perubahan peranan pemerintah dari *service provider towards co-producer*: **co-design** layanan dan kebijakan mereka bersama dengan pengguna mereka dan *stakeholders* utama lain; **co-manage** sumberdaya mereka dengan mitra lain; **co-deliver** layanan mereka dengan pengguna dan komunitas mereka; **co-assess** layanan mereka dengan stakeholder utama mereka (Loffler dalam Bovard dan Loffler. 2009: 225).

Elke Loffler (dalam Bovard and Loffler. 2009: 219), menyatakan: *networks as a specific mode of public governance*. Satu bentuk *network* adalah kemitraan dengan *partner* yaitu *stakeholders*. Adapun *stakeholders* utama dalam governansi publik dapat berupa kelompok orang, organisasi atau individu-individu. Secara tipikal, isu governansi publik menurut Elke Loffler dalam Bovard and Loffler, editor (2009: 219) (diantara yang penting) meliputi *stakeholders* inti berikut :

1. *Citizens*;
2. *Community organizations that are loosely organized*;
3. *Non-profit organizations (including charities and major Non-Governmental Organization)*;
4. *Business*;
5. *Media*;
6. *Public agencies (e.g. different levels of government/Parliament, including international levels)*;
7. *Elected politicians*;
8. *Trade unions*.

Dalam pandangan sebagian akademisi, *public governance* merujuk pada *inter-organization networks* (Rhode, 1997 seperti dikutip oleh Bovard dan Loffler 2009:222). Bermitra mengandung arti membangun jaringan kerja, kini telah menjadi satu aspek *public governance* yang kian meningkat serta semakin dianggap penting, namun itu adalah hanyalah satu mode spesifik dari *public governance*. Kerja bermitra dalam domain publik, secara khusus antara organisasi sektor publik dan sektor privat atau antara pemerintah dan

bisnis. Dewasa ini, setiap orang/siapapun menginginkan untuk bekerja dalam kemitraan (Bovaird dan Tizard dalam Bovaird dan Loffler. 2009: 233).

B. Alasan Dijalinnya Kemitraan Pemerintah - Bisnis

Mengapa kemitraan dilakukan? Alasan utama perlunya dibangun kemitraan antara pemerintah-swasta, adalah karena timbulnya kesadaran bahwa persoalan-persoalan di bidang sektor publik, tidak dapat lagi hanya dilihat dari kepentingan dan tanggung jawab pemerintah. Membenahi sektor publik pada dasarnya adalah 'kerja patungan' antara pemerintah dengan para *stakeholders*. Kemitraan dengan para pemangku kepentingan lainnya mesti dilakukan, karena tidak mungkin pemerintah mengerjakan semua urusan publik mengingat keterbatasan dana, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, untuk menyediakan pelayanan publik. Kemitraan juga dilakukan, agar kualitas pelayanan publik dapat dipenuhi sesuai dengan tuntutan masyarakat sebagaimana yang mereka terima dari sektor swasta. Di satu pihak, adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik, sementara di pihak lain tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin meningkat, menjadikan kemitraan sebagai pilihan strategi yang perlu dilakukan. Namun, kemitraan akan menjadi hal yang baik dilakukan, apabila memenuhi alasan lain berikut ini:

1. Pihak swasta dapat memberikan pelayanan dengan kualitas yang lebih baik, dibandingkan bila diberikan oleh pemerintah;
2. Pihak swasta dapat menjamin, bahwa pelayanan dapat diberikan lebih cepat dibandingkan bila disediakan oleh pemerintah;
3. Ada dukungan dari pengguna jasa untuk melibatkan pihak swasta sebagai penyedia pelayanan;
4. Ada peluang kompetisi di antara para calon mitra swasta;

5. Tidak ada ketentuan perundang-undangan yang melarang pelibatan pihak swasta dalam penyediaan jasa pelayanan;
6. Keluaran dari pelayanan dapat dengan mudah diukur dan ditetapkan tarifnya dengan rasional;
7. Biaya pelayanan dapat diperoleh kembali melalui penetapan tarif penggunaan jasa layanan;
8. Ada peluang inovasi dalam penyediaan pelayanan;
9. Ada rekam jejak atau pengalaman kemitraan yang baik antara pemerintah dan swasta yang sudah dilakukan sebelumnya;
10. Ada peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kemitraan tersebut.

Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka kemitraan pemerintah-bisnis (juga dengan pihak ketiga atau *NGO*) kurang memberikan manfaat. Jika salah satu dari alasan-alasan tersebut tidak terpenuhi, maka model kemitraan sebaiknya tidak diterapkan karena model tersebut rentan dengan risiko-risiko finansial maupun politis yang dapat membebani masyarakat pengguna jasa layanan di kemudian hari.

C. Manfaat Kemitraan Pemerintah-Bisnis

Kemitraan antara pemerintah dengan sektor bisnis dilakukan, karena diperolehnya nilai manfaat bagi pihak-pihak yang bermitra. Beberapa manfaat dari terjalannya sebuah kemitraan adalah:

- 1). Meningkatkan produktivitas organisasi. Produktivitas ditingkatkan dengan mengurangi faktor *input*.
- 2). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat meningkat melalui ragam pelayanan yang diberikan atas dasar kemitraan.
- 3). Menghasilkan efisiensi dan efektifitas. Efisiensi terjadi bila *output* tertentu dapat dicapai dengan input yg minimum. Efektifitas berarti mendapatkan hasil sesuai dengan yang diinginkan dengan menghemat

waktu melalui teknologi yang dimiliki bersama. Sektor swasta memang terkondisikan untuk bekerja secara efektif dan efisien dengan struktur organisasi dan personil yang tidak kaku, dimana hal tersebut tidak ditemukan dalam lingkungan pemerintah.

4). Jaminan kuantitas, kualitas dan kontinuitas. Kualitas pelayanan menjadi lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif karena produk akhir ditentukan oleh pihak yang bermitra.

5). Berbagi resiko dan *profit*. Resiko dan keuntungan ditanggung dan dinikmati bersama; di samping *profit sharing*, melekat juga *risk sharing*.

6). Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan. Masuknya sektor swasta di sektor publik membuat persaingan akan lebih tumbuh, pelayanan akan lebih baik dan dapat lebih bervariasi.

7). Optimalisasi akses dan sumber daya, teknologi dan pasar. Kemitraan memungkinkan pemerintah memperoleh fleksibilitas tambahan karena telah berbagi dengan bisnis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pada sektor publik.

8). Menyatukan kekuatan. Bermitra memungkinkan pemerintah memperoleh fleksibilitas tambahan karena tidak harus melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan sektor publik; sementara sektor bisnis mendapatkan lahan tambahan di luar sektor bisnis.

D. Kemitraan dari Perspektif *Governance*

Menurut Bovaird dan Tizard (dalam Bovaird dan Loffler. 2009: 242), kemitraan tidak hanya membantu menyampaikan objektif dari sektor publik dan menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi, sepanjang kinerja mereka berbasiskan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi:

- 1). *Citizen engagement*;
- 2). *Transparency*;
- 3). *Accountability*;

- 4). *Equalities and social inclusion;*
- 5). *Ethical and honest behaviour;*
- 6). *Equity (fair procedures and due process);*
- 7). *Willingness and ability to collaborate;*
- 8). *Ability to compete;*
- 9). *Leadership;*
- 10). *Sustainability.*

E. Pola Kemitraan Pemerintah-Bisnis

Kemitraan antara sektor pemerintahan dengan sektor bisnis, merupakan salah satu bentuk kemitraan yang paling banyak dilakukan, mengingat alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan di atas. Dalam prakteknya, kemitraan ini dapat dibedakan berdasarkan tipologi kemitraan yang disepakati oleh pihak-pihak yang bermitra. Di bawah ini adalah tipologi kemitraan pemerintah – bisnis (*G to P*) yang sering kita jumpai :

1. Tipologi Kemitraan Pemerintah-Bisnis

Keterlibatan sektor bisnis atau swasta sudah tentu akan membantu meringankan fungsi pemerintah sebagai motor pelaksana pembangunan. Namun perlu diingat, bahwa hubungan yang terjalin antara pemerintah dengan sektor swasta, haruslah bersifat saling menguntungkan, dan mesti diikat dalam suatu kontrak untuk jangka waktu tertentu. Untuk itu, pola kemitraan tidak bisa diperlakukan secara seragam antara satu daerah dengan daerah lainnya, demikian pula antara pemerintah dengan swasta dan sektor ketiga. Perlu dicari pola-pola kemitraan yang paling tepat dengan daerah yang bersangkutan, termasuk pula dengan bidang kegiatan yang dimitrakan. Perbedaan pola kemitraan, tentunya akan membedakan mekanisme *sharing* yang disepakati, baik *sharing* modal maupun *sharing* keuntungan atau kerugian. Menurut Tony Bovaird (2004: 202), ada sejumlah tipologi yang berbeda yang dapat diterapkan pada kemitraan antara pemerintah dengan sektor bisnis. Tipologi kemitraan dimaksud adalah :

- a. *Sectoral basis*. Kemitraan dengan organisasi sektor ketiga dan asosiasi masyarakat sipil, dengan bisnis swasta, dengan bisnis dan sektor ketiga;
- b. *Relationship basis*. Jaringan yang jelas, kolaboratif, pembagian kekuasaan, kontraktual;
- c. *Economic basis*. Kemitraan sisi penawaran, sisi permintaan atau campuran sisi permintaan/penawaran;
- d. *Policy area*. Tujuan kebijakan kemitraan (contohnya, mempromosikan produktivitas ekonomi, memberdayakan klien dan yang kurang beruntung, menangani inklusi sosial);
- e. *Scope*. Kemitraan vertikal, horizontal, dan campuran.

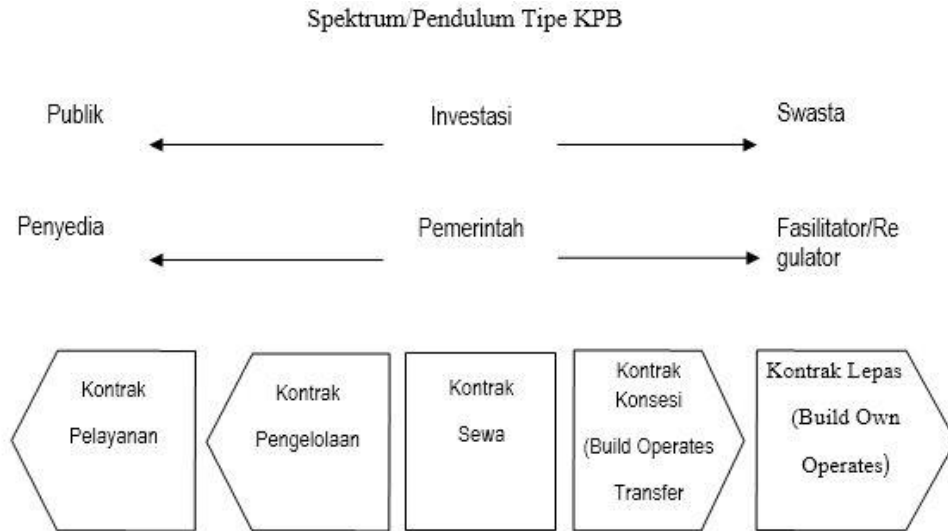
2. Bentuk-bentuk Kemitraan Pemerintah - Bisnis

Meningkatnya kontrak pelayanan langsung oleh organisasi sektor publik, merefleksikan satu pergerakan parsial dari bentuk pemberian layanan pre dominan melalui internal birokrasi, ke arah bentuk alternatif pelayanan. Hal ini memungkinkan jalinan kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta, dapat dilakukan dalam beberapa bentuk yang bersifat alternatif, antara lain:

- a. Kontrak pelayanan (*service contract*),
- b. Kontrak pengelolaan (*management contract*),
- c. Kontrak sewa (*lease contract*),
- d. Kontrak konsesi (*concession contract* atau *Build Operation Transfer*),
- e. Kontrak lepas (*Built Own Operates* atau *Build Transfer Operates*).

Bentuk kontrak mana yang dipilih oleh pemerintah, adalah bentuk kemitraan yang lebih menunjukkan keunggulan daripada kelemahan bagi sektor publik atau yang pro warga. Berikut adalah bagan dari jenis kontrak dimaksud:

Bagan 1 Tipe-Tipe *Government-Business Partnership*



Sumber: Kumar dan Prasad, Tahun 2004 dikutip oleh Tim Kajian PKP2A III LAN Samarinda.

Bagan diatas menunjukkan 5 (lima) tipe umum model kemitraan, yang diklasifikasikan berdasarkan pendulum atau spektrum investasi dan peran pemerintah. Tipe kontrak pelayanan (*service contract*) merupakan bentuk kemitraan yang pendulumnya lebih banyak pada investasi dan penyediaan layanan pada sektor publik. Sebaliknya, model *build own operates* atau kontrak secara lepas, merupakan bentuk kemitraan yang menitikberatkan pada investasi dan penyediaan pelayanan pada sektor swasta. Dalam bentuk kemitraan ini, pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator. Secara lebih rinci bentuk-bentuk kemitraan dimaksud, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Service Contract* atau Kontrak Pelayanan

Dalam kontrak pelayanan, pemerintah memberikan wewenang kepada swasta dalam kegiatan operasional perawatan, dalam hal ini kontrak pelayanan disediakan oleh pemerintah, berdasarkan harga dan standar *performance* yang telah ditentukan pula oleh pemerintah. Kontrak

Pelayanan ini biasanya diberlakukan pada sektor air bersih, pengumpulan sampah, produksi dan distribusi kontainer sampah, pelayanan pembersihan di jalan, perawatan kendaraan (truk-truk), pengerukan kali, atau perawatan pipa air, tagihan rekening air dan listrik. Contohnya: Penerapan Program *Corporate Social Responsibility* oleh PT HM Sampoerna Tbk. di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan (Magya Ramadhania Putri dan Isnaini Rodiyah, 2016).

b. Management Contract atau Kontrak Pengelolaan

Dalam Kontrak Pengelolaan, pihak swasta bertindak sebagai pemilik *asset*, sekaligus sebagai investor, yang bertanggung jawab atas risiko finansial dalam batasan minimal. Contohnya dalam pengelolaan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, tempat parkir).

c. Lease Contract atau Kontrak Sewa

Pada Kontrak Sewa, pemilik modal adalah sektor publik (pemerintah) namun pihak swasta (bisnis) turut menanggung risiko keuangan. Contoh: pengelolaan taman hiburan, bandar udara, armada angkutan bis, dan sejenisnya.

d. Build Operate Transfer (BOT) atau Bangun Operasi Serah

Dalam kontrak *BOT* ini, pembiayaan proyek berasal dari pihak swasta, dan pihak pemerintah berkewajiban menyediakan keperluan lahannya. Swasta mengoperasikan fasilitas dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian diserahkan kepada dan menjadi milik pemerintah. Contohnya : pembangunan jalan tol, pelabuhan laut dan udara, rumah sakit, stadion olahraga, dan sebagainya. Contoh *BOT* nyata di Indonesia adalah pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Pekot-Sama Sentral Swasemdaya) di Banjar Baru; Pembangunan Pasar Antasari (Pekot-Giri Jaladhi Wana) di Banjarmasin; Pembangunan dan Pengelolaan

Pelabuhan Palaran (Pekot Pelindo Sumatera Indonesia) di Samarinda.

e. Build Own Operate (BOO) atau Bangun Miliki Operasi

Dalam BOO atau BTO (*Build Transfer Operate*), swasta merupakan aktor dominan. Pihak Swasta-lah yang membangun, sekaligus memiliki dan mengoperasikan fasilitas. Pemerintah tidak memberikan pendanaan langsung dalam model ini, tetapi pemerintah dapat menyediakan lahan atau menawarkan insentif keuangan lainnya, seperti status bebas pajak atau berperan dan berfungsi sebagai regulator (Magya Ramadhania Putri dan Isnaini Rodiyah, 2016). Swasta memiliki dan mengoperasikan fasilitas secara mandiri dan selamanya, dengan mengembalikan biaya investasi dan operasional melalui pendapatan dari retribusi, uang sewa, atau biaya layanan dalam jangka waktu kontrak yang terbatas. Contoh: Pengelolaan Sampah melalui Kemitraan antara Pekot Gikoko Kogyo Indonesia di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 1 pada halaman berikut, memperlihatkan beberapa contoh dari jenis-jenis atau bentuk praktek kemitraan yang telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, berikut pembagian peran dari masing-masing pihak yang bermitra .

Tabel 11.1. Contoh Beberapa Jenis Praktek Kemitraan

| Bidang Kegiatan | Bentuk Kemitraan | Peran Pemerintah | Peran Mitra |
|--|---|--|---|
| Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Palaran (Pemkot-Pelindo-Samudera Indonesia) Samarinda | BOT 50 tahun; Bagi hasil Pemkot 25% net profit | Penyedia Lokasi Regulator Dukungan akses | <i>Captive market</i> (Pelindo) Investor (swasta) Pengelola melalui <i>Special Purpose Company</i> yang dibentuk investor |
| Perkebunan & Pabrik Minyak Kelapa Sawit (Pemkot-Agricinal), Samarinda | <i>Joint venture</i> membentuk perusahaan inti Agri Mitra Bantuas | Investor Dukungan akses | Investor Pengelola |
| Pengelolaan Parkir (Pemkot-Tribuana Selatan Raya) Tarakan; | Bagi hasil, <i>fixed income</i> Pemkot Rp 10jt/bln | Penyedia lahan Regulator Dukungan akses | Investor Pengelola area Operasional (pemungutan) |
| Pengelolaan Sampah (Pemkot-Tidung bangun Perkasa & Sabar Utama) Tarakan; | Sistem kontrak waktu tertentu | SDA | Operasional (pengangkutan)Pemeliharaan sarana dan prasarana |
| Pengelolaan Pelabuhan Tengkyau I (Pemkot-Camfilo) Tarakan; | Sistem kontrak 3 tahun; Bagi hasil, <i>fixed income</i> Pemkot Rp 25 jt/bln | Pemilik aset Regulator | Operasional pengelolaan Pemeliharaan |
| Pembangunan Pasar Antasari (Pemkot-Giri Jaladhi Wana) Banjarmasin | BOT 50 tahun; Bagi hasil Pemkot, | Penyedia lahan Regulator Dukungan akses dan perijinan | Investor Pengelola |
| Taman Kota Banjarmasin | BOT 50 tahun; Bagi hasil Pemkot, <i>fixed income</i> Rp14M | SDA | SDA |
| Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Pemkot-Sama Sentral Swasemdaya) Banjarbaru | BOT 7 tahun | Penyedia lahan Regulator & Pengawas Dukungan akses dan perijinan | Investor Pengelola |
| Pembangunan Palangkaraya Mal (Pemkot-Satriakahayan multitama) Palangkaraya; | BOT 30 tahun; Bagi hasil, <i>fixed income</i> Pemkot Rp 82,79 jt/thn | Penyedia lahan Dukungan akses dan perijinan Investor Pengelola operasional | Investor Pengelola operasional |
| Pembangunan Citra Mal (Pemkot-Agrabudi Karyamarga) Palangkaraya; | BOT 20 tahun; Bagi hasil, <i>fixed income</i> Pemkot Rp 505 jt 10 tahun pertama, Rp 200 jt 10 tahun kedua | SDA | SDA |
| Renovasi dan pengelolaan pasar (Pemkot-Mutiara Mas Putih) Pontianak; | BOT 30 tahun; Bagi hasil Pemkot 10% | Penyedia lahan Dukungan akses & Perijinan | Investor Pengelola |
| Pengelolaan Sampah Implementasi protokol Kyoto (Pemkot-Gikoko Kogyo Indonesia) Pontianak; | BOO 21 tahun | Penyedia lahan Dukungan akses & perijinan Regulator Pengangkutan sampah | Investor Operasional pengelolaan Pemeliharaan |

Sumber: Diolah dari Tim Kajian PKP2A III LAN RI, 2008

Dari hasil temuan Tim Kajian PKP2A III - Lembaga Administrasi Negara (tahun 2008), berkenaan dengan praktek kemitraan yang diterapkan di beberapa daerah di Kalimantan tersebut, memperlihatkan keragaman bidang yang dimitrakan dengan swasta, termasuk juga model-model yang diterapkan. Namun demikian, ada kecenderungan bahwa kemitraan yang dilakukan masih terbatas pada jenis-jenis layanan infrastruktur, sarana, barang dan jasa, sedangkan jenis layanan administratif sama sekali belum diterapkan. Belum ada inovasi dari daerah yang menerapkan kemitraan dalam bidang pelayanan administratif, hingga kini kemitraan yang diterapkan masih terbatas pada 2 (dua) jenis pekerjaan, yaitu pembangunan dan pengelolaan. Pembangunan yang dimitrakan, dalam hal ini berupa pengadaan barang atau fasilitas publik. Sedangkan aspek pengelolaannya sendiri, merupakan pelaksanaan atau operasionalisasi atas proyek yang dimitrakan. Beberapa contoh potensi kemitraan dalam bidang pelayanan publik-kelompok administratif yang bisa diterapkan di daerah, tampak dalam bidang-bidang kegiatan sektor publik, berbagai bidang pekerjaan pada dinas, kantor atau badan, yang mungkin dapat dimitrakan seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 2 pada halaman berikut ini.

Tabel 11.2. Contoh Bidang Kegiatan Administratif dan Pelayanan Publik & Peluang Kemitraan di Indonesia

| Bidang Kegiatan (Kementerian/ Kedinasan) | Bentuk Kemitraan | Kegiatan yang dilakukan |
|--|---|--|
| Kependudukan (Pusat dan Daerah) | Kontrak kerja | Input data, pengolahan dan penyajian data kependudukan |
| Kebakaran (Pusat dan Daerah) | Kontrak kerja | Pengujian bahan-bahan yang berhubungan dengan penanggulangan kebakaran |
| Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (Pusat dan Daerah) | Kontrak kerja dengan perguruan tinggi atau swasta atau asosiasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan 2. Percobaan untuk percontohan 3. Pemanfaatan lahan (kebun percobaan) 4. Penelitian/pemeriksaan lab. Hasil-hasil pertanian dan peternakan 5. Sertifikasi mutu produk |
| Perkebunan, kehutanan, pertamanan (Pusat dan Daerah) | <i>BOT / BOO</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Percobaan untuk percontohan 2. Pemanfaatan lahan perkebunan 3. Penelitian/pemeriksaan laboratorium hasil perkebunan dan hutan |
| Pariwisata (Pusat dan Daerah) | Kerjasama Operasi atau Kontrak kerja | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan pelatihan tenaga kepariwisataan 2. Pengembangan/promosi pariwisata 3. Pembinaan kegiatan pariwisata 4. Penelitian, pendokumentasian, dan pemeliharaan seni budaya |
| Pendidikan (Pusat dan Daerah) | Kontrak kerja atau kerjasama operasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan kursus-kursus 2. Pendidikan formal 3. Penelitian |
| Tenaga Kerja | Kontrak kerja atau kerjasama operasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan 2. Pengiriman 3. Penelitian |
| Pemuda & Olah Raga (Pusat dan Daerah) | <i>BOO/BOT</i> | Pemanfaatan fasilitas olah raga |
| Perpajakan / Pendapatan / Retribusi / Parkir / BPKD (Pusat dan Daerah) | <i>BOO/BOT</i> | Penghitung potensi, pelatihan, pembangunan jaringan <i>online system</i> perpajakan, pendataan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah |
| Perhubungan | <i>BOO</i> | Uji Kendaraan bermotor oleh bengkel teruji |

Sumber: Mahmudi, 2009.

3. Kondisi yang Diperlukan untuk Terjalannya Kemitraan Efektif

Bagi sebagian besar pegawai atau tenaga kerja terutama mereka yang lahir sebelum era *millennial*, kolaborasi atau kemitraan tidaklah datang secara alami. Pada generasi sebelumnya diajarkan, bahwa persaingan itu baik, dan kerja keras individu akan dihargai dengan kemajuan karier yang stabil. Akan tetapi seiring dengan bergulirnya waktu, sifat pekerjaan telah banyak berubah, bagaimanapun manajemen dan pengetahuan yang diciptakan pada abad ke-20 tidak lagi secara kaku dapat dipertahankan hari ini, jika organisasi ingin berhasil. Kemitraan sebagai satu bentuk kolaborasi akan membantu memecahkan kesulitan, sehingga sifat organisasi dapat menjadi lebih kreatif, fleksibel, dan siap untuk memenuhi perubahan, menuntut kebutuhan bisnis saat ini (Kip Kelly & Alan Schaefer, 2015). Untuk itu, ada beberapa kondisi yang harus dikembangkan dalam diri para pemimpin dan individu yang bermitra, yang dikontribusikan guna memastikan bahwa kemitraan adalah bagian dari budaya organisasi. Kondisi dimaksud adalah:

- 1). Kebutuhan,
- 2). Kepercayaan,
- 3). Keterbukaan,
- 4). Pembelajaran,
- 5). Profitabel,
- 6). Komunikasi, dan
- 7). Visi, serta tujuan bersama.

Kebutuhan. Agar satu negara menjadi maju, maka pemerintah memerlukan kerjasama dengan sektor bisnis. Pemerintah memiliki keterbatasan, sementara kegiatan-kegiatan di sektor publik dapat dilakukan oleh sektor non pemerintah secara lebih efisien dan efektif. Pemerintah perlu bermitra dengan sektor bisnis, pada dasarnya karena keduanya saling membutuhkan. Pemerintah perlu bekerjasama dengan sektor bisnis, guna meningkatkan

pangsa sumber daya dunia yang tersedia bagi suatu negara atau wilayah. Pemerintah yang kompetitif, harus jauh lebih proaktif dalam bekerjasama dengan sektor bisnis, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional, melampaui model tradisional yang dilakukan oleh pemerintah. Karena pemerintah dan bisnis saling membutuhkan, maka keduanya memiliki hubungan dengan kadar kooperasi yang tinggi. Keduanya dituntut untuk mengembangkan sifat kooperatif secara intensif, dalam jangka panjang. Hubungan sinergis antara sektor publik dengan sektor swasta atau dunia usaha akan menghasilkan keluaran transaksional (*transactional output*) yang lebih efisien dari kegiatan masyarakat. (Cullen and Cushman, 2000: 6).

Kepercayaan. Merupakan fondasi kemitraan yang efektif. Ada banyak sisi untuk dipercaya, tetapi kerentanan adalah aspek yang paling mempengaruhi proses kolaboratif. Tanpa kerentanan, orang tidak akan sepenuhnya berinvestasi sendiri, atau mampu mengembangkan ide mereka dalam upaya kolektif. Dalam proses kolaboratif, kepercayaan mesti dimaknai sebagai upaya menciptakan lingkungan, manakala setiap orang dapat secara terbuka mengungkapkan kekhawatiran, ketakutan, dan perbedaan pendapat (yaitu, rentan) tanpa takut akan penolakan, agresi, atau pembalasan. Ketika kerentanan terancam, perilaku yang menghambat kreativitas dan inovasi akan mengambil alih. Lebih jauh lagi, ketika orang merasa diremehkan dan melihat kontribusi mereka menjadi tidak dikenal dan tidak dihargai, mereka akan melepaskan diri dan mencari tempat lain untuk mencari kesempatan berkontribusi. Kepercayaan dan rasa hormat adalah fondasi kolaborasi dan merupakan kunci untuk membangun komitmen terhadap tujuan bersama.

Keterbukaan. Akan memantapkan mekanisme komunikasi yang lancar dan transparans, dalam kaitannya dengan tingkat partisipasi. Oleh karenanya, sejak tahap awal, mekanisme kemitraan yang transparan harus dikembangkan dan dimantapkan. Dalam peraturan yang baru, penunjukan proyek

infrastruktur yang dilakukan secara langsung, tidak lagi diperbolehkan. Persaingan melalui *tender* telah diwajibkan untuk semua proyek *G to P*. Proses-proses dan faktor-faktor yang harus ditempuh dan dipertimbangkan dalam *tender* yang kompetitif telah diatur didalam ketentuan KPS dan sejumlah peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksana

Pembelajaran. Agar secara bersama tercipta optimasi nilai kompetitif pada sektor bisnis dan sektor publik, maka sektor bisnis perlu belajar dari sektor publik, dan sebaliknya sektor publik tidak segan belajar dari sektor bisnis. Apa yang bisa dipelajari oleh sektor bisnis dari sektor publik? Di antaranya, bahwa sektor bisnis dapat belajar banyak tentang bagaimana mengelola kinerja dalam situasi yang kompleks, ketika kekuatan pasar normal tidak efektif. Mereka dapat belajar bagaimana mengembangkan kebijakan di saat berbagai masalah yang muncul dapat diatasi, juga dapat belajar tentang bagaimana mengembangkan konsensus untuk mendukung pengambilan keputusan, dan dapat belajar mengenai bagaimana menghindari timbulnya beberapa risiko yang tidak perlu. Lantas, apa pula yang bisa dipelajari sektor publik dari sektor bisnis? Dalam hal ini, sektor publik dapat belajar tentang bagaimana menghubungkan *input* ke *output*; bagaimana mengelola penyebaran *output*; dan dapat belajar tentang bagaimana fokus pada *clien* sebagai misi utama organisasi, dan bukan sebagai sumber masalah. Akhirnya, sektor pemerintah pun dapat belajar dalam mengelola risiko dan menerima kesalahan sebagai bagian dari proses itu (Ronald B. Cullen and Donald P. Cushman, 2000: 37). Dalam proses pembelajaran tersebut sangat diperlukan komunikasi efektif, antara pemerintah-bisnis agar mereka mampu bekerja secara bersama-sama, sebagai upaya meningkatkan daya saing nasional. Bisnis dan pemerintah sangat mungkin sering bertemu dan berbicara, tetapi jarang menghasilkan komunikasi yang efektif. Banyak hambatan yang kerap ditemui dalam membangun komunikasi efektif, antara manajer sektor bisnis

dengan pemerintah, yang berpotensi mengurangi ruang lingkup masing-masing sektor untuk belajar satu sama lain.

Profitabel. Adanya keterlibatan pihak swasta untuk mendukung kegiatan sektor publik, hakikatnya adalah upaya mendapatkan profit atau benefit bagi kedua pihak. Institusi bisnis harus mendapatkan profit, namun profit yang didapat oleh pihak swasta, tidak boleh merugikan sektor publik. Untuk itu, perlu pengawasan dari pihak pemerintah dan diberlakukannya pembatasan waktu.

Komunikasi. Tidak ada kolaborasi tanpa komunikasi yang efektif. Pemimpin wajib mengomunikasikan mengapa kolaborasi itu penting bagi keberhasilan organisasi, dan mesti menguraikan strategi dan peta jalan tentang bagaimana organisasi akan bekerja secara kolaboratif. Baik staf maupun pemimpin, harus berbagi dan membangun ide, mengkritik secara konstruktif, dan memberikan umpan balik. Komunikasi yang efektif membutuhkan tingkat kesadaran diri yang substansial. Staf atau pegawai harus memahami preferensi mereka sendiri, tentang bagaimana mereka mendekati situasi kolaboratif. Mereka juga harus memahami gaya komunikasi dan kolaborasi yang mungkin disukai staf/pegawai lain. Kesadaran inilah yang memungkinkan staf mengenali gaya komunikasi dan kolaborasi/kemitraan yang berbeda, dan berusaha meningkatkannya. Lebih dari itu, setiap staf/pegawai harus bisa berbicara dalam bahasa kolaboratif atau kemitraan yang sama.

Visi dan Tujuan Bersama. Dua atau lebih pihak yang bermitra harus memiliki visi dan tujuan bersama, dan berkontribusi pada visi dan tujuan bersama tersebut. Ini adalah persoalan tentang bagaimana pihak-pihak yang terlibat, meluangkan waktu guna mengartikulasikan kata "mengapa" - untuk semua orang yang terlibat, dalam proses kemitraan pada proyek atau inisiatif tertentu. Semua pihak yang bermitra, mesti memahami bagaimana pekerjaan

mereka berkontribusi pada tujuan dibentuknya kemitraan dan organisasi, dan bagaimana kemitraan akan membantu mereka mencapai tujuan bersama. Ketika para pihak yang bermitra memahami tujuan mereka secara lebih luas, mereka dapat memberikan kontribusi lebih berarti bagi tim mereka. Kemitraan pemerintah dan bisnis tidak dapat dielakkan, bahkan menjadi kebutuhan di era penyelenggaraan pemerintahan berbasis *good governance* dewasa ini. Kemitraan pemerintah dengan bisnis, adalah dua pilar penting dalam *good public governance*, merupakan langkah strategis untuk mensinergikan *stakeholders* dalam perbaikan sektor publik yang menjadi domain pemerintah. Masalah di sektor publik tidak mungkin diselesaikan sendiri oleh pemerintah, dengan hanya mengandalkan kemampuan dan anggaran pemerintah. Kemitraan dibutuhkan, karena dapat memberikan hasil yang lebih berkualitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, daripada agensi yang bekerja sendirian. Untuk itu pemerintah membentuk kemitraan dengan sektor privat, dengan tujuan meningkatkan nilai manfaat/benefit bagi kedua pihak, terutama bagi warga dengan berasaskan prinsip : partisipasi, transparansi, responsif, akuntabel, efektif dan efisien, kepastian hukum, konsensus dan kesetaraan dan inklusif.

Terkait dengan hal itu, tersedia berbagai pola kemitraan yang dapat dipilih oleh pemerintah, dan dari berbagai tipologi tersebut, bisa diterapkan berdasarkan salah satu basis berikut : *sectoral basis, relationship basis, economic basis, policy area, scope*. Selanjutnya, bertolak dari bentuknya kemitraan pun dapat dilakukan melalui berbagai macam kontrak, seperti: kontrak pelayanan, kontrak pengelolaan, kontrak sewa, kontrak konsesi, kontrak lepas. Namun apapun pilihannya, agar kemitraan yang terjalin berjalan efektif, maka semua pihak yang bermitra dituntut berkemampuan menciptakan kondisi yang saling membutuhkan, saling percaya, saling

terbuka, saling belajar, saling menguntungkan, saling komunikasi, dan memiliki visi serta tujuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- A Sumarudin, dkk. (2019). *Sistem Monitoring Tanaman Hortikultura Pertanian Di Kabupaten Indramayu Berbasis Internet Of Things*. Vol 9 (No 1) : 45-54.
- Abdulsyani. (1994). *Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Achmad, Faqih, Dewi Rizkiani, Dodi Budirokhman. (2015). *Analisis Usaha Agroindustri Emping Jagung (Kasus Di Desa Ciomas Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka)*. Jurnal Agrijati Vol 29 No 3.
- Ambarsari, Wiwik, dkk. (2019). *Kondisi Sosial Dan Kebiasaan Petani Padi Menggunakan Input Produksi Padi (Oryza Sativa, L.) Di Kabupaten Indramayu*. Vol 10 (No 1) : 11-29.
- Anholt, S. (2010) *Places: Identity, Image, and Reputation*. London: Palgrave Macmillan.
- Ansell, Chris & Alison Gash. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. JPART 18:543–571. Diakses di <http://jpart.oxfordjournals.org/>.
- Atthahara, H., & Rizki, M. F. (2019). *Analisis Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Dampak Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Bagi Masyarakat Sekitar Di Kabupaten Karawang*. *The Indonesian Journal of Politics and Policy*, 1(1), 9-21.
- Azi, Nyimas Latifah Letty. (2016). *Hubungan Kerjasama Pemerintah dengan Pihak Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*. Diakses di <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-lokal/1107-hubungan-kerjasama-pemerintah-dengan-pihak-swasta-dalam-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia>.
- Bovaird, Tony, “*Public–private partnerships: from contested concepts to prevalent practice*. Dalam *International Review of Administrative Sciences* 70(2). Vol 70(2):199–215 [DOI:10.1177/0020852304044250]. Diakses di <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0020852304044250>
- Budiman & Ujang Cepi Barlian (2020). *Manajemen Strategik*. Bandung : CV Putra Jaya Mandiri.
- Cahyaningrum, D. (2019). *Pelindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan dari Pengalihan Fungsi untuk Non Pertanian Pangan (Legal Protection of Food Agricultural Land from Conversion to Non-Food Agricultural Land)*. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 10(1), 27-48.
- Cullen, Ronald B. and Donald P. Cushman. (2000). *Transitions to Competitive Government: Speed, Consensus, and Performance*. New York: State University of New York Press.

- Danastri, Sasya. *Analisis Penetapan Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru Di Kecamatan Harjamukti, Cirebon Selatan*.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. (2016). *Produksi Buah Mangga*. Jawa Barat. Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. 9 No. 1 Tahun 2014 (ISSN 1907-2902).
- Dinnie, K (2011) *City Branding : Theory and Cases*. London: Palgrave Macmillan.
- Dedi M, Masykur Riyadi. *Pembangunan Daerah Melalui Pengembangan Wilayah*.
- Dwiridotjahjono, Jojok. *Penerapan Good Corporate Governance: Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia*. Jurnal Administrasi Bisnis (2009), Vol.5, No.2: hal. 101–112, (ISSN:0216–1249).
- Edwin Hidayat, Atang Sutandi, dan Boedi Tjahjono. (2014). *Kajian Wilayah Pengembangan Industri Kecil Berbasis Komoditas Unggulan Pertanian Di Kabupaten Majalengka*. Ilmiah Globe, Volume 16 No. 2 Desember 2014.
- Etzioni-Halevy, Eva. (1985). *Bureaucracy and Democracy: A Political Dilemma*. Revised Edition. London: Routledge & Kegan Paul.
- Frederickson, H. George and David K. Hart. (1985). *The Public Service and the Patriotism of Benevolence*. Public Administration Review. September/October.
- Hasibuan, Malayu (1985). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hariz, Anif Rizqianti dan Purwanto dan Suherman. (2018). *Pengembangan Kawasan Industri Ramah Lingkungan Sebagai Upaya Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem (Studi Kasus di Taman Industri BSB Semarang)*. Diakses dari journal walisongo.ac.id pada 10 April 2020.
- Harmon, Michael M. and Richard T. Mayer. 1986. *Organization Theory For Public Administration*. Boston: Little, Brown and Company.
- Hestuadiputri, Dita. *Peran Dan Fungsi Ibu Kota Kecamatan Lasem Sebagai Pusat Pertumbuhan Di Kabupaten Rembang*.
- Hidayat Edwin, Sutandi Atang, Tjahjono Boedi. *Kajian Wilayah Pengembangan Industri Kecil Berbasis Komoditas Unggulan Pertanian Di Kabupaten Majalengka*. Majalah Ilmiah Globe, Volume 16. 2014: 101-108.
- Hunger JD & L.Wheelen (2003). *Manajemen Strategis*. Terjemahan: Julianto Agung. Penerbit ANDI copyright c.2001,2003.
- Idrus, M., Sistem Pengawasan dan Perimbangan Untuk Mewujudkan Good Governance, dalam Miftah Thoha, penyunting. 1999. *Administrasi Negara, Demokrasi dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

- Iing Nasihin, Agus Yadi Ismail, Randi Adpan. (2015). *Sebaran Jenis Dan Harga Industri Pengolahan Kayu Setengah Jadi Di Kabupaten Majalengka*. Wanaraksa Vol. 9 No.2.
- Irwan Bisri Rianto, Eko Budi Santoso. 2018. *Penentuan Lokasi Kawasan Industri Tekstil Terpadu di Kabupaten Majalengka*. Jurnal Teknik ITS Vol. 7, No. 1.
- Iskandar, Yusman dkk, Manajemen Publik, Program Pascasarjana Universitas Garut, Tahun 2001.
- Ismail, Yunita. *Kebijakan Pembangunan Kawasan Industri Yang Berwawasan Lingkungan (Eco-Industrial Park)*. Diakses dari e-journal.president.ac.id pada 10 April 2020.
- Jaelani, A., Setyawan, E. & Nursyamsudin. (2017). *Religi, Budaya Dan Ekonomi Kreatif: Prospek dan Pengembangan Pariwisata Halal Di Cirebon*. Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam. 02, 101-122.
- Kavaratzis, Ashworth. (2005). *City Branding: An Effective Assertion Of Identity Or A Transitory Marketing Trick?*. Oxford : Blackwell Publishing Ltd.
- Kavaratzis, M. (2008). *From City Marketing to City Branding: An Interdisciplinary Analysis with Reference to Amsterdam, Budapest, and Athens. Dissertation*. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
- Kelly, Kip & Alan Schaefer. (2015). *People Together Creating a Collaborative Organizational Culture*. Diakses di <https://www.kenan-flagler.unc.edu/~media/Files/documents/executive-development/unc-white-paper-creating-a-collaborative-organizational-culture.pdf>
- Kotler, Philip, Somkid Jatusripitak, dan Suvit Maesincee. (1998). *Pemasaran Keunggulan Bangsa (The Marketing of Nations)*. Alih Bahasa oleh Aldi Jenie. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Kwanda, Timoticin. (2000). *Pengembangan Kawasan Industri Di Indonesia*. Diakses dari puslit2.petra.ac.id pada 10 April 2020.
- Kwanda, Timoticin. *Pengembangan Kawasan Industri Di Indonesia*. Dimensi Teknik Arsitektur Vol. 28. 2000: 54-61.
- Lestari, Rizki Ayu, Endrawati Fatimah dan Lita Sari Barus. (2017). *Identifikasi Perkembangan Perkotaan Metropolitan Cirebon Raya*. Seminar Nasional Cendekiawan ke 3. Hlm 199-205.
- Loffler, Elke dalam Tony Bovaird and Elke Loffler, editor. (2009). *Public Management and Governance*. Second Edition. Routledge: New York, p. 216
- Magya Ramadhania Putri dan Isnaini Rodiyah, Kemitraan Pemerintah-Swasta Dalam Program *Corporate Social Responsibility* Di Kabupaten Pasuruan. Dalam *JKMP* (ISSN. 2338-445X dan E-ISSN. 2527 9246), Vol. 4, No. 2, September 2016, 117-234

- Mahi, A. (2016). *Pengembangan Wilayah: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Mahmudi. *Kemitraan pemerintah daerah dan efektivitas pelayanan publik*. Dalam *Kajian Bisnis Dan Manajemen* Vol. 9 No. 1, Januari 2007 Hal. 53 – 67. Diakses di <http://journal.uui.ac.id/Sinergi/article/view/230/226>
- Manurung, T.E, Komariah, S, & Purboyo, A. (2014). *Perbandingan Kontribusi Industri Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bandung Dan Jember*. Perjanjian No: III/LPPM/2014-03/44-P, 1-72.
- Masruroh, R & Nurhayati, N. (2016). *Strategi Pengembangan Pariwisata dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuningan*, 124-133.
- McCraw, Thomas K., *The Public and Private Spheres in Historical Perspective*, dalam Richard J. Stillman II. Editor. (1992). *Public Administration: Concepts and Case*. Fifth Edition: Boston
- McKevitt, David and Alan Lawton, (ed). *Public Sector Management: Theory, Critique and Practice*. London: SAGE Publications.
- Moenir. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Naisbit, John. (1994). *Global Paradox*, alih bahasa Budijanto. Jakarta: Binarupa Aksara
- Neni Nurhayati, Masruroh Rina. (2016). *Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Rangka Peningkatan Asli Daerah Di Kabupaten Kuningan*. SENIT. ISBN 978-602-74355-0-6
- Nugraha, Aditya Pula. (2012). *Evaluasi Pengembangan Wilayah dalam Meningkatkan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Tabalong*. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, Volume 1 Edisi 2: 95.
- Nugroho, Rianto. (2000). *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi: Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Nur'aini, Y. (2010). *An Analysis of The Preparedness of Bandung Towards City Branding*. *Master Thesis*. Bandung and Groningen : Double Master Degree Programme Development Planning and Infrastructure Management School of Architecture, Planning and Policy Development Institut Teknologi Bandung and Environmental and Infrastructure Planning Faculty of Spatial Sciences University of Groningen.
- Nuraisah, Getmi, dkk. (2019). *Dampak Perubahan Iklim Terhadap Usahatani Padi Di Desa Wanguk Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu*. Vol 5 (No 1): 60-71.
- Nursingih, H. (2001). *Kajian Komponen Penawaran Dan Permintaan Wisata Sebagai Penunjang Kepariwisataaan Budaya Kota Cirebon*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Osborne and Plastrik. (1996). *Perjanjian Build, Operate and Transfer (BOT)* <http://sendhynugraha.blogspot.com/2012/11/perjanjian-build-operate-and-transfer.html>.
- Piekkari, Rebecca, Philip C. Nell dan Pervez N. Ghauri. (2010). *Regional Management as a System*. Research Article.
- Pinem, Dessy Eresina. (2015). *Menemukan Strategi Pengembangan Kawasan Industri Melalui Analisis Sektor Unggulan Kota Binjai*. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 4 (1), 45-64. Diakses dari e-journal2.undip.ac.id pada 10 April 2020.
- Pontoh, Kustiwan. (2009). *Pengantar Perencanaan Perkotaan*. Bandung: Penerbit ITB.
- Putro, Prasetyo. *E-journal Ilmu Pemerintahan*. (ejournal.ip.fisip-unmul.org; 2013), 151-164.
- Purwadi, Ir. (2002). *Penelitian tentang Strategi Pengembangan BUMD Non Perbankan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. (Surabaya: Balitbang Daerah Provinsi Jawa Timur, 2002), hlm. 3.
- Rafiuddin, A., Widiatmaka, W., & Munibah, K. (2018). *Pola Perubahan Penggunaan Lahan dan Neraca Pangan di Kabupaten Karawang*. *Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan*, 18(1), 15-20.
- Rahajeng, Mardatilla Septiani dan Asnawi Manaf. (2015). *Bentuk-Bentuk Kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Dalam Upaya Keberlanjutan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Studi Kasus: Kabupaten Kendal Dan Kota Pekalongan)*. *Jurnal Pengembangan Kota* (2015) Volume 3 No. 2 (112–119). Tersedia online di: <http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk>
- Rahmadyani, I. (2010). *Identifikasi Elemen Pembentuk City Branding Kota Bandung. Tugas Akhir*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Raubo, A. (2010). *City Branding and its Impact on City's Attractiveness for External Audiences*. Master Thesis. Rotterdam : Erasmus University.
- Rindaasyuti. *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Dalam Bisnis Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Pemerintah*. Diakses di <https://rindaasyuti.wordpress.com/2008/05/21/pengaruh-penerapan-good-corporate-governance-dalam-bisnis-dan-implikasinya-terhadap-akuntabilitas-pemerintah/>.
- Rosana, Ellya. (2011). *Modernisasi dan Perubahan Sosial*. *Jurnal TAPIS* Vol.7 No.12 Januari-Juli 2011.
- Sari, D., & Yalia, M. (2019). *Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi Untuk Pengembangan Kepariwisata Di Kota Cirebon*. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan)*, 20, 13-28.
- Setiawan, dkk. (2008). *Model Pelayanan Publik yang Berkeadilan: Studi Empirik pada PDAM Kota Surakarta: laporan Penelitian*. (Surakarta:

- Institute Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta), hlm. 2.
- Sina, Peter Garlans. (2012). *Analisis Literasi Ekonomi*. Jurnal *Economia* Vol.8 No.2.
- Sjafrizal. (2009). *Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*. Baduose Media.
- Soekanto, Soerjono. (1994). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soleh, Chabib & Rochmansjah, Heru. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. (Jakarta: Fokusmedia, 2010), hlm. 68.
- Suparman, Nanang. *Modul Manajemen Publik*. (2019)
- Susilo, W. H. (2011). *Observasi di Kota Cirebon: Suatu Potensi Pariwisata dengan Meningkatkan Keberadaan Heritage*. Artikel: DIKTI.
- Susongko. *Konsep Kewilayahan dan Pertumbuhan Wilayah*. Modul 1: 1.1-1.2.
- Susongko. *Modul Kebijakan Pengembangan Wilayah Dan Perkotaan*.
- Syahrudin. (2010). *Evaluasi Implementasi Pengembangan Kawasan Industri*. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*. Jan-Apr 2010, hlm 31 Vol 17 No 1.
- Tarlich, Tjutju & Dedeh Kurniasih. (2017). *Kompetensi Inti Industri Daerah Kabupaten Majalengka*. Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2017.
- Tim Kajian PKP2A III LAN Samarinda, Kemitraan Antara Pemerintah Kota dengan Swasta dalam Pembangunan Daerah di Kalimantan <https://media.neliti.com/media/publications/52389-ID-kemitraan-antara-pemerintah-kota-dengan.pdf>
- Van Gelder, S. (2008) *An Introduction to City Branding*. Amsterdam: Placebrands Limited.
- Walters, Stephen J. (1998). *Enterprise, Government, and The Public*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Wahyudi, Ade. (2017). *Kajian Fungsi dan Peran Kota dan Kabupaten di Bidang Ekonomi Dalam Penyelenggaraan Metropolitan Cirebon Raya*. Vol 6 no 1. e ISSN 2541-2973.
- Widagdo, R & Rokhlinasari S. (2017). *Dampak Keberadaan Pariwisata Religi terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat Cirebon*. 09, 59-75.
- Winardi, Priyarsono, DS, Siregar, H., Kuastanto, H. (2019). *Peranan Kawasan Industri dalam Mengatasi Gejala Deindustrialisasi*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 19, 84-95.
- Zulfa, Isti. (2018). *Identifikasi Pusat Pertumbuhan & Interaksi Parsial Di Provinsi Lampung*. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* Nomor 19 Hal 61-74.

Riwayat Hidup Penulis

Budiman – Lahir di Bandung 25 Oktober 1958, merupakan anak ke-3 dari enam bersaudara. Lulus dari SDN Ranggalawe 3 Garut (1970), SMPN 1 Garut (1973), dan SMAN Garut (1976). Tahun 1977 kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran - Jurusan Manajemen, dan sambil menyelesaikan penyusunan skripsi, bekerja di SPBU serta mengajar di beberapa SMA swasta di “Kota Dodol” Garut.

Pada tahun 1986, penulis menjadi PNS pada Cabang Dinas Perindustrian Kab. Ciamis, dan atas permohonan sendiri (1988), mutasi ke Pemda Tk.II Garut. Tahun 1989 diangkat menjadi Ka Sub Bagian Pembinaan Perusahaan & Perbankan Daerah, lalu menjadi Kepala Sub Bag Perkotaan Setda (1992-1994). Tahun 1994 dipromosikan menjadi Kepala Bidang Ekonomi Bappeda, kemudian Kabid Pendidikan BP-7 (1996-1998), dan Kasi Pemerintahan Kantor Pembantu Bupati Garut Kota (1999-2000). Di awal era otda, penulis dipercaya sebagai Kepala Bagian Perekonomian Setda, hingga mengantarnya menjadi Dewan Pengawas PD BPR, PDAM, pengurus Dekranasda, dan Masyarakat Ekonomi Syariah.

Tahun 2004, penulis dipromosikan menjadi Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Kab. Garut, lalu menjadi Asisten Sekda II (2007), Plt Sekretaris Daerah (2007-2009), Asisten Ekonomi (2009-2011), dan Kepala Dinas Perhubungan (2011-2013). Di tengah kesibukan sebagai birokrat, penulis aktif mengajar di STIE Garut, dan sempat menjabat Kajur Akuntansi & Manajemen (1996-1998), Ka Prodi Manajemen Fekon Universitas Garut dan Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Garut (2013-2015).

Setelah menyelesaikan S-2 di Universitas Garut dan STIE ISM Jakarta, penulis menempuh S-3 pada Pasca Sarjana Universitas Islam Nusantara (lulus 2017). Kini penulis menjadi dosen tetap UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ditugaskan di FISIP dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Pada pihak lain, penulis pun hingga kini masih mendapat kepercayaan sebagai Ketua Tim Penasihat Investasi Pemda Garut, Wakil Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kab.Garut, Wakil Ketua Bidang Organisasi PMI Kab. Garut dan Konsultan pada perusahaan swasta.